



LAPORAN **PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2021

PEMERINTAHAN KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2022

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Tegal untuk Tahun Anggaran 2021 pada **Sistem Informasi Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD)** sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjaditanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkanperbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah ini .

Slawi, 30 Maret 2022
INSPEKTUR,

PRASETIAWAN, SH. M.Hum
NIP. 19640206 199203 1 010

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengemban dan melaksanakan tugas serta tanggungjawab dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 Kabupaten Tegal.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini disusun dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, dimana ruang lingkup laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diukur berdasarkan indikator kinerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sedangkan Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang disusun secara periodik.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021 diharapkan dapat memberikan gambaran kepada berbagai pihak tentang capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tegal pada tahun 2021.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna baik secara penyajian maupun substansi materi yang disajikan. Untuk itu kritik saran yang ada sebagai masukan bagi pemerintah daerah untuk penyempurnaan laporan ini dan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tegal.

Akhirnya kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah bersama-sama dengan pemerintah daerah membangun Kabupaten Tegal dan yang telah mendukung dalam penyusunan LPPD Tahun 2021 Kabupaten Tegal.

Tegal, Maret 2022

The official seal of Kabupaten Tegal, featuring a central emblem with a bird and a star, surrounded by the text 'KABUPATEN TEGAL' and 'BUPATI TEGAL'.
BUPATI TEGAL,
[Handwritten Signature]
Dra. UMI AZIZAH



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB . I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Penjelasan Umum	
a. Undang – Undang Pembentukan Daerah.....	3
b. Kondisi Geografis	4
c. Jumlah Penduduk	10
d. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tegal	13
e. Jumlah Perangkat Daerah Unit Kerja dan Pegawai Pemerintah....	14
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	20
1.1.2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	25
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah.....	25
b. Visi dan Misi Kepala Daerah	26
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	38
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.....	61
1.1.3. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	75
a. Dasar Penerapan SPM.....	75
b. Kebijakan Umum SPM dalam RPJMD	77
c. Arah Kebijakan	77
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	82
2.1. Capaian Kinerja Makro	82
a. Indeks Pembangunan Manusia	82
b. Angka Kemiskinan	84
c. Angka pengangguran.....	85
d. Perumbuhan Ekonomi	88
e. Pendapatan Perkapita	88
f. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	89
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	90
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran	90
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	137
2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	145
2.3. Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	146
a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Bupati	146



b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja.....	148
c. Pengukuran Realisasi Dan Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya.....	225
d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Targer Dalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah	227
e. Analisis Efisienasi Pembangunan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai	228
f. Analisis Progran Dan Kegiatan Yang Mendukung Capaian Kinerja..	231
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	239
a. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.....	239
b. Gambaran Umum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	239
c. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	241
3.1. Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Kabupaten Tegal	242
3.2. Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Kabupaten Tegal....	244
3.3. Permasalahan Dan Kendala.....	252
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL...	254
4.1. Urusan Pendidikan	254
4.2. Bidang Kesehatan	264
4.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum	279
4.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat	285
4.5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	290
4.6. Bidang Urusan Sosial	300
4.7. Program dan Kegiatan.....	312
BAB V PENUTUP	321



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Daerah merupakan pihak yang menjalankan roda perekonomian, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang dituntut untuk dapat melaksanakan pemerintahan secara transparan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan agar tercipta pemerintahan yang bersih. Pemerintah Daerah diatur berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah sesuai asas otonomi.

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah sebagai perubahan dan penyempurnaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah dilaksanakan dengan maksud agar daerah dapat menangani urusan pemerintahan didasarkan tugas, wewenang dan kewajiban senyatanya, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang - undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memerhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Pemerintah daerah harus mampu mengurus daerahnya sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan



tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Selain itu pemerintah daerah harus memperhatikan kepentingan nasional, sehingga akan tercipta keseimbangan antara kepentingan pusat dan daerah.

Pemerintah Daerah harus memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat agar Pemerintah Pusat dapat mengetahui pengelolaan dan tanggung jawab kinerja dari Pemerintah Daerah. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Ruang lingkup LPPD mencakup satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah tahun 2019 huruf a terdiri atas capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Semakin besar peran pemerintah daerah, maka dibutuhkan pengukuran kinerja yang sistematis untuk mengukur pencapaian penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pengukuran kinerja merupakan metode yang digunakan untuk menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga kemajuan dari organisasi dapat terlihat. Hasil pengukuran kinerja dijadikan umpan balik atas rencana yang telah diimplementasikan masing – masing perangkat daerah.

Berdasarkan realitas dan pemahaman tersebut, maka Tahun 2021 adalah tahun ketiga implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024. Pemerintah Kabupaten Tegal wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021 kepada Pemerintah melalui Gubernur Jawa Tengah dengan substansi materi laporan didasarkan pada pencapaian kinerja pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2021.



1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang – Undang Pembentukan Daerah

Dasar hukum pembentukan Kabupaten Tegal sebagai salah satu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110).

Sejarah Kabupaten Tegal dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu Aspek Historis dan Aspek Yuridis Formal. Secara Aspek Historis, Kabupaten Tegal diakui sebagai bagian dari **Babad Tanah Jawa** dimulai dari diangkatnya Ki Gede Sebayu menjadi Juru Demung (setaraf dengan Tumenggung) di Kadipaten Tegal pada Hari Rabu Kliwon tanggal 18 Mei 1601 Masehi atau tanggal 12 Robiul Awal Tahun 1010 Hijriyah atau 1523 Caka. Kabupaten Tegal bila ditinjau aspek yuridis, didasarkan pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

Dalam perkembangannya, Kabupaten Tegal mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sehingga dipandang perlu untuk memindahkan Pusat Ibu kota dari Kota Tegal ke Kota Slawi. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1984 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal ke



Kota Slawi di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal, maka Ibukota Kabupaten Tegal yang sebelumnya di Kota Tegal pindah ke Kota Slawi. Perpindahan ibukota Kabupaten Tegal dari Kota Tegal ke Kota Slawi dilakukan sejak tahun 1981 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal No. 15 Tahun 1981 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal ke Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal. Pemindahan Ibukota Kabupaten Tegal dari Kota Tegal ke Kota Slawi dimaksudkan untuk peningkatan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan Kabupaten Tegal. Disamping itu guna pengembangan wilayah, baik sebagai pusat pertumbuhan secara umum, pengembangan wilayah dan perubahan ruang yang lebih menyebar dan meluas sebagai dampak Pembangunan bidang Pemerintahan, Perekonomian maupun Kemasyarakatan.

b. Kondisi Geografis

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah dengan ibukota Slawi dan terletak di : $108^{\circ} 57'6''$ s/d $109^{\circ} 21'30''$ BT dan antara $6^{\circ} 50'41''$ s/d $7^{\circ} 15'30''$ LS. Luas wilayah Kabupaten Tegal adalah 878,79 km².

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah dengan ibukota kabupaten berada di Kota Slawi, lokasi strategis pengembangan pembangunan poros Jakarta – Semarang dan poros ke selatan Purwokerto / Cilacap. Wilayah Kabupaten Tegal meliputi pesisir utara bagian barat dan sebagian wilayah berbatasan dengan laut jawa (pantura).

Kecamatan yang mempunyai wilayah yang terluas adalah Kecamatan Margasari (86,84 km²), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Slawi (13,63 km²). Kabupaten Tegal berbatasan dengan:

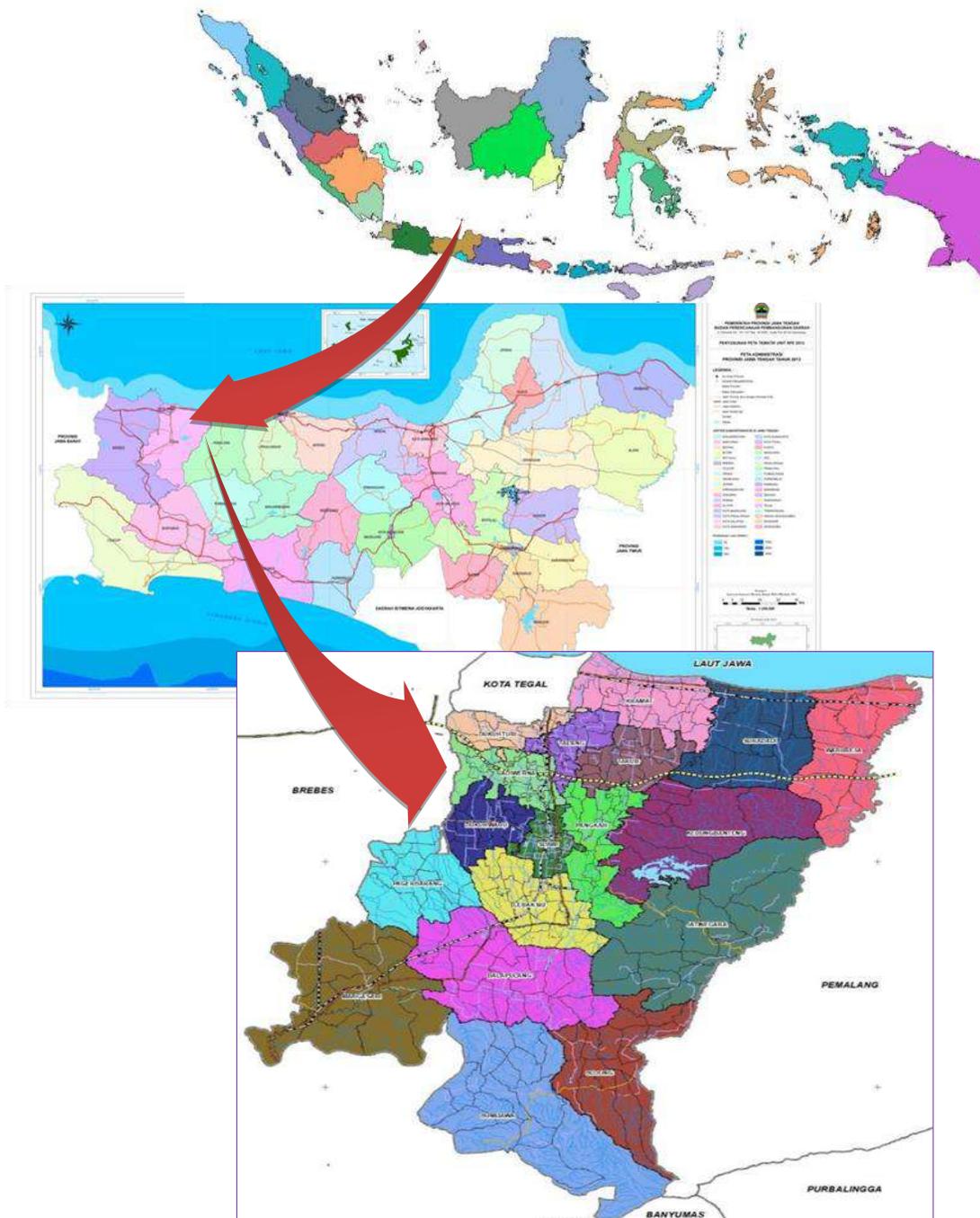
- Sebelah utara : Kota Tegal dan Laut Jawa
- Sebelah timur : Kabupaten Pemalang
- Sebelah selatan : Kabupaten Brebes dan Kab. Banyumas
- Sebelah barat : Kabupaten Brebes

Kabupaten Tegal mempunyai letak yang sangat strategis dimana dilintasi oleh beberapa Jalur utama, sebagai berikut :



- Jalan TOL Pejagan – Pemalang
- Jalan Arteri Pantura Semarang – Tegal – Cirebon di sebelah utara
- Jalan Arteri Primer Tegal – Cilacap
- Jalan Arteri Sekunder Ketanggungan – Prupuk
- Jalur Kereta Api Jakarta – Semarang – Surabaya
- Jalur Kereta Api Jakarta – Cirebon – Yogyakarta
- Jalur Kereta Api Tegal – Slawi – Purwokerto – Yogyakarta – Solo

Gambar 1. 1. Peta Konstelasi Kabupaten Tegal dengan Wilayah Sekitarnya



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032



Kabupaten Tegal secara Topografis terdiri dari 3 (tiga) kategori daerah, yaitu:

- Daerah Pantai Meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja.
- Daerah Dataran Rendah Meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuwaru, Slawi, Lebaksiu sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah.
- Daerah Dataran Tinggi Meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong dan sebagian Pangkah, Kedungbanteng.

Gambar 1. 2. Peta Topografi Kabupaten Tegal



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

Berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan air laut, Kabupaten Tegal untuk ketinggian permukaan laut di bagi menjadi 4 (empat) yaitu :

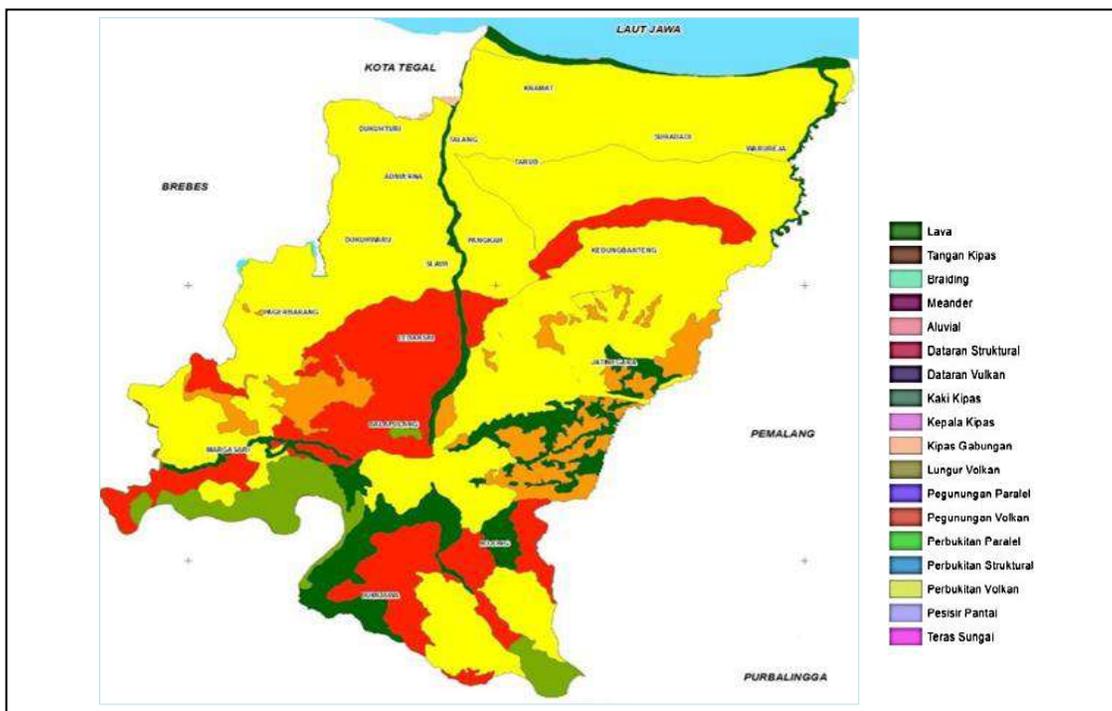
- Wilayah Kramat sekitarnya : 11 Meter
- Wilayah Slawi sekitarnya : 42 Meter
- Wilayah Lebaksiu sekitarnya : 135 Meter
- Wilayah Bumijawa sekitarnya : 949 Meter

Kondisi Berdasarkan analisis data GIS oleh BPDAS Pemali Jratun di Kabupaten Tegal terdapat lima jenis tanah utama yaitu tanah Aluvial,



Grumosol, Latosol, Litosol, Podzolik, dan Regosol, serta asosiasinya. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tegal antara lain adalah Alluvial (34,93%), Regosol (24 %), Latosol (23,69 %), Grumosol (9,42 %), Andosol (4,29 %) dan jenis lain-lain (3,67 %). Tanah Aluvial merupakan jenis terluas yang ada di Kabupaten Tegal yaitu seluas 30.698 hektar yang merupakan tanah potensial untuk pengembangan produk pertanian seperti padi, palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan dan lain-lain.

Gambar 1. 3. Peta Jenis Tanah Kabupaten Tegal



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2032

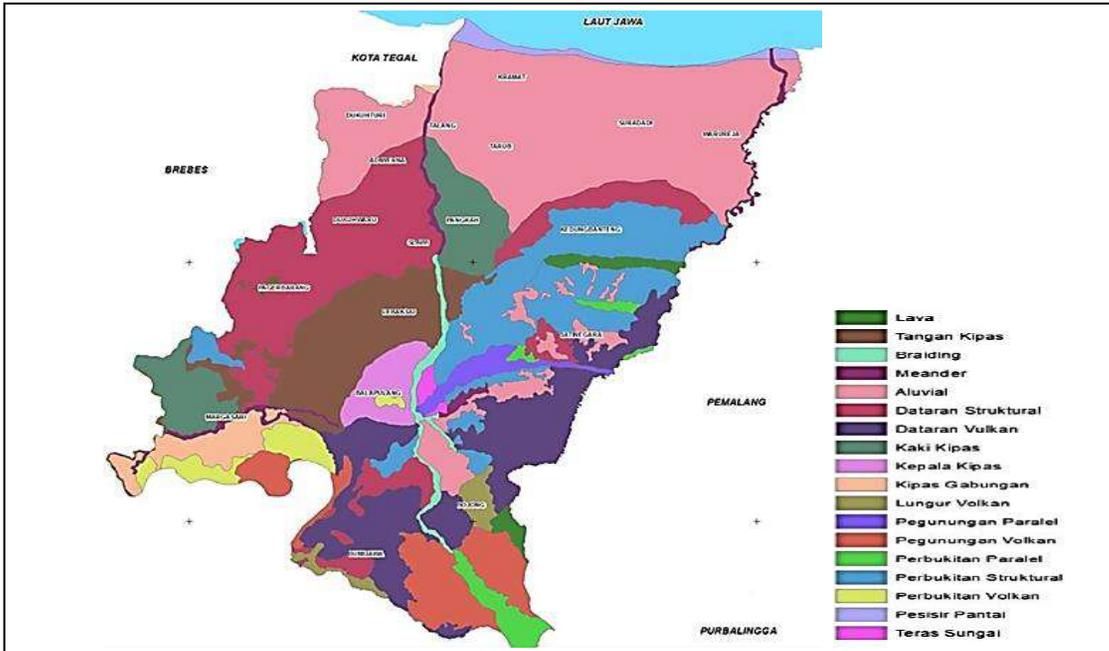
Kabupaten Tegal berada di kawasan pantai utara Pulau Jawa. Kabupaten Tegal memiliki garis pantai sepanjang 30 km, dengan luas daratan seluas 87.878 Ha, wilayah daratan Kabupaten Tegal memiliki kemiringan dan bentang alam yang bervariasi. Diantaranya berupa wilayah hutan, persawahan, dan ladang yang cukup luas. Begitu pula dari segi topografi, Kabupaten Tegal memiliki tiga kategori daerah yakni daerah pantai di wilayah utara, menerus ke selatan merupakan daerah dataran rendah, hingga daerah dataran tinggi di wilayah kaki Gunung Slamet.

Dilihat dari kondisi geologis yang lain, Kabupaten Tegal memiliki berbagai jenis klasifikasi geologis dimulai dari klasifikasi lava, tangan kipas, braiding, meander, aluvial, dataran struktural, dataran vulkan, kaki kipas, kepala kipas, kipas gabungan, lungur vulkan, pegunungan paralel,



pegunungan volkan, perbukitan paralel, perbukitan struktural, perbukitan volkan, pesisir pantai, serta teras sungai.

Gambar 1. 4 Peta Geologi Kabupaten Tegal



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

Kabupaten Tegal secara kewilayahan dikelilingi dan dibelah oleh 2 Sungai Besar yaitu Sungai Gung dan Kumisik. Selain itu Kabupaten Tegal juga mempunyai Waduk Cacaban yang mempunyai fungsi water storage di wilayah bagian timur. Secara detail keberadaan dan pembagian DAS dan Sub DAS di wilayah Kabupaten Tegal ditunjukkan dalam tabel.

Tabel 1. 1 Daerah Aliran Sungai (DAS)

No	Nama DAS	Luas (Ha)	Kecamatan
1	Cacaban	14.599	Jatinegara, Kedungbanteng, Lebaksiu, Pangkah, talang, Tarub
2	Cenang	3.608	Suradadi
3	Gangsa	11.291	Adiwerna, Dukuhturi, Dukuhwaru, Lebaksiu, Slawi, Talang
4	Gung	17.229	Adiwerna, Balapulung, Bojong, Bumijawa, Slawi, Dukuhturi, Jatinegara, Lebaksiu, Pangkah, Talang
5	Rambut	13.078	Bojong, Jatinegara, Kedungbanteng, Warureja
6	Semedo	3.064	Suradadi, Warureja
7	Pah	7.909	Kedungbanteng, Kramat, Suradadi, Tarub
8	Pemali	11.079	Balapulung, Bumijawa, Margasari, Pagerbarang

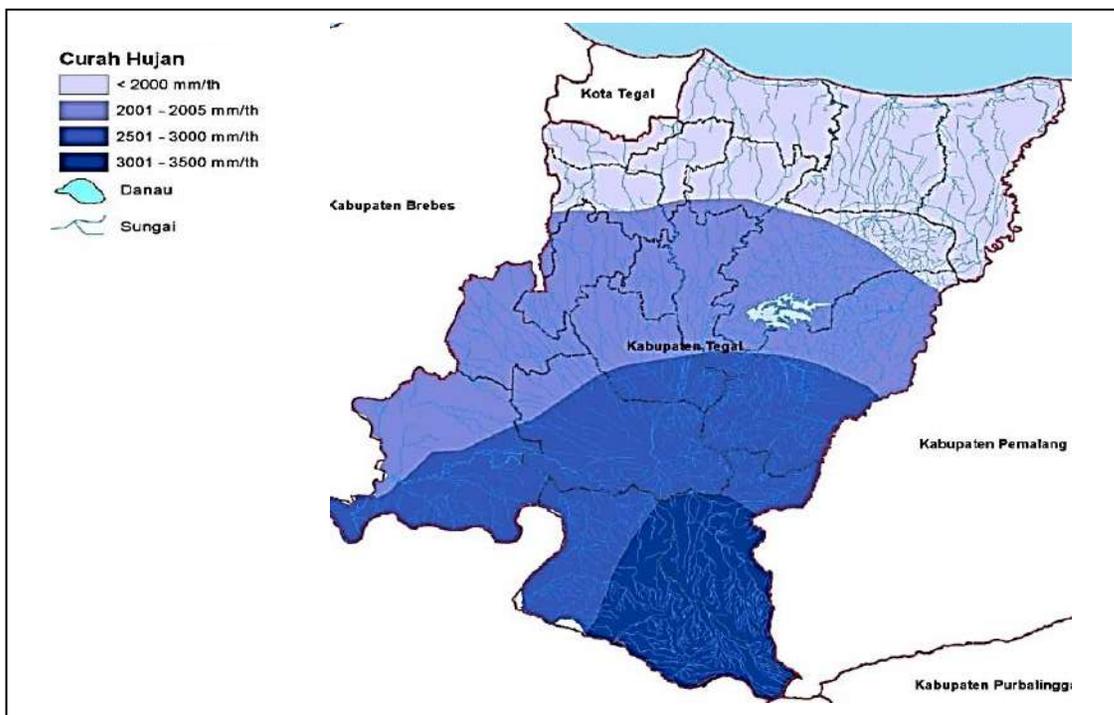


9	Kumisik	12.788	Balapulang, Bumijawa
10	Glagah	2.959	Bumijawa
	Jumlah	97.604	

Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

Kabupaten Tegal beriklim tropis, dengan rata-rata curah hujan sepanjang tahun sebesar 140,00 mm. Banyaknya curah hujan bergantung pada kelembaban udara yang tinggi, tetapi tekanan udara rendah dengan kecepatan angin, suhu udara dan lama penyinaran matahari serta penguapan sedang-sedang saja. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebanyak 345 mm dengan Kelembaban 82 %, Tekanan udara 1.008,4 hPa, Kecepatan angin 4 Knots, Suhu udara rata-rata 26,9°C dan Lama penyinaran Matahari 113,4 jam serta Penguapan air sebesar 131,2 mm. Gambaran tentang sebaran wilayah berdasarkan curah hujan dapat dilihat dalam peta sebagai berikut:

Gambar 1.5 Peta Sebaran Wilayah Berdasarkan Curah Hujan



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

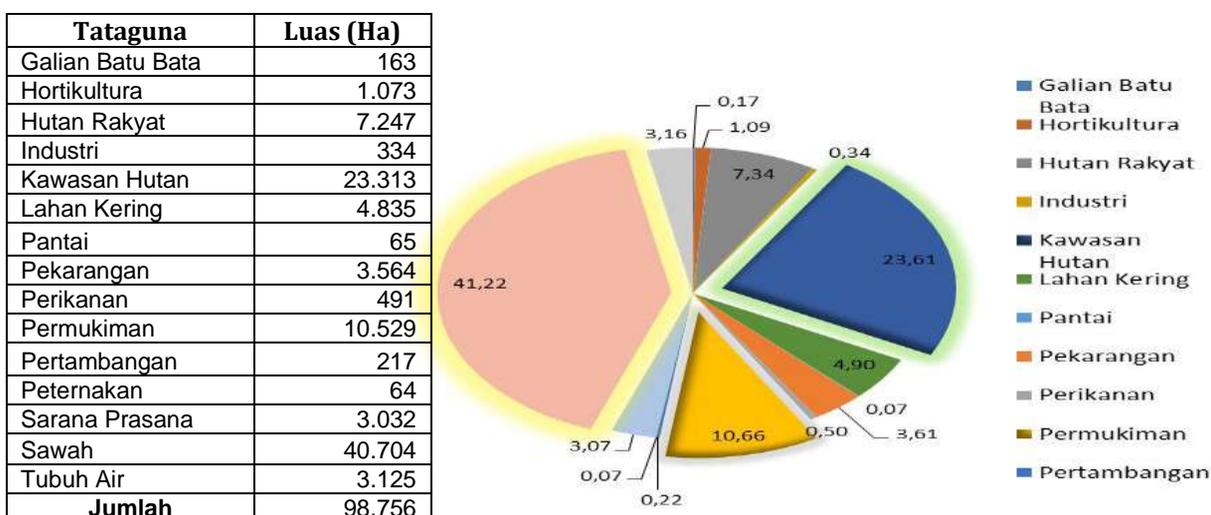
Variasi penggunaan lahan di Kabupaten Tegal merupakan salah satu potensi sumber daya lahan. Berdasarkan interpretasi Citra Satelit Resolusi Tinggi Liputan Tahun 2016, Kondisi Penggunaan Lahan di Kabupaten Tegal didominasi oleh penggunaan lahan sawah basah sekitar 41,22 % dari luas



wilayah Tegal ini berarti bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor dominan di Kabupaten Tegal, disusul kawasan hutan sekitar 23,61%.

Untuk lahan kering seluas 13.154 Ha komposisinya adalah tegalan, hutan rakyat dan hortikultura. Berdasarkan kondisi eksisting Bangunan permukiman seluas 10.529 Ha dan lahan pekarangan seluas 3.564 Ha di Kabupaten, apabila disandingkan dengan data jumlah penduduk Tahun 2019 sebanyak 1.573.087, dengan demikian secara kepadatan penduduk netto terkategori kepadatan tinggi 139 jiwa/Ha (13.580 jiwa/km²). Kondisi ini membutuhkan lahan yang cukup untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk.

Tabel 1. 2 Penggunaan Lahan



Sumber : Interpretasi Citra Resolusi Tinggi

c. Jumlah Penduduk

Perkembangan penduduk Kabupaten Tegal berdasarkan data yang ada pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal jumlah penduduk Kabupaten Tegal Tahun 2021 adalah sebanyak 1.664.588 jiwa. Angka jumlah penduduk dan angka kepadatan penduduk dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Struktur penduduk Kabupaten Tegal sebagai berikut :



Tabel 1.3
JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN TEGAL TIAP KECAMATAN
PER 31 DESEMBER 2021

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	MARGASARI	58.619	56.917	115.536
2	BUMIJAWA	53.165	49.755	102.920
3	BOJONG	40.615	38.346	78.961
4	BALAPULANG	50.550	48.535	99.085
5	PAGERBARANG	33.045	32.344	65.389
6	LEBAKSIU	50.343	49.515	99.858
7	JATINEGARA	32.946	31.294	64.240
8	KEDUNGBANTENG	24.045	23.342	47.387
9	PANGKAH	60.042	57.928	117.970
10	SLAWI	40.001	39.779	79.780
11	ADIWERNA	69.769	66.543	136.312
12	TALANG	55.238	52.626	107.864
13	DUKUHTURI	52.185	49.691	101.876
14	TARUB	45.486	44.046	89.532
15	KRAMAT	59.823	58.735	118.558
16	SURADADI	49.686	47.743	97.429
17	WARUREJA	36.020	34.601	70.621
18	DUKUHWARU	36.024	35.246	71.270
TOTAL		847.602	816.986	1.664.588

Keterangan : Sumber DKB Semester II Tahun 2021

TABEL 1.4
JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR
TAHUN 2021

NO	KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	00-04	66.505	61.886	128.391
2	05-09	73.865	68.610	142.475
3	10-14	73.251	67.899	141.150
4	15-19	58.192	56.599	114.791
5	20-24	72.253	67.957	140.210
6	25-29	71.881	66.053	137.934



7	30-34	68.984	63.372	132.356
8	35-39	72.474	66.897	139.371
9	40-44	67.837	63.323	131.160
10	45-49	57.926	57.993	115.919
11	50-54	46.559	48.181	94.740
12	55-59	38.249	41.843	80.092
13	60-64	31.098	33.772	64.870
14	65-69	22.674	22.972	45.646
15	70-74	13.691	14.617	28.308
16	>=75	12.163	15.012	27.175
TOTAL		847.602	816.986	1.664.588

Sumber DKB Semester II Tahun 2021

Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur, maka jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 1.151.443 orang, jumlah non produktif, yaitu penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) dan penduduk kelompok umur tua (65 tahun ke atas) mencapai 513.145 orang. Dari hal tersebut di atas, dapat diketahui angka beban ketergantungan (dependency ratio) mencapai 44,56 % artinya dalam setiap 100 penduduk terdapat 44 penduduk tidak produktif.

Secara umum, wilayah yang kepadatan penduduknya relatif lebih tinggi berada pada kawasan perkotaan, terutama kawasan yang mengikuti jalur regional, kawasan kota Slawi, dan kawasan perbatasan dengan Kota Tegal. Hal ini terjadi karena kawasan - kawasan tersebut merupakan pusat aktivitas ekonomi (yang otomatis juga memiliki kualitas layanan sarana dan prasarana yang relatif baik) sehingga menarik orang untuk datang dan tinggal.

Mayoritas penduduk Kabupaten Tegal bekerja di sektor Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan di ikuti penduduk yang bekerja disektor perdagangan, hotel, dan restoran. Hal ini menunjukkan strategisnya sektor pertanian bagi Kabupaten Tegal. Di sisi lain, meskipun kontribusi sektor industri pengolahan adalah yang terbesar bagi perekonomian, namun jumlah pekerjanya hanya 0,019%.



d. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tegal

Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Lingkup Propinsi Djawa Tengah. Pada Tahun 1986 terjadi pemecahan dan perubahan batas antara wilayah Kabupaten Tegal dan Kota Tegal berdasar pada Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal. Secara administratif wilayah Kabupaten Tegal terbagi menjadi 18 kecamatan yang terdiri dari 281 desa dan 6 kelurahan. 5 kelurahan berada di Kecamatan Slawi yaitu Kelurahan Slawi Wetan, Kelurahan Kudaile, Kelurahan Procot, Kelurahan Pakembaran, Kelurahan Kagok serta Kelurahan Dampyak di Kecamatan Kramat.

TABEL 1. 5

Luas Wilayah Per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Desa/kel	Luas (Km ²)
1	Margasari	13	86,84
2	Bumijawa	18	88,55
3	Bojong	17	58,52
4	Balapulang	20	74,91
5	Pagerbarang	13	43,00
6	Lebaksiu	15	40,95
7	Jatinegara	17	79,62
8	Kedungbanteng	10	87,62
9	Pangkah	23	35,51
10	Slawi	10	13,63
11	Dukuhwaru	10	26,58
12	Adiwerna	21	23,86
13	Dukuhturi	18	17,48
14	Talang	19	18,37
15	Tarub	20	26,82
16	Kramat	20	38,49
17	Suradadi	11	55,73
18	Warureja	12	62,31



Jumlah	287	878,79
---------------	------------	---------------

Sumber : Kabupaten Tegal Dalam Angka 2022

Potensi Pengembangan wilayah di Kabupaten Tegal mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032, dengan mensinkronkan arah kebijakan pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

- **Perangkat Daerah**

Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah maka Pemerintah Kabupaten Tegal menindaklanjuti hal tersebut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal dan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.

Perangkat Daerah sebagaimana peraturan tersebut diatas yang diterapkan di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah; dan



f. Kecamatan.

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dibentuk dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Kabupaten Tegal merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Tegal, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum;
 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman dan bidang penataan ruang, serta bidang pertanahan;
 5. Satpol PP Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Sub Urusan Polisi Pamong Praja dan Sub Urusan kebakaran;
 6. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
 7. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 9. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;



10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 12. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
 13. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang energi dan sumber daya mineral;
 15. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga serta bidang pariwisata;
 16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
 17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang ketahanan pangan;
 18. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dan bidang peternakan;
 19. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. Badan Daerah Kabupaten Tegal terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Tipe A, melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan dan fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi Penunjang Keuangan;



3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
 4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian dan fungsi penunjang Pendidikan dan Pelatihan;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- f. Kecamatan, terdiri dari:
1. Kecamatan Margasari dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Bumijawa dengan Tipe A;
 3. Kecamatan Bojong dengan Tipe A;
 4. Kecamatan Balapulang dengan Tipe A;
 5. Kecamatan Pagerbarang dengan Tipe A;
 6. Kecamatan Lebaksiu dengan Tipe A;
 7. Kecamatan Jatinegara dengan Tipe A;
 8. Kecamatan Kedungbanteng dengan Tipe A;
 9. Kecamatan Pangkah dengan Tipe A;
 10. Kecamatan Slawi dengan Tipe A;
 11. Kecamatan Dukuhwaru dengan Tipe A;
 12. Kecamatan Adiwerna dengan Tipe A;
 13. Kecamatan Dukuhturi dengan Tipe A;
 14. Kecamatan Talang dengan Tipe A;
 15. Kecamatan Tarub dengan Tipe A;
 16. Kecamatan Kramat dengan Tipe A;
 17. Kecamatan Suradadi dengan Tipe A;
 18. Kecamatan Warureja dengan Tipe A;
- g. Dalam wilayah Kecamatan dibentuk Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan.

- **Unit Kerja Perangkat Daerah**

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.



Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten sebagai unit organisasi bersifat khusus serta UPTD dibidang Kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Rumah Sakit Umum Daerah bersifat otonom dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan, barang milik daerah, kepegawaian tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

- **Kepegawaian**

Organisasi Perangkat Daerah dalam menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan tujuannya yang ingin dicapai haruslah mempunyai dan memiliki sumber daya manusia yang mampu mengemban tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan sesuai dengan jenis pekerjaannya.

Berhasil atau tidaknya suatu bidang usaha tidak terlepas dari peran serta karyawan atau pegawai tersebut mempunyai keterampilan dan keahlian yang cukup memadai maka tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi, apabila pegawai tersebut sesuai dengan keahliannya.

TABEL 1.6

**REKAPITULASI JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN TEGAL
PER 31 DESEMBER 2021**

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH
1	Sekretariat Daerah Kab. Tegal	139
2	Sekretariat DPRD Kab. Tegal	35
3	Inspektorat	54
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	55
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	34
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	39
7	Badan Pendapatan Daerah	46
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,	38



	Penelitian Dan Pengembangan	
9	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	42
10	Dinas Perikanan	26
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	87
12	Dinas Kesehatan	1.191
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	33
14	Dinas Lingkungan Hidup	72
15	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	64
16	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	176
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	36
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	35
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30
20	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	5.047
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	117
22	Dinas Perhubungan	51
23	Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	70
24	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	120
25	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	64
26	Dinas Sosial	33
27	Satuan Polisi Pamong Praja	75
28	RSUD Dr. Soeselo Slawi	372
29	RSUD Suradadi	73
30	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	20
31	Kecamatan Adiwerna	16
32	Kecamatan Balapulang	16
33	Kecamatan Bojong	16
34	Kecamatan Bumijawa	15
35	Kecamatan Dukuhturi	18
36	Kecamatan Dukuhwaru	17
37	Kecamatan Jatinegara	15
38	Kecamatan Kedungbanteng	16
39	Kecamatan Kramat	29
40	Kecamatan Lebaksiu	15
41	Kecamatan Margasari	21
42	Kecamatan Pagerbarang	16
43	Kecamatan Pangkah	15
44	Kecamatan Slawi	50
45	Kecamatan Suradadi	19
46	Kecamatan Talang	16
47	Kecamatan Tarub	21
48	Kecamatan Warureja	19
	JUMLAH	8.624

Dari tabel diatas bahwa pada tahun 2021 jumlah pegawai negeri sipil yang tersebar di perangkat daerah sejumlah 8.624 orang, Dinas Pendidikan



dan Kebudayaan sebanyak 5.047 orang yaitu 58,52 % dari jumlah keseluruhan 1.191 orang yaitu 13,81 % dari jumlah keseluruhan.

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Secara nasional Tahun 2021 dengan terjadinya keadaan yang luar biasa Pemerintah terus berupaya menyusun strategi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) karena banyak masyarakat terdampak akibat pandemi Covid-19. Beragam program pun disiapkan, mulai dari jaring pengaman sosial hingga stimulus fiskal bagi dunia usaha. Berbagai langkah extraordinary melalui uang kita ini diambil agar dampak pandemi pada ekonomi tidak semakin berat. Penyelamatan dari dampak pandemi Covid-19 dalam bidang kesehatan dan ekonomi terus dijalankan. Hal tersebut tampak dari jumlah uang yang telah dibelanjakan pemerintah, antara lain berupa DAK Fisik bidang Kesehatan untuk kebutuhan pelayanan dasar, penguatan RS rujukan baik nasional maupun daerah, dan pencegahan pengendalian penyakit.

Hal ini juga dirasakan oleh seluruh daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Tegal dimana memaksa Pemerintah Kabupaten Tegal dan DPRD menurunkan target pendapatan daerah sebesar delapan persen. Penurunan ini karena pelemahan perekonomian dan berkurangnya transfer dari pusat ke daerah.

TABEL 1.7

Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021

Sampai dengan 31 Desember 2021

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)
PENDAPATAN DAERAH	2.750.790.210.000,00	2.862.651.471.052,00	104,07
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	469.765.165.000,00	591.004.284.313,00	125,81
Pajak Daerah	133.050.000.000,00	143.617.868.928,00	107,94
Retribusi Daerah	22.447.112.000,00	20.911.507.338,00	93,16
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.417.021.000,00	15.417.023.399,00	100,00
Lain-lain PAD yang Sah	298.851.032.000,00	411.057.884.648,00	137,55
PENDAPATAN TRANSFER	2.129.195.245.000,00	2.117.374.969.793,00	99,44
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.550.193.467.000,00	1.533.598.637.942,00	98,93
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	30.110.971.000,00	42.890.214.753,00	142,44
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.077.039.778.000,00	1.077.039.778.000,00	100,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	155.693.681.000,00	125.814.842.815,00	80,81
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	287.349.037.000,00	287.853.802.374,00	100,18



Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	378.196.584.000,00	378.196.584.000,00	100,00
Dana Insentif Daerah (DID)	18.742.708.000,00	18.742.708.000,00	100,00
Dana Desa	359.453.876.000,00	359.453.876.000,00	100,00
Transfer Pemerintah - Provinsi	200.805.194.000,00	205.579.747.851,00	102,38
Pendapatan Bagi Hasil	181.202.194.000,00	186.620.461.851,00	102,99
Bantuan Keuangan	19.603.000.000,00	18.959.286.000,00	96,72
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	151.829.800.000,00	154.272.216.946,00	101,61
Pendapatan Hibah	6.500.000.000,00	5.631.258.846,00	86,63
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	145.329.800.000,00	148.640.958.100,00	102,28
BELANJA DAERAH	2.467.200.647.000,00	2.285.151.931.627,00	92,62
BELANJA OPERASI	2.027.307.962.130,00	1.905.870.135.761,00	94,01
Belanja Pegawai	1.119.870.986.289,00	1.072.594.469.688,00	95,78
Belanja Barang dan Jasa	833.631.449.841,00	763.648.877.353,00	91,61
Belanja Hibah	70.427.526.000,00	66.338.288.720,00	94,19
Belanja Bantuan Sosial	3.378.000.000,00	3.288.500.000,00	97,35
BELANJA MODAL	423.892.684.870,00	368.877.462.091,00	87,02
Belanja Modal Tanah	1.511.000.000,00	384.882.542,00	25,47
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109.164.469.120,00	94.646.809.885,00	86,70
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	152.630.442.450,00	128.622.796.811,00	84,27
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	154.075.944.100,00	143.805.033.653,00	93,33
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.510.829.200,00	1.417.939.200,00	21,78
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	16.000.000.000,00	10.404.333.775,00	65,03
Belanja Tidak Terduga	16.000.000.000,00	10.404.333.775,00	65,03
TRANSFER	494.685.660.000,00	491.512.110.860,00	99,36
TRANSFER	494.685.660.000,00	491.512.110.860,00	99,36
Transfer Bagi Hasil	15.000.000.000,00	11.826.401.862,00	78,84
Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	15.000.000.000,00	11.826.401.862,00	78,84
Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan	479.685.660.000,00	479.685.708.998,00	100,00
Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	479.685.660.000,00	479.685.708.998,00	100,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.961.886.307.000,00	2.776.664.042.487,00	93,75
SURPLUS / (DEFISIT)	-211.096.097.000,00	85.987.428.565,00	-40,73
PEMBIAYAAN DAERAH			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	218.096.097.000,00	218.130.182.486,02	100,02
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	218.096.097.000,00	218.096.097.806,02	100,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	34.084.680,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00
Penyertaan Modal Daerah	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	211.096.097.000,00	211.130.182.486,02	100,02
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	297.117.611.051,02	0,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal, unaudited.

Dari data realisasi APBD 2021 tersebut, dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan tahun 2021 mencapai Rp. 2.862.651.471.052,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 2.750.790.210.000,00 atau terealisasi sebesar



104,07%. Dari jumlah tersebut realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Rp 591.004.284.313,00 atau 125,81% dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 469.765.165.000,00. Realisasi Pendapatan dari Dana Perimbangan adalah sebesar Rp 1.533.598.637.942,00 atau 98,93% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 1.550.193.467.000,00. Sedangkan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar Rp 154.272.216.946,00 atau 101,61% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 151.829.800.000,00. Dengan demikian dari ketiga pos Pendapatan, ada dua yang terealisasi melebihi anggaran.

TABEL 1.8

Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal
Tahun Anggaran 2021 Berdasarkan Urusan

Sampai dengan 31 Desember 2021

URUSAN/PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN DAERAH	2.750.790.210.000,00	2.862.651.471.052,00
Urusan Wajib Pelayanan Dasar	285.817.771.000,00	396.614.419.180,00
Pendidikan	0,00	109.407.537,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	109.407.537,00
Kesehatan	285.372.051.000,00	395.718.226.593,00
Dinas Kesehatan	285.372.051.000,00	395.718.226.593,00
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	425.360.000,00	567.854.370,00
Dinas Pekerjaan Umum	425.360.000,00	567.854.370,00
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	16.660.000,00	58.949.180,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	16.660.000,00	58.949.180,00
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	3.700.000,00	159.981.500,00
Satuan Polisi Pamong Praja	3.700.000,00	67.876.500,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	92.105.000,00
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	5.867.315.000,00	6.192.434.035,00
Lingkungan Hidup	1.925.000.000,00	2.716.786.500,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.925.000.000,00	2.716.786.500,00
Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	5.400.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	5.400.000,00
Perhubungan	2.059.828.000,00	1.995.902.025,00
Dinas Perhubungan	2.059.828.000,00	1.995.902.025,00
Penanaman Modal	1.882.487.000,00	1.474.345.510,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.882.487.000,00	1.474.345.510,00
Urusan Pilihan	15.195.538.000,00	13.428.468.148,00
Kelautan dan Perikanan	199.077.000,00	232.281.142,00
Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	199.077.000,00	232.281.142,00
Pariwisata	7.722.170.000,00	5.419.286.588,00
Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	7.722.170.000,00	5.419.286.588,00
Pertanian	5.000.000,00	25.994.305,00



Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5.000.000,00	25.994.305,00
Perdagangan	6.578.140.000,00	6.946.131.617,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.578.140.000,00	6.946.131.617,00
Perindustrian	691.151.000,00	804.774.496,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	691.151.000,00	804.774.496,00
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	2.443.909.586.000,00	2.446.416.149.689,00
Keuangan	2.443.733.267.000,00	2.446.258.135.864,00
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	133.050.000.000,00	143.901.964.238,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.310.683.267.000,00	2.302.356.171.626,00
Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	176.319.000,00	158.013.825,00
Kecamatan Dukuhturi	0,00	2.000,00
Kecamatan Kramat	30.000.000,00	30.200.625,00
Kecamatan Slawi	146.319.000,00	127.811.200,00
BELANJA DAERAH	2.961.886.307.000,00	2.776.664.042.487,00
Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1.890.525.843.000,00	1.762.752.228.575,00
Pendidikan	932.747.190.000,00	897.272.638.709,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	932.747.190.000,00	897.272.638.709,00
Kesehatan	724.628.240.000,00	648.273.338.662,00
Dinas Kesehatan	724.628.240.000,00	648.273.338.662,00
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	157.173.510.000,00	147.714.399.530,00
Dinas Pekerjaan Umum	141.908.510.000,00	135.337.920.350,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	15.265.000.000,00	12.376.479.180,00
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	43.628.724.000,00	41.736.749.001,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	43.628.724.000,00	41.736.749.001,00
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	23.146.535.000,00	19.039.948.758,00
Satuan Polisi Pamong Praja	15.893.155.000,00	12.719.551.808,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.253.380.000,00	6.320.396.950,00
Sosial	9.201.644.000,00	8.715.153.915,00
Dinas Sosial	9.201.644.000,00	8.715.153.915,00
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	122.271.911.000,00	109.483.494.447,00
Tenaga Kerja	1.046.000.000,00	896.579.800,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.046.000.000,00	896.579.800,00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.409.910.300,00	4.152.111.238,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, KB	4.409.910.300,00	4.152.111.238,00
Pangan	333.970.000,00	311.567.217,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	333.970.000,00	311.567.217,00
Pertanahan	4.865.000.000,00	3.393.373.073,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	4.865.000.000,00	3.393.373.073,00
Lingkungan Hidup	19.320.135.000,00	17.504.802.734,00
Dinas Lingkungan Hidup	19.132.370.000,00	17.320.197.334,00
Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	187.765.000,00	184.605.400,00
Administrasi Kependudukan dan Capil	11.906.928.000,00	11.108.514.980,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.906.928.000,00	11.108.514.980,00
Pemberdayaan Masyarakat Desa	12.248.108.000,00	11.637.253.831,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12.248.108.000,00	11.637.253.831,00
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.469.156.700,00	7.322.392.947,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, KB	8.469.156.700,00	7.322.392.947,00
Perhubungan	31.360.318.000,00	27.562.576.670,00



Dinas Perhubungan	31.360.318.000,00	27.562.576.670,00
Komunikasi dan Informatika	8.798.299.500,00	8.386.247.888,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	8.798.299.500,00	8.386.247.888,00
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	893.059.000,00	854.139.406,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	893.059.000,00	854.139.406,00
Penanaman Modal	5.130.204.000,00	4.541.620.681,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.130.204.000,00	4.541.620.681,00
Kepemudaan dan Olah Raga	6.609.299.000,00	5.927.711.257,00
Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	6.609.299.000,00	5.927.711.257,00
Statistik	251.011.500,00	241.783.030,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	251.011.500,00	241.783.030,00
Persandian	230.724.000,00	216.949.500,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	230.724.000,00	216.949.500,00
Kebudayaan	2.244.523.000,00	1.640.418.154,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.244.523.000,00	1.640.418.154,00
Perpustakaan	424.679.000,00	366.901.000,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	424.679.000,00	366.901.000,00
Kearsipan	3.730.586.000,00	3.418.551.041,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.730.586.000,00	3.418.551.041,00
Urusan Pilihan	68.941.723.000,00	64.315.465.209,00
Kelautan dan Perikanan	8.016.974.500,00	7.493.100.514,00
Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	8.016.974.500,00	7.493.100.514,00
Pariwisata	9.526.323.000,00	8.952.423.770,00
Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	9.526.323.000,00	8.952.423.770,00
Pertanian	24.936.406.500,00	23.246.536.519,00
Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	316.097.500,00	290.019.441,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	24.620.309.000,00	22.956.517.078,00
Perdagangan	15.725.851.000,00	15.376.858.081,00
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	15.725.851.000,00	15.376.858.081,00
Perindustrian	10.716.168.000,00	9.246.546.325,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	10.716.168.000,00	9.246.546.325,00
Transmigrasi	20.000.000,00	0,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	20.000.000,00	0,00
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	880.146.830.000,00	840.112.854.256,00
Administrasi Pemerintahan	63.982.606.000,00	59.573.379.003,00
Sekretariat Daerah	63.982.606.000,00	59.573.379.003,00
Pengawasan	6.457.785.000,00	5.568.627.519,00
Inspektorat	6.457.785.000,00	5.568.627.519,00
Perencanaan	7.192.753.000,00	6.475.847.967,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	7.192.753.000,00	6.475.847.967,00
Keuangan	678.900.976.000,00	657.919.116.339,00
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	13.786.668.000,00	11.075.305.710,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	665.114.308.000,00	646.843.810.629,00
Kepegawaian	9.913.869.000,00	7.939.439.720,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	9.913.869.000,00	7.939.439.720,00
Pendidikan dan Pelatihan	2.070.395.000,00	2.017.457.118,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	2.070.395.000,00	2.017.457.118,00
Penelitian dan Pengembangan	989.854.000,00	789.865.200,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	989.854.000,00	789.865.200,00
Sekretariat DPRD	59.768.362.000,00	55.990.299.657,00
Sekretariat DPRD	59.768.362.000,00	55.990.299.657,00



Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	46.429.200.000,00	39.651.880.481,00
Kecamatan Adiwerna	1.726.686.000,00	1.441.026.447,00
Kecamatan Balapulang	2.147.361.000,00	1.820.789.463,00
Kecamatan Bojong	1.919.060.000,00	1.563.595.050,00
Kecamatan Bumijawa	1.938.369.000,00	1.613.335.853,00
Kecamatan Dukuhturi	1.862.340.000,00	1.525.153.056,00
Kecamatan Dukuhwaru	1.872.427.000,00	1.533.917.097,00
Kecamatan Jatinegara	1.834.058.000,00	1.497.976.699,00
Kecamatan Kedungbanteng	1.774.501.000,00	1.346.873.216,00
Kecamatan Kramat	3.917.208.000,00	3.461.846.665,00
Kecamatan Lebaksiu	1.938.034.000,00	1.610.997.724,00
Kecamatan Margasari	2.211.178.000,00	1.952.916.184,00
Kecamatan Pagerbarang	1.954.983.000,00	1.483.236.621,00
Kecamatan Pangkah	1.737.162.000,00	1.395.252.466,00
Kecamatan Slawi	11.654.160.000,00	10.865.230.175,00
Kecamatan Suradadi	1.942.829.000,00	1.592.996.888,00
Kecamatan Talang	2.047.240.000,00	1.653.659.194,00
Kecamatan Tarub	1.935.569.000,00	1.557.877.364,00
Kecamatan Warureja	2.016.035.000,00	1.735.200.319,00
Kesatuan Bangsa dan Politik	4.441.030.000,00	4.186.941.252,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.441.030.000,00	4.186.941.252,00
PEMBIAYAAN DAERAH		
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang		
Keuangan		
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	218.096.097.000,00	218.130.182.486,02

Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal, unaudited.

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan daerah, perumusan permasalahan dan isu strategis sangat menentukan alternative/solusi yang bisa diambil sebagai dasar penentuan kebijakan. Untuk itu analisis permasalahan dan isu strategis harus mampu mengidentifikasi pokok suatu permasalahan / isu sekaligus mengenali faktor penentu keberhasilannya berdasarkan akar masalahnya. Kemudian perlu ditentukan prioritas masalah/isu yang akan diselesaikan dalam kerangka pembangunan daerah kedepan.

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Prioritas fokus pembangunan daerah dan prioritas program pembangunan daerah juga disusun mendasari Permasalahan Strategis



Pemerintah Daerah dan isu-isu strategis yang diformulasikan sebagai kondisi yang perlu dihadapi tahun 2021 di Kabupaten Tegal.

Sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi maka yang menjadi permasalahan strategis atau prioritas dalam pembangunan Kabupaten Tegal adalah :

1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial.
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
3. Pemantapan tatakelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Penyediaan infrastruktur yang mantap dan pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan.
5. Peningkatan daya saing ekonomi lokal, ketahanan pangan dan pengembangan industri kreatif.
6. Pengembangan potensi pariwisata dan penumbuhan destinasi wisata desa.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kabupaten Tegal 2019-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan JAngka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia”

Arti Visi:

Sejahtera : Masyarakat Kabupaten Tegal yang sehat dan bahagia, mampu mengembangkan hidupnya secara layak dan bermartabat serta memiliki akses pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara berkeadilan dan ramah



lingkungan.

- Mandiri** : Masyarakat Kabupaten Tegal yang produktif, punya etos kerja tinggi, mampu mengembangkan dan memantapkan usaha ekonomi lokalnya secara mandiri dan berkelanjutan.
- Unggul** : Masyarakat Kabupaten Tegal yang memiliki pemikiran maju, optimis, semangat belajar yang tinggi, ditunjang kemampuannya dalam berinovasi dan berkreasi untuk menghasilkan karya nyata yang bermanfaat dan berdaya saing tinggi.
- Berbudaya** : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki semangat gotong royong yang tinggi, berperilaku hidup bersih dan sehat serta memegang teguh nilai-nilai tradisi, kearifan dan budaya lokal.
- Berakhlak Mulia** : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki sikap dan karakter kepribadian yang arif dan bijaksana yang tercermin dalam perilaku warganya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan spiritualitas keagamaan.

Misi

Dalam rangka penjabaran Visi Kabupaten Tegal maka disusunlah misi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia, dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.**

Misi ini bermakna bagaimana agenda reformasi birokrasi terus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, efisien, akuntabel dan melayani, sampai dengan level pemerintahan desa. Upaya yang perlu dilakukan antara lain adalah melalui peningkatan kualitas pelayanan publik; modernisasi manajemen kepegawaian; restrukturisasi, downsizing dan rightsizing,



perubahan manajemen dan organisasi; rekayasa proses administrasi pemerintahan; anggaran berbasis kinerja program dan proses perencanaan yang partisipatif. Tata kelola pemerintahan desa juga menjadi fokus perhatian untuk 5 (lima) tahun ke depan, dengan alokasi anggaran desa yang dari tahun ke tahun semakin tinggi, maka perlu terus dilakukan pengawalan kebijakan dalam implementasinya.

Dalam rangka mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif melayani rakyat, maka penting adanya pemanfaatan Teknologi Informasi secara lebih optimal. Perwujudan E-Government sudah menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah, murah, cepat dan transparan berbasis TIK serta membuka akses informasi publik dan mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan.

2. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.

Misi ini bermakna terbangunnya infrastruktur yang andal dan berkualitas merupakan kunci utama untuk penguatan daya saing suatu daerah. Target pemerintah daerah dan tingginya ekspektasi masyarakat atas layanan infrastruktur yang andal dan berkualitas tentu harus direspons dengan sebaik-baiknya. Perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang dan terpadu dari berbagai sektor demi menciptakan kawasan yang tidak hanya terbangun, melainkan juga terintegrasi sehingga mampu berkembang dan memberi manfaat yang maksimal kepada masyarakat.

Untuk menjamin keberhasilan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, pemerintah daerah harus melakukan peningkatan keterpaduan rencana dan program berbasis pendekatan wilayah. Pengembangan infrastruktur harus mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah dan kapasitas daya dukung lingkungan melalui kajian lingkungan hidup strategis. Keterpaduan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan akan meningkatkan penyediaan air baku untuk semua kebutuhan, kinerja jaringan irigasi, kapasitas pengendalian daya rusak air, kemantapan



jalan, konektivitas antar wilayah, kebutuhan hunian dengan prasarana dan sarana pendukung, penyediaan sanitasi layak (pengelolaan limbah dan sampah), serta penanganan backlog rumah hunian dan kualitas infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan.

3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.

Misi ini memiliki makna pembangunan ekonomi rakyat yang kokoh dan maju yaitu adanya hasil-hasil pembangunan yang tidak hanya tampak dari segi kuantitas melainkan juga secara kualitas yang dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Pembangunan ekonomi berkeadilan dapat didefinisikan sebagai suatu proses mendirikan atau membentuk dengan dilandasi nilai-nilai kebenaran, tidak bersifat sewenang-wenang, bersifat proporsional namun tetap memiliki keberpihakan terhadap pihak yang lemah. Dalam konsep ekonomi, artinya masyarakat mendapat kesempatan yang luas dan setara dalam memperoleh kesejahteraan kehidupan. Konsep pertumbuhan ekonomi berkeadilan di Kabupaten Tegal dikemas dalam *Triple track strategy*, yang terdiri dari *pro-growth* (pertumbuhan ekonomi); *pro-poor* (mengentaskan kemiskinan); dan *pro-job* (penciptaan lapangan kerja/ penurunan pengangguran). *Pro Growth Strategy* juga mencakup strategi pemberdayaan kelompok masyarakat yang memiliki usaha pada sektor-sektor pertanian, industri pengolahan dan pariwisata. *Pro-growth* selanjutnya diharap dapat mendorong program pengentasan kemiskinan atau *Pro-poor* dan penciptaan lapangan kerja atau *Pro-job*.

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan merupakan bagian dari komitmen dalam mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goals (SDGs)* / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Dokumen-dokumen PBB, terutama dokumen hasil World Summit 2005 menyebut ketiga hal dimensi tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi, diharapkan tidak mengorbankan aspek-aspek sosial dan juga tidak menimbulkan gradasi lingkungan (*Enviromental Gradient*). Penerapan konsep pembangunan ekonomi



berkelanjutan, terutama pada sektor-sektor ekonomi yang memberikan kontribusi tinggi yaitu pertanian, perdagangan, pariwisata dan industri pengolahan harus memperhatikan aspek-aspek sosial dan lingkungan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan, program dan kegiatannya

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Misi ini memiliki makna peningkatan kualitas hidup manusia untuk membentuk karakter dan kualitas sumberdaya manusia yang pintar, sehat, sejahtera dan berakhlak mulia melalui penyelenggaraan layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial yang merata dan bermutu. Instrumen dasar dalam penguatan layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial adalah dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM adalah perangkat ampuh dalam meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan sosial, serta harus dilaksanakan secara kolaboratif dengan lintas sektor. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, pengurangan kemiskinan dan pengangguran menjadi tujuan utama dalam implementasi Misi keempat ini, dengan sasaran antara lain peningkatan derajat pendidikan masyarakat, derajat kesehatan masyarakat, pengendalian pertumbuhan penduduk, pemberdayaan dan pembangunan gender serta peningkatan kualitas pemuda dan olahraga.

Upaya peningkatan kualitas hidup manusia dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain dengan pemanfaatan atas hasil pengkajian kelitbangan untuk dapat diterapkan dalam rangka mendukung program-program bidang pendidikan dan kesehatan. Pemanfaatan dan dukungan teknologi informasi juga menjadi faktor yang penting dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup aktivitas yang saling berkaitan yaitu pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik. Untuk itu, pemanfaatan teknologi informasi pada upaya peningkatan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa unit kerja / organisasi merupakan satu



kesatuan kesatuan yang utuh dan saling berhubungan dalam proses kerjanya sebagai suatu sistem.

5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Misi ini memiliki makna untuk mewujudkan ketertiban umum dengan memberikan perlindungan bagi warga masyarakat agar dapat tinggal di lingkungan yang aman, nyaman dan harmonis sehingga mampu menjalankan kehidupannya secara layak dan bermartabat. Dimensi sosial dalam kehidupan, meniscayakan penciptaan sebuah penataan sistem yang mewadahi dinamika kemasyarakatan. Ini dilakukan dengan terus memperkokoh kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Aplikasinya bisa dilakukan secara berjenjang berdasarkan stratifikasi kehidupan sosial, budaya dan kearifan lokal.

Upaya yang dilakukan antara lain melalui peningkatan dialog dan kerjasama umat beragama dan antar umat beragama, penguatan kebhinekaan dan penciptaan ruang dialog antar warga, peningkatan upaya penegakan perda, peningkatan kualitas kesiapsiagaan bencana, penanggulangan bencana yang terencana, terkoordinasi, terpadu dan akuntabel, perlindungan dan pemanfaatan seni budaya dan peningkatan promosi seni budaya.

Untuk lebih rinci tentang penjabaran tujuan, sasaran, dan indikator kerjanya pada setiap misi dapat dilihat pada Tabel 1.9.



Tabel 1.9
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
							2020	2021	2022	2023	2024	
1	Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif Melayani Rakyat	Mewujudkan Aparatur Birokrasi yang Profesional		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka; Tahunan	45,25	50,1	55,10	57,10	60,10	65,10	65,10
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen; Tahunan	75,00	78,61	80,46	82,15	84,83	86,20	86,20
				Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor; Tahunan	2,58	2,75	3,00	3,25	3,40	3,55	3,55
			Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai; Tahunan	60,10	63,61	65,61	67,61	70,61	73,61	73,61
			Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	Opini; Tahunan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Skor; Tahunan	70,00	72,12	74,24	76,42	78,31	80,56	80,56



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
							2020	2021	2022	2023	2024	
2	Memperkuat Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Andal, Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Konektivitas antar Wilayah		Indeks Williamson	Persen; Kumulatif	0,260	0,258	0,254	0,250	0,246	0,242	0,242
			Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Persentase Infrastruktur Wilayah Mantap	Persen; Tahunan	59,98	64,82	69,24	74,46	78,35	83,60	83,60
				Persentase Infrastruktur Permukiman Layak	Persen; Tahunan	87,64	89,45	91,65	93,76	95,26	97,23	97,23
			Meningkatnya Sistem Jaringan / Konektivitas Perhubungan	Rasio Konektivitas Perhubungan	Skor; Tahunan	51,14	53,34	58,24	63,67	67,43	72,42	72,42
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen; Tahunan	63,78	64,28	64,78	65,78	66,28	68,28	68,28
			Meningkatnya kualitas air dan kualitas udara	Indeks Kualitas Air	Persen; Tahunan	61,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
				Indeks Kualitas Udara	Persen; Tahunan	77,00	77,50	78,00	79,00	80,00	81,00	81,00
		3	Membangun Perekonomian Rakyat yang Kokoh, Maju, Berkeadilan dan	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri		Pertumbuhan Ekonomi	Persen; Tahunan	5,40	5,48	5,53	5,58	5,63



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
							2020	2021	2022	2023	2024	
	Berkelanjutan	Pengolahan dan Pariwisata										
			Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat di Sektor Pertanian dan Perikanan	Laju PDRB Sektor Pertanian	Persen; Tahunan	1,35	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1
				Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persen; Tahunan	121,38	122,02	122,66	123,30	123,94	124,58	124,58
			Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat di Sektor Industri Pengolahan	Laju PDRB Sektor Industri	Persen; tahunan	6,02	6,09	6,16	6,24	6,31	6,38	6,38
			Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Jumlah; Tahunan	487	587	687	787	887	987	987,00
			Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah Wisatawan Nusantara	Jumlah; Tahunan	1.052.487	1.152.587	1.252.687	1.352.787	1.452.887	1.552.987	1.552.987
			Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat di Sektor Perdagangan	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Persen; Tahunan	5,95	6,02	6,09	6,16	6,24	6,31	6,31
4	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas		Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai; Tahunan	66,44	68,03	68,73	69,43	70,13	70,83	70,83
				Indeks pemberdayaan Gender (IDG)	Persen; Tahunan	69,05	69,30	69,70	70,16	70,80	71,40	71,40



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
							2020	2021	2022	2023	2024	
	Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen; Tahunan	86,76	86,85	86,94	87,03	87,12	87,21	87,21
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun; Tahunan	6,70	6,75	6,77	6,80	6,83	6,85	6,85
				Harapan Lama Sekolah	Tahun; Tahunan	12,34	12,37	12,40	12,45	12,50	12,53	12,53
			Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun; Tahunan	71,14	71,19	71,24	71,29	71,34	71,39	71,39
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen; Tahunan	69,05	69,30	69,70	70,16	70,80	71,40	71,40
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen; Tahunan	86,76	86,85	86,94	87,03	87,12	87,21	87,21
			Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	Rasio; Tahunan	2,47	2,44	2,40	2,37	2,33	2,30	2,30
			Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga	Kota Layak Pemuda	Level; Tahunan	proses	proses	proses	pratama	pratama	pratama	pratama
				Jumlah Prestasi Olahraga tingkat Provinsi	Kali; Tahunan	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	10,00



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
							2020	2021	2022	2023	2024	
		Menurunkan Kesenjangan Kemiskinan		Indeks Gini	Persen; Tahunan	0,311	0,307	0,303	0,299	0,295	0,289	0,289
			Menurunkan Angka Kemiskinan	Persentase penduduk miskin	Persen; Tahunan	7,94	7,01	6,64	6,26	5,88	5,50	5,50
			Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen; Tahunan	8,45	7,45	7,20	7,05	6,85	6,60	6,60
5	Menciptakan Tata Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, Tenram dan Nyaman dengan Tetap Menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya serta Kearifan Lokal	Mewujudkan kerukunan hidup dalam masyarakat		Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen; Tahunan	80,66	82,66	84,66	86,66	88,66	90,66	90,66
			Meningkatnya Kerukunan Hidup Masyarakat	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen; Tahunan	80,66	82,66	84,66	86,66	88,66	90,66	90,66
		Menurunnya Resiko Bencana		Indeks Risiko Bencana	Angka; Tahunan	184,41	181,98	177,71	174,62	172,12	171,84	171,84
			Meningkatnya kapasitas daerah dalam menurunkan resiko bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Angka; Tahunan	0,58	0,62	0,72	0,80	0,89	0,90	0,90



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
							2020	2021	2022	2023	2024	
		Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan		Indeks Kebudayaan	Indeks; tahunan	60,00	62,34	64,73	66,08	68,52	70,00	70,00
			Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Cagar Budaya (<i>Tangible dan Intangible</i>) Dilestarikan	Indeks; tahunan	21,40	22,50	24,50	26,50	27,00	28,56	28,56

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal Tahun 2019



c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Tabel 1.10

Program Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target 2021	PD Penanggung Jawab
MISI 1: Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat				
Tujuan: 1.1 Mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi dalam pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	63,69	64,19	
Sasaran 1.1.1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,2	2,3	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,61	80,46	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan Informasi	40,62	45,00	DINAS KOMINFO
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK dalam digitalisasi pemerintahan	25,00	25,00	DINAS KOMINFO
	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas kominfo	16,67	54,17	DINAS KOMINFO
	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	45,00	55,00	DINAS KOMINFO
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	20,00	25,00	DINAS KOMINFO
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Adiwerna	76,37	77,62	KECAMATAN ADIWERNA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Balapulang	79,29	80,54	KECAMATAN BALAPULANG



PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Bojong	79,62	80,87	KECAMATAN BOJONG
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Bumijawa	87,53	88,78	KECAMATAN BUMIJAWA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Dukuwaru	79,37	80,62	KECAMATAN DUKUHTURI
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Dukuhturi	77,44	78,69	KECAMATAN DUKUHWARU
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Jatinegara	79,70	80,95	KECAMATAN JATINEGARA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Kedungbanteng	82,00	83,00	KECAMATAN KEDUNGBANTENG
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Kramat	78,98	80,23	KECAMATAN KRAMAT
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Lebaksiu	77,25	80,00	KECAMATAN LEBAKSIU
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Margasari	77,40	78,65	KECAMATAN MARGASARI
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Pagerbarang	77,63	78,88	KECAMATAN PAGERBARANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Pangkah	78,74	79,99	KECAMATAN PANGKAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Slawi	79,67	80,92	KECAMATAN SLAWI
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Suradadi	79,76	81,01	KECAMATAN SURADADI
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Talang	73,20	74,45	KECAMATAN TALANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Tarub	80,55	81,80	KECAMATAN TARUB
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Warureja	77,40	78,65	KECAMATAN WARUREJA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Persentase desa mandiri Kecamatan	0,00	0,00	KECAMATAN



DAN KELURAHAN	Adiwerna			ADIWERNA
	Persentase desa Maju Kecamatan Adiwerna	9,52	9,52	KECAMATAN ADIWERNA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Balapulang	0,00	0,00	KECAMATAN BALAPULANG
	Persentase desa maju Kecamatan Balapulang	5,00	5,00	KECAMATAN BALAPULANG
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Bojong	12,00	12,00	KECAMATAN BOJONG
	Persentase desa maju Kecamatan Bojong	0,29	0,29	KECAMATAN BOJONG
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Bumijawa	0,00	0,00	KECAMATAN BUMIJAWA
	Persentase desa maju Kecamatan Bumijawa	11,11	11,11	KECAMATAN BUMIJAWA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Dukuhwaru	0,00	0,00	KECAMATAN DUKUHWARU
	Persentase desa maju Kecamatan Dukuhwaru	10,00	10,00	KECAMATAN DUKUHWARU
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Dukuhturi	0,00	0,00	KECAMATAN DUKUHTURI
	Persentase desa maju Kecamatan Dukuhturi	5,56	5,56	KECAMATAN DUKUHTURI
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Jatinegara	0,00	0,00	KECAMATAN JATINEGARA
	Persentase desa maju Kecamatan Jatinegara	6,00	6,00	KECAMATAN JATINEGARA



PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Kedungbanteng	0,00	0,00	KECAMATAN KEDUNGABNTENG
	Persentase desa maju Kecamatan Kedungbanteng	0,00	0,00	KECAMATAN KEDUNGABNTENG
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan mandiri Kecamatan Kramat	0,00	0,00	KECAMATAN KRAMAT
	Persentase desa/kelurahan maju Kecamatan Kramat	16,00	16,00	KECAMATAN KRAMAT
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Lebaksiu	7,69	7,69	KECAMATAN LEBAKSIU
	Persentase desa Maju Kecamatan Lebaksiu	15,00	15,00	KECAMATAN LEBAKSIU
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Margasari	8,00	8,00	KECAMATAN MARGASARI
	Persentase desa maju Kecamatan Margasari	46,00	46,00	KECAMATAN MARGASARI
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Pagerbarang	0,00	0,00	KECAMATAN PAGERBARANG
	Persentase desa maju Kecamatan Pagerbarang	8,00	8,00	KECAMATAN PAGERBARANG
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Pangkah	0,00	0,00	KECAMATAN PANGKAH
	Persentase desa Maju Kecamatan Pangkah	4,00	4,00	KECAMATAN PANGKAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Slawi	0,00	0,00	KECAMATAN SLAWI
	Persentase desa maju Kecamatan Slawi	60,00	60,00	KECAMATAN SLAWI



PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Suradadi	0,00	0,00	KECAMATAN SURADADI
	Persentase desa maju Kecamatan Suradadi	9,00	9,00	KECAMATAN SURADADI
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Talang	0,00	0,00	KECAMATAN TALANG
	Persentase desa maju Kecamatan Talang	0,00	0,00	KECAMATAN TALANG
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Tarub	0,00	0,00	KECAMATAN TARUB
	Persentase desa maju Kecamatan Tarub	20,00	20,00	KECAMATAN TARUB
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan mandiri Kecamatan Warureja	0,00	0,00	KECAMATAN WARUREJA
	Persentase desa/kelurahan Maju Kecamatan Warureja	17,00	17,00	KECAMATAN WARUREJA
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tertib dan Baik Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa	35,00	50,00	DISPERMASDES
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	15,00	20,00	DISDUKCAPIL
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk ber Kartu Keluarga	91,67	92,00	DISDUKCAPIL
	Perekaman KTP elektronik	99,68	99,72	DISDUKCAPIL
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	21,80	50,00	DISDUKCAPIL



PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kepemilikan akta kelahiran	93,10	94,00	DISDUKCAPIL
	Persentase penduduk berakta kematian	68,54	69,29	DISDUKCAPIL
Sasaran 1.1.2: Meningkatnya kualitas manajemen kinerja	Nilai SAKIP Kabupaten	63,61	65,61	
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan	100,00	100,00	BAPPEDA DAN LITBANG
	Persentase hasil rekomendasi Pengendalian yang ditindaklanjuti	75,00	86,00	BAPPEDA DAN LITBANG
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	91,22	87,00	BAPPEDA DAN LITBANG
	Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun bidang Perekonomian dan SDA	92,88	87,00	BAPPEDA DAN LITBANG
	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	93,02	89,00	BAPPEDA DAN LITBANG
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase OPD Rumpun Perekonomian dan pembangunan tercapai LKJIP	9,00	20,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Proses Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa tercapai BAIK	100,00	100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Level Tingkat Maruritas UKPBJ terpenuhi	1,00	2,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Tingkat Standardisasi LPSE terpenuhi	12,00	13,00	SEKRETARIAT DAERAH
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan	65,00	72,50	BAPPEDA DAN LITBANG



	pembangunan daerah			
Sasaran 1.1.3: Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu Penyusunan APBD	100,00	100,00	BPKAD
	Persentase ketepatan waktu Penerbitan SP2D	100,00	100,00	BPKAD
	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Peraturan Daerah & Peraturan Bupati Pertanggungjawaban APBD	100,00	100,00	BPKAD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD	14,09	14,81	BAPPENDA
	Rasio Piutang Pajak Daerah	66,26	90,00	BAPPENDA
	Rasio Pajak Daerah	30,63	30,02	BAPPENDA
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Penyusunan Laporan BMD yang Baik dan Tepat Waktu	62,50	65,00	BPKAD
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI	91,70	91,00	INSPEKTORAT
	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Provinsi	100,00	100,00	INSPEKTORAT
	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten	39,02	50,00	INSPEKTORAT
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Predikat WBK/WBBM berdasarkan penilaian internal	16,67	4,20	INSPEKTORAT
	Persentase Pemenuhan IKU Perangkat Daerah	60,41	60,00	INSPEKTORAT
	Persentase PD menyajikan laporan keuangan secara akuntabel	81,25	85,00	INSPEKTORAT
Sasaran 1.1.4: Meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	72,24	74,24	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan	0,12	0,12	BKD



	Persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya	87,97	91,50	BKD
	Persentase jabatan jabatan fungsional (non guru non kesehatan) terisi sesuai dengan kompetensinya	35,76	38,79	BKD
	Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah Dasar (%)	110,04	224,96	BKD
	Rasio pegawai fungsional (%)	9,87	14,40	BKD
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	93,50	92,94	BKD
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 20/jam dalam setahun	47,49	65,01	BKD
	Persentase PNS mengikuti seminar/workshop/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan	33,40	37,10	BKD
MISI 2: Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan				
Tujuan 2.1 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar yang berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap berwawasan Lingkungan	70,17	74,26	
Sasaran 2.1.1. Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Mantap	71,45	74,88	
	Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang layak	67,11	69,91	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Ketersediaan Jaringan Irigasi dalam kondisi baik pada Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten	58,86	60,10	DPU



PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Akses Layanan Air Minum	61,09	63,32	DPU
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase ketersediaan Jaringan Drainase di Jalan Kewenangan Kabupaten	58,42	61,42	DPU
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio Bangunan dan Lingkungan yang tertata	0,3	10	DPU
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Bangunan Negara yang Sesuai Standar Teknis	76,88	78,00	DPU
	Rasio bangunan yang memiliki IMB	6,50	7,49	DPU
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	81,11	82,50	DPU
	Proporsi Jembatan dalam Kondisi Mantap	88,05	89,50	DPU
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio kepatuhan terhadap ITR yang diajukan	79,93	87	DPU
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Sarana dan Prasarana Desa yang terpenuhi dan Baik	55,23	60,23	DISPERMASDES
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	69,40	70,11	DISPERMASDES
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100	100	DINAS PERKIMTAH
	Rasio Pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki	100,00	100,00	DINAS PERKIMTAH



	izin			
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni	13,06	15,4	DINAS PERKIMTAH
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Laju Penurunan Luas Kawasan Kumuh yang telah ditetapkan	35,47	198,01	DINAS PERKIMTAH
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase ketersediaan PSU perumahan	83,31	83,90	DINAS PERKIMTAH
Sasaran 2.1.2.Meningkatnya Sistem jaringan/konektivitas perhubungan	Rasio Konektivitas Kabupaten	75,2	75,25	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Dokumen Perencanaan Lalu Lintas	0,00	0	DISHUB
	Persentase Rekomendasi Andalalin	20,00	40	DISHUB
	Persentase perlintasan KA yang telah dilakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	32,80	38	DISHUB
	Persentase Simpang APILL Standar	0,00		DISHUB
	Persentase Pengamanan Pengaturan Lalu Lintas	0,00	0	DISHUB
	Persentase Lokasi Titik Parkir Berizin	65,33	73,67	DISHUB
	Persentase Juru Parkir Berizin	73,60	77,6	DISHUB
	Rasio fasilitasi penerbitan ijin trayek	76,00	80	DISHUB
	Persentase Pelanggaran Perizinan, Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Angkutan	35,00		DISHUB
	Persentase layanan terminal angkutan jalan	31,00		DISHUB



	Persentase Kepemilikan Uji Kendaraan angkutan umum	77,80		DISHUB
	Persentase Jalan memiliki Perlengkapan Jalan	34,49	54	DISHUB
	Persentase Prasarana Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum)	57,00	67	DISHUB
Sasaran 2.1.3.Meningkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55,05	55,13	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Nilai Peningkatan Status Mutu Air Sungai	3,70	3,70	DLH
	Presentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3	1,08	5,77	DLH
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Peningkatan Luas Lahan Kehati yang terkelola	0	33,33	DLH
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Penanganan Limbah B3	60,00	60,00	DLH
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan Akses Sanitasi/ Limbah Domestik	94,37	95,17	DPU
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	47,29	54,69	DLH
	Persentase Pengurangan Sampah	14,00	15,31	DLH
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Rasio ketersediaan sarana dan prasarana persampahan	78,00	80,00	DPU
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha yang Berkomitmen dalam Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	30,00	40,00	DLH
MISI 3: Membangun perekonomian rakyat yang				



kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan				
Tujuan 3.1. Mewujudkan perekonomian rakyat yang kuat berbasis pertanian, industri pengolahan dan pariwisata	Pertumbuhan Ekonomi	-1,46	3,2	
Sasaran 3.1.1. eningkatnya Produktifitas Sektor Pertanian	Laju PDRB Sektor Pertanian	2,18	2,33	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (Kg.)	1.964.378	1.964.378	DKPP
	Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp.)	13.608.184	13.608.184	DKPP
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase perairan umum daratan (PUD) yang bebas dari destructive fishing	11,11	33,33	DKPP
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (kg)	2.730.262	2.743.913	DKPP
	Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Rp.000)	145.642.227	146.698.838	DKPP
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	5.478.639	5.484.118	DKPP
	Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Rp.000)	131.189.142	131.320.332	DKPP
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi daging (kg)	11.284.734	11.397.581	DINAS TAN KP
	Produksi Telur (kg.)	10.760.493	10.868.098	DINAS TAN KP
	Produksi Susu (kg.)	604.664	610.711	DINAS TANKP
	Persentase Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	89,80	89,85	DINAS TAN KP
	Persentase Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi	63,00	64,00	DINAS TAN KP
	Luas Lahan Pertanian Organik	2,00	2,00	DINAS TAN KP



	Rasio Penggunaan Alsintan Pra Panen	62,72	62,72	DINAS TAN KP
	Rasio Penggunaan Alsintan Pasca Panen	15,51	15,51	DINAS TAN KP
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Indeks pertanaman	1,52	1,58	DINAS TAN KP
	Aksebilitas Jalan Usaha Tani (Km/Ha)	2,60	3,00	DINAS TAN KP
	Luas Lahan Sawah Lestari	100,00	100,00	DINAS TAN KP
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rasio Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	< 2,5	< 2,5	DINAS TAN KP
	Rasio Penggunaan Agen Pengendali Hayati per Luas tanam dalam menekan serangan OPT Padi	0,00	1,00	DINAS TAN KP
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Ternak terkendali status kesehatannya	31,37	5,60	DINAS TAN KP
	Persentase Pengawasan peredaran produk hasil ternak yang Aman Sehat Utruh dan Halal/ASUH	100	2 Jenis	DINAS TAN KP
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kapasitas penyuluh swadaya terhadap dasar-dasar penyuluhan	0	33	DINAS TAN KP
	Penumbuhan Peningkatan Kelas Kelompok Tani Pemula Ke Lanjut	0,00	2,45	DINAS TAN KP
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase penguatan cadangan pangan	26,50	27,00	DINAS TAN KP
	Persentase ketersediaan informasi harga dan pasokan pangan	48,00	49,00	DINAS TAN KP
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rawan pangan	72,00	90,00	DINAS TAN KP



Sasaran 3.1.2. Meningkatnya Produktifitas di Sektor Industri Pengolahan	Laju PDRB Sektor Industri Pengolahan	-0,46	1,45	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP	60,00	60,00	DISPERINAHER
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100,00	100,00	DISPERINAHER
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase industri yang memiliki 7 informasi industri secara lengkap dan terkini (SII Nas)	20,00	40,00	DISPERINAHER
Sasaran 3.1.3. Meningkatnya Produktifitas Pariwisata	Rasio PAD sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten	1,85	1,86	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Tujuan Wisata produktif (DTW) yang ditetapkan	78,33	78,33	DISPORAPAR
	Persentase usaha pariwisata memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	69,00	148,00	DISPORAPAR
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase DTW yang dipromosikan	78,33	78,33	DISPORAPAR
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata yang dibina	50	100	DISPORAPAR
Sasaran 3.1.4. Meningkatnya Produktifitas di Sektor Perdagangan	Laju PDRB Sektor Perdagangan	-4,2	2,56	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar direhabilitasi	50,00	61,54	DINAS DAGKOP UKM
	Persentase pasar e-ritribusi	7,69	26,92	DINAS DAGKOP UKM
	Persentase Sarana dan Prasaran Pendistribusian yang terkelola dengan baik	100,00	100,00	DINAS DAGKOP UKM



PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase laju peningkatan nilai penjualan produk dalam negeri	2	2,00	DINAS DAGKOP UKM
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Laju Nilai Ekspor	1	1,00	DINAS DAGKOP UKM
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi bermitra	1,04	2,34	Disdagkop UMKM
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan Bermitra	2,63	3,68	DINAS DAGKOP UKM
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	sen; Kumulatif; IKU	35000,00	631600
MISI 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi				
Tujuan 4.1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas				
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,39	68,73	
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,85	86,94	
Sasaran 4.1.1. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan masyarakat				
	Indeks Pendidikan	0,546	0,552	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	79,86	79,87	DINAS DIKBUD
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	97,25	97,26	DINAS DIKBUD
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	107,03	100	DINAS DIKBUD
	Tingkat partisipasi warga		100,00	



	negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	105,99		DINAS DIKBUD
	Rata-rata Nilai Kelulusan SD	77.47	75	DINAS DIKBUD
	Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	70.86	72.11	DINAS DIKBUD
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru Kelas PAUD	23,00	20,00	DINAS DIKBUD
	Rasio Guru Kelas TK	3,16	4,00	DINAS DIKBUD
	Rasio Guru Kelas SD	19:11	1.70	DINAS DIKBUD
	Guru Mapel PAI	3.00	3.20	DINAS DIKBUD
	Guru Mapel PJOK	2.90	3.10	DINAS DIKBUD
	Rasio Guru Mapel SMP	04:38	07:44	DINAS DIKBUD
	Rasio Guru Mapel Paket A	06:14	00:00	DINAS DIKBUD
	Rasio Guru Mapel Paket B	22:44	22:44	DINAS DIKBUD
	Rasio Guru Mapel Paket C	18:14	12:07	DINAS DIKBUD
Sasaran 4.1.2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0,794	0,799	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	0,092	0,094	DINAS KESEHATAN
	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	88,90	100,00	DINAS KESEHATAN
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	93,30	97,00	DINAS KESEHATAN
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	98,20	99,00	DINAS KESEHATAN
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,00	100,00	DINAS KESEHATAN



	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	73,70	90,00	DINAS KESEHATAN
	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	38,90	50,00	DINAS KESEHATAN
	Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	15,40	25,00	DINAS KESEHATAN
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	33,60	77,00	DINAS KESEHATAN
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10,10	25,00	DINAS KESEHATAN
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	74,50	78,00	DINAS KESEHATAN
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	57,30	65,00	DINAS KESEHATAN
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	57,10	65,00	DINAS KESEHATAN
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	90,50	95,00	DINAS KESEHATAN
	Cakupan balita stunting	12,50	12,40	DINAS



				KESEHATAN
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya terakreditasi	42,00	42,00	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr Soeselo	100	100	RSUD dr SOESELO
	Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD Soeselo	78,46 (AA)	88.5 (AA)	RSUD dr SOESELO
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD Suradadi	100	100	RSUD SURADADI
	Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD Suradadi	74,06 (A)	100	RSUD SURADADI
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan pelayanan perijinan praktik tenaga kesehatan	100,00	100,00	DINAS KESEHATAN
	Cakupan puskesmas yang mempunyai 9 tenaga kesehatan strategis	83,00	86,20	DINAS KESEHATAN
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana produksi pangan industri rumah tangga yang diterbitkan sesuai ketentuan	30	100	DINAS KESEHATAN
	Cakupan pemenuhan persyaratan perijinan sarana pelayanan kefarmasian	100	100	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	95,4	95,5	DINAS KESEHATAN
Sasaran 4.1.3. Meningkatnya pemberdayaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,3	69,7	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN	Persentase ARG pada belanja operasi	26,84	27,00	DINAS P3AP2KB



PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	APBD			
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga mendapat pelayanan konseling	0,04	0,05	DINAS P3AP2KB
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak	50,00	22,42	DINAS P3AP2KB
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence Rate) CPR	67,8	68,94	DINAS P3AP2KB
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	15,27	13,96	DINAS P3AP2KB
Sasaran 4.1.3. Meningkatnya Produktifitas Pemuda	Jumlah wirausaha muda pemula berbasis kinerja	100	200	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,073	0,109	DINAS PORAPAR
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	0,067	0,069	DINAS PORAPAR
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan prestasi olahraga	61,00	65,00	DINAS PORAPAR
Tujuan 4.2. Menekan laju kemiskinan	Persentase penduduk miskin	8,14	8,41	
Sasaran 4.2.1. Menurunnya Kedalaman dan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,08	1,02	
Keparahan Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,19	0,17	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS Perseorangan Keluarga dan Kelembagaan yang pernah dibina dan diberdayakan	32,44	49,35	DINAS SOSIAL
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti .	29,39	34,61	DINAS SOSIAL
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN	Persentase PPKS, Fakir		98,75	



JAMINAN SOSIAL	Miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial.	97,99		DINAS SOSIAL
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa	100,00	100,00	DISPERMASDES
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan ketahanan kesejahteraan keluarga	21,58	22,32	DINAS P3AP2KB
Sasaran 4.2.2. Menekan Laju Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	9,82	10,42	
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	100	DISPERINAKEK
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	37.990,00	39.438,000	DISPERINAKEK
	Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	3,70	4,60	DISPERINAKEK
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah	17,82	25,00	DISPERINAKEK
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Lokasi potensial yang memiliki profil investasi	0,00	28,57	DINAS PMPTSP
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan calon investor yang berkomitmen	100,00	20,00	DINAS PMPTSP
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase ketepatan waktu perizinan yang ditetapkan sebelum batas waktu	100	79	DINAS PMPTSP
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan Perusahaan	61,28	64,28	DINAS PMPTSP
MISI 5: Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman,				



tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal				
Tujuan 5.1. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	82,66	84,66	
Sasaran 5.1.1. Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	82,66	84,66	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang memahami ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	80,42	84,66	BADAN KESBANGPOL
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Gangguan KANTIBMAS yang tertangani	85,00	100,00	BADAN KESBANGPOL
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Konflik yang tertangani	97,00	100,00	BADAN KESBANGPOL
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Adiwerna	100	100	KECAMATAN ADIWERNA
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Balapulang	100	100	KECAMATAN BALAPULANG
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Bojong	100	100	KECAMATAN BOJONG
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Bumijawa	100	100	KECAMATAN BUMIJAWA
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Dukuhwaru	75	75	KECAMATAN DUKUHURI
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Dukuhuri	100	100	KECAMATAN DUKUHWARU
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Jatinegara	100	100	KECAMATAN JATINEGARA



	Jatinegara			
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Kedungbanteng	81	81	KECAMATAN KEDUNGBANTE NG
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Kramat	100	100	KECAMATAN KRAMAT
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Lebaksiu	70	70	KECAMATAN LEBAKSIU
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Margasari	100	100	KECAMATAN MARGASARI
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Pagerbarang	100	100	KECAMATAN PAGERBARANG
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Pangkah	100	100	KECAMATAN PANGKAH
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Slawi	100	100	KECAMATAN SLAWI
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Suradadi	100	100	KECAMATAN SURADADI
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Talang	100	100	KECAMATAN TALANG
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Tarub	100	100	KECAMATAN TARUB
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Warureja	82	82	KECAMATAN WARUREJA
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase gangguan trantibun yang tertangani	82,00	84,00	SATPOL PP
	Presentase pelanggaran perda dan perkara yg diselesaikan	83,00	86,00	SATPOL PP



Tujuan 5.2. Menurunnya Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	183	177,71	
Sasaran 5.2.1. Meningkatnya kapasitas daerah dalam menurunkan resiko bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,60	0,72	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	79,00	82,00	SATPOL PP
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	65	68,25	BPBD
	Persentase jumlah warga negara yg memperoleh layanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	1,38	1,45	BPBD
	Persentase jumlah warga negara yg memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	22,26	23,37	BPBD
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	100	100	DINAS SOSIAL
Tujuan 5.3. Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemanfaatan Kebudayaan	44,74	50,73	
Sasaran 5.3.1. Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan	57,5	60,5	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase tradisi yang dikembangkan	61,11	63,11	DINAS DIKBUD
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Seni dan Kesenian yang dibina	54,55	65,66	DINAS DIKBUD
	Persentase Sumber		78,00	



PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Sejarah yang Terdokumentasikan	76,47		DINAS DIKBUD
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Terlestarikannya Cagar Budaya	45,83	47,83	DINAS DIKBUD

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Sebagai upaya pencapaian target sasaran pembangunan dan mempertimbangkan isu strategis yang dihadapi, maka pembangunan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 diarahkan untuk “Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat yang Didukung Infrastruktur dan Pelayanan Publik yang Berkualitas”. Namun dengan adanya pandemi covid-19 dan upaya penanggulangannya, maka terjadi perubahan tema RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2021 yaitu “Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang didukung infrastruktur dan pelayanan publik yang berkualitas dengan memperhatikan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial pasca covid-19”. Dalam kerangka ini, maka prioritas pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2021 ditujukan untuk :

1. Peningkatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial, yang difokuskan pada :
 - a. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar sesuai standar pelayanan minimal.
 - b. Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat.
 - c. Peningkatan upaya promosi dan pemberdayaan kesehatan.
 - d. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan.
 - e. Peningkatan pelayanan pengarusutamaan gender.
 - f. Peningkatan perlindungan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan.
 - g. Peningkatan jaminan pelayanan dan kepesertaan keluarga berencana.
 - h. Peningkatan kewirausahaan pemuda.



- i. Peningkatan prestasi olahraga tingkat provinsi/nasional.
 - j. Penguatan kebhinekaan dan penciptaan ruang dialog antar warga.
 - k. Peningkatan upaya penegakan perda.
 - l. Peningkatan kualitas kesiapsiagaan bencana.
 - m. Penanggulangan Bencana yang terencana, terkoordinasi, terpadu dan akuntabel.
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang difokuskan pada :
- a. Pengintegrasian program penanggulangan kemiskinan.
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, terutama difabel, PGOT dan lansia terlantar.
 - c. Peningkatan kompetensi dan kualifikasi angkatan kerja.
 - d. Peningkatan investasi untuk perluasan lapangan kerja yang mengutamakan tenaga kerja lokal.
 - e. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja.
3. Peningkatan daya saing ekonomi lokal, ketahanan pangan dan pengembangan industri kreatif, yang difokuskan pada :
- a. Peningkatan Produktifitas sektor Pertanian meliputi tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan peternakan.
 - b. Peningkatan Produktifitas sektor Perikanan.
 - c. Peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat.
 - d. Peningkatan daya saing sektor industri pengolahan.
 - e. Pengembangan usaha industri kreatif.
 - f. Penguatan fungsi pasar tradisional.
 - g. Pengendalian indeks perubahan harga.
 - h. Peningkatan UMKM yang kompetitif.
 - i. Pengarusutamaan produk UMKM lokal.
 - j. Penumbuhan koperasi berbasis produk UMKM lokal.
4. Penyediaan infrastruktur yang mantap dan pengembangan wilayah, yang difokuskan pada :
- a. Peningkatan Infrastruktur wilayah yang mantap.
 - b. Percepatan Infrastruktur pemukiman yang layak.
 - c. Peningkatan cakupan layanan pengelolaan sampah dan limbah B3 sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK).
 - d. Optimalisasi layanan sistem jaringan transportasi.



- e. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi.
 - f. Peningkatan Kualitas Udara, Kualitas Air dan Pengendalian Kerusakan Lahan.
5. Pemantapan tatakelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, yang difokuskan pada :
- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal.
 - b. Penyediaan layanan pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - c. Peningkatan Manajemen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - d. Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 - e. Peningkatan keselarasan perencanaan pembangunan daerah.
 - f. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - g. Peningkatan pendapatan asli daerah.
 - h. Peningkatan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara.
 - i. Penerapan Sistem Merit.
6. Pengembangan potensi pariwisata dan penumbuhan destinasi wisata desa, yang difokuskan pada :
- a. Optimalisasi pengelolaan dan infrastruktur objek wisata.
 - b. Penumbuhan dan pemantapan kemandirian wisata desa.
 - c. Penguatan pemasaran wisata.
 - d. Perlindungan dan pemanfaatan seni budaya.
 - e. Peningkatan promosi seni budaya.
 - f. Pelestarian Cagar Budaya
7. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca covid-19, selain arah kebijakan mendasari perencanaan jangka menengah, arah kebijakan pembangunan tahun 2021 juga memperhitungkan permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Dari hasil analisis permasalahan daerah, diproyeksikan pada tahun 2021 covid-19 masih eksis merusak aspek-aspek kehidupan wilayah Kabupaten Tegal setidaknya berada pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk itu setidaknya arah kebijakan yang diimplementasikan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal tahun 2021 terkait covid-19 antara lain:



- a. Penanganan Lanjutan covid-19 Penanganan lanjutan dilakukan pada upaya penjaminan kualitas kesehatan publik.

Penanganan lanjutan covid-19 dilakukan dengan menjamin setiap penduduk Tegal yang terinfeksi atau berpotensi terinfeksi (ODP, PDP, OTG, Suspect) mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Penangan lanjutan covid-19 juga diarahkan untuk menjamin pelaksanaan protokol kesehatan, meliputi pelaksanaan protokol kesehatan Pelaku Perjalanan (PP) hingga protokol kesehatan kerumunan massa (ketentraman dan ketertiban umum). PD yang mengampu arah kebijakan ini adalah Dinas Kesehatan, RSUD dr. Soeselo, RSUD Suradadi (Urusan Kesehatan), Dinas Perhubungan (Urusan Perhubungan), BPBD, Satpol PP, Kesbangpol dan Gugus Tugas covid-19 (Urusan Ketentraman Ketertiban Umum).

- b. Pemulihan Sosial Pasca covid-19 Pemulihan sosial pasca covid-19 sangat tergantung kecepatan dan ketepatan penanganannya.

Semakin lama proses penanganannya maka semakin lama pula proses pemulihannya. Hal tersebut terkait dengan seberapa besar kerusakan sosial yang dialami. Untuk itu tahun upaya-upaya pemulihan sosial pasca covid-19 ditahun 2021 harus menjadi salah satu guideline program/kegiatan perangkat daerah ditahun 2021. Upaya pemulihan sosial dilakukan melalui upaya pemenuhan Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net). PD pengampu arah kebijakan ini adalah Dinas Sosial.

- c. Pemulihan Ekonomi Pasca covid-19

Berbagai kebijakan khususnya terkait stimulus ekonomi masyarakat mulai pelaku ekonomi skala besar hingga kecil harus dikeluarkan melalui berbagai program/kegiatan seluruh Perangkat Daerah yang terkait. Selain itu mengingat potensi meningkatnya jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran di Kabupaten Tegal yang cukup besar, maka Perangkat Daerah terkait khususnya Dinas Sosial, Disperinaker, dan Disdakop dan UKM, Dis Tan dan KP, DKPP, Disporapar perlu merumuskan kebijakan strategis yang efektif dan efisien ditahun 2021.

- d. Transformasi ekonomi wilayah potensial Pandemi covid-19 secara luas telah merusak struktur ekonomi secara luas.



Rantai-rantai perekonomian pun secara umum telah rusak. Belajar dari realita yang ada, transformasi ekonomi wilayah perlu mendapatkan perhatian. Ada beberapa potensi transformasi ekonomi yang bisa dikembangkan di Kabupaten Tegal antara lain:

- 1) Digitalisasi ekonomi wilayah mulai skala kecil hingga besar. Hal ini didasarkan fakta bahwa adanya pandemi covid-19 di Kabupaten Tegal telah memunculkan ekonomi digital masyarakat di semua lini bahkan penjual sayur eceran telah masuk kedalamnya. Kemunculan ekonomi digital ini mempunyai potensi pengembangan mulai dari hulu ke hilirnya. Untuk itu perlu di-manage keterkaitan hulu hilirnya (supply chain management).
- 2) Rusaknya struktur ekonomi secara luas berpotensi semua pelaku usaha (besar) bisa mengambil peran pelaku usaha lain. Kabupaten Tegal cukup terkenal dengan khususnya di industri logam dan pengolahan hasil pertanian. Untuk itu industry-industri tersebut harus didorong agar bisa berperan masuk ke sektor ekonomi yang sama yang ditinggalkan oleh industri sejenis di tempat lain yang tidak adaptif bahkan gulung tikar. Atau minimal peran sektor industri lokal tidak diambil oleh pelaku dari luar.
- 3) Perlu dilakukan suatu inovasi dan inkubasi usaha ekonomi yang potensi permintaan pasarnya besar akibat pandemic covid-19 namun supply-nya masih sangat rendah. Untuk itu perlu dilakukan riset pasar yang tepat. Misalnya, adanya potensi industri kesehatan. Tidak cukup hanya menjelaskan bisnis kesehatan saja, tetapi harus lebih fokus misalkan APD, handsanitizer, dll.

Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca covid-19 dilakukan dengan melibatkan potensi APBDesa. Pemerintah Desa akan disinergikan untuk melakukan peran-peran penanganan lanjutan covid-19, pemulihan sosial pasca covid-19, pemulihan ekonomi pasca covid-19 dan transformasi ekonomi wilayah potensial secara serentak dan berkelanjutan sesuai kewenangan masing-masing.



Mendorong pencapaian indikator kinerja makro ekonomi daerah yang mampu mengantisipasi tantangan dan prospek ekonomi Tahun 2021 dalam rangka mewujudkan tujuan utama pembangunan daerah. Adapun sasaran makro pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.11
Tabel Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2021

Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Tegal	Target Sasaran	
	Target Awal	Target Terkoreksi Akibat Covid-19
1. Indeks Reformasi Birokrasi	55,10	55,10
2. Angka Kemiskinan	6,64	7,90
3. Indeks Rasio Gini	0,303	0,303
4. Tingkat Pengangguran Terbuka	7,20%	8,05
5. Pertumbuhan Ekonomi	5,53%	4,9%-5,3%
6. Inflasi	3,0%	± 1,2-4%
7. Indeks Williamson	0,254	0,254
8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,73	68,73
9. Indeks Pembangunan Gender	86,94	86,94
10. Indek Pemberdayaan Gender	69,70	69,70
11. SAKIP	65,61	65,61
12. WTP	WTP	WTP

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, Tahun 2020.

Guna mendukung tercapainya tujuan, sasaran, dan target pembangunan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2021, ditetapkan pagu indikatif program sesuai dengan prioritas, sebagaimana tertuang dalam Tabel 1.12. Target capaian tahun 2021 dilakukan penyesuaian sehubungan dengan proyeksi dampak covid-19 pada tahun 2021.



Tabel 1.12.
Target Pembangunan Daerah Sesuai Dengan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2021

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN 2021	PROGRAM PRIORITAS
1	Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif Melayani Rakyat	Mewujudkan Aparatur Birokrasi yang Profesional		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka; Tahunan	55,10	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen; Tahunan	80,46	Program Pelayanan Capil
							Program pelayanan Dafduk
							Program Peningkatan Layanan pemerintah Kecamatan Adiwerna
							Program Peningkatan Layanan pemerintah Kecamatan Balapulang
							Program Peningkatan Layanan pemerintah Kecamatan Bumijawa
							Program Peningkatan Layanan pemerintah Kecamatan Bojong
							Program Peningkatan Layanan pemerintah Kecamatan Dukuhwaru
		Program Peningkatan Layanan pemerintah Kecamatan Dukuhturi					



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN 2021	PROGRAM PRIORITAS
							Program Peningkatan Layanan pemerintah Kecamatan Kramat
							Program Peningkatan Layanan pemerintah Kecamatan Kedungbanteng
							Program Peningkatan Layanan pemerintah Kecamatan Lebaksiu
							Program Peningkatan Layanan pemerintah Kecamatan Jatinegara
							Program Peningkatan Layanan pemerintah Kecamatan Margasari
							Program Peningkatan Layanan pemerintah Kecamatan Pagerbarang
							Program Peningkatan Layanan pemerintah Kecamatan Pangkah
							Program Peningkatan Layanan pemerintah Kecamatan Suradadi
							Program Peningkatan Layanan pemerintah Kecamatan Slawi
							Program Peningkatan Layanan pemerintah Kecamatan Talang



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN 2021	PROGRAM PRIORITAS
							Program Peningkatan Layanan pemerintah Kecamatan Tarub
							Program Peningkatan Layanan pemerintah Kecamatan Warureja
				SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Skor; Tahunan	3,00	Program Teknologi Informatika dan Persandian
			Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai; Tahunan	65,61	Program perencanaan dan penganggaran program
							Program Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan
							Program Bina Organisasi
							Program Manajemen resiko, tatakelola dan penguatan penengendalian
			Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	Opini; Tahunan	WTP	Program pengawasan intern dan penganan pengaduan masyarakat
							Program pengelolaan BMD
							Program perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan
							Program pendataan dan penetapan
							Program penataan desa
							Program administrasi pemerintahan desa



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN 2021	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Skor; Tahunan	74,24	Program pendidikan dan pelatihan ASN Program pembinaan karir dan penilaian kompetensi ASN
2	Memperkuat Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Andal, Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Indeks Williamson	Persen; Kumulatif	0,254	
				Persentase Infrastruktur Wilayah Mantap	Persen; Tahunan	69,24	Program jalan
				Persentase Infrastruktur Permukiman Layak	Persen; Tahunan	91,65	Program jembatan Program tata perumahan dan permukiman Program tingkat pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun(B3)
			Meningkatnya Sistem Jaringan / Konektivitas Perhubungan	Rasio Konektivitas Perhubungan	Skor; Tahunan	58,24	Program lalu lintas Program angkutan
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen; Tahunan	64,78	
			Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen; Tahunan	74,00	Program pengendalian kualitas lingkungan hidup Program peningkatan kapasitas dan pengawasan lingkungan hidup
		3	Membangun Perekonomian Rakyat	Mewujudkan Perekonomian Rakyat		Pertumbuhan Ekonomi	Persen; Tahunan



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN 2021	PROGRAM PRIORITAS		
	yang Kokoh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan	yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat di Sektor Pertanian dan Perikanan	Laju PDRB Sektor Pertanian	Persen; Tahunan	0,6	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian		
							Program Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura		
				Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persen; Tahunan	122,66	Program Perikanan Tangkap		
									Program Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan
			Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat di Sektor Industri Pengolahan	Laju PDRB Sektor Industri	Persen; tahunan	4,65	Program industri logam		
							Program Agro		
			Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Jumlah; Tahunan	687	Program Pemasaran dan pengembangan produk wisata		
				Jumlah Wisatawan Nusantara	Jumlah; Tahunan		1.252.687	Program objek dan sarana wisata	
Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat di Sektor Perdagangan	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Persen; Tahunan	6,09	Program perdagangan					
				Program pengelolaan pasar					
4	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penguatan Layanan Bidang	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas		Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai; Tahunan	68,73			



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN 2021	PROGRAM PRIORITAS
	Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi			Indeks pemberdayaan Gender (IDG)	Persen; Tahunan	69,70	
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen; Tahunan	86,94	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun; Tahunan	6,77	Program pendidikan dasar
				Harapan Lama Sekolah	Tahun; Tahunan	12,40	Program pembinaan pendidikan anak usia dini dan non formal informal
			Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun; Tahunan	71,24	Program kesehatan masyarakat
							Program Yankes
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	Indeks pemberdayaan Gender (IDG)	Persen; Tahunan	69,70	Program pemberdayaan perempuan
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen; Tahunan	86,94	
			Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	Rasio; Tahunan	2,40	Program Keluarga Berencana
			Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga	Kota Layak Pemuda	Level; Tahunan	proses	Program pemuda dan olahraga
				Jumlah Prestasi Olahraga tingkat Provinsi/ Nasional	Kali; Tahunan	7,00	



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN 2021	PROGRAM PRIORITAS
		Menurunkan Kesenjangan Kemiskinan	Menurunkan Angka Kemiskinan	Indeks Gini	Persen; Tahunan	0,303	
				Persentase penduduk miskin	Persen; Tahunan	7,90	Program rehabilitasi sosial
							Program pemberdayaan
			Program perlindungan dan jaminan sosial				
			Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen; Tahunan	8,45	Program penanganan fakir miskin
							Program pengembangan desa
Program Kemasyarakatan desa							
5	Menciptakan Tata Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, Tenang dan Nyaman dengan Tetap Menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya serta Kearifan Lokal	Mewujudkan kerukunan hidup dalam masyarakat		Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen; Tahunan	84,66	
Meningkatnya Kerukunan Hidup Masyarakat			Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen; Tahunan	84,66	Program Penegakan Perundang-undangan Daerah	
						Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	
						Program Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran	
Program Kesbangpol							



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN 2021	PROGRAM PRIORITAS
		Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana		Indeks Risiko Bencana	Angka; Tahunan	177,71	
			Meningkatnya kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Angka; Tahunan	0,72	Program pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana Program penanganan kedaruratan, peralatan dan logistik bencana Program peningkatan rehabilitasi dan rekontruksi paska bencana
		Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Indeks Kebudayaan	Indeks; tahunan	64,73	
				Persentase Cagar Budaya (<i>Tangible dan Intangible</i>) Dilestarikan	Indeks; tahunan	24,50	Program kebudayaan

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, Tahun 2020.



1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah menimbulkan berbagai permasalahan di daerah. Kemampuan daerah, baik dari sumber daya aparatur, kelembagaan maupun keuangan, masih relative terbatas. Ketidakmerataan kemampuan daerah juga menyebabkan kesenjangan antar daerah dalam melaksanakan urusan-urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Permasalahan tersebut membuat Pemerintah Pusat merasa perlu untuk menyusun satu standar baku pelaksanaan urusan wajib dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Maka disusunlah Standar Pelayanan Minimal yang menjadi tolok ukur pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan wajib dasar yaitu Pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, pekerjaan umum, social dan trantibumlinmas. Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang didapatkan oleh warga negara secara minimal. SPM ini berisi indikator-indikator yang menjadi panduan daerah dalam melaksanakan pelayanan dasar secara minimal kepada warga negara.

Penerapan SPM di daerah, harus direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan pelaksanaannya kepada Pemerintah Pusat. Sehingga dalam laporan Penerapan SPM ini berisi rencana penerapan SPM, realisasi pelaksanaannya, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta tindak lanjut dari pemerintah daerah dalam mengantisipasi kendala agar tidak terjadi di tahun mendatang.

a. Dasar Penerapan SPM

Dasar hukum pelaksanaan penerapan SPM di Kabupaten Tegal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberap kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;



16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

b. Kebijakan Umum SPM dalam RPJMD

Guna menindaklanjuti Peraturan Perundang-undangan tentang Standar Pelayanan Minimal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Selanjutnya SPM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024. Sehingga dokumen-dokumen perencanaan turunan dari RPJMD juga telah memuat program kegiatan dan rencana anggaran penerapan SPM, dari mulai Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) hingga Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD).

c. Arah Kebijakan

Dalam RPJMD, SPM menjadi salah satu dokumen yang menjadi referensi. Pada Bab I Pendahuluan Rencana Pemangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) digambarkan keterkaitan antar dokumen, salah satunya SPM. SPM menjadi referensi dalam penyusunan indikator program dan indikator sasaran. Program-program pada Perangkat Daerah Wajib Pelayanan Dasar diarahkan selaras dengan SPM atau menuju pencapaian indikator SPM. Sehingga 6 jenis urusan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota telah diakomodir dalam RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 sejalan dan selaras dengan dokumen perencanaan strategis dan sektoral lainnya, baik nasional, maupun provinsi. Dokumen RPJMD disusun dengan mempedomani RPJPD dan RPJMN, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, dan RTRW Kabupaten Tegal. Sekaligus terkait dengan KLHS



yang mengintegrasikan didalamnya pelaksanaan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (SDGs), dan beberapa regulasi pusat lainnya (seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).

Gambar 1.6
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Sumber dan Ilustrasi : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal

RPJMD yang disusun akan menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan dijabarkan tiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen RKPD akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA/PPAS untuk menyusun Rancangan APBD setiap tahunnya, serta menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).



Tabel 1.13

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024

TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
Tema/Fokus: Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui efektifitas pelayanan publik didukung penyediaan infrastruktur yang mantap dan penguatan daya saing ekonomi daerah	Tema/Fokus: Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang didukung infrastruktur dan pelayanan publik yang berkualitas dengan memperhatikan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial	Tema/Fokus: Penguatan dan Transformasi Sosial-ekonomi dan pemerataan infrastruktur yang didukung SDM pemerintahan yang professional	Tema/Fokus: Pengembangan Infrastruktur ekonomi, budaya, dan lingkungan hidup yang nyaman	Tema/Fokus: Kabupaten Tegal yang lebih sejahtera dan berbudaya
Arah Kebijakan: 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Arah Kebijakan: 1. Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektifitas pembangunan yang inovatif dan berbasis TIK 2. Perluasan akses infrakstruktur dasar dan konektivitas wilayah serta peningkatan kualitas lingkungan hidup	Arah Kebijakan: 1. Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektifitas pembangunan yang inovatif dan berbasis TIK 2. Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah serta peningkatan kualitas lingkungan hidup	Arah Kebijakan: 1. Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektifitas pembangunan yang inovatif dan berbasis TIK 2. Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah serta peningkatan kualitas lingkungan hidup	Arah Kebijakan: 1. Penguatan kualitas layanan pemerintah dan efektifitas pembangunan yang inovatif dan berbasis TIK 2. Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah serta peningkatan kualitas lingkungan hidup



TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas pelayanan publik	3. Pemulihan dan transformasi sector pertanian, perdagangan, industry, koperasi dan UKM, pariwisata dan iklim investasi	3. Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan, industry, koperasi dan UKM, pariwisata dan iklim investasi ramah lingkungan	3. Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan, industry, koperasi dan UKM, pariwisata, dan iklim investasi ramah lingkungan	3. Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan, industry, koperasi dan UKM, pariwisata, dan iklim investasi ramah lingkungan
4. Peningkatan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan	4. Penguatan mutu dan transformasi Pendidikan dan kesehatan era tatanan baru	4. Penguatan mutu dan transformasi Pendidikan dan kesehatan era tatanan baru	4. Penguatan mutu dan transformasi Pendidikan dan kesehatan era tatanan baru	4. Penguatan mutu dan transformasi Pendidikan dan kesehatan era tatanan baru
5. Peningkatan daya saing ekonomi lokal, ketahanan pangan dan pengembangan industri kreatif	5. Peningkatan produktifitas pemuda dan olahraga berbasis gender	5. Peningkatan produktifitas pemuda dan olahraga berbasis gender	5. Peningkatan produktifitas pemuda dan olahraga berbasis gender	5. Peningkatan produktifitas pemuda dan olahraga berbasis gender
6. Pengembangan potensi pariwisata dan penumbuhan destinasi wisata desa	6. Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan jaminan social serta pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin	6. Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan jaminan social serta pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin	6. Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan jaminan social serta pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin	6. Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan jaminan social serta pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin
	7. Peningkatan Kompetensi Angkatan	7. Peningkatan Kompetensi Angkatan	7. Peningkatan Kompetensi Angkatan	7. Peningkatan Kompetensi Angkatan



TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
	Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja	Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja	Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja	Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja
			8. Peningkatan kualitas keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat	8. Peningkatan kualitas keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat
			9. Optimalisasi pelestarian budaya dan kearifan lokal	9. Optimalisasi pelestarian budaya dan kearifan lokal



BAB II
CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Makro Kabupaten Tegal Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja 2020	Capaian Kinerja 2021	Perubahan (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	68,39	68,79	0,585
2.	Angka Kemiskinan	8,14%	8,60%	5,651
3.	Angka Pengangguran	9,82%	9,97%	1,527
4.	Pertumbuhan Ekonomi	-1,48%	3,72%	351,351
5.	Pendapatan Perkapita	Rp 22,15 jt	Rp 23,21jt	4,786
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	-	-	-

Sumber : BPS Kabupaten Tegal 2021

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indeks komposit yang memberikan gambaran secara komprehensif tingkat capaian pembangunan manusia sebagai dampak dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. IPM tersusun dari tiga dimensi pembangunan manusia, yaitu dimensi kesehatan, dimensi pengetahuan, dan dimensi perekonomian. Ketiga dimensi tersebut dianggap mampu menggambarkan pembangunan manusia di suatu daerah. Oleh karena itu perkembangan ketiga dimensi tersebut sangat mempengaruhi perkembangan IPM suatu daerah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tegal tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Kabupaten Tegal tahun 2021 adalah sebesar 68,79 atau tumbuh 0,58 persen (meningkat 0,40 poin) dibandingkan capaian tahun 2020.

Peningkatan IPM Kabupaten Tegal tahun 2021 didukung oleh peningkatan disemua komponen penyusunnya. Hal ini berbeda dengan kondisi sebelumnya. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 telah



menyebabkan perlambatan pertumbuhan IPM yang disebabkan oleh penurunan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita telah merangkak naik 0,92 persen dibanding tahun 2020.

Dari sisi pendidikan, anak-anak di Kabupaten Tegal yang berusia 7 tahun pada tahun 2021, memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,89 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat SMA atau Diploma I. Angka ini meningkat cukup tajam yaitu 1,74 persen atau naik 0,22 tahun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 12,67 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,01 tahun, dari 6,98 tahun menjadi 6,99 tahun pada tahun 2021.

Dari sisi kesehatan, bayi di Kabupaten Tegal yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,72 tahun, lebih lama 0,12 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Tabel 2. 2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tegal Menurut Komponen 2017 - 2021

Komponen	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Umur Harapan Hidup saat lahir(UHH)	Tahun	71,14	71,28	71,4	71,6	71,72
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,06	12,34	12,58	12,67	12,89
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,55	6,7	6,86	6,98	6,99
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Rp 000	9.136	9.433	9.798	9.612	9.700
IPM		66,44	67,33	68,24	68,39	68,79
Selisih	poin	0,60	0,89	0,91	0,15	0,40
Pertumbuhan IPM	%	0,91	1,34	1,35	0,22	0,58

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2021



b. Angka Kemiskinan

Untuk mengukur tingkat kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Ekonomi Kabupaten Tegal pada 2020 masih mengalami kontraksi sebesar 1,46 persen. Semua sektor ekonomi berkontraksi, namun sektor pertanian masih dapat tumbuh positif di tahun 2020. Tidak dapat dipungkiri dampak ekonomi yang disebabkan Pandemi Covid-19 masih terasa sampai awal tahun 2021.

Pandemi Covid-19 memukul industri di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Belasan perusahaan berhenti beroperasi dan merumahkan karyawannya. Pada awal tahun 2021 terdapat 11 perusahaan yang berhenti beroperasi karena terdampak pandemi Covid-19. Informasi dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, pekerja yang dirumahkan dari 11 perusahaan di Kabupaten Tegal yang berhenti beroperasi jumlahnya lebih dari 1000 orang. Dan jumlah pekerja yang terdampak itu kemungkinan masih bisa bertambah.

Informasi dari salah satu konsultan pendamping UMKM, UMKM di Kabupaten Tegal kebanyakan mengurangi produksi dan merumahkan karyawan. Mereka terus berjuang menghadapi tantangan ekonomi di saat pandemi wabah Corona.

Bantuan sosial pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat membantu penduduk pada masa pandemi, terutama penduduk pada lapisan bawah. Namun pada awal 2021, Dinas Sosial Kabupaten Tegal menanggukkan penyaluran 1011 bansos tidak tepat sasaran. Adanya indikasi kelalaian petugas operator desa yang memasukkan dan mengunggah data warganya tanpa melalui Musdes, Dinsos juga menengarai jarak waktu pengumpulan data tambahan calon penerima BST dari Kemensos yang sangat terbatas menjadi juga menjadi salah satu penyebabnya.

Adanya aturan pembatasan wilayah, menyebabkan banyak pedagang di obyek wisata dan supir angkutan dalam kota yang menganggur.



Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Tegal di awal tahun 2021 mengakibatkan air Sungai Rambut dan Logeni meluap. Akibatnya, ribuan rumah warga di sejumlah desa di jalur Pantura di dua kecamatan, yakni Kecamatan Warureja dan Jatinegara kebanjiran. Awal tahun juga terjadi bencana tanah longsor yang menyebabkan jalan masuk obyek wisata Guci amblas walaupun masih bisa dilalui tapi terjadi kemcatan yang parah. Jalur distribusi pangan terganggu. Akibatnya kunjungan di obyek wisata berkurang dan harga beberapa komoditas juga merangkak naik di awal tahun 2021.

c. Angka Pengangguran

Pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif dalam empat minggu terakhir untuk mencari pekerjaan (Kaufman dan Hotchkiss,1999). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan (www.bps.go.id), pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut (Sukirno, 2004). Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur.

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya usia penduduk produktif di Kabupaten Tegal. Penduduk usia kerja pada Agustus 2021 tercatat sebanyak 1.080.674 orang, naik sebanyak 0,5 persen dibanding pada Agustus 2020. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 66,24 persen, sedangkan sisanya termasuk bukan angkatan kerja.

Angkatan kerja mencerminkan jumlah penduduk yang secara aktual siap memberikan kontribusi terhadap produksi barang dan jasa di suatu wilayah/negara. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Tegal pada Agustus 2021 sebanyak 715.845 orang, bertambah sebanyak 621 orang dibanding pada Agustus 2020. Komponen pembentuk Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Penduduk yang bekerja pada Agustus



2021 sebanyak 644.499 orang, berkurang sebanyak 479 orang dibanding setahun yang lalu. Sementara itu, jumlah pengangguran sebanyak 71.346 orang, mengalami kenaikan sekitar 1.100 orang dibanding setahun yang lalu.

Tabel 2.3
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja
Agustus 2020 – Agustus 2021

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2020 Orang	Agustus 2021 Orang	Perubahan Persen
Penduduk Usia Kerja	1.075.255	1.080.674	0,50
Angkatan Kerja	715.224	715.845	0,09
- Bekerja	644.978	644.499	-0,07
- Pengangguran	70.246	71.346	1,57
Bukan Angkatan Kerja	360.031	364.829	1,33
	Persen	Persen	Persen Poin
Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT)	9,82	9,97	0,15
- Laki-laki	12,00	12,20	0,20
- Perempuan	6,42	6,74	0,32
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(TPAK)	66,52	66,24	-0,28
- Laki-laki	82,24	79,39	-2,85
- Perempuan	51,25	53,46	2,21

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2021

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT pada Agustus 2020 sebesar 9,82 persen naik menjadi 9,97 persen pada Agustus 2021. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 10 orang pengangguran.

Bila dicermati menurut tingkat pendidikan, pada Agustus 2021, TPT dengan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tercatat paling tinggi, yaitu sebesar 25,17 persen. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang berlebih terutama pada tingkat pendidikan SMK. TPT tertinggi berikutnya dicatat oleh tamatan Perguruan Tinggi sebesar 17,12 persen. TPT SD ke bawah menjadi yang paling kecil di antara semua tingkat pendidikan, yaitu sebesar 5,77 persen. Mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau



menerima pekerjaan apa saja. Sebaliknya dengan pendidikan yang lebih tinggi memilih bertahan agar mendapatkan pekerjaan sesuai dengan pendidikan, harapan/keinginan dan upah yang lebih layak sehingga secara makro ada peningkatan angka TPT.

Penduduk usia kerja yang sedang atau pernah bekerja dan terdampak Covid-19 dikelompokkan menjadi empat komponen, yaitu mereka yang menjadi :

a) Pengangguran Karena Covid-19; b) Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena Covid-19; c) Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19; dan d) Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena Covid-19. Kondisi a) dan b) merupakan dampak pandemi Covid-19 pada mereka yang berhenti bekerja, sedangkan kondisi c) dan d) merupakan dampak pandemi Covid-19 yang dialami oleh mereka yang saat ini masih/sedang bekerja.

Tabel 2.4
Dampak Covid-19 terhadap Ketenagakerjaan, Agustus 2020 - Agustus 2021

Dampak Covid-19 Terhadap Ketenagakerjaan	Agustus 2020	Agustus 2021	Perubahan Agustus 2020 – Agustus 2021	
	orang	orang	orang	persen
Penganggur karena pandemi COVID-19	25.955	25.022	-933	-3,59
BAK karena pandemi COVID-19	6.467	3.680	-2.787	-43,10
Sementara tak Bekerja karena pandemi COVID-19	6.728	10.857	4.129	61,37
Pengurangan jam kerja karena pandemi COVID-19	122.309	92.435	-29.874	-24,43
Total	161.459	131.994	-29.465	-18,25
Penduduk Usia Kerja (PUK)	1.075.255	1.080.674	5.419	0,50
Persentase PUK terdampak Covid-19	15,02	12,21	-2,80	-18,66

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2021

Keterangan:

1. Pengangguran Karena Covid-19 adalah penganggur yang pernah berhenti bekerja karena Covid-19 sejak Agustus 2020
2. Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena Covid-19 adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja dan pernah berhenti bekerja karena Covid-19 sejak Agustus 2020
3. Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19 adalah penduduk yang pernah bekerja namun karena Covid-19 menjadi sementara tidak bekerja

Pada Tabel 2.4 dapat dilihat bahwa penduduk yang sedang/pernah bekerja dan terdampak Covid-19 pada Agustus 2021 sebanyak 131.994 orang, berkurang sebanyak 29.465 orang atau sebesar 18,25 persen dibandingkan dengan yang tercatat pada Agustus 2020. Komposisi kelompok



penduduk yang terdampak Covid-19 terdiri dari 25.022 orang pengangguran karena Covid-19; 3.680 orang Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19; 10.857 orang sementara tidak bekerja karena Covid-19, dan 92.435 orang penduduk yang bekerja namun mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19. Dari keempat komponen tersebut, tiga komponen mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2020. Pengurangan terbanyak ditempati oleh penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19, yaitu 29.874 orang. Diikuti oleh pengurangan pada komponen Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 sebanyak 2.787 orang dan pengurangan pengangguran karena Covid-19 sebanyak 933. Namun sebaliknya jumlah penduduk yang pernah bekerja namun karena Covid-19 menjadi sementara tidak bekerja mengalami kenaikan sebanyak 4.129 orang

d. Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian Kabupaten Tegal tahun 2021 mengalami pemulihan sejak dimulainya pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal 2020. Hal ini ditandai dengan arah pertumbuhan yang positif. Peningkatan kondisi ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB atas dasar harga Berlaku (ADHB) dan atas dasar harga Konstan (ADHK), serta pertumbuhan pada total PDRB.

Peningkatan nilai PDRB dipengaruhi oleh adanya perubahan harga pada tingkat konsumen dan juga perubahan volume konsumsi berdasarkan perubahan pada nilai PDRB ADHB yaitu dari Rp35.300.027,84 Juta pada tahun 2020 menjadi Rp 37.335.993,58 Juta pada tahun 2021.

Selain dinilai ADH Berlaku, PDRB juga dinilai ADH Konstan 2010 yang menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, tanpa ada pengaruh perubahan harga dimana pada tahun 2020 sebesar Rp 24.492.665,57 Juta yang meningkat menjadi Rp25.402.911,06 Juta di tahun 2021. Oleh karena itu, terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,72 % pada tahun 2021 jika dibandingkan tahun sebelumnya.

e. Pendapatan Perkapita

Besarnya pendapatan yang diterima rumah tangga dapat menggambarkan kesejahteraan suatu masyarakat. Untuk mengetahui tingkat



kesejahteraan masyarakat suatu daerah secara umum maka kita menghitung Pendapatan Perkapita yang dihitung dari Pendapatan Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dibagi dengan total penduduk pertengahan tahun.

Pada tahun 2020 pendapatan perkapita Kabupaten Tegal adalah 22,15 juta rupiah sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 23,21 juta rupiah.

f. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan merupakan sebuah realita yang ada ditengah-tengah masyarakat baik di negara maju maupun negara berkembang, dan masih menjadi isu penting untuk diatasi.

Pembangunan dapat dipandang sebagai suatu proses yang hasilnya bersifat multi dimensional, yang mencakup berbagai perubahan atas struktur social, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi pemerintahan dan masyarakat. Disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan diperlukan. Masalah ketimpangan perlu menjadi focus utama dalam menetapkan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Proses perbaikan kualitas kesejahteraan ekonomi penduduk diharapkan diikuti dengan perbaikan kualitas penduduk secara utuh.



2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Tabel 2.5

No	Urusan	NO IKK	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1	Pendidikan	PENDIDIKAN PAUD				
		1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	464	Dikbud	
		2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Dikbud	
		3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	Dikbud	
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	2260	Dikbud	
		5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	2407	Dikbud	
		6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	1050	Dikbud	
		7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	628	Dikbud	
		PENDIDIKAN DASAR				



1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	658	Dikbud	
2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	158450	Dikbud	
3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	149133	Dikbud	
4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	158450	Dikbud	
5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	149133	Dikbud	
6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	6277	Dikbud	
7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	3928	Dikbud	
8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	8014	Dikbud	
9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	5217	Dikbud	
10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1732	Dikbud	
11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1312	Dikbud	
12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1461	Dikbud	
13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	747	Dikbud	
14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	7581	Dikbud	



15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	4172	Dikbud	
16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	866	Dikbud	
17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	191	Dikbud	
18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	1161	Dikbud	
19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	730	Dikbud	
PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA				
1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	54	Dikbud	
2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	158450	Dikbud	
3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	149133	Dikbud	
4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	158450	Dikbud	
5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	149133	Dikbud	



6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	6277	Dikbud	
7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	3928	Dikbud	
8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	8014	Dikbud	
9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	5217	Dikbud	
10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1723	Dikbud	
11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1312	Dikbud	
12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1461	Dikbud	
13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	747	Dikbud	
14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	7581	Dikbud	
15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	4172	Dikbud	
16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	866	Dikbud	
17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1,sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	191	Dikbud	
18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	1161	Dikbud	



		19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	730	Dikbud		
		PENDIDIKAN KESETARAAN				Dikbud	
		1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	25	Dikbud		
		2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	6065	Dikbud		
		3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	6065	Dikbud		
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	221	Dikbud		
		5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	236	Dikbud		
		6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	188	Dikbud		
		7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	17	Dikbud		
		8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	17	Dikbud		
2	Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan					
		1	Jumlah RS Rujukan kabupaten yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	9	Dinkes		
		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Yang Terakreditasi					
		1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	9	Dinkes		



1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1	Dinkes	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	1360	Dinkes	
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1	Dinkes	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	1360	Dinkes	
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1	Dinkes	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	1361	Dinkes	
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1	Dinkes	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	1404	Dinkes	
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1	Dinkes	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	0	Dinkes	
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1	Dinkes	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1447	Dinkes	
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1	Dinkes	



2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1447	Dinkes	
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1	Dinkes	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1401	Dinkes	
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1	Dinkes	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1447	Dinkes	
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1	Dinkes	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	58	Dinkes	
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1	Dinkes	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1405	Dinkes	
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten				
1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten (ha)	21182,25	Dinas Perkimtaru	



2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten (m)	0,00	Dinas Perkimtaru	
3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kab (ha)	1400000,00	Dinas Perkimtaru	
4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten (m)	0,00	Dinas Perkimtaru	
5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kota	Tidak Ada	Dinas PU	
6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten	Ada	Dinas PU	
7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten	0,00	Dinas Perkimtaru	
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten				
1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten (ha)	21182,25	Dinas Perkimtaru	
2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten (m)	0,00	Dinas Perkimtaru	
3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kab (ha)	1400000,00	Dinas Perkimtaru	
4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten (m)	0,00	Dinas Perkimtaru	
5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten	Tidak Ada	Dinas PU	
6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten	Ada	Dinas PU	
7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten	0,00	Dinas Perkimtaru	
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi				



1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	0	DPU	
2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	60,27	DPU	
3	Persentase panjang jaringan irigasi Tersier dalam kondisi baik		DPU	
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten				
1	Pemenuhan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) kabupaten	0,00	Dinas Perkimtaru	
2	Tersusun dan ditetapkannya Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) kabupaten	0,00	Dinas Perkimtaru	
0	Jumlah BUMD dan atau UPTD kabupaten penyelenggaraan SPAM	0,00	Dinas Perkimtaru	
4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	0,00	Dinas Perkimtaru	
5	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	0,00	Dinas Perkimtaru	
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik				
1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	362913,00	Dinas Perkimtaru	
2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	1147,00	Dinas Perkimtaru	
3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	364060,00	Dinas Perkimtaru	
4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	942	DLH	



5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	942	DLH	
6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	942	DLH	
7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	13,06268957	Dinas Perkimtaru	
8	Kinerja penyediaan pelayanan SPADL S akses aman	0	Dinas Perkimtaru	
9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	0	Dinas Perkimtaru	
10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	194,1365273	Dinas Perkimtaru	
11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	2	Dinas Perkimtaru	
		3		
12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	23.500	Dinas Perkimtaru	
		30.000		
13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	0,569112145	Dinas Perkimtaru	
14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	942	Dinas Perkimtaru	
Rasio kepatuhan IMB Kabupaten				
1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	49,85337243	Dinas Perkimtaru	
			Dinas Perkimtaru	
2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dalam tahun eksisting	1618	Dinas Perkimtaru	



3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	100	Dinas Perkimtaru	
4	Penetapan Keputusan Bupati tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	0	Dinas Perkimtaru	
5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk dilindungi dan dilestarikan	33	Dinas Perkimtaru	
6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk kepentingan strategis daerah kabupaten	0	Dinas Perkimtaru	
7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kabupaten	2677	Dinas Perkimtaru	
8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten yang dipelihara/dirawat	2677	Dinas Perkimtaru	
Rasio kemantapan jalan				
1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kabupaten	847,27	DPU	
2	Panjang jalan yang dibangun	0,00	DPU	
3	Panjang jembatan yg dibangun	0,00	DPU	
4	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	71,02	DPU	
5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	69,00	DPU	
6	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	0,00	DPU	
7	Panjang jembatan yang direhabilitasi	54,30	DPU	
8	Panjang jalan yang dipelihara	126,15	DPU	
9	Panjang jembatan yang dipelihara	3262,20	DPU	
Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi				
1	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten	0	DPU	
2	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten	2	DPU	
3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten	711	DPU	



4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan kabupaten yang aktif dengan data termutakhir	Tidak	DPU	
5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD kabupaten	100	DPU	
6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Ada	DPU	
7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tidak	DPU	
8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada	DPU	
9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten	Ada	DPU	
10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Tidak	DPU	
11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	711	DPU	
12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/ analisis di wilayah kabupaten	711	DPU	
13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten	125	DPU	



14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	125	DPU	
15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	DPU	
16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	DPU	
17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	DPU	
18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kabupaten	173	DPU	
19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten	Tidak	DPU	
20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kabupaten	219	DPU	
21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kabupaten	125	DPU	
22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	123	DPU	
23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	2	DPU	
24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak	DPU	



		25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	DPU	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten				
		1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	0,00	Dinas Perkimtaru	
		2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0,00	Dinas Perkimtaru	
		3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0,00	Dinas Perkimtaru	
		4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0,00	Dinas Perkimtaru	
		5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0,00	Dinas Perkimtaru	
		6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0,00	Dinas Perkimtaru	
		7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0,00	Dinas Perkimtaru	
		8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0,00	Dinas Perkimtaru	
		9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0,00	Dinas Perkimtaru	
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten				
		1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0,00	Dinas Perkimtaru	
		2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0,00	Dinas Perkimtaru	
		3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0,00	Dinas Perkimtaru	



4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0,00	Dinas Perkimtaru	
5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0,00	Dinas Perkimtaru	
6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0,00	Dinas Perkimtaru	
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani				
1	Jumlah luasan (ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	58,16	Dinas Perkimtaru	
2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	6089,00	Dinas Perkimtaru	
3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastrukur kawasan kumuh	13658,00	Dinas Perkimtaru	
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)				
1	Jumlah rumah di kabupaten	388479,00	Dinas Perkimtaru	
2	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	6089,00	Dinas Perkimtaru	
3	Jumlah rumah tidak layak huni	42675,00	Dinas Perkimtaru	
4	Jumlah rumah yang tidak dihuni	36586,00	Dinas Perkimtaru	
5	Rasio rumah dan KK	138,5107046	Dinas Perkimtaru	
			Dinas Perkimtaru	
6	Jumlah rumah pembangunan baru	1226,00	Dinas Perkimtaru	
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)				
1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	131,00	Dinas Perkimtaru	
2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	276198,00	Dinas Perkimtaru	
3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	16633,00	Dinas Perkimtaru	
4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	363927,00	Dinas Perkimtaru	



		5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0,00	Dinas Perkimtaru		
		6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	0,00	Dinas Perkimtaru		
		7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0,00	Dinas Perkimtaru		
		8	Jumlah pengembang yang terregistrasi	0,00	Dinas Perkimtaru		
		9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0,00	Dinas Perkimtaru		
5	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan					
1		Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kabupaten yang ditangani	11	Satpol			
2		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	576	Satpol			
3		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	9	Satpol			
4		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	2	Satpol			
5		Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Ada	Satpol			
6		Tersedianya sarana prasarana minimal	Ada	Satpol			
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana							
1		Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	75,00%	BPBD			
2		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	68,42%	BPBD			



Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				
1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	75,00%	BPBD	
2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100,00%	BPBD	
3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	0,21%	BPBD	
4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	1,45%	BPBD	
5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	68,42%	BPBD	
6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	0,65%	BPBD	
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				
1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100,00%		



2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100,00%	BPBD	
3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	50,78%	BPBD	
4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	21,06%	BPBD	
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				
1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten	89	Satpol	
2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	4	Satpol	
3	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	40	Satpol	
4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	0	Satpol	
5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	5 mobil,10 APAR	Satpol	



		6	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	1	Satpol		
		7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	0	Satpol		
		8	Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	0	Satpol		
		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti					
		1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	13	Dinsos		
		2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	754.	Dinsos		
		3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	7	Dinsos		
		4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	2228	Dinsos		
		5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	3	Dinsos		
		6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	1036	Dinsos		
		7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1	Dinsos		
		8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	258	Dinsos		
6	Sosial						



9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	87	Dinsos	
10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	1	Dinsos	
11	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	2	Dinsos	
12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	118	Dinsos	
13	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	-	Dinsos	
14	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	276	Dinsos	
15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, rumah singgah/ shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	234	Dinsos	
16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	210	Dinsos	
17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	69	Dinsos	
18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	41	Dinsos	
19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	48	Dinsos	



	20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	48	Dinsos	
	21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	79	Dinsos	
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten				
	1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	0,00	Dinsos	
	2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	0,00	Dinsos	
	3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0,00	Dinsos	
	4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0,00	Dinsos	
	5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0,00	Dinsos	
	6	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	0,00	Dinsos	
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja				
	1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten	Ada	Dinsos	
	2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	55,56	Dinsos	
	3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten	2558,00	Dinsos	
	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi				
	1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	0	Dinas Perinaker	
	2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	100	Dinas Perinaker	
7	Tenaga Kerja				



3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	4,44	Dinas Perinaker	
4	Persentase LPK yang terakreditasi	0,00	Dinas Perinaker	
5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	0,00	Dinas Perinaker	
6	Jumah penganggur yang dilatih	248,00	Dinas Perinaker	
7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100	Dinas Perinaker	
8	Persentase penyerapan lulusan	0	Dinas Perinaker	
9	Lulusan bersertifikat kompetensi	0	Dinas Perinaker	
10	Jumlah calon pekerja migran Indonesia (CPMI)/ calon tenaga kerja indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	surat keterangan	Dinas Perinaker	
11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia(CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	surat keterangan	Dinas Perinaker	
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja				
1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0	Dinas Perinaker	



2	Data tingkat produktivitas total	0,00	Dinas Perinaker	
Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)				
1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	40,08	Dinas Perinaker	
2	Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	#DIV/0!	Dinas Perinaker	
3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	0,00	Dinas Perinaker	
4	Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	9,95	Dinas Perinaker	
5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	100,00	Dinas Perinaker	
6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	0,27	Dinas Perinaker	
7	Jumlah mogok kerja	0,00	Dinas Perinaker	
8	Jumlah penutupan perusahaan	4,00	Dinas Perinaker	



9	Jumlah perselisihan kepentingan	surat keterangan	Dinas Perinaker	
10	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	surat keterangan	Dinas Perinaker	
11	Jumlah perselisihan PHK	7,00	Dinas Perinaker	
12	Jumlah pekerja/buruh ter-PHK	328,00	Dinas Perinaker	
13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit	1,00	Dinas Perinaker	
14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten yang diberdayakan	surat keterangan	Dinas Perinaker	
15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	0	Dinas Perinaker	
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten				
1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten	8783,00	Dinas Perinaker	
2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kabupaten	20000,00	Dinas Perinaker	
3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kabupaten	0,00	Dinas Perinaker	
4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten	0,00	Dinas Perinaker	
5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	1,00	Dinas Perinaker	
6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kabupaten	0,00	Dinas Perinaker	
7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kabupaten	241,00	Dinas Perinaker	
8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	13221,00	Dinas Perinaker	



		9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	surat keterangan	Dinas Perinaker		
		10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	0,00	Dinas Perinaker		
		11	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi kepulangan	surat keterangan	Dinas Perinaker Dinas Perinaker		
		12	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan diklat kerja	surat keterangan	Dinas Perinaker Dinas Perinaker		
		13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	surat keterangan	Dinas Perinaker Dinas Perinaker		
		14	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	surat keterangan	Dinas Perinaker Dinas Perinaker		
				Persentase ARG pada belanja langsung APBD			
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten yang telah dilatih PUG	45	Dinas P3AP2KB		
		2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten	1	Dinas P3AP2KB		
				Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten			
		1	Jumlah media massa (cetak,elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	4	Dinas P3AP2KB		
		2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	22	Dinas P3AP2KB		
		3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	Dinas P3AP2KB		



		4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	22	Dinas P3AP2KB		
		5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Kabupaten (APBD kabupaten)	12	Dinas P3AP2KB		
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)					
		1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten yang mendapatkan pelatihan	19	Dinas P3AP2KB		
		2	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten yang sudah dilatih	19	Dinas P3AP2KB		
		3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	1	Dinas P3AP2KB		
		4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten	1	Dinas P3AP2KB		
		5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1	Dinas P3AP2KB		
		6	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	1	Dinas P3AP2KB		
		7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	Dinas P3AP2KB		
		Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)					
9	Pangan	1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada	Dinas Tan KP		
		2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada	Dinas Tan KP		
		3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak Ada	Dinas Tan KP		



		4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada	Dinas Tan KP		
		5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	Dinas Tan KP		
		6	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada	Dinas Tan KP		
		7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada	Dinas Tan KP		
		8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada	Dinas Tan KP		
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan					
		1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati	100	DPMPST		
		2	SK Bupati tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0	Dinas Perkimtaru		
		3	SK Bupati tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	0	Dinas Perkimtaru		
		4	Dokumen Izin membuka tanah	0	Dinas Perkimtaru		
		5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten	0	Dinas Perkimtaru		
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten					
		1	Hasil Perhitungan kota terhadap :	60,67	DLH		
			a) Indeks Kualitas Air,(IKA)	16,58	DLH		



		b) Indeks Kualitas Udara (IKU)	34,48	DLH	
		c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	9,61	DLH	
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kota			
		1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten	80,04	DLH
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten			
		1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	100,00	DLH
		2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kota	-	DLH
		3	Penetapan hak MHA (Masyarakat Hukum Adat) terkait dengan PPLH yang berada di Pemerintah Kabupaten	Nihil	DLH
		4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Nihil	DLH
		5	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	100,00	DLH
		6	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kota yang ditangani	100,00	DLH
		Perekaman KTP Elektronik			
12	Administrasi Kependudukan	1	Penerbitan akta perkawinan	100	Dinas Dukcapil



	dan Catatan Sipil						
		2	Penerbitan akta perceraian	100	Dinas Dukcapil		
		3	Penerbitan akta kematian	68,23	Dinas Dukcapil		
		4	Penyajian data kependudukan	100	Dinas Dukcapil		
		Persentase Pengentasan Desa Tertinggal					
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	2,00	Bapermasdes		
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0,00	Bapermasdes		
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	26,00	Bapermasdes		
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	26,00	Bapermasdes		
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri					
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0,00	Bapermasdes		
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0,00	Bapermasdes		
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	3,00	Bapermasdes		
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						



		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	3,00	Bapermasdes		
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR					
		1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Tidak Ada	P3AP2KB		
		2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	20	P3AP2KB		
		3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	28,7	P3AP2KB		
		4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	71,55	P3AP2KB		
		5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	113	P3AP2KB		
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)					
		1	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100	P3AP2KB		
		2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	18,15	P3AP2KB		
		3	Pemerintah Kabupaten yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	21	P3AP2KB		
		4	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	38,78	P3AP2KB		



		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)			
		1	Persentase kesertaan KB di kabupaten dengan kesertaan rendah	51,22	P3AP2KB
		2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	51,53	P3AP2KB
		Rasio konektivitas kota			
		1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	100,00%	Dishub
		2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	68,22%	Dishub
		3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	100,00%	Dishub
		4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten	58,00%	Dishub
		V/C Ratio di Jalan kota			
		1	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten	45,50%	Dishub
15	Perhubungan				



: Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo				
1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	21%	Dishub	
2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	21%	Dishub	
3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Ada	Dishub	
Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi				
1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	99%	Dinas Kominfo	
2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	75%	Dinas Kominfo	



16	Komunikasi dan Informatika	3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100%	Dinas Kominfo		
		4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	0%	Dinas Kominfo		
		5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	3%	Dinas Kominfo		
		6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	40%	Dinas Kominfo		
		7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	18%	Dinas Kominfo		
		8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	75%	Dinas Kominfo		
		9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	75%	Dinas Kominfo		



10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100%	Dinas Kominfo	
11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	19%	Dinas Kominfo	
12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	0%	Dinas Kominfo	
13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	100%	Dinas Kominfo	
14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada	Dinas Kominfo	
Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Kabupaten				
1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten	88%	Dinas Kominfo	
2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	62%	Dinas Kominfo	



		3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	99,85%	Dinas Kominfo		
		Meningkatnya Koperasi yang berkualitas					
		1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	52,86	Dinas Dagkop UKM		
		2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	100,00	Dinas Dagkop UKM		
		3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	46,97	Dinas Dagkop UKM		
		4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	41,59	Dinas Dagkop UKM		
		5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	0,00	Dinas Dagkop UKM		
		6	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	64,46	Dinas Dagkop UKM		
		7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	3,23	Dinas Dagkop UKM		
17	Koperasi dan UKM						



8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Tidak Perlu Diisi		
9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	53,03	Dinas Dagkop UKM	
10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	0,00	Dinas Dagkop UKM	
11	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	15,15	Dinas Dagkop UKM	
12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	46,97	Dinas Dagkop UKM	
13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	15,15	Dinas Dagkop UKM	
Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha				
1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	44,44	Dinas Dagkop UKM	
2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	79,63	Dinas Dagkop UKM	
3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	41,22	Dinas Dagkop UKM	
4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	102,01	Dinas Dagkop UKM	



		5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	15,01	Dinas Dagkop UKM		
		6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	1,86	Dinas Dagkop UKM		
		7	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	0,48	Dinas Dagkop UKM		
		Persentase peningkatan investasi di kabupaten					
18	Penanaman Modal	1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten	100,00	DPMPTSP		
		2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	0,00	DPMPTSP		
		3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	0,00	DPMPTSP		
		4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	1,00	DPMPTSP		
		5	Kegiatan pameran penanaman modal	1,00	DPMPTSP		
		6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	1,00	DPMPTSP		
		7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	1507,00	DPMPTSP		
		8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	8909,00	DPMPTSP		
		9	Laporan realisasi penanaman modal	1652641501031,00	DPMPTSP		
		10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten	55,60	DPMPTSP		
		11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	286,00	DPMPTSP		



		12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten	100,00	DPMPTSP		
19	Pemuda dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri					
		1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	420	Dinas Porapar		
		2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	84	Dinas Porapar		
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan					
		1	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	160	Dinas Porapar		
		2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	50	Dinas Porapar		
		Peningkatan Prestasi Olahraga					
		1	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	0,00	Dinas Porapar		
		2	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	1,00	Dinas Porapar		
20	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah					
		1	Tersedianya buku profil daerah	Ada	Dinas Kominfo		
		2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	48,00	Dinas Kominfo		
		3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	48,00	Dinas Kominfo		
		4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	35%	Dinas Kominfo		
		5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	35,00	Dinas Kominfo		
		6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	2,08%	Dinas Kominfo		



		7	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	0,00%	Dinas Kominfo		
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah					
		1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yg harus diamankan	0,00%	Dinas Kominfo		
		2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yg ada pada Pemerintah Daerah	81,65%	Dinas Kominfo		
		3	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	1,83%	Dinas Kominfo		
		4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	0,00%	Dinas Kominfo		
22	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya					
		1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	485	Dinas Dikbud		
		2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	21	Dinas Dikbud		
		3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	15	Dinas Dikbud		



4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	14	Dinas Dikbud	
5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	33	Dinas Dikbud	
6	Perlindungan cagar budaya kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	17	Dinas Dikbud	
7	Layanan perizinan membawa cagar budaya kabupaten ke luar kabupaten dengan dukungan data	-	Dinas Dikbud	
8	Pengembangan cagar budaya kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi),	2	Dinas Dikbud	
9	Pemanfaatan cagar budaya kabupaten (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	17	Dinas Dikbud	
10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	950	Dinas Dikbud	
11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	1219	Dinas Dikbud	
12	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Tidak Perlu Diisi	Dinas Dikbud	
13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	1,00	Dinas Dikbud	
14	Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten	1,00	Dinas Dikbud	
15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	5,00	Dinas Dikbud	
16	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	12,00	Dinas Dikbud	
17	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	4,00	Dinas Dikbud	
18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	10,00	Dinas Dikbud	
19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	1,00	Dinas Dikbud	



23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat				
		1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	16,18947151	Dinas Arpus	
		2	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	1,048667899	Dinas Arpus	
		3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,007269066	Dinas Arpus	
		4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	1,558073654	Dinas Arpus	
		5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	5,00	Dinas Arpus	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat				
		1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	0,00	Dinas Arpus	
		2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0,00	Dinas Arpus	
		3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	0,00	Dinas Arpus	
		24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		
1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip			100	Dinas Arpus	



2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	Dinas Arpus	
3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	0	Dinas Arpus	
4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0	Dinas Arpus	
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat				
1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	0,00	Dinas Arpus	
2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0,00	Dinas Arpus	
3	Penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan sesuai NSPK di kaabupaten	0,00	Dinas Arpus	
4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan ksbupsten yang sesuai NSPK	0,00	Dinas Arpus	
5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	3,00	Dinas Arpus	
6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten yang sesuai NSPK	0,00	Dinas Arpus	



25	Kelautan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)				
		1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	15	Dinas KPP	
		2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	100	Dinas KPP	
		3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten yang diterbitkan	Tidak Ada	Dinas KPP	
		4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	150	Dinas KPP	
		5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	179.110.878	Dinas KPP	
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan				
		1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	0	Dinas Pariwisata	
		2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	175	Dinas Pariwisata	
		3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per subjenis usaha di kabupaten	8	Dinas Pariwisata	
		4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	0	Dinas Pariwisata	
		5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	1	Dinas Pariwisata	
		6	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten	0	Dinas Pariwisata	
		7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	3	Dinas Pariwisata	



		8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	2,07	Dinas Pariwisata		
		9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan		Dinas Pariwisata		
		10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	19	Dinas Pariwisata		
		Produktivitas pertanian per hektar per tahun					
27	Pertanian	1	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	0	Dinas Tan KP		
		2	Prasaran pertanian yang digunakan		Dinas Tan KP		
		3	Penerbitan izin usaha pertanian	0	Dinas Tan KP		
		4	Persentase Prasarana pertanian yang digunakan	0	Dinas Tan KP		
		5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kabupaten	0	Dinas Tan KP		
28	Kehutanan	1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan TAHURA	0,00			
		2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0			
		3	Pemulihan ekosistem pada TAHURA	0,00			
		4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	0			
29	ESDM	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten					
		1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten	tidak			
30	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko					



Swalayan)				
1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	0	Dinas Dagkop UKM	
		77.794	Dinas Dagkop UKM	
			Dinas Dagkop UKM	
			Dinas Dagkop UKM	
2	Persentase penerbitan TDG	100	Dinas Dagkop UKM	
			Dinas Dagkop UKM	
3	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	11,11111111	Dinas Dagkop UKM	
			Dinas Dagkop UKM	
4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	0	Dinas Dagkop UKM	
			Dinas Dagkop UKM	
	a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	0	Dinas Dagkop UKM	
	b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	0	Dinas Dagkop UKM	
	c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	0	Dinas Dagkop UKM	
5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/kota	0	Dinas Dagkop UKM	
6	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	0	Dinas Dagkop UKM	
7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi	100,00	Dinas Dagkop UKM	



		perdagangan di wilayah kerjanya			
	8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	9,00	Dinas Dagkop UKM	
		Persentase kinerja realisasi pupuk			
	1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	147369013764,08	Dinas Tan KP	
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku			
	1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	61,21822034	Dinas Dagkop UKM	
	2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	5,903614458	Dinas Dagkop UKM	
31	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten			
	1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten	#DIV/0!	Dinas Perinaker	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP			
	1	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	0,00	Dinas Perinaker	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait			
	1	Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan	100	Dinas Perinaker	



			IUI menengah yang diterbitkan			
			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait			
		1	Persentase jumlah izin perluasan industri IPI) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan	surat keterangan	Dinas Perinaker	
			Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini			
		1	Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri di kota	0,33	Dinas Perinaker	
32	Transmigrasi	1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	surat keterangan	Dinas Perinaker	
		2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	surat keterangan	Dinas Perinaker	
		3	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibina	surat keterangan	Dinas Perinaker	



2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel 2.6

No	Urusan	NO IKK	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	85,05	Dinas Dikbud	
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	92,73	Dinas Dikbud	
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	72,71	Dinas Dikbud	
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	96,55	Dinas Dikbud	
2	Kesehatan	5	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	0,09	Dinkes	
		6	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi	33,33	Dinkes	
		7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	87,94	Dinkes	
		8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	91,25	Dinkes	
		9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,81	Dinkes	
		10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	87,61	Dinkes	
		11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20,83	Dinkes	



		12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	12,82	Dinkes	
		13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	47,66	Dinkes	
		14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	67,04	Dinkes	
		15	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	72,42	Dinkes	
		16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	82,53	Dinkes	
		17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	65,20	Dinkes	
		18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00	Dinkes	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	78,22998029	Dinas Perkim	
		20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten	1,5	Dinas Perkim	
		21	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	22	Dinas Perkim	
		22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	49	Dinas Perkim	



		23	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	Dinas Perkim	
		24	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100	Dinas Perkim	
		25	Rasio kemantapan jalan	83	Dinas Perkim	
		26	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	8	Dinas PU	
		27	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	Dinas PU	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	28	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	-	Dinas Perkim	
		29	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	#DIV/0!	Dinas Perkim	
		30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	23,48430139	Dinas Perkim	
		31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	9,417754885	Dinas Perkim	
		32	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0,252265888	Dinas Perkim	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	33	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	Satpol PP	
		34	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	75	Satpol PP	
		35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100,00%	BPBD	



		36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	99,13%		
		37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,00%	BPBD	
		38	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	82,02	Satpol PP	
		39	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15,00	Satpol PP	
6	Sosial	40	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	33,84	Dinas Sosial	
		41	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	100,00	Dinas Sosial	
7	Tenaga Kerja	42	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100,00	Dinas Perinaker	
		43	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	-	Dinas Perinaker	
		44	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	58,73	Dinas Perinaker	
		45	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	14,89	Dinas Perinaker	
		46	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	66,11	Dinas Perinaker	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	47	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	3,59	Dinas P3aP2KB	
		48	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	0,009	Dinas P3aP2KB	
		49	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	6,120	Dinas P3aP2KB	



9	Pangan	50	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	11,20	Dinas Tan KP	
10	Pertanahan	51	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	90,78	Dinas Perkim	
		52	Persentase pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	87,81	Dinas Perkim	
		53	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	90,78	Dinas Perkim	
		54	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	#DIV/0!	Dinas Perkim	
		55	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	#DIV/0!	Dinas Perkim	
		56	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	#DIV/0!	Dinas Perkim	
11	Lingkungan Hidup	57	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten	60,67	Dinas LH	
				16,58	Dinas LH	
				34,48	Dinas LH	
				9,61	Dinas LH	
		58	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	80,04	Dinas LH	
59	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	64,29	Dinas LH			
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	60	Perekaman KTP Elektronik	100,00	Dinas Dukcapil	
		61	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	31,15	Dinas Dukcapil	
		62	Kepemilikan Akte Kelahiran	95,39289996	Dinas Dukcapil	
		63	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	4,166666667	Dinas Dukcapil	



13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	64	Persentase pengentasan desa tertinggal	83,87	Bapermasdes
		65	Persentase peningkatan status desa mandiri	150	Bapermasdes
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	66	TFR (Angka Kelahiran Total)	0,00	Dinas P3aP2KB
		67	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	67,77	Dinas P3aP2KB
		68	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)	14,73	Dinas P3aP2KB
15	Perhubungan	69	Rasio konektivitas kabupaten	70,30	Dishub
		70	Kinerja lalu lintas kabupaten	0,41	Dishub
16	Komunikasi dan Informatika	71	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	20,83%	Dinas Kominfo
		72	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	37,50%	Dinas Kominfo
		73	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	67,13%	Dinas Kominfo
17	Koperasi dan UKM	74	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	61%	Dinas Dakop UKM
		75	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	100%	Dinas Dakop UKM
18	Penanaman Modal	76	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	-82,35%	DPMPTSP
19	Kepemudaan dan Olahraga	77	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,11%	Dinas Porapar
		78	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	0,83%	Dinas Porapar



		79	Peningkatan prestasi olahraga	2,0	Dinas Porapar	
20	Statistik	80	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	Dinas Kominfo	
		81	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	Dinas Kominfo	
21	Persandian	82	Tingkat keamanan informasi pemerintah	45,58139535	Dinas Kominfo	
22	Kebudayaan	83	Terlestarikannya Cagar Budaya	14,66666667	Dinas Dikbud	
23	Perpustakaan	84	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	72,63	Dinas Arpus	
		85	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	21,70	Dinas Arpus	
24	Kearsipan	86	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional pasal 40 dan pasal 59 UU No 43/2009 tentang Kearsipan	50,00	Dinas Arpus	
		87	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan barbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintah, layanan publik dan kesra	0,50	Dinas Arpus	
Urusan Pilihan						
25	Kelautan Perikanan	88	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kecamatan di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP)	4.004,097	Dinas KPP	
26	Pariwisata	89	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-100,0	Dinas Porapar	
		90	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	-7,979	Dinas Porapar	
		91	Tingkat hunian akomodasi	3702,92%	Dinas Porapar	
		92	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	6,962470048	Dinas Porapar	



		93	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0,914353606	Dinas Porapar	
27	Pertanian	94	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	642,961	Dinas Tan KP	
		95	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	87,333	Dinas Tan KP	
28	Kehutanan			Tidak Perlu Diisi		Tidak Perlu Diisi
29	ESDM	96	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/Kabupaten	surat keterangan	Dinas Perinaker	surat keterangan
30	Perdagangan	97	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	79,73719545	Dinas Dakop UKM	
		98	Persentase kinerja realisasi pupuk	89,9517996	Dinas Dakop UKM	
		99	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (JTTP) bertanda terasah yang berlaku	61,21822034	Dinas Dakop UKM	
31	Perindustrian	100	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten	0,932049481	Dinas Perinaker	
		101	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten)	40	Dinas Perinaker	
		102	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	Dinas Perinaker	
		103	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	surat keterangan	Dinas Perinaker	
		104	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di	surat keterangan	Dinas Perinaker	



			Daerah Kabupaten			
		105	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	29,00	Dinas Perinaker	
32	Transmigrasi					tidak perlu diisi

2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.7

No	Urusan	NO IKK	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)	1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	16,803857	BPKAD	
		2	Rasio PAD	18,492573	BPKAD	
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2,65	Inspektorat	Penilaian BPKP Prov Jateng
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,00	Inspektorat	Laporan BPKP Prov Jateng
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	15,623422	BPKAD	
		6	Opini Laporan Keuangan	100,00	BPKAD	ada
2	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN)	7	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	Setda	
		8	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	100	Setda	
		9	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	89,821	Setda	
3	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)	10	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	96,38	BKD	
		11	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	16,52	BKD	
		12	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	42,09	BKD	
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)	13	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	92,62	BPKAD	
		14	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	125,81	BPKAD	
		15	Assets management	100	BPKAD	
		16	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	13,161939	BPKAD	



5	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK)	17	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100	BPKAD	
		18	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100	BPKAD	

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Bupati

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah. Perjanjian kinerja sangat penting disusun karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dicapai/dihasilkan. Perjanjian Kinerja yang disusun oleh instansi pemerintah berguna untuk menetapkan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga fokus dalam mengarahkan dan mengelola program serta kegiatan instansi pemerintah akan lebih baik.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Tegal Tahun 2021 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Strategi serta prioritas APBD Tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2021

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021
1	Mewujudkan Aparatur Birokrasi yang Profesional	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Opini; Tahunan	64,19
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	2	Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor; Tahunan	2,30
		3	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen; Tahunan	80,46
3	Meningkatkan Kualitas Manajemen Kinerja	4	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai; Tahunan	65,61



No	Tujuan dan Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021
4	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	5	Opini BPK	Opini; Tahunan	WTP
5	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	6	Indeks Williamson	Persen; Kumulatif	0,254
6	Terwujudnya Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	7	Pertumbuhan Ekonomi	Persen; Tahunan	3,20
7	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	8	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai; Tahunan	68,73
8	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	9	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen; Tahunan	69,70
		10	Indek Pembangunan Gender (IPG)	Persen; Tahunan	86,94
9	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	11	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun; Tahunan	6,77
10	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	12	Harapan Lama Sekolah	Tahun; Tahunan	12,40
		13	Angka Harapan Hidup	Tahun; Tahunan	71,24
11	Menurunnya Kesenjangan Kemiskinan	14	Indek Gini	Persen; Tahunan	0,303
12	Menurunnya Angka Kemiskinan	15	Persentase Penduduk Miskin	Persen; Tahunan	8,41
13	Menurunnya Pengangguran	16	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen; Tahunan	10,42
14	Menurunnya Resiko Bencana	17	Indeks Resiko Bencana	Angka; Tahunan	177,71
15	Meningkatnya Pelestarian dan Pariwisata Kebudayaan	18	Indeks Kebudayaan	Angka; Tahunan	64,73



b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Tegal dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

- ❖ Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- ❖ Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *Outcome*, selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Tabel 2.9
Skala Nilai Peringkat Kinerja
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Skala Capaian Kinerja	Kategori Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah



≤ 50%	Sangat Rendah
-------	---------------

Penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- ❖ Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- ❖ Hasil Sedang Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- ❖ Hasil Rendah dan Sangat Rendah Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran RPJMD organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran RPJMD instansi Pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2021 menunjukan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.10
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No.	Tujuan RPJMD	No.	Sasaran RPJMD	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian 2021
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif Melayani Rakyat									
1.	Mewujudkan Aparatur Birokrasi yang Profesional			1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai; Tahunan	64,19	64,21	100,03



No.	Tujuan RPJMD	No.	Sasaran RPJMD	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian 2021
		1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai; Tahunan	80,46	82,20	102,16
		3.		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai; Tahunan	2,30	2,55	111	
		2.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	4.	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai; Tahunan	65,61	63,28	96,44
		3.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	5.	Opini BPK	Opini; Tahunan	WTP	WTP	100
Misi 2 : Memperkuat Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Andal, Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan.									
2.	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah			6.	Indeks Williamson	Persen; Kumulatif	0,254	NA	-
Misi 3 : Membangun Perekonomian Rakyat yang Kokoh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan									
3.	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			7.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen; Tahunan	3,20	3,72	116,25
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi									
4.	Mewujudkan Sumber daya Manusia yang Berkualitas			8.	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai; Tahunan	68,73	68,79	100,08
		4.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	9.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen; Tahunan	69,70	72,12	103,47
				10.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen; Tahunan	86,94	87,53	100,67
		5.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	11.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun; Tahunan	6,77	6,99	103,25
				12.	Harapan Lama Sekolah	Tahun; Tahunan	12,40	12,89	103,95
		6.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	13.	Angka Harapan Hidup	Tahun; Tahunan	71,24	71,72	100,67
5.	Menurunkan Kesenjangan Kemiskinan			14.	Indeks Gini	Persen; Tahunan	0,303	0,368	78,87
		7.	Menurunkan Angka Kemiskinan	15.	Persentase penduduk miskin	Persen; Tahunan	8,41	8,6	97,74



No.	Tujuan RPJMD	No.	Sasaran RPJMD	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian 2021
		8.	Menurunnya Pengangguran	16.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen; Tahunan	10,42	9,97	104,31
Misi 5 : Menciptakan Tata Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, Tenram dan Nyaman dengan Tetap Menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya serta Kearifan Lokal									
6.	Menurunnya Resiko Bencana			17.	Indeks Resiko Bencana	Angka; Tahunan	177,71	181,91	97,63
7.	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan			18	Indeks Kebudayaan	Angka; Tahunan	64,73	60,05	92,77

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada :

- a. Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif Melayani Rakyat melalui Reformasi Birokrasi, dapat dilihat dari indikator :
 1. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi, mencapai : 100,03% atau dengan kategori Sangat Tinggi.
 2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), mencapai : 102,16% atau dengan kategori Sangat Tinggi.
 3. Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), mencapai : 111% atau dengan kategori Sangat Tinggi.
 4. Nilai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Tegal, mencapai : 96,44 % atau dengan kategori Sangat Tinggi.
 5. Opini BPK terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, mencapai : 100 % atau dengan kategori Sangat Tinggi.
- b. Misi 2 : Memperkuat Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Andal, Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan melalui peningkatan konektivitas antar wilayah, dapat dilihat dari indicator :
 1. Nilai Indeks Williamson, data tidak tersedia untuk level kabupaten.
- c. Misi 3 : Membangun Perekonomian Rakyat yang Kokoh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan melalui Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata, dapat dilihat dari indikator :



1. Persentase Pertumbuhan Ekonomi, mencapai 116,25% atau dengan kategori Sangat Tinggi.
- d. Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, melalui mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan menurunkan kesenjangan kemiskinan, dapat dilihat dari indicator :
1. Nilai Indeks Pembangunan Manusia, mencapai : 100,08 % atau dengan kategori Sangat Tinggi.
 2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), mencapai : 104,73 % atau dengan kategori Sangat Tinggi.
 3. Indeks Pembangunan Gender (IPG), mencapai : 100,67 % atau dengan Sangat Tinggi.
 4. Rata-rata Lama Sekolah, mencapai : 103,25 % atau dengan kategori Sangat Tinggi.
 5. Harapan Lama Sekolah, mencapai : 103,95 % atau dengan kategori Sangat Tinggi.
 6. Angka Harapan Hidup, mencapai : 100,67 % atau dengan kategori Sangat Tinggi.
 7. Nilai Indeks Gini, mencapai : 78,87% atau dengan Tinggi.
 8. Persentase penduduk miskin, mencapai : 97,74% atau dengan kategori Sangat Tinggi.
 9. Tingkat Pengangguran Terbuka, mencapai : 104,31% atau dengan kategori Sangat Tinggi.
- e. Misi 5 : Menciptakan Tata Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, Tentram dan Nyaman dengan Tetap Menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya serta Kearifan Lokal, melalui menurunkan resiko bencana serta peningkatan pelestarian dan pewarisan kebudayaan, dapat dilihat dari indikator :
1. Indeks Resiko Bencana, mencapai : 97,63% atau dengan kategori Sangat Tinggi.
 2. Indeks Kebudayaan, mencapai 92,77% atau dengan kategori Sangat Tinggi.
- Rata – rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2021 adalah sebesar 99,78 %, atau dengan kategori Sangat Tinggi.



Adapun capaian dari masing-masing tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Mewujudkan Aparatur Birokrasi yang Profesional.

Dalam rangka mewujudkan aparatur birokrasi yang profesional, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan satu indikator utama untuk mendukung tujuan kinerja tersebut, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.11
Capaian Kinerja Tujuan Mewujudkan Aparatur Birokrasi yang Profesional

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian 2021	Target Akhir RPJMD 2024
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka; Tahunan	64,19	64,21	100,03	65,69
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					100,03	

Capaian kinerja tujuan mewujudkan aparatur birokrasi yang profesional dengan didukung oleh 1 (satu) indikator dengan capaian sebesar 100,03 % atau dengan kategori **Sangat Tinggi**. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal telah berusaha keras untuk melaksanakan program reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien.

Hal-hal yang telah dilaksanakan guna meningkatkan capaian kinerja reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Tegal sebagai berikut :

- a. Membentuk agen perubahan dan menugaskan agen perubahan dengan target perubahan yang nyata pada masing-masing unit kerja.
- b. Menginternalisasi dan menyosialisasikan RB ke unit kerja melalui media komunikasi dan pertemuan.
- c. Melakukan identifikasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis secara keseluruhan serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan system pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan untuk menyempurnakan produk hokum yang dibentuk.
- d. Meningkatkan pengelolaan sistem manajemen SDM antara lain melakukan assessment pegawai secara menyeluruh, menyempurnakan ukuran kinerja individu yang mengacu kepada kinerja organisasi dan menjadikannya sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.



- e. Mengembangkan aplikasi manajemen kinerja secara terintegrasi, mulai dari perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja.
- f. Meningkatkan kualitas pembangunan zona integritas di unit kerja pelayanan sehingga unit tersebut menjadi unit kerja yang berpredikat WBK/WBBM.
- g. Meningkatkan implementasi pelayanan publik khususnya di tingkat OPD antara lain melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat.

Capaian realisasi reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2021 sebesar 64,21 masih belum melampaui target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 65,69, capaian tahun 2021 ini sudah 97,71% dari target akhir RPJMD sehingga diharapkan setelah berakhirnya RPJMD 2019-2024 target reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Tegal sebesar 65,69 bisa tercapai.

Tabel 2.12
Capaian Kinerja Tujuan Mewujudkan Aparatur Birokrasi yang Profesional tahun 2019-2021

NO	Indikator Kinerja Utama	2019			2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Reformasi Birokrasi	-	45,25	-	50,10	63,69	127,13	64,19	64,21	100,03

Dari tabel 2.12 realisasi capaian reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Tegal dari tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2021 walaupun secara presentasi capaian mengalami penurunan namun secara nilai setiap tahun mengalami kenaikan hal ini disebabkan karena target tahun sebelumnya masih dibawah target tahun 2021. Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2021 ada perbedaan dengan penilaian tahun – tahun sebelumnya. Hal yang menjadi perbedaan terkait penilaian indek reformasi birokrasi pada Komponen Pengungkit, pada tahun 2021 komponen pengungkit terdiri dari pemenuhan (8 area perubahan), hasil antara area perubahan (hasil penilaian dari instansi lain) dan reform (perubahan dari 8 area perubahan) sedangkan komponen pengungkit tahun 2020 hanya pemenuhan dari 8 area perubahan.



Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan, yaitu :

- a. Mengoptimalkan fungsi Tim Reformasi Birokrasi Internal melalui pertemuan berkala membahas kemajuan Reformasi Birokrasi serta mengkomunikasikan dan memastikan penerapan hingga ke OPD.
- b. Mengoptimalkan implementasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan melakukan monitoring perkembangan pelaksanaan rencana aksi dan meningkatkan pengetahuan assessor PMPRB.
- c. Mewujudkan budaya kerja positif dengan menugaskan Agen Perubahan/Kelompok Budaya Kerja disertai target-target nyata dimasing-masing OPD, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas keberhasilan Agen Perubahan/Kelompok Budaya Kerja.
- d. Optimalisasi area Deregulasi Kebijakan dengan menyusun peta keterkaitan antara kebijakan Pusat/Pemkot dengan kebijakan di OPD dan mengoptimalkan peran kebijakan di Pemkab Tegal dalam rangka berkontribusi untuk meningkatkan peringkat *Ease of Doing Business* (EoBD) Indonesia.
- e. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382 s.d. 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, penyederhaan birokrasi dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (agile), dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah kepada public.
- f. Menyusun peta proses bisnis terkait penyederhanaan jabatan dan melakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis di beberapa OPD.
- g. Optimalisasi penerapan E-Government di lingkungan Pemkab Tegal dengan menyusun Grand Design pengembangan SPBE serta pengintegrasian beberapa aplikasi.
- h. Optimalisasi pengelolaan system manajemen SDM dengan menindaklanjuti pemanfaatan hasil *assessment* sebagai dasar pengembangan karier individu berbasis kompetensi, menyusun perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau HCDP secara



menyeluruh dan memetakan talenta/*talent pool* sebagai dasar penempatan jabatan kritikal dan rencana suksesi jabatan.

- i. Penyempurnaan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SAKIP yang terintegrasi di seluruh OPD yang merupakan system pengukuran kinerja berbasis elektronik sebagai dasar monitoring dan evaluasi kinerja sebagai langkah awal penerapan budaya kinerja berbasis *outcome*.
- j. Optimalisasi penguatan kebijakan pengawasan internal, terutama dalam hal penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, kebijakan benturan kepentingan serta penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- k. Optimalisasi peran APIP sebagai Quality Assurance and Consulting.
- l. Mengoptimalkan implementasi pelayanan publik khususnya di tingkat OPD dalam hal pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai dengan standard dan menginformasikan hasil survei eksternal kepada stakeholder serta menindaklanjuti hasil survei eksternal terutama terhadap komponen survei yang memiliki nilai rendah dengan melakukan perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan.

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 2 (dua) indikator utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 2.13
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021 (%)	Target Akhir RPJMD 2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai; Tahunan	80,46	82,20	102,16	86,2
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai; Tahunan	2,30	2,55	111	2,6
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					106,58	

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah seringkali dirasakan kurang maksimal oleh masyarakat. Berbagai cara telah dilakukan



oleh pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang salah satunya mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam penilaian bentuk survei kepada masyarakat. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2021 adalah 82,20 atau 102,16% dengan predikat **sangat tinggi** dibandingkan dengan target tahun 2021, sedangkan capaian target RPJMD adalah 86,2, sehingga capaian tahun 2021 masih 95,35% dari target RPJMD. Adapun perkembangan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut :

Tabel 2.14
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat
Tahun 2019-2021

NO	Indikator Kinerja Utama	2019			2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,30	78,36	96,38	78,61	80,83	102,82	80,46	82,20	102,16

Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan di perangkat daerah dan unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tegal Tahun 2021 sebesar 82,20 atau masuk dalam kategori “**Baik**”. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal telah dilaksanakan dengan baik. Nilai hasil survei kepuasan masyarakat dari tahun 2019 sampai dengan 2021 mengalami kenaikan walaupun secara capaian prosentase naik turun, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan jumlah unit organisasi yang melakukan survei setiap tahun, sebagai contoh pada tahun 2021 unit organisasi yang melakukan survei kepuasan masyarakat berjumlah 147 sedangkan tahun 2020 berjumlah 107 hal ini mempengaruhi dalam hasil akhir survei kepuasan masyarakat. Adapun hasil survei kepuasan masyarakat pada perangkat daerah dan unit penyelenggara pelayanan publik yang melakukan survei secara mandiri dengan pendampingan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tegal dapat diuraikan sebagai berikut :



Tabel 2.15
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	IKM PD/ UNIT
1	SETDA	83,69
2	SEKRETARIAT DPRD	94,05
3	INSPEKTORAT	74,27
4	BAPPEDA DAN LITBANG	86,50
5	BAPPENDA	83,63
6	BKD	87,09
7	BPBD	95,83
8	DINAS DIKBUD	86,82
	a KWK ADIWERNA	86,82
	b KWK BALAPULANG	86,82
	c KWK BOJONG	86,82
	d KWK BUMIJAWA	86,82
	e KWK DUKUHWARU	86,82
	f KWK DUKUHTURI	86,82
	g KWK JATINEGARA	86,82
	h KWK KEDUNG BANTENG	86,82
	i KWK KRAMAT	86,82
	j KWK LEBAKSIU	86,82
	k KWK MARGASARI	86,82
	l KWK PAGERBARANG	86,82
	m KWK PANGKAH	86,82
	n KWK SLAWI	86,82
	o KWK SURADADI	86,82
	p KWK TALANG	86,82
	q KWK TARUB	86,82
	r KWK WARUREJA	86,82
	s DIKBUD	86,82
9	DINAS KESEHATAN	80,12
	a PUSKESMAS KALADAWA	80,85
	b PUSKESMAS JATIBOGOR	80,56
	c PUSKESMAS KALIBAKUNG	81,48
	d PUSKESMAS KAMBANGAN	86,60
	e PUSKESMAS ADIWERNA	92,14
	f PUSKESMAS DUKUHTURI	77,46
	g PUSKESMAS KEDUNGBANTENG	83,43
	h PUSKESMAS TALANG	82,41
	i PUSKESMAS BUMIJAWA	81,00
	j PUSKESMAS KRAMAT	78,94
	k PUSKESMAS BOJONG	81,69
	l PUSKESMAS PANGKAH	80,71
	m PUSKESMAS DUKUWARU	84,92
	n PUSKESMAS KESAMIRAN	84,77



	o	PUSKESMAS PENUSUPAN	78,99
	p	PUSKESMAS TARUB	88,47
	q	PUSKESMAS MARGASARI	75,93
	r	PUSKESMAS BALAPULANG	85,02
	s	PUSKESMAS JATINEGARA	78,42
	t	PUSKESMAS KUPU	75,63
	u	PUSKESMAS SLAWI	88,27
	v	PUSKESMAS KESAMBI	87,58
	w	PUSKESMAS LEBAKSIU	77,69
	x	PUSKESMAS PAGIYANTEN	80,56
	y	PUSKESMAS PAGERBARANG	86,80
	z	PUSKESMAS WARUREJA	88,06
	aa	PUSKESMAS DANASARI	87,61
	ab	PUSKESMAS SURADADI	
	ac	LABORATORIUM KESEHATAN KAB TEGAL	77,31
	ad	PUSKESMAS BANGUN GALIH	80,56
	ae	FARMASI DINKES	85,52
	af	WISATA KESEHATAN JAMU	78,47
	ag	BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	86,11
10	DINAS PU		82,91
	a	Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	82,91
	b	Layanan Laboratorium Konstruksi dan Alat Berat	82,91
11	DINAS PERKIMTARU		85,33
	a	CIPTA KARYA WILAYAH 1	88
	b	UPTD KECIPTAKARYAAN 2	84
	c	UPTD KECIPTAKARYAAN 3	84
12	DINAS SOSIAL		87,53
13	DINAS PERINNAKER		79,21
14	DINAS P3AP2 DAN KB		82,06
15	DINAS LH		82,92
	a	UPTD Laboratorium	89,63
	b	UPTD Pemrosesan Akhir Sampah	81,23
	c	Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi	80,56
	d	Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	77,78
	e	Bidang Tata Lingkungan	85,38
16	DINAS DUKCAPIL		84,66
17	DINAS PERMASDES		89,81
18	DINAS KOMINFO		77,60
19	DINAS PM DAN PTSP		88,86
20	DINAS PORAPAR		75,48



	a	DESTINASI TEMPAT WISATA GUCI	75,55
	b	DESTINASI TEMPAT WISATA CACABAN	75,31
	c	DESTINASI TEMPAT WISATA PURIN	75,60
21	DINAS ARPUS		83,08
22	DINAS KPP		85,74
	a	RUMAH POTONG HEWAN	85,74
	b	TEMPAT PELELANGAN IKAN	85,74
	c	BALAI BENIH IKAN	85,74
	d	POS KESEHATAN HEWAN	85,74
	e	INSEMINASI BUATAN	85,74
23	DINAS DAKOP DAN UKM		88,4
	a	BIDANG KOPERASI	82
	b	BIDANG PENGELOLAAN PASAR	93
	c	BIDANG UMKM	90
	d	BIDANG PERDAGANGAN	89
	e	UPTD PASAR 1	88
	f	UPTD PASAR II	83
	g	UPTD PASAR III	85
	h	UPTD PASAR IV	89
	i	UPTD METROLOGI	92
	j	UPTD PASAR V	93
24	RSUD dr. SOESEO		76,70
25	RSUD SURADADI		77,78
26	KECAMATAN MARGASARI		94,15
27	KECAMATAN BUMIJAWA		84,76
28	KECAMATAN BOJONG		89,71
29	KECAMATAN BALAPULANG		91,67
30	KECAMATAN PAGERBARANG		81,03
31	KECAMATAN LEBAKSIU		81,75
32	KECAMATAN JATINEGARA		80,9
33	KECAMATAN KEDUNGBANTENG		84,24
34	KECAMATAN PANGKAH		84,39
35	KECAMATAN SLAWI		81,17
36	KECAMATAN DUKUHWARU		81,58
37	KECAMATAN ADIWERNA		83,33
38	KECAMATAN TALANG		92,99
39	KECAMATAN TARUB		79,09
40	KECAMATAN KRAMAT		81,11
41	KECAMATAN SURADADI		80,12
NILAI RERATA IKM KABUPATEN TEGAL			82,20

Berdasarkan data tabel 2.15 tersebut, masih terdapat 6 Perangkat Daerah maupun Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang masih



mempunyai nilai kurang baik karena hasil Survei Kepuasan Masyarakat masih dibawah 76,61. Dari hasil survei yang dilakukan pada tahun 2021 nilai unsur pada masing-masing perangkat daerah maupun Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang paling banyak memperoleh nilai rendah adalah unsur kecepatan waktu pelayanan dan unsur penanganan pengaduan pelayanan, sehingga kedepan perlu adanya perbaikan terhadap unsur-unsur tersebut. Adapun nilai interval Indeks Kepuasan Masyarakat menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik adala sebagai berikut :

A (Sangat Baik)	: 88,31 – 100
B (Baik)	: 76,61 – 88,30
C (Kurang Baik)	: 65,00 – 76,60
D (Tidak Baik)	: 25,00 – 64,99

2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2021 adalah sebesar 2.55 atau 111% dengan predikat **sangat tinggi**. Capaian ini masih dibawah target akhir RPJMD sebesar 2,6, sehingga capaian tahun 2021 sudah 98,07% dari target akhir RPJMD. Penilaian Indeks SPBE tahun 2021 berbeda dengan penilaian tahun-tahun sebelumnya, di mana, penilaian indeks SPPBE tahun 2018-2020 menggunakan 3 domain dan 37 pertanyaan, sedangkan penilaian indeks SPBE tahun 2021 menggunakan 4 domain dan 47 pertanyaan. Berikut ini adalah tabel perbedaan penilaian indeks SBPE tahun 2018 sampai dengan 2021.

Tabel 2.16
Perbedaan Penilaian Indeks SPBE tahun 2018 dan 2021

Tahun	Domain	Jumlah Pertanyaan	Indeks SPBE	Dasar Hukum
2018	Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE	37	2,58	Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2018
2019	Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE	37	2,82	Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2018
2020	Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE	37	3.11	Penilaian mandiri (internal)

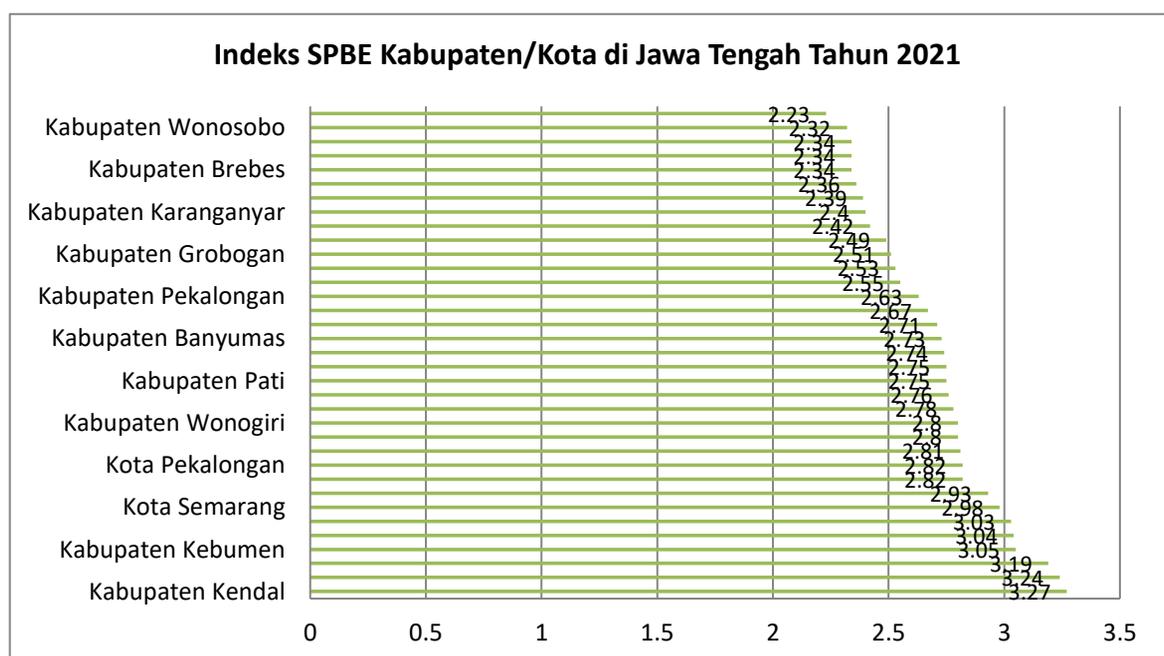


2021	Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE	47	2.55	Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020
------	---	----	------	----------------------------------

Tercapainya target Indeks SPBE tahun 2021 dikarenakan sinergitas yang kuat antarperangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, sehingga evidence yang dibutuhkan guna menopang penilaian tersebut berjalan dengan baik. Kendati demikian, berdasarkan hasil penilaian Indeks SPBE tersebut, masih banyak indikator yang memerlukan effort lebih besar guna mendorong indeks SPBE Kabupaten Tegal ke depan. Capaian indeks SPBE Kabupaten Tegal tahun 2021 hanya menempatkan Pemerintah Kabupaten Tegal pada urutan ke-22 dari 35 kabupaten/kota di lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Artinya, indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Tegal masih di bawah rata-rata indeks kabupaten/kota sebesar 2.70.

Oleh karena itu, dukungan dan komitmen yang lebih tinggi dari perangkat daerah terkait sangat dibutuhkan, agar capaian Indeks SPBE tahun 2022 sampai dengan berakhirnya RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024 di atas rata-rata capaian indeks SPBE kabupaten/kota di Jawa Tengah. Berikut ini adalah Tabel capaian indeks SPBE kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2021.

Tabel 2.17



Sumber : Kepmenpan Nomor 1503 Tahun 2021



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian Indeks SPBE tahun 2021 paling rendah adalah Kabupaten Purbalingga sebesar 2,23 dan capaian Indeks SPBE tahun 2021 paling tinggi adalah Kabupaten Kendal sebesar 3.27. Oleh karena itu, diperlukan kaji tiru terhadap kabupaten/kota yang capaian indeks SPBEnya lebih besar dari 3.0. Sehingga mendapatkan gambaran dan analisis guna meningkatkan indeks SPBE Kabupaten Tegal.

Untuk mendongkrak capaian Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Tegal pada tahun-tahun mendatang, telah dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE pada tahun 2021.
2. Penyusunan Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada tahun 2021.
3. Penyusunan Manajemen Data pada tahun 2021.
4. Penyusunan Manajemen Risiko SPBE pada tahun 2021.
5. Penyusunan peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal nomor 2 tahun 2020 sejumlah 4 (empat) peraturan bupati pada tahun 2022.
6. Audit aplikasi dan audit infrastruktur pada tahun 2022.

Gambar 2.1
Foto kegiatan penilaian Indeks SPBE tahun 2021



Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja

Dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen kinerja, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan satu indikator utama untuk mendukung sasaran kinerja tersebut, yaitu sebagai berikut :



Tabel 2.18

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian 2021	Target Akhir RPJMD 2024
1	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai; Tahunan	65,61	63,28	96,44	73,61
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					96,44	

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas manajemen kinerja dengan didukung oleh 1 (satu) indikator dengan capaian sebesar 96,44 % atau dengan kategori **Sangat Tinggi**. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal telah berusaha keras untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan baik. SAKIP dilaksanakan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran. Efisiensi harus dibangun secara sistemik, bukan melalui kebijakan-kebijakan temporal dan tidak berkelanjutan. Efisiensi tidak cukup hanya dengan memotong anggaran pada pertengahan tahun berjalan, sebagaimana praktik yang selama ini terjadi.

Untuk realisasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2021 sebesar 63,28 masih belum melampaui target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 73,61 sehingga progress capaian tahun 2021 terhadap target akhir RPJMD sebesar 85,96. Dengan menyisakan waktu 2 tahun untuk mencapai target akhir RPJMD Tahun 2024 dengan nilai 73,61 dibutuhkan kerja keras dimana hasil penilaian SAKIP dari tahun ke tahun masih dikisaran nilai 60-an. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Tegal harus terus meningkatkan akuntabilitas kinerja agar semakin baik. Adapun perkembangan nilai SAKIP Kabupaten sebagai berikut :

Tabel 2.19
Capaian Nilai SAKIP Kabupaten
Tahun 2019-2021

NO	Indikator Kinerja Utama	2019			2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Nilai SAKIP Kabupaten	-	60,10	-	63,61	61,36	96,45	65,61	63,28	96,44



Berdasarkan tabel 2.19 capaian SAKIP Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun dari tahun 2019 sampai dengan 2021 mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal telah berusaha keras untuk melakukan upaya perbaikan dalam penerapan dan penguatan SAKIP, perbaikan tersebut dilakukan baik pada level Pemerintah Kabupaten maupun level Perangkat Daerah.

Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas pelaksanaan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan, yaitu :

- a. Pemerintah Kabupaten Tegal agar melakukan perbaikan terhadap komponen perencanaan kinerja dengan memperhatikan berbagai kaidah seperti manfaat langsung dirasakan oleh masyarakat (*result oriented*) dan keterpaduan perencanaan pembangunan (*integrated development plan*).
- b. Menyempurnakan cascading kinerja sampai tingkat individu pegawai untuk memastikan keselarasan ukuran kinerja individu yang berkontribusi dalam pencapaian kinerja organisasi sebagai dasar pemberian reward and punishment.
- c. Memastikan tersediannya ukuran kinerja pada setiap jenjang jabatan sampai kepada individu secara spesifik, relevan dan terukur serta memastikan seluruh SKP yang disusun menggambarkan kinerja yang berorientasi hasil didasarkan pada PK.
- d. Mengembangkan aplikasi SAKIP secara terintegrasi mulai dari e-planning, e-budgeting dan e-SAKIP sehingga tercipta system informasi yang terintegrasi serta dimanfaatkan secara maksimal sarana monitoring evaluasi kinerja secara bulanan atau triwulanan dan menjamin keandalan, akurasi pengumpulan data kinerja guna mendukung budaya kinerja organisasi di berbagai level.
- e. Meningkatkan kualitas laporan kinerja di tingkat Pemda dan OPD dengan menyajikan analisis yang memadai atas pencapaian kinerja yang berorientasi hasil dan analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja serta memastikan agar pimpinan OPD memanfaatkan laporan kinerja sebagai feedback dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.



- f. Menjaga dan meningkatkan sinergitas dan kerjasama dalam upaya mewujudkan Pemerintah Kabupaten Tegal manajemen kinerja yang lebih baik.

Sasaran 3 : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan satu indikator utama untuk mendukung capaian kinerja sasaran tersebut, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.20
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian 2021	Target Akhir RPJMD 2024
1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	WTP
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					100	

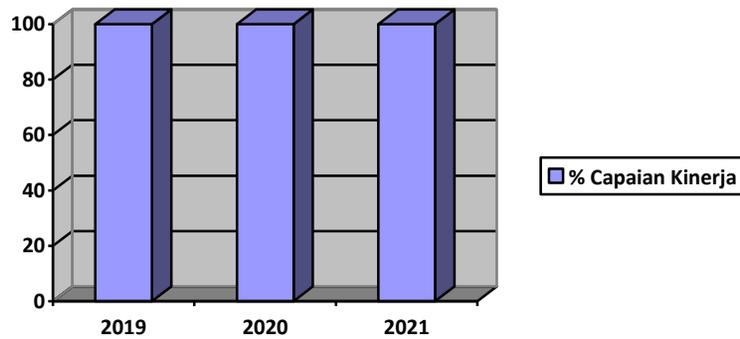
Capaian kinerja sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dengan didukung oleh 1 (satu) indikator dengan capaian sebesar 100 % atau dengan kategori **Sangat Tinggi**. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal telah berusaha keras untuk mewujudkan akuntabilitas di bidang keuangan dan aset daerah. Untuk realisasi opini BPK tahun 2021 berkategori Wajar Tanpa Pengecualian sudah tercapai target akhir RPJMD. Hal yang sama juga dengan capaian tahun-tahun sebelumnya dengan hasil WTP. Adapun perkembangan capaian kinerja sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berikut ini :

Tabel 2.21
Capaian Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah
Tahun 2019-2021

NO	Indikator Kinerja Utama	2019			2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Opini BPK	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100



Gambar 2.2
Diagram Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah



Permasalahan dalam pencapaian opini WTP untuk LKPD Tahun 2021 adalah pembayaran belanja penerangan jalan umum tidak sesuai dengan pemakaian daya listrik yang terpasang mengakibatkan pembayaran belanja penerangan jalan umum tidak sesuai dengan pemakaian daya listrik yang sebenarnya dan membebani keuangan daerah serta penggantian atas retur barang persediaan Decacetin Tetes Mata pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal belum dilaksanakan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pengembalian persediaan obat.

Tujuan 2 : Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah

Dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 1 (satu) indikator utama. Adapun realisasi capaian tujuan tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 2.22
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian 2021	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Indeks Wiliamson	Persen; Kumulatif	0,254	NA	-	0,242
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					-	

Capaian kinerja sasaran tujuan meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan didukung oleh 1 (satu) indikator tidak tersedia data untuk level kabupaten.

Secara kewilayahan Kabupaten mempunyai pusat – pusat kegiatan yang tersebar secara sporadis yang terkoneksi dengan sistem jaringan prasarana jalan dan jembatan di mana berdasar SK Bupati Tegal Nomor



050/583/2014 tentang Penetapan Jalan Kabupaten Tegal, panjang jalan Kabupaten adalah 847,27 km kilometer dan jalan desa sepanjang 691,28 km. Sedangkan untuk Jalan Nasional yang berada di Wilayah Kabupaten Tegal sepanjang 68,29 kilometer, Jalan Provinsi sepanjang 54,63 kilometer, serta jalan desa di Kabupaten Tegal sepanjang 691,28 km.

Secara kewilayahan regional Bregasmalang di Bagian Utara terlntasi oleh Jalan Arteri Primer (Jalan Pantura), dan bagian tengah jalan arteri sekunder (ruas Tegal – Cilacap) yang merupakan jalan nasional sepanjang 68,29 kilometer. Di Bagian Tengah juga terlntasi oleh Jalan Kolektor Primer yang merupakan jalan provinsi (Ruas Randudongkal – Jatinegara – Slawi – Dukuhwaru – Jatibarang) yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan di wilayah Randudongkal (Kabupaten Pemalang), Jatinegara – Slawi – Dukuhwaru (Kabupaten Tegal), dan Jatibarang – Ketanggungan – Losari (Kabupaten Brebes).

Tabel 2.23

Capaian Kinerja Pembangunan Jalan Kabupaten Tahun 2017-2021

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan Per Tahun									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1.	Baik	377,94	44,6	528,9	62,4 2	576,24	68,0 1	582,6 9	68,7 7	603,7 0	71,2 5
2.	Rusak Ringan	139,51	16,5	82,98	9,79	70,94	8,37	69,22	8,16	63,12	7,44
3.	Rusak Sedang	170,34	20,1	118,7	14,0 0	105,73	12,4 8	104,5 6	12,3 4	97,31	11,4 8
4.	Rusak Berat	159,48	18,8	116,8	13,7 8	94,355	11,1 4	90,81	10,7 1	83,14	9,81
	Total	847,27	100	847,3	100	847,27	100	847,2 8	100	847,2 7	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas Secara umum, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kondisi jalan Kabupaten yang baik meningkat persentasenya. Hal ini merupakan hasil pembangunan yang didanai APBD Kabupaten Tegal. Saat ini kondisi jalan rusak berat masih mencapai 83,14 km atau sekitar 9,81%. Kondisi jalan rusak berat di Kabupaten Tegal berada pada jalan jalan kecil yang bukan jalan strategis dimana sebagian besar berfungsi sebagai jalan usaha pertanian. Sedangkan jalan rusak berat dan berfungsi sebagai jalan strategis akan menjadi prioritas dan Pekerjaan Rumah yang harus



diselesaikan secara tuntas di waktu yang akan datang.

Untuk menjamin konektivitas antar wilayah di Kabupaten Tegal, Indikator infrastruktur jalan seharusnya bukan lagi baik, rusak ringan, maupun rusak berat, Namun seharusnya indikator pembangunan infrastruktur jalan mantap dan tidak mantap. Jalan Mantap dapat diartikan dengan jalan yang ada secara fisik harus dalam kondisi baik, secara dimensi dan kelengkapan jalannya harus sesuai dengan fungsinya.

Salah satu bentuk pembangunan guna menjamin konektivitas antar wilayah di Kabupaten Tegal khususnya di daerah yang masih sulit akses transportasinya pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Tegal secara bertahap membangun akses jalan tembus yang menghubungkan antara Pedukuhan Sawangan di lereng Gunung Slamet dengan Desa Sigedong di Kecamatan Bumijawa yang merupakan jalan tembus berketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut. Adapun pengerjaan tahun ini telah berhasil menyelesaikan pembangunan jalan telford dan rigid beton setebal 10 sentimeter dengan lebar 5 meter sepanjang 908 meter. Dengan dibangunnya jalan rigid beton sepanjang 908 meter tahun ini, maka total panjang jalan ruas Sigedong-Sawangan yang berhasil dibangun sejak 2019 lalu mencapai 1,5 kilometer. Sehingga masih menyisakan 3,1 kilometer lagi untuk sampai ke Dukuh Sawangan.

Pembangunan jalan ini mendukung perekonomian warga guna kemudahan akses orang, barang, dan jasa, pembangunan ruas jalan ini juga berfungsi sebagai jalur evakuasi bencana, khususnya bagi warga Dukuh Sawangan yang hanya berjarak 6,5 kilometer dari puncak Gunung Slamet.

Kemudian berdasarkan Hirarki dan kewenangan, drainase yang menjadi kewenangan kabupaten adalah drainase sekunder yaitu yang sejajar dengan jalan kabupaten. Kebutuhan drainase Kabupaten 490,15 km saat ini baru terbangun sekitar 61,60%. Dari data capaian penyediaan jaringan drainase di Kabupaten Tegal terdapat peningkatan panjang drainase dari tahun ke tahun.



Tabel 2.24
Panjang Drainase Jalan Kabupaten Tahun 2017-2021

No	Uraian	Panjang Drainase Jalan Per Tahun (km)				
		2017	2018	2019	2020	2021
a	Jalan Kabupaten	847,27	847,27	847,27	847,27	847,27
b	Jalan yang harus berdrainase	477,46	477,46	490,15	490,15	490,15
c	Jalan yang tidak harus berdrainase	169,45	169,45	160,79	160,79	55,19
d	Jalan yang berdrainase	232,79	254,41	277,95	286,35	301,93
e	% Jalan berdrainase (d/b)	48,76	53,28	57,85	58,42	61,60

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal, Tahun 2021

Tujuan 3 : Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata

Dalam rangka mewujudkan perekonomian rakyat yang kuat berbasis pertanian, industri pengolahan dan pariwisata, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 1 (satu) indikator utama. Adapun realisasi capaian tujuan tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 2.25
Capaian Kinerja Tujuan Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian 2021	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen; Tahun	3,2	3,72	116,25	4,85-5,45
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					116,25	

Rata-rata capaian kinerja tujuan mewujudkan perekonomian rakyat yang kuat berbasis pertanian, industri pengolahan dan pariwisata dengan didukung 1 (satu) indikator pada tahun 2021 sebesar 3,72 atau 116,25 % dari target tahun 2021 dengan kategori **Sangat Tinggi**. Untuk realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal tahun 2021 sebesar 3,2 sedangkan target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 4,85-5,45 sehingga belum melampaui target akhir. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Tegal harus terus meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Tegal untuk bisa mencapai target akhir RPJMD.

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 mengalami fluktuatif, hal ini disebabkan karena pandemi covid-19 yang melanda hingga saat ini.



Tabel 2.26
Capaian Kinerja Tujuan Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis
Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata
Tahun 2019-2021

NO	Indikator Kinerja Utama	2019			2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Pertumbuhan Ekonomi	-	5,56	-	5,48	-1,48	-26,64	3,2	3,72	116,25

Berdasarkan data Tahun 2021, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal sebesar 3,72% menduduki peringkat ketiga dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Pertumbuhan ekonomi paling rendah adalah di Kabupaten Brebes (2,33%) sedangkan Pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi adalah Kabupaten Batang (4,88%). Capaian kenaikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal tentunya tak lepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh segenap komponen yang ada di Kabupaten Tegal sehingga roda perekonomian mulai bangkit sejak dilanda pandemi covid-19, upaya yang dilakukan untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi tersebut di antaranya melalui kebijakan yang memberikan kemudahan berinvestasi dan berusaha sehingga pertumbuhan sektor industri pengolahan utamanya padat karya diharapkan akan meningkat dan lapangan kerja baru pun akan terbuka lebih luas, termasuk peluang berwirausaha di kalangan pemuda dan usaha mikro, kecil dan menengah. Salah satu bentuk usaha yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas terkait dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi :

1. Telah dilakukan Pembinaan, Pelatihan, Pendampingan, dan Fasilitasi bagi UMKM, dimana hingga tahun 2021, terdapat 7 Usaha Mikro yang pencapaian aset dan omsetnya mendekati standar Usaha Kecil. Untuk jumlah Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Tegal yang telah terdata hingga akhir tahun 2021 sejumlah 97.563 Pelaku, dan omset UMKM tahun 2021 sebesar Rp. 1.756.134.000.000,-.
2. Program Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal yang merupakan sebuah program pemajuan kewirausahaan untuk mempersiapkan daerah dalam bersaing dengan daerah lain di lini kewirausahaan pemuda. Bentuk kegiatan dari program ini ialah kompetisi



penstrategian berwirausaha dan juga pengembangan wirausaha. Harapannya dengan wirausaha muda pemula yang berkualitas akan menciptakan perusahaan-perusahaan yang bersaing di strata atas yang tentunya membawa Kabupaten Tegal menjadi lebih baik di sisi perekonomiannya.

3. Pembangunan di sektor pertanian khususnya pertanian tanaman pangan dari tahun ke tahun terus ditingkatkan untuk dapat memelihara kemandirian swasembada pangan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperbaiki keadaan gizi melalui penganeekaragaman jenis bahan pangan. Pada tahun 2021, produksi padi yaitu 414.551 GKG dan produksi padi setara beras 260.089 ton. Beberapa produktivitas tanaman palawija di Kabupaten Tegal tahun 2021 yaitu jagung tercatat 128.532 ton dan kedelai 107 ton. Secara umum, produksi beberapa jenis sayuran semusim (bawang merah, bawang putih, kentang, kubis, cabe, tomat, wortel, dll) selama tahun 2019- 2021 mengalami fluktuasi. Demikian halnya dengan produksi beberapa jenis buah tahunan seperti mangga, durian, jeruk siam, pisang, pepaya, salak, rambutan, sawo dll.

Tabel 2.27
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se Eks Karisidenan
Pekalongan Tahun 2021

No	Kab/Kota	2021
1	Batang	4,88
2	Pemalang	4,19
3	Kab. Tegal	3,72
4	Kota Pekalongan	3,59
5	Pekalongan	3,54
6	Kota Tegal	3,12
7	Brebes	2,33

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2021

Selain itu juga pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha pada tahun 2021 mengalami kenaikan, adapun kenaikan tertinggi dicapai oleh kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 6,87%, sedangkan seluruh kategori dicapai oleh kategori ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2021 mencatat pertumbuhan yang positif. Adapun kategori-kategori lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan diantaranya kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2,80%; kategori Pertambangan dan



Penggalian sebesar 4,35%; kategori Industri Pengolahan sebesar 4,28%; kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 2,87%; kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 6,50%; kategori Konstruksi sebesar 4,29%; kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,07%; kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 3,23%; kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 4,54%; kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 6,87%; kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 1,76%; kategori Real Estat sebesar 2,08%; kategori Jasa Perusahaan sebesar 2,37%; kategori Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar -0,10%; kategori Jasa Pendidikan sebesar 0,72% dan kategori Jasa Lainnya sebesar 0,63%.

Tabel 2.28
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%)
Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha/Industry	2017	2018	2019	2020	2021
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.35	1.44	-0,69	2,18	2,80
B Pertambangan dan Penggalian	6.50	5.19	3,55	2,05	4,35
C Industri Pengolahan	6.95	6.66	6,44	-0,66	4,28
D Pengadaan Listrik dan Gas	5.65	4.78	5,74	0,77	2,87
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.09	4.30	3,40	2,40	6,50
F Konstruksi	7.22	5.85	4,84	-2,68	4,29
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.80	4.43	6,81	-4,20	4,07
H Transportasi dan Pergudangan	6.09	6.50	7,13	-29,18	3,23
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.33	6.74	8,68	-5,45	4,54
J Informasi dan Komunikasi	7.50	9.51	10,70	14,96	6,87
K Jasa Keuangan dan Asuransi/	5.09	4.24	3,90	2,32	1,76
L Real Estat	4.50	4.07	4,99	-0,73	2,08
M Jasa Perusahaan	6.50	6.14	10,16	-6,69	2,37
N Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3.25	3.46	3,61	-0,91	-0,10
O Jasa Pendidikan	6.57	8.40	6,02	-0,42	0,72
P Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.10	8.78	6,74	3,02	1,78
Q Jasa lainnya	5.43	7.70	8,92	-5,02	0,63
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product	5,38	5,51	5,56	-1,48	3,72

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2021

Tujuan 4 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 1 (satu) indikator utama. Adapun realisasi capaian tujuan tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :



Tabel 2.30
Capaian Kinerja Tujuan Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian 2021	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai; Tahunan	68,73	68,79	100,08	70,83
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					100,08	

Rata-rata capaian kinerja tujuan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung 1 (satu) indikator pada tahun 2021 sebesar 100,08 % atau dengan kategori **Sangat Tinggi**. Untuk realisasi Nilai IPM Kabupaten Tegal tahun 2021 sebesar 68,79 sedangkan target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 70,83 sehingga belum melampaui target akhir dan progres capaian tahun 2021 terhadap capaian target akhir RPJMD adalah sebesar 97,11%.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan agregasi dari tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tegal tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Kabupaten Tegal tahun 2021 adalah sebesar 68,79 atau tumbuh 0,58 persen (meningkat 0,40 poin) dibandingkan capaian tahun 2020. Peningkatan IPM Kabupaten Tegal tahun 2021 didukung oleh peningkatan disemua komponen penyusunnya. Hal ini berbeda dengan kondisi sebelumnya. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 telah menyebabkan perlambatan pertumbuhan IPM yang disebabkan oleh penurunan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita telah merangkak naik 0,92 persen dibanding tahun 2020.

Dari sisi kesehatan, bayi di Kabupaten Tegal yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan dapat hidup hingga 71,72 tahun, lebih lama 0,12 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) Kabupaten Tegal menempati posisi terendah kedua setelah Kabupaten Brebes maupun dibandingkan Kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah. UHH Kabupaten Tegal lebih tinggi 2,12 tahun jika dibandingkan Kabupaten Brebes. Jika bayi baru lahir di Kabupaten Tegal memiliki harapan hidup hingga usia 71,72 tahun, maka bayi baru lahir di Kabupaten Brebes memiliki harapan hidup lebih pendek,



mencapai 69,54 tahun.

Dari sisi pendidikan, anak-anak di Kabupaten Tegal yang berusia 7 tahun pada tahun 2021, memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,89 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat SMA atau Diploma I. Angka ini meningkat cukup tajam yaitu 1,74 persen atau naik 0,22 tahun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 12,67 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,01 tahun, dari 6,98 tahun menjadi 6,99 tahun pada tahun 2021. Dari sisi kesehatan, bayi di Kabupaten Tegal yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,72 tahun, lebih lama 0,12 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Perkembangan IPM Kabupaten Tegal dari tahun 2017 – 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.31
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2017 – 2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
IPM :	66,44	67,33	68,24	68,39	68,79
Angka Harapan Hidup (tahun)	71,14	71,28	71,40	71,60	71,72
Harapan Lama Sekolah (EYS)	12,06	12,34	12,58	12,67	12,89
Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	6,55	6,70	6,86	6,98	6,99
Pengeluaran (Ribuan Rupiah/orang/tahun)	9.136	9.433	9.798	9.612	9.700

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2021

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tetangga khususnya di Eks Karisidenan Pekalongan, pada Tahun 2021 IPM Kabupaten Tegal sebesar 68,79 % masih menduduki peringkat ketiga terendah dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan sebagai tahun 2020 kemarin. IPM paling rendah adalah di Kabupaten Brebes (66,32) sedangkan IPM yang paling tinggi adalah Kota Tegal (75,52).

Tabel 2.32
IPM Kabupaten/Kota se Eks Karisidenan Pekalongan Tahun 2021

No	Kab/Kota	2021
1	Kota Tegal	75,52
2	Kota Pekalongan	75,40
3	Pekalongan	70,11
4	Batang	68,92
5	Kab. Tegal	68,79



6	Pemalang	66,56
7	Brebes	66,32

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2021

Sasaran 4 : Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender

Salah satu pelayanan yang di berikan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk menunjang program-program pemerintahan yang salah satunya tertuang dalam sasaran meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan gender yang didukung oleh 2 (dua) indikator utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 2.33

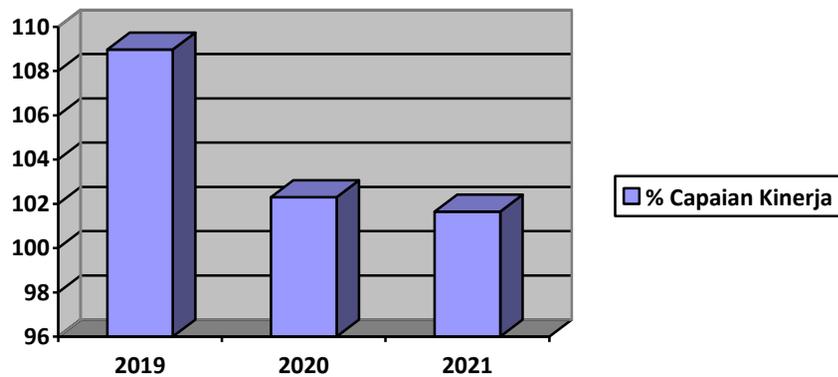
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian 2021	% Capaian 2020	% Capaian 2019	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	%	69,70	72,12	103,47	104,73	98,7	71,40
2.	Indeks pembangunan gender (IPG)	%	86,94	87,53	100,67	99,87	131,98	87,21
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					102,07	102,30	108,97	

Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan gender dengan didukung 2 (dua) indikator pada tahun 2021 sebesar 102,07 % atau dengan kategori **Sangat Tinggi**. Capaian tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mampu mencapai 102,30%. Untuk realisasi Indeks pemberdayaan gender (IDG) Kabupaten Tegal tahun 2021 sebesar 72,12 sedangkan target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 71,40 sehingga sudah melampaui target akhir. Dan realisasi Indeks pembangunan gender (IPG) Kabupaten Tegal tahun 2021 sebesar 87,53 sedangkan target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 87,21 sehingga telah melampaui target akhir. Adapun perkembangan capaian kinerja sasaran meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan gender dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar 2.3
Diagram Capaian Kinerja Sasaran Pemberdayaan dan Pembangunan Gender



Capaian masing-masing indikator pada sasaran pemberdayaan dan pembangunan gender adalah sebagai berikut :

1. Indeks pemberdayaan gender

Realisasi indikator indeks pemberdayaan gender pada tahun 2021 yaitu sebesar 72,12 atau mencapai 103,47% dari target 69,70 sehingga capaian ini masuk dalam kategori sangat tinggi. Realisasi tahun 2021 lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yaitu 72,58 atau sebesar 104,73 %.

Tabel 2.34
Capaian Indikator Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2019-2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	%	69,70	72,12	103,47	72,58	70,16	71,40

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen, serta dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajer, professional, administrasi, teknisi. Kesimpulannya, IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

Penurunan nilai IDG pada tahun 2021 disebabkan karena pandemi covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia, sehingga hal tersebut mempengaruhi berbagai sektor kehidupan, menurunnya sumbangsih pendapatan masyarakat dan kualitas kehidupan masyarakat. Untuk



menghadapi pandemi covid-19 terdapat beberapa program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan, antara lain kegiatan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP) yang dilaksanakan oleh Dinas P3AP2 dan KB Kab. Tegal bekerjasama dengan Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Prov. Jawa Tengah bagi perempuan di Kabupaten Tegal.

Gambar 2.4
PPEP Pembuatan Bolu dan Hidroponik



Gambar 2.5
Kegiatan Pendidikan Perempuan Berpolitik



2. Indeks pembangunan gender

Realisasi indikator indeks pembangunan gender pada tahun 2021 yaitu sebesar 86,79 dari target 87,53 atau mencapai 100,67 % atau dengan kategori **Sangat Tinggi**. Realisasi tahun 2021 lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yaitu 86,74 atau sebesar 99,87%, capaian tahun 2021 ini juga telah melampaui target akhir RPJMD untuk nilai indeks pembangunan gender sebesar 87,21.



Tabel 2.35
Capaian Indikator Indek Pembangunan Gender tahun 2019-2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Indeks pembangunan gender (IPG)	%	86,94	87,53	100,67	86,74	86,74	87,21

IPG (indeks pembangunan gender) dan IDG (indeks pemberdayaan gender) adalah indikator yang dipergunakan untuk melihat kesenjangan dan akses perempuan dalam pembangunan. IPG dirumuskan sebagai rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan dan IPM laki-laki dimana jika angka IPG semakin mendekati angka 100 maka kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki semakin kecil. IPM dibentuk oleh beberapa komponen, yaitu Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran perkapita yang disesuaikan.

Penurunan nilai IPG pada tahun 2021 disebabkan karena pandemi covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia, yang mana penularan covid-19 juga mempengaruhi Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan (PPP) Perempuan Kab. Tegal, dimana menurut BPS PPP pada Tahun 2021 sebesar 7.461.000 turun dari tahun sebelumnya 7.615.000 per orang/tahun.

Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas layanan pendidikan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 2 (dua) indikator utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian 2021	% Capaian 2020	% Capaian 2019	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,77	6,99	103,25	103,41	98,98	6,85



2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,40	12,89	103,95	102,43	99,84	12,53
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					103,60	102,92	99,41	

Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas layanan pendidikan dengan didukung 2 (dua) indikator pada tahun 2021 tercapai sebesar 103,60 % atau dengan kategori Capaian **Sangat Tinggi**. Rata-rata capaian tersebut meningkat tipis 0,68% dari tahun sebelumnya yang mencapai 102,92%. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun masih dalam situasi pandemi covid-19 yang belum berakhir, namun tingkat kesadaran masyarakat akan betapa pentingnya pendidikan semakin meningkat. Dalam hal ini Dinas Pendidikan pun menyambut baik akan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal terus berupaya dalam pemberian pelayanan pendidikan terhadap masyarakat, diantaranya dengan mengalokasikan APBD pada program-program dan kegiatan yang dapat menunjang peningkatan pelayanan pendidikan dalam hal ini pemenuhan kebutuhan sarana prasarana sekolah baik dari mulai Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, maupun pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Selain itu Dinas Pendidikan juga mengalokasikan Dana untuk penyediaan biaya personil peserta didik SD (bagi siswa yang kurang mampu), dan penyediaan biaya personil peserta didik nonformal/kesetaraan.

Adapun perkembangan capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas layanan pendidikan dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 2.6
Diagram Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan



Capaian masing-masing indikator pada sasaran meningkatnya kualitas layanan pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Rata-rata Lama Sekolah

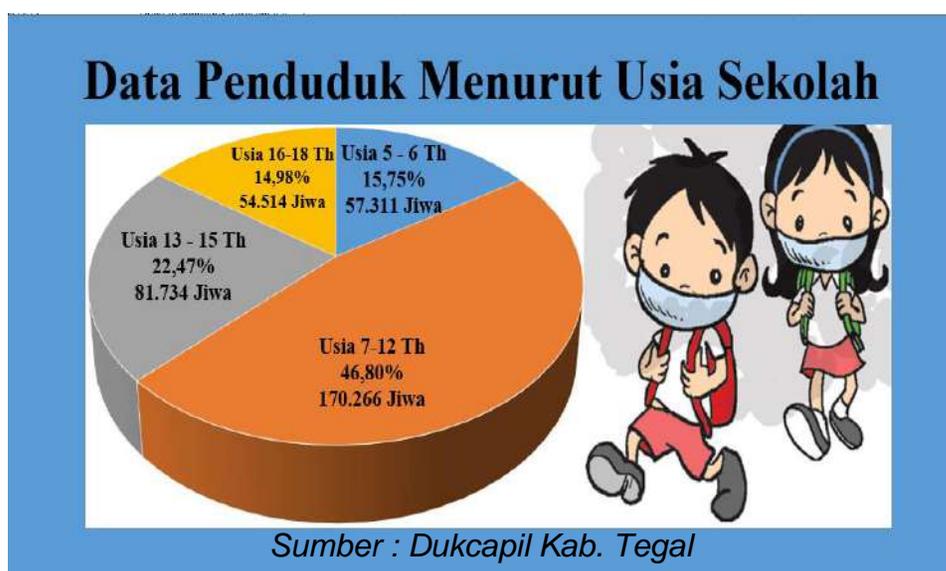
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Tegal dapat direalisasikan 6,99 dari angka yang ditargetkan yaitu 6,77 atau dengan kata lain prosentase capaian pada Tahun 2021 mencapai 103,25% dengan kategori capaian Sangat Tinggi. Setiap tahun rata-rata lama sekolah mengalami kenaikan dan capaian tahun 2021 sebesar 6,99 telah melebihi target akhir RPJMD sebesar 6,85 sehingga progress capaian tahun ini sebesar 102% dari target akhir RPJMD.

Tabel 2.37
Capaian Kinerja Indikator Utama Rata-Rata Lama Sekolah

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,77	6,99	103,25	6,98	6,86	6,85

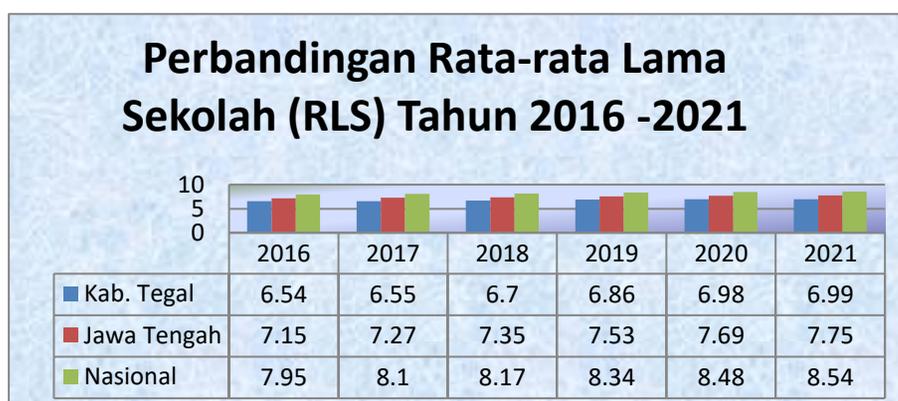
Rata-Rata Lama Sekolah merupakan rata-rata setiap orang berusia 25 tahun ke atas di Kabupaten Tegal yang mengenyam pendidikan formal dan non formal. Dari data tersebut, pada tahun 2021, diketahui bahwa setiap orang di Kabupaten Tegal rata-rata telah berpendidikan hampir kelas 7 (Kelas 1 SMP).

Gambar 2.7
Penduduk menurut kelompok usia sekolah



Akan tetapi, walaupun mengalami peningkatan Rata-rata lama sekolah di setiap tahunnya, sehingga Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tegal pada tahun 2021 menunjukkan angka 6,99, namun hal ini berarti tingkat rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tegal masih tergolong rendah, karena angka tersebut menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Tegal yang berumur 25 tahun ke atas hanya mampu mengenyam pendidikan sampai kelas 7 saja atau belum sampai lulus SMP. Kondisi ini perlu ditingkatkan di masa-masa yang akan datang, agar rata-rata penduduk Kabupaten Tegal bisa mengenyam pendidikan setingkat SMA. Maka bila dibandingkan dengan data rata-rata lama sekolah pada tingkat provinsi dan nasional kita bisa melihat grafik berikut ini :

Gambar 2.8
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah
Tahun 2016-2021



2. Harapan Lama Sekolah

Pada indikator kinerja harapan lama sekolah sudah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2021 dari angka 12,40 telah tercapai 12,89 atau dengan prosentase capaian 103,95% dan termasuk dalam kategori Capaian Sangat Tinggi. Angka tersebut menunjukkan lamanya waktu sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu (7 tahun keatas) di masa mendatang adalah selama 12,89 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan Lulus SLTA.

Tabel 2.38
Capaian Kinerja Indikator Harapan Lama Sekolah

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,40	12,89	103,95	12,67	12,58	12,53



Peningkatan Harapan lama sekolah Kabupaten Tegal pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan adanya peningkatan dari 12,58 tahun pada capaian tahun 2019 meningkat menjadi 12,67 tahun pada tahun 2020 dan 12,89 pada Tahun 2021.

Sedangkan apabila dibandingkan target akhir pada RPJMD 2019-2024 sebesar 12,53 untuk Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2024. Dengan demikian indikator angka harapan lama sekolah telah mencapai 102,87% menuju tahun 2024. Solusi atau upaya untuk mencapai target akhir RPJMD adalah intervensi program kegiatan pada Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Program Pendidikan Non Formal (PNF) sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2019-2024 dan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Pada tahun 2021 indikator angka harapan lama sekolah didukung pada Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, dan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terdiri dari 6 kegiatan dan anggaran sebesar Rp. 136.749.447.300,- dengan fokus kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pengelolaan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan) dengan anggaran sebesar Rp. 38.337.186.950,- untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia pada faktor pendukung Pendidikan Non Formal (kesetaraan) Paket A, B dan C dengan gerakan “*Ayo Sekolah Maning*” serta Terhadap hasil pada indikator Angka Harapan Lama Sekolah terhadap program kegiatan dinilai efektif dan berhasil.

Berikut ini kami sajikan grafik perbandingan capaian harapan lama sekolah untuk Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dan Tingkat Nasional dari Tahun 2016 s.d. Tahun 2021.



Gambar 2.9
Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah
Tahun 2016-2021



Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2021

Mencermati angka yang ada, progres pembangunan pendidikan di Kabupaten Tegal cukup menggembirakan. Setiap tahun grafik peningkatan kinerjanya cukup tinggi, sehingga perlu dipertahankan di tahun-tahun yang akan datang.

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tetangga khususnya di Eks Karisidenan Pekalongan, Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tegal Tahun 2021 adalah 12,89 tahun menduduki peringkat kedua tertinggi dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Harapan Lama Sekolah (HLS) paling rendah adalah di Kabupaten Pemalang (11,96 tahun) sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang paling tinggi adalah Kota Tegal (13,07 tahun).



Gambar 2.10
Perbandingan Angka HLS di Eks Karisidenan Pekalongan



Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2021

Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 1 (satu) indikator utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 2.39
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian 2021	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,24	71,72	100,67	71,39
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					100,67	

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas layanan kesehatan dengan didukung 1 (satu) indikator (Angka Harapan Hidup) pada tahun 2021 sebesar 71,72 atau 100,67% dengan kategori **Sangat Tinggi**. Capaian tersebut sudah melebihi dari target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 71,39 sehingga telah melampaui target akhir.

Capaian angka harapan hidup dalam kurun waktu 3 tahun terakhir bahkan 5 tahun terakhir mengalami kenaikan setiap tahunnya. Adapun



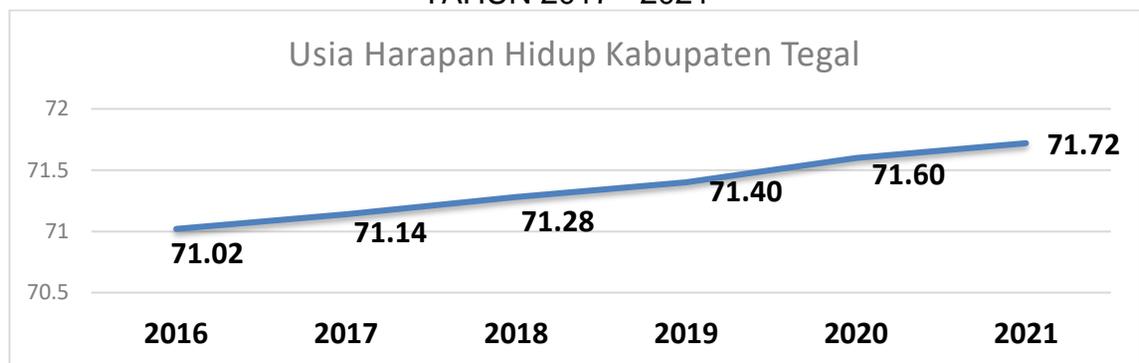
capaian 3 tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 2.40
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan
Tahun 2019-2021

NO	Indikator Kinerja Utama	2019			2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Angka Harapan Hidup	69,63	71,40	102,54	71,19	71,60	100,58	71,24	71,72	100,67

Dari tabel 2.40 diatas dapat dilihat bahwa secara realisasi angka harapan hidup Kabupaten Tegal dari Tahun 2019 – 2021 mengalami kenaikan walaupun secara persentase fluktuatif hal ini disebabkan target pada tahun 2019 masih dibawah target tahun 2020 dan 2021. Sedangkan Angka Harapan Hidup Kabupaten Tegal dalam lima tahun terakhir tergambar pada grafik berikut.

Gambar 2.11
GRAFIK ANGKA HARAPAN HIDUP KAB. TEGAL
TAHUN 2017 - 2021



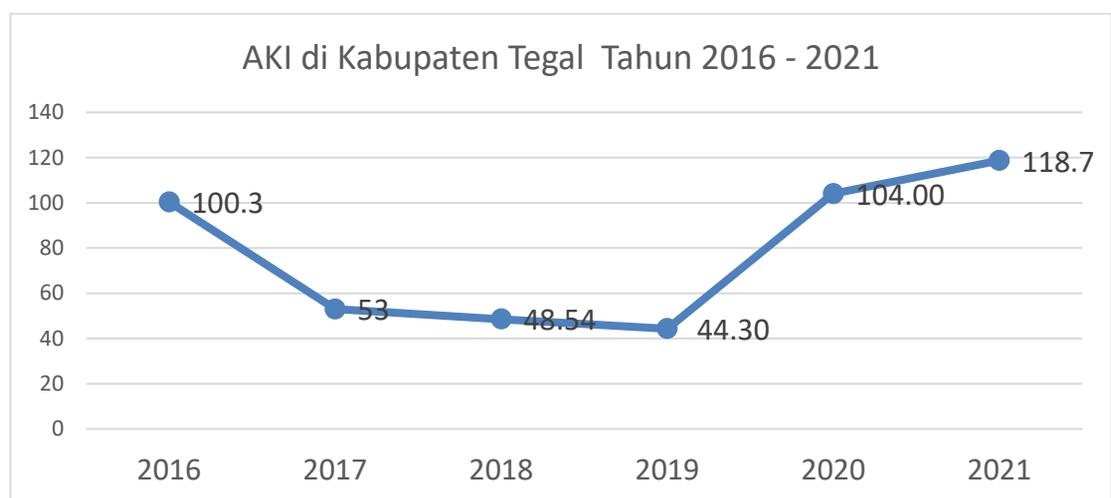
Sumber Data: BPS Kabupaten Tegal, 2021

Secara umum, angka harapan hidup (AHH) merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan penduduk di bidang kesehatan. Angka harapan hidup adalah perkiraan lama hidup rata rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. AHH merupakan gambaran keberlangsungan hidup seseorang yang salah satunya dapat dilihat dari suatu perwujudan derajat kesehatan masyarakat. AHH sangat dipengaruhi oleh Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA), serta peningkatan capaian pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.



Pemerintah Kabupaten Tegal telah berupaya keras untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) selama pandemi Covid 19. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa saat pandemi COVID-19 menyebar, pelayanan kesehatan memiliki beban tambahan dalam melakukan skrining, pengujian laboratorium dan perawatan intensif, tersebut berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak. AKI di Kabupaten Tegal meningkat sejak pandemi Covid-19, dari 12 kasus pada tahun 2019, meningkat menjadi 30 kasus pada tahun 2021.

Gambar 2.12
AKI KAB. TEGAL TAHUN 2016 - 2021



Penyebab kematian ibu pada tahun 2021 sebagian besar karena infeksi virus covid 19, dari 30 kasus kematian ibu melahirkan pada tahun 2021, sebanyak 14 kasus (46,67%) karena terkonfirmasi Covid 19, sedangkan penyebab lainnya adalah ibu hamil menderita hipertensi 23,33%, perdarahan (16,67%) dan penyebab lainnya sebesar 13,33%. Adanya pandemi covid 19 menyebabkan pelayanan posyandu terhenti pada saat masa darurat covid 19, serta pembatasan pelayanan posyandu setelahnya. Permasalahan lain yang terjadi adalah keterbatasan ruang isolasi dan ruang bersalin untuk ibu bersalin terkonfirmasi Covid 19 di rumah sakit. Hal ini menyebabkan keterlambatan penanganan ibu bersalin terkonfirmasi Covid 19.

Kekhawatiran tenaga kesehatan dan para ibu bahwa mereka dapat terinfeksi virus corona juga merupakan faktor yang menghambat layanan gizi dan KIA selama masa pandemi COVID-19. Tenaga kesehatan sebenarnya khawatir tertular saat melayani pasien, tetapi mereka masih bersedia melayani. Ibu-ibu, terutama yang memiliki bayi, juga



mengungkapkan kekhawatirannya untuk datang ke puskesmas bahkan saat mengalami keluhan. Mereka pada umumnya lebih memilih untuk pergi ke bidan yang membuka praktik secara mandiri atau klinik karena keduanya tidak seramai puskesmas.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah kematian ibu, terutama pada masa pandemi Covid 19. Hal – hal yang sudah dilakukan antara lain:

1. Posyandu tetap dilaksanakan pada daerah zona hijau dengan protocol kesehatan dan menerapkan sistem shifting sasaran serta pelaksanaan dilaksanakan di ruang terbuka.
2. Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga kesehatan baik Rumah Sakit maupun Puskesmas
3. Pengadaan alat desinfektan
4. Pelaksanaan rapid test dan PCR
5. Merubah alur pelayanan di Puskesmas khususnya di PONED dan Mampu Persalinan
6. Melakukan skrining semua ibu hamil dengan rapid test dan swab 10 hari sebelum HPL (Hari Perkiraan Lahir).
7. Merujuk ibu bersalin dengan hasil rapid test reaktif atau tes PCR positif.
8. Penambahan ruang isolasi dan ruang bersalin untuk ibu bersalin terkonfirmasi Covid 19 di rumah sakit
9. PONED tetap menyediakan APD lengkap untuk menangani ibu bersalin dengan rapid test reaktif atau tes PCR positif.
10. Terus mensosialisasikan 5 M pada masyarakat

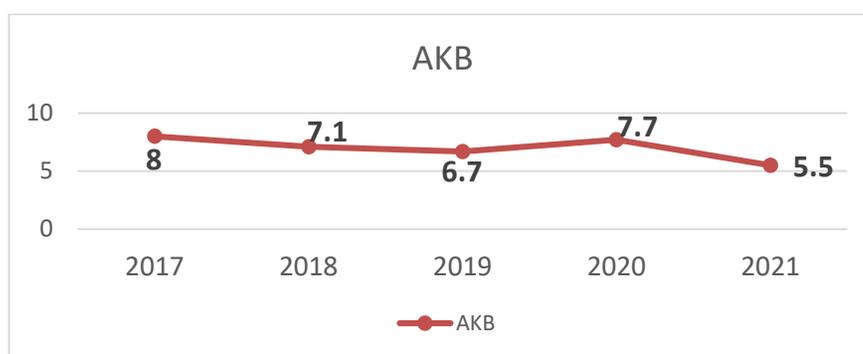
Gambar 2.13
PELAKSANAAN POSYANDU DENGAN PROTOKOL KESEHATAN
DI KAB. TEGAL TAHUN 2021



Angka Kematian Bayi (AKB) dapat didefinisikan sebagai banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. AKB merupakan indikator yang biasanya digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu banyak upaya kesehatan yang dilakukan dalam rangka menurunkan AKB.

Kecenderungan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Tegal dalam kurun lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. AKB tahun 2021 yaitu sebesar 5,1 per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini lebih tinggi dari AKB tahun 2020 yaitu sebesar 6,9 per 1000 kelahiran hidup. Angka tersebut sudah melampaui target pada Renstra Dinas Kesehatan, yaitu sebesar 6,9 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2021. Secara rinci AKB di Kabupaten Tegal dalam kurun lima tahun adalah sebagai berikut:

Gambar 2.14
ANGKA KEMATIAN BAYI DI KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2017 – 2021



Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Penyebab kematian bayi paling umum di Indonesia adalah karena asfiksia (kondisi saat bayi kekurangan oksigen sebelum atau selama kelahiran), infeksi (sepsis, pneumonia, tetanus, diare), dan berat badan lahir rendah. Dinas Kesehatan Kab. Tegal telah berupaya untuk memberikan pelayanan kesehatan pada bayi secara optimal, terutama pada masa pandemic Covid 19.

Permasalahan yang terjadi pada pelayanan kesehatan bayi antara lain:

1. Adanya pandemi covid 19 menyebabkan pelayanan ibu bersalin dan bayi baru lahir terhambat. Terutama pada puskesmas yang ditutup sementara, atau karena petugas kesehatan yang terkonfirmasi positif covid 19 tidak bisa memberi pelayanan



2. Adanya kebijakan pembatasan kontak langsung dengan bayi baru lahir saat pelayanan kesehatan

3. Masih ada bayi baru lahir yang ditangani dukun bayi

Upaya yang sudah dilakukan dalam mengatasi masalah – masalah tersebut antara lain:

1. Pelayanan puskesmas PONEB dan mampu persalinan tetap dibuka selama 24 jam

2. Pemenuhan APD untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir

3. Pembinaan dukun bayi

4. Sosialisasi pentingnya penanganan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan yang kompeten pada keluarga masyarakat

Gambar 2.15
PEMBERIAN IMUNISASI PADA BAYI DENGAN PROTOKOL KESEHATAN
DI KAB. TEGAL TAHUN 2021



Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Angka Kematian Balita (AKABA) merupakan jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. AKABA merepresentasikan peluang terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun. AKABA dapat pula menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak balita, tingkat pelayanan KIA/Posyandu, tingkat keberhasilan program KIA/Posyandu, dan kondisi sanitasi lingkungan.

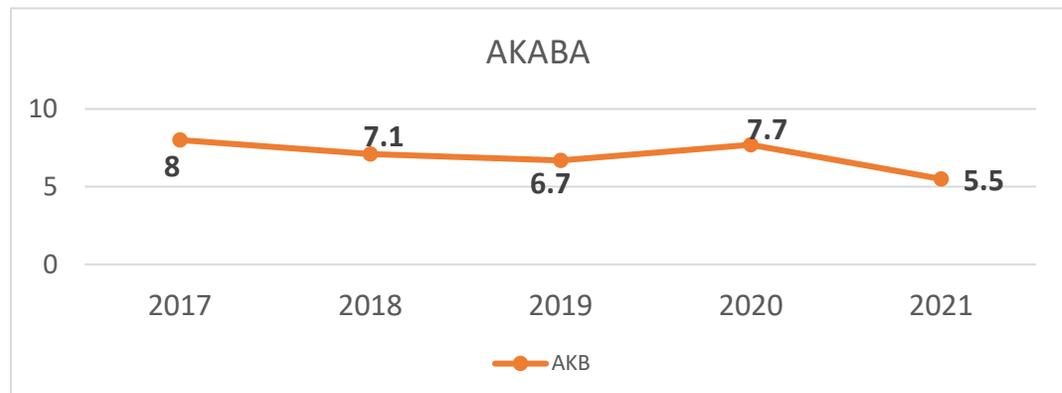
AKABA di Kabupaten Tegal pada tahun 2021 yaitu sebesar 5,5 per 1000 kelahiran hidup, meningkat jika dibandingkan AKABA tahun 2019 yaitu sebesar 7,7 per 1000 kelahiran hidup. Angka tersebut sudah memenuhi target renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal tahun 2019-2024, yaitu 7,7 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2021.

Kecenderungan AKABA di Kabupaten Tegal dalam waktu lima



tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 2.16
GRAFIK ANGKA KEMATIAN BALITA DI KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2017 – 2021



Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Penyebab kematian balita antara lain infeksi pernafasan, komplikasi bayi prematur, diare, asfiksia, sepsis, cacat bawaan lahir, meningitis, dan kekurangan zat besi. Permasalahan yang terjadi selama tahun 2021 antara lain:

1. Adanya pandemi covid 19 menyebabkan pelayanan posyandu balita terhenti pada saat masa darurat covid 19, serta pembatasan pelayanan posyandu setelahnya.
2. Adanya kebijakan pembatasan kontak langsung dengan balita saat pelayanan kesehatan

Berbagai upaya dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kab. Tegal dalam menurunkan kematian balita, antara lain:

1. Posyandu tetap dilaksanakan pada daerah zona hijau dengan protocol kesehatan dan menerapkan sistem shifting sasaran serta pelaksanaan dilaksanakan di ruang terbuka.
2. Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga kesehatan baik Rumah Sakit maupun Puskesmas
3. Pemberian vit A
4. Penanganan yang tepat pada balita gizi buruk

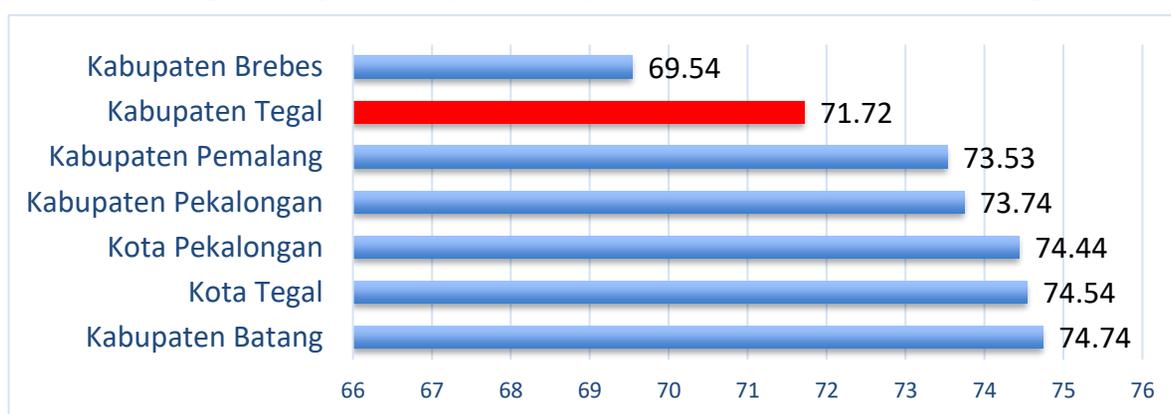
AHH Kabupaten Tegal cukup tinggi. Pada tahun 2021 angkanya menunjukkan 71,74 tahun. Angka ini merupakan peningkatan dari tahun tahun sebelumnya, yaitu 71,60 tahun pada tahun 2020 atau 71,43 tahun pada tahun 2021. Tingginya AHH ini membutuhkan kebijakan penanganan lansia yang komprehensif. Semakin banyak penduduk yang memenuhi AHH



mengindikasikan jumlah lansia yang semakin banyak. Lansia yang tidak produktif akan menjadi beban dependensi rasio bagi penduduk usia.

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tetangga khususnya di Eks Karisidenan Pekalongan, AHH Kabupaten Tegal Tahun 2021 adalah 71,72 tahun menduduki peringkat kedua terendah dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Angka Harapan Hidup (AHH) paling rendah adalah di Kabupaten Brebes (69,33 tahun) sedangkan Angka Harapan Hidup (AHH) yang paling tinggi adalah Kabupaten Batang (74,69 tahun).

Gambar 2.17
Perbandingan Angka Harapan Hidup di Eks Karisidenan Pekalongan



Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2021

Tujuan 5 : Menurunkan Kesenjangan Kemiskinan

Dalam rangka menurunkan kesenjangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 1 (satu) indikator utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 2.41
Capaian Kinerja Tujuan Menurunkan Kesenjangan Kemiskinan

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian 2021	% Capaian 2020	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Indek Gini	Persen, Tahun	0,303	0,368	78,87	94,79	0,289
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					78,87	94,79	

Capaian kinerja tujuan menurunkan kesenjangan kemiskinan dengan didukung 1 (satu) indikator (Indeks Gini) pada tahun 2021 sebesar 78,87% atau dengan kategori **Tinggi**. Untuk realisasi Indeks Gini Kabupaten Tegal tahun 2021 sebesar 0,368 lebih rendah dibanding tahun



2020 sebesar 0,359 sedangkan target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 0,289 sehingga belum melampaui target akhir.

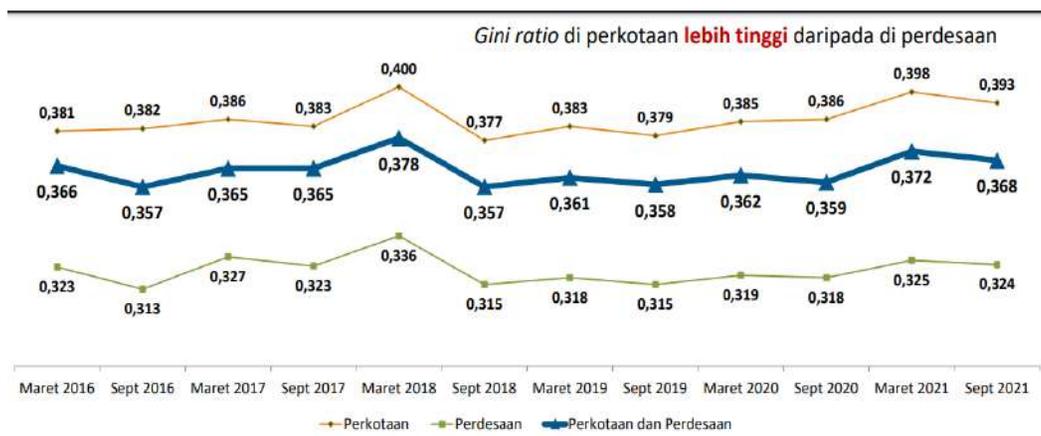
Indek Gini merupakan ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks Gini Kabupaten Tegal menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi hampir oleh setiap daerah di Indonesia bahkan dunia. Beberapa hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal dalam penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, maka pada tahun 2021 Belanja Daerah Kabupaten Tegal diarahkan pada:

1. Pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha utamanya UMKM dan IKM yang terdampak.
2. Pemulihan perekonomian masyarakat terdampak diantaranya pada sektor ketenagakerjaan dengan system padat karya dan peningkatan daya beli masyarakat.
3. Fokus pada upaya penanganan masalah sosial dan kemiskinan yang diantaranya sebagai dampak dari pandemi Covid-19.
4. Fokus pada upaya kesehatan masyarakat dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
5. Memenuhi alokasi prosentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundangundangan yaitu untuk 20% fungsi pendidikan dan 10% fungsi kesehatan, sedangkan mandatory untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi.
6. Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah dan daerah melalui :
 - a. Bantuan keuangan kepada kabupaten/kota yang diarahkan pada kegiatan yang dapat mendorong perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
 - b. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa diarahkan untuk peningkatan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat desa. Terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan refocusing anggaran.



gambar 2.18

Perkembangan Gini Ratio di Jawa Tengah periode Maret 2016– September 2021.



Sumber : BPS Jawa Tengah Tahun 2021

Indek gini tahun 2021 sebesar 0,368 turun 0,004 poin dibanding indek gini Maret 2021 (0,372) dan naik 0,009 poin dibanding Gini Ratio September 2020 (0,359) sehingga ketimpangan mengalami penurunan pada periode Maret 2021 – September 2021.

Distribusi Pengeluaran Penduduk per Kapita dan Gini Ratio di Jawa Tengah, September 2020 – September 2021.

Tabel 2.42

Daerah/Tahun	Kelompok Penduduk			Gini Ratio	
	Penduduk 40 persen Terbawah	Penduduk 40 persen Menengah	Penduduk 20 persen Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan	September 2020	18,24	35,13	46,53	0,386
	Maret 2021	17,17	35,51	47,32	0,398
	September 2021	17,45	35,38	47,16	0,393
Perdesaan	September 2020	21,15	37,95	40,90	0,318
	Maret 2021	20,19	39,19	40,62	0,325
	September 2021	20,34	38,96	40,70	0,324
Perkotaan dan Perdesaan	September 2020	19,45	36,10	44,45	0,359
	Maret 2021	18,34	36,76	44,90	0,372
	September 2021	18,54	36,66	44,80	0,368

Sumber : BPS Jawa Tengah Tahun 2021

Sasaran 7 : Menurunkan Angka Kemiskinan

Dalam rangka mewujudkan sasaran menurunkan angka



kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 1 (satu) indikator utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 2.42
Capaian Kinerja Sasaran Menurunkan Angka Kemiskinan

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian 2021	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Persentase penduduk miskin	%	8,41	8,60	97,74	5,50
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					97,74	

Capaian kinerja sasaran menurunkan angka kemiskinan dengan didukung 1 (satu) indikator persentase penduduk miskin pada tahun 2021 adalah 8,60 atau sebesar 97,74% atau dengan kategori **Tinggi**, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu sebesar 5,50 capaian tahun 2021 belum dapat melampaui target.

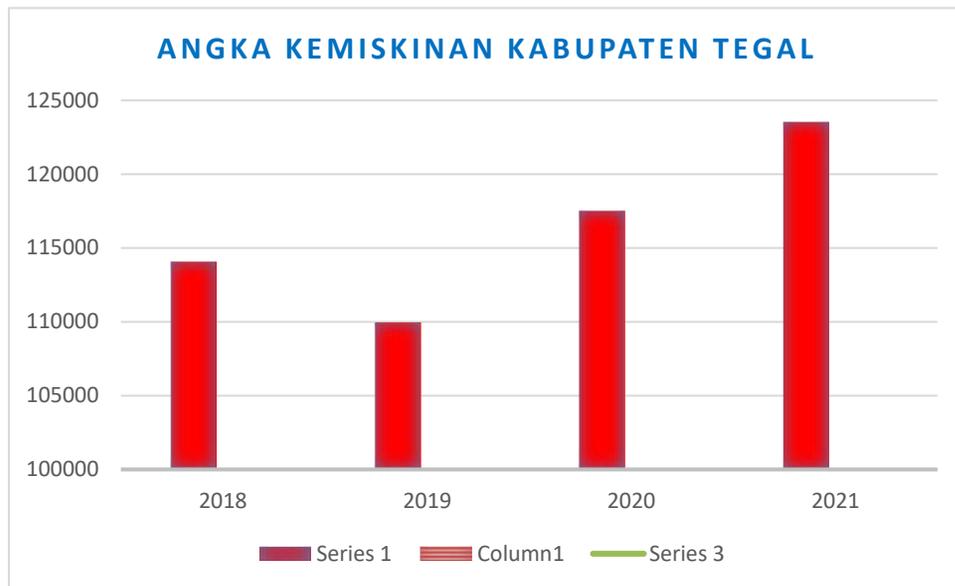
Angka kemiskinan di Kabupaten Tegal pada tahun 2021 meningkat 0,6% (6,02 ribu ruta) atau bertambah dari 8,14 % (117,50 ribu ruta) di tahun 2020 menjadi 8,60% (123,52 ribu ruta) dan masuk jajaran 10 besar dengan tingkat kemiskinan terendah di Jawa Tengah. Adapun perkembangan capaian kinerja sasaran menurunkan angka kemiskinan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini :

Tabel 2.44
Capaian Kinerja Sasaran Menurunkan Angka Kemiskinan tahun 2019-2021

NO	Indikator Kinerja Utama	2019			2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Penduduk Miskin	8,25	7,64	107,98	7,01	8,14	83,88	8,41	8,60	97,74



Gambar 2.19
Diagram Capaian Kinerja Sasaran Menurunkan Angka Kemiskinan



Selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir tingkat kemiskinan di Kabupaten Tegal mengalami naik turun yang cukup signifikan pada tahun 2019 dimana penduduk miskin tercatat sebanyak 109,94 ribu jiwa (berkurang 4,12 ribu jiwa) atau 7,64% terhadap total jumlah penduduk, jumlah ini turun sebesar 0,3% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2018 mencapai 114,06 ribu jiwa atau 7,94 %. Namun di Tahun 2021 Angka kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0.6 % dari sebelumnya di Tahun 2020 sebesar 8,14 % (117,50 Ribu Ruta) menjadi 8,60 % (123,52 Ruta), Namun demikian Penduduk miskin di Kabupaten Tegal sejak Tahun 2017-2021 secara persentase selalu lebih rendah jika dibandingkan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.44
Tabel Angka Kemiskinan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Tegal

TAHUN	NASIONAL	PROVINSI JAWA TENGAH	KABUPATEN TEGAL
2017	10,10	12,23	9,90
2018	9,90	11,32	7,94
2019	9,41	10,80	7,64
2020	9,78	11,41	8,14
2021	9,71	11,25	8,60

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2021

Berikut ini adalah gambaran secara lengkap mengenai angka kemiskinan yang merupakan presentase penduduk miskin terhadap jumlah



penduduk selama kurun waktu tahun 2017-2021, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.45

Penduduk Miskin Tahun 2017 - 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Penduduk Miskin	141.800	114.060	109.940	117.500	123,520
2.	Jumlah Penduduk	1.433.515	1.437.225	1.440.671	1.435.147	1.436.279
3.	Persentase (%)	9,90	7,94	7,64	8,14	8,60

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2021

Indikator kemiskinan dihitung dari survei 20% populasi di bawah Garis Kemiskinan Sementara (GKS) tahun sebelumnya. Dari GKS ditetapkan nilai pengeluaran dari 52 komoditi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan pengeluaran Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Namun demikian, pada tahun 2021, angka kemiskinan di Kabupaten Tegal meningkat dari sebelumnya 8,14% pada tahun 2020 menjadi 8,60% pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena Dampak pandemi Covid-19 hingga akhir Tahun 2021 masih dirasakan oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Tegal, Meski Pandemi Covid 19 sudah mulai reda sejak pertengahan Tahun 2021 namun dampaknya sangat berpengaruh terhadap perekonomian dimana kontraksi komoditas makanan dan non makanan sudah terjadi dalam bentuk:

- a. Kontraksi permintaan-penawaran, produksi lemah, ekspor-impor terhambat;
- b. *panic buying*,
- c. menahan *spending* (pengeluaran);
- d. mengatur *saving* (tabungan/investasi);
- e. pembatasan kegiatan masyarakat.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, kondisi kemiskinan Kabupaten Tegal perlu dilihat dari perspektif regional. Kondisi makro regional yang relatif senada mengindikasikan efektivitas penanganan program kemiskinan satu wilayah cenderung tepat apabila berada pada posisi yang relatif sama dengan kab/kota sekitarnya.

Capaian kinerja kemiskinan Kabupaten Tegal pada Tahun 2021 merupakan terbaik ketiga jika disandingkan dengan 7 (Tujuh) Kabupaten



dan Kota di eks karesidenan Pekalongan. Penduduk miskin Kabupaten Tegal lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kota Pekalongan, sebagaimana gambar berikut ini.

Gambar 2.21

Perbandingan Kemiskinan di eks Karesidenan Pekalongan



Sumber: BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2021

Persentase Kemiskinan Kabupaten Tegal Tahun 2021 adalah 8,60% menduduki peringkat ketiga terendah dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Kemiskinan paling rendah adalah di Kota Pekalongan (7,59%) sedangkan Kabupaten yang kemiskinannya paling tinggi adalah Kabupaten Brebes (17,43%).

Pemerintah Kabupaten Tegal telah berupaya semaksimal mungkin dalam upaya menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai program bantuan untuk keluarga miskin. Namun, pandemi Covid 19 merupakan penyebab utama meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Tegal yang sangat berdampak pada ekonomi masyarakat. Pandemi Covid 19 mengganggu aktivitas ekonomi sehingga akhirnya mempengaruhi pendapatan masyarakat yang mengakibatkan daya beli (tingkat konsumsi) masyarakat mengalami perlambatan. Banyak perusahaan yang tidak bisa bertahan sehingga masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan. Sektor pariwisata juga mengalami keterpurukan, banyak pengusaha kecil dan



pekerja yang kehilangan penghasilan.

Pemerintah Kabupaten Tegal telah melakukan berbagai upaya berupa penyaluran bantuan terhadap masyarakat yang terdampak Covid 19 baik yang terdampak kesehatan maupun ekonomi. Kabupaten Tegal menganggarkan Belanja Bantuan Tidak Terduga Program Jaring Pengaman Sosial berupa bantuan Beras bagi masyarakat terdampak dan stimulus ekonomi di beberapa sektor yang terdampak. Bantuan diberikan sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Tegal dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

Dalam upaya melakukan penanggulangan kemiskinan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah telah berupaya semaksimal mungkin melakukan program bantuan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya :

1. Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Tegal pada tahun 2021 sebanyak 113.580 KPM, Jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ada penurunan sebanyak 29.993 KPM dibandingkan pada tahun 2020 sebanyak 143.573 KPM. Jumlah penerima BPNT mengalami penurunan yang cukup signifikan disebabkan di tahun 2020 adanya perluasan bantuan akibat dampak Pandemi Covid 19. BPNT berasal dari APBN, sedangkan di Tahun 2021 jumlah bantuan mulai dikurangi karena sudah meredanya dampak covid 19.

Tabel 2.46
Daftar Penerima BPNT Tahun 2021

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KPM	SATUAN
1.	Adiwerna	6.911	KPM
2.	Balapulang	9.317	KPM
3.	Bojong	7.289	KPM
4.	Bumijawa	8.886	KPM
5.	Dukuhturi	4.939	KPM
6.	Dukuhwaru	4.647	KPM
7.	Jatinegara	5.502	KPM
8.	Kedungbanteng	4.816	KPM
9.	Kramat	5.231	KPM
10.	Lebaksiu	7.031	KPM
11.	Margasari	7.096	KPM
12.	Pagerbarang	4.824	KPM
13.	Pangkajene	8.220	KPM
14.	Slawi	4.001	KPM
15.	Suradadi	7.320	KPM



NO.	KECAMATAN	JUMLAH KPM	SATUAN
16.	Talang	4.822	KPM
17.	Tarub	7.834	KPM
18.	Warureja	5.894	KPM
	Jumlah	113.580	KPM

2. Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Tegal pada tahun 2021 sebanyak 67.937 KPM. Jumlah penerima bantuan PKH bertambah sebanyak 10.405 KPM dibandingkan pada tahun 2020 sebanyak 57.532 KPM. Jumlah penerima bantuan PKH juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan disebabkan adanya perluasan bantuan akibat dampak Pandemi Covid 19. Bantuan PKH berasal dari APBN.

Tabel 2.47
Daftar Penerima PKH Tahun 2021

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KPM	SATUAN
1.	Adiwerna	3.064	KPM
2.	Balapulang	7.115	KPM
3.	Bojong	5.166	KPM
4.	Bumijawa	6.625	KPM
5.	Dukuhturi	2.449	KPM
6.	Dukuhwaru	2.532	KPM
7.	Jatinegara	3.699	KPM
8.	Kedungbanteng	2.660	KPM
9.	Kramat	2.430	KPM
10.	Lebaksiu	4.199	KPM
11.	Margasari	4.463	KPM
12.	Pagerbarang	2.026	KPM
13.	Pangkajene	4.453	KPM
14.	Slawi	2.519	KPM
15.	Suradadi	3.865	KPM
16.	Talang	2.452	KPM
17.	Tarub	4.661	KPM
18.	Warureja	3.559	KPM
	Jumlah	67.937	KPM

3. Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Tegal pada tahun 2021 sebanyak 82.038 KPM. BLT berasal dari APBN yang diberikan bagi warga terdampak Covid 19.



Tabel 2.48
Daftar Penerimaan BST Tahun 2021

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KPM	SATUAN
1.	Adiwerna	5.364	KPM
2.	Balapulang	6.611	KPM
3.	Bojong	5.060	KPM
4.	Bumijawa	5.767	KPM
5.	Dukuhturi	3.740	KPM
6.	Dukuhwaru	3.163	KPM
7.	Jatinegara	4.090	KPM
8.	Kedungbanteng	3.698	KPM
9.	Kramat	4.149	KPM
10.	Lebaksiu	5.186	KPM
11.	Margasari	4.815	KPM
12.	Pagerbarang	2.979	KPM
13.	Pangkah	6.137	KPM
14.	Slawi	2.624	KPM
15.	Suradadi	5.436	KPM
16.	Talang	3.386	KPM
17.	Tarub	5.724	KPM
18.	Warureja	4.109	KPM
	Jumlah	82.038	KPM

4. Penerima bantuan pangan bagi warga terdampak Covid 19 yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah (APBD I) di Kabupaten Tegal pada tahun 2021 sebanyak 89.837 KPM lebih rendah dari Tahun sebelumnya yang mencapai 90.618 KPM atau berkurang sebesar 871 KPM.

Tabel 2.49
Daftar Penerima Bantuan Pangan Tahun 2021

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KPM	SATUAN
1.	Adiwerna	6.164	KPM
2.	Balapulang	4.241	KPM
3.	Bojong	3.353	KPM
4.	Bumijawa	7.045	KPM
5.	Dukuhturi	5.073	KPM
6.	Dukuhwaru	3.829	KPM
7.	Jatinegara	3.299	KPM
8.	Kedungbanteng	2.983	KPM
9.	Kramat	8.882	KPM
10.	Lebaksiu	7.557	KPM
11.	Margasari	6.698	KPM
12.	Pagerbarang	5.173	KPM
13.	Pangkah	3.937	KPM



NO.	KECAMATAN	JUMLAH KPM	SATUAN
14.	Slawi	2.217	KPM
15.	Suradadi	5.703	KPM
16.	Talang	6.467	KPM
17.	Tarub	2.866	KPM
18.	Warureja	4.350	KPM
	Jumlah	89.837	KPM

5. Penerima bantuan beras bagi warga terdampak Covid 19 yang berasal dari Belanja Tidak Terduga Jaring Pengaman Sosial akibat terdampak Covid 19 dari APBD Kabupaten Tegal (APBD II) 2021 dengan total anggaran sebesar Rp.656.339.000,- dengan sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.50
Daftar Penerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) Covid 19

NO.	WARGA TERDAMPAK/KELOMPOK RENTAN	JUMLAH	SATUAN
1	Warga Terdampak	1.983	KPM
2	Warga Isolasi Mandiri Terkonfirmasi Covid 19	1.149	KPM
	JUMLAH	3.132	KPM

6. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) di Kabupaten Tegal pada tahun 2021 sebanyak 755.433 KPM Jumlah penerima PBI-JKN berkurang sebanyak 85.232 KPM dibandingkan pada tahun 2020 sebanyak 840.665 KPM

Tabel 2.51
Daftar Penerima PBI – JKN Tahun 2021

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KPM	SATUAN
1.	Adiwerna	50.750	KPM
2.	Balapulang	65.604	KPM
3.	Bojong	50.779	KPM
4.	Bumijawa	50.613	KPM
5.	Dukuhturi	27.221	KPM
6.	Dukuhwaru	34.473	KPM
7.	Jatinegara	36.757	KPM
8.	Kedungbanteng	25.276	KPM
9.	Kramat	33.221	KPM
10.	Lebaksiu	49.416	KPM
11.	Margasari	59.814	KPM
12.	Pagerbarang	23.658	KPM
13.	Pangkajene	50.876	KPM
14.	Slawi	23.671	KPM
15.	Suradadi	49.170	KPM



NO.	KECAMATAN	JUMLAH KPM	SATUAN
16.	Talang	35.481	KPM
17.	Tarub	47.720	KPM
18.	Warureja	40.492	KPM
	BLANK	441	KPM
	Jumlah	755.433	KPM

7. Penerima Kartu Jateng Sejahtera (KJS) di Kabupaten Tegal pada tahun 2021 sebanyak 1.210 KPM. Jumlah penerima KJS berkurang sebanyak 47 KPM dibandingkan pada tahun 2020 sebanyak 1.257 KPM.

Tabel 2.52
Daftar Penerima Bantuan KJS Tahun 2021

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KPM	SATUAN
1.	Adiwerna	108	KPM
2.	Balapulang	122	KPM
3.	Bojong	20	KPM
4.	Bumijawa	20	KPM
5.	Dukuhturi	104	KPM
6.	Dukuhwaru	108	KPM
7.	Jatinegara	16	KPM
8.	Kedungbanteng	33	KPM
9.	Kramat	56	KPM
10.	Lebaksiu	219	KPM
11.	Margasari	156	KPM
12.	Pagerbarang	21	KPM
13.	Pangkah	49	KPM
14.	Slawi	34	KPM
15.	Suradadi	26	KPM
16.	Talang	16	KPM
17.	Tarub	74	KPM
18.	Warureja	28	KPM
	Jumlah	1.210	KPM

8. Bantuan Jaminan Hidup bagi Lansia (Jadup Lansia) pada Tahun Anggaran 2021 sebanyak 666 Lansia yang tersebar diseluruh Kecamatan di Kabupaten Tegal , dengan Total Anggaran sebesar Rp.1.998.000.000,- dengan capaian sebesar Rp.1.658.500.000,- atau sebesar 82,98 % ,hal ini dikarenakan adanya Lansia yang meninggal sebanyak 79 Lansia.



Sasaran 7 : Menurunnya Pengangguran

Dalam rangka mewujudkan sasaran menurunnya pengangguran, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 1 (satu) indikator utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 2.53
Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Pengangguran

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian 2021	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen; Tahunan	10,42	9,97	104,31	9,85-8,85
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					104,31	

Rata-rata capaian kinerja sasaran menurunnya Pengangguran dengan didukung 1 (satu) indikator pada tahun 2021 sebesar 104,31 % atau dengan kategori **Sangat Tinggi**. Untuk realisasi tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tegal tahun 2021 sebesar 9,97 sedangkan target akhir RPJMD Tahun 2024 sebesar 9,85-8,85 sehingga belum melampaui target akhir.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2021 sebesar 9,97 persen. TPT pada Agustus 2020 sebesar 9,82 persen naik menjadi 9,97 persen pada Agustus 2021. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 10 orang pengangguran, meningkatnya angka pengangguran mencapai 0,15 persen dibanding tahun sebelumnya, merupakan dampak kondisi Pandemi Covid-19 seiring menurunnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tegal.

Tabel 2.54
Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Pengangguran 2019-2021

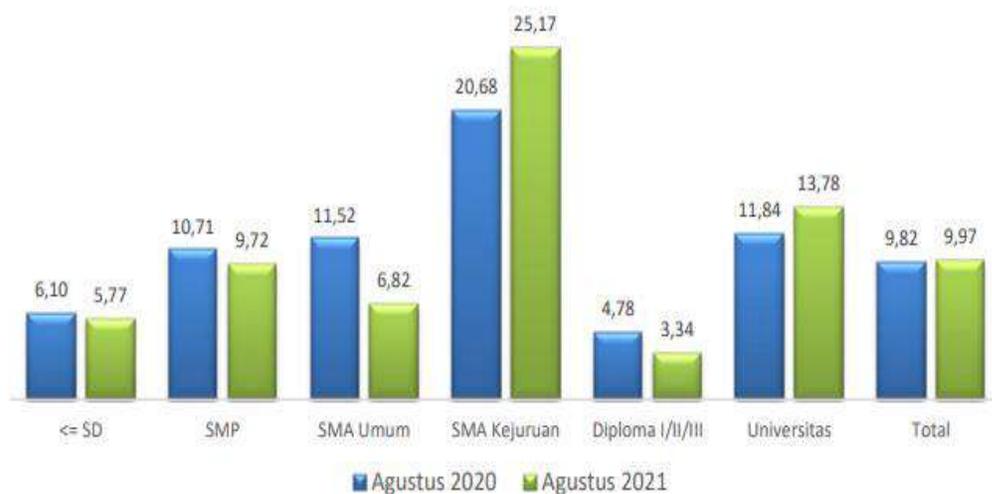
NO	Indikator Kinerja Utama	2019			2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	-	8,21	-	7,45	9,82	68,19	10,42	9,97	104,31



Hal ini menyebabkan beberapa lowongan kerja dibatasi sehingga berkurangnya penempatan tenaga kerja, selain itu kondisi ekonomi yang tidak stabil beberapa perusahaan juga merumahkan maupun memutus hubungan kerja beberapa pekerjanya.

Bila dicermati menurut tingkat pendidikan, pada Agustus 2021, TPT dengan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tercatat paling tinggi, yaitu sebesar 25,17 persen. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang berlebih terutama pada tingkat pendidikan SMK. TPT tertinggi berikutnya dicatat oleh tamatan Perguruan Tinggi sebesar 17,12 persen. TPT SD ke bawah menjadi yang paling kecil di antara semua tingkat pendidikan, yaitu sebesar 5,77 persen. Mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja. Sebaliknya dengan pendidikan yang lebih tinggi memilih bertahan agar mendapatkan pekerjaan sesuai dengan pendidikan, harapan/keinginan dan upah yang lebih layak sehingga secara makro ada peningkatan angka TPT.

Gambar 2.22
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Agustus 2020 - Agustus 2021



Sumber BPS Kabupaten Tegal 2021

Bila dilihat dari komposisi angkatan kerja pada Agustus 2021 terdiri atas 644.499 orang penduduk yang bekerja dan 71.346 orang pengangguran. Apabila dibandingkan dengan komposisi pada Agustus 2020, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 621 orang. Penduduk bekerja mengalami penurunan sebanyak 479 orang, sedangkan pengangguran naik sebanyak 1.100 orang. Walaupun terdapat kenaikan



pada jumlah Angkatan Kerja, namun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tidak mengalami kenaikan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan pada periode Agustus 2020 hingga Agustus 2021. TPAK pada Agustus 2021 tercatat sebesar 66,24 persen, turun 0,28 persen poin dibanding setahun yang lalu.

TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Artinya dalam setahun ini terjadi pergeseran struktur pada tenaga kerja di Kabupaten Tegal, sebagian besar penambahan penduduk usia kerja kemungkinan bergeser ke sekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan. Pada Agustus 2021, TPAK laki-laki sebesar 79,39 persen sementara TPAK perempuan hanya 53,46 persen. Dibanding kondisi setahun yang lalu, TPAK laki-laki mengalami penurunan sebesar 2,85 persen poin, sebaliknya TPAK perempuan mengalami kenaikan sebesar 2,21 persen poin

Gambar 2.23
Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin (persen), Agustus 2020 - Agustus 2021



Sumber BPS Kabupaten Tegal 2021

Pandemi Covid-19 yang melanda sekarang ini menyebabkan dampak terhadap ketenagakerjaan di Kabupaten Tegal khususnya, penduduk usia kerja yang sedang atau pernah bekerja dan terdampak Covid-19 dikelompokkan menjadi empat komponen, yaitu mereka yang



menjadi : a) Pengangguran Karena Covid-19; b) Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena Covid-19; c) Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19; dan d) Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena Covid-19. Kondisi a) dan b) merupakan dampak pandemi Covid-19 pada mereka yang berhenti bekerja, sedangkan kondisi c) dan d) merupakan dampak pandemi Covid-19 yang dialami oleh mereka yang saat ini masih/sedang bekerja.

Tabel 2.55
Dampak Covid-19 terhadap Ketenagakerjaan, Agustus 2020 – Agustus 2021

Dampak Covid-19 Terhadap Ketenagakerjaan	Agustus 2020	Agustus 2021	Perubahan Agustus 2020 - Agustus 2021	
	orang	orang	orang	persen
➤ Penganggur karena pandemi COVID-19	25.955	25.022	-933	-3,59
➤ BAK karena pandemi COVID-19	6.467	3.680	-2.787	-43,10
➤ Sementara tak Bekerja karena pandemi COVID-19	6.728	10.857	4.129	61,37
➤ Pengurangan jam kerja karena pandemi COVID-19	122.309	92.435	-29.874	-24,43
Total	161.459	131.994	-29.465	-18,25
Penduduk Usia Kerja (PUK)	1.075.255	1.080.674	5.419	0,50
Persentase PUK terdampak Covid-19	15,02	12,21	-2,80	-18,66

Sumber BPS Kabupaten Tegal 2021

Keterangan :

1. Pengangguran karena Covid-19 adalah pengangguran yang pernah berhenti bekerja karena Covid-19 sejak Agustus 2020
2. Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam katagori bukan angkatan kerja dan pernah berhenti bekerja karena Covid-19 sejak Agustus 2020
3. Sementara Tidak Bekerja karena Covid-19 adalah penduduk yang pernah bekerja namun karena Covid-19 menjadi sementara tidak bekerja

Pada Tabel 2.55 dapat dilihat bahwa penduduk yang sedang/pernah bekerja dan terdampak Covid-19 pada Agustus 2021 sebanyak 131.994 orang, berkurang sebanyak 29.465 orang atau sebesar 18,25 persen dibandingkan dengan yang tercatat pada Agustus 2020. Komposisi kelompok penduduk yang terdampak Covid-19 terdiri dari 25.022 orang pengangguran karena Covid-19; 3.680 orang Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19; 10.857 orang sementara tidak bekerja karena Covid-19, dan 92.435 orang penduduk yang bekerja namun mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19. Dari keempat komponen tersebut, tiga komponen mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2020. Pengurangan terbanyak ditempati oleh penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19, yaitu 29.874 orang. Diikuti oleh



pengurangan pada komponen Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 sebanyak 2.787 orang dan pengurangan pengangguran karena Covid-19 sebanyak 933. Namun sebaliknya jumlah penduduk yang pernah bekerja namun karena Covid-19 menjadi sementara tidak bekerja mengalami kenaikan sebanyak 4.129 orang.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam rangka penurunan tingkat pengangguran terbuka antara lain :

1. Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

Pada tahun 2021 Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melaksanakan pelatihan dan penempatan tenaga kerja, berikut data terkait hal tersebut.

Tabel 2.56
Data Pelaksanaan Pelatihan Tahun 2021

NO.	JENIS PELATIHAN	JUMLAH PESERTA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	SUMBER ANGGARAN
1	Tata Boga 1	20	Kedawung	07-08-2021 s/d 11-08-2021	DBHCHT
2	Tata Boga 2	20	Kedawung	12-08-2021 s/d 16-08-2021	DBHCHT
3	Tata Boga 3	20	Dampyak	18-08-2021 s/d 23-08-2021	DBHCHT
4	Batik 1	20	Kemantran	24-08-2021 s/d 08-09-2021	DBHCHT
5	Batik 2	20	Munjungagung	13-09-2021 s/d 27-09-2021	DBHCHT
6	Menjahit 1	20	Munjungagung	11-08-2021 s/d 04-09-2021	DBHCHT
7	Menjahit 2	20	Kramat	06-09-2021 s/d 28-09-2021	DBHCHT
8	Tata Rias 1	20	Suradadi	09-08-2021 s/d 14-08-2021	DBHCHT
9	Tata Rias 2	20	Kepunduhan	23-08-2021 s/d 28-08-2021	DBHCHT
10	Bahasa Korea	20	Suradadi	16-08-2021 s/d 14-10-2021	DBHCHT
11	Tukang Finishing Kayu	16	Gunungagung	01-11-2021 s/d 25-11-2021	APBD
12	Menjahit	16	Sidamulya	21-10-2021 s/d 15-11-2021	APBD
13	Mekanik Sepeda Motor	16	Pakembaran	26-10-2021 s/d 19-11-2021	APBD

Sumber Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021



Tabel 2.57
Data Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2021

BULAN	JENIS PENEMPATAN					
	AKL		AKAD		AKAN	
	L	P	L	P	L	P
JANUARI	3	12	80	88	-	5
FEBRUARI	14	15	66	50	1	12
MARET	1	-	103	68	2	14
APRIL	-	311	95	67	13	4
MEI	-	28	53	119	1	-
JUNI	-	-	43	77	15	7
JULI	33	207	37	243	2	1
AGUSTUS	-	97	109	25	12	2
SEPTEMBER	41	484	87	102	2	9
OKTOBER	5	739	260	91	1	3
NOPEMBER	9	214	135	249	4	12
DESEMBER	1.346	6.633	148	462	41	9
JUMLAH	1.452	8.740	1.216	1.641	94	78
	10.192		2.857		172	

Sumber Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021

Gambar 2.24
Kegiatan pelaksanaan pelatihan



5	SPBU 44.521.05 Kalisapu	Kamis, 19/08/2021	Perjanjian Bersama
6	PT Bank Mandiri Taspen	Kamis, 18/11/2021	Perjanjian Bersama
7	PT Kemasan Hijau	Kamis, 23/12/2021	Perjanjian Bersama

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tegal Tahun 2021 adalah 9,97% merupakan TPT yang cukup tinggi dibandingkan dengan 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan bahkan di Jawa Tengah, sedangkan TPT paling rendah adalah di Kabupaten Pekalongan (4,28%). Berbagai upaya kebijakan perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal ke depan guna bisa menekan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tegal khususnya terkait stimulus ekonomi masyarakat mulai pelaku ekonomi skala besar hingga kecil harus dikeluarkan melalui berbagai program/kegiatan seluruh Perangkat Daerah yang terkait. Selain itu mengingat potensi meningkatnya jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran di Kabupaten Tegal yang cukup besar, maka Perangkat Daerah terkait khususnya Dinas Sosial, Disperinaker, dan Disdakop dan UKM, Dis Tan dan KP, DKPP, Disporapar perlu merumuskan kebijakan strategis yang efektif dan efisien ke depan.

Tujuan 6 : Menurunnya Resiko Bencana

Salah satu pelayanan yang di berikan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk menunjang misi pemerintahan yang salah satunya tertuang dalam tujuan meningkatnya kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana, yang didukung oleh 1 (satu) indikator utama, Adapun realisasi capaian tujuan tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 2.59
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian 2021	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Indeks Resiko Bencana	Angka	177,71	181,91	97,63	172,12
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					97,63	

Rata-rata capaian kinerja tujuan menurunnya risiko bencana dengan didukung 1 (satu) indikator pada tahun 2021 sebesar 97,63% atau dengan kategori **Sangat Tinggi**. Realisasi Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Tegal tahun 2021 sebesar 181,91 sedangkan target akhir



RPJMD Tahun 2024 sebesar 172,12 sehingga belum melampaui target akhir.

Kabupaten Tegal dengan kondisi topografi yang ada merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi ancaman bencana yang lengkap. Hampir semua ancaman bencana seperti banjir, longsor, angin kencang, gempa bumi, letusan gunung berapi, kekeringan maupun kebakaran hutan bahkan tsunami bisa terjadi di wilayah Kabupaten Tegal. Namun demikian kapasitas masyarakat maupun kelembagaan dalam penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Tegal tergolong masih rendah, yang ditandai dengan angka Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dalam penanggulangan bencana pada tahun 2021 sebesar 0,62 yang hanya masuk katagori sedang. Hal inilah yang menyebabkan **risiko bencana** di wilayah Kabupaten Tegal tergolong **tinggi** dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Jawa Tengah.

Capaian kinerja tujuan : Menurunnya Risiko Bencana, yang didukung oleh 1 (satu) indikator utama tujuan yaitu **Indeks Risiko Bencana (IRB)** pada tahun 2021 sebesar 181,91 (Level : Tinggi) dengan tingkat capaian 97,63% atau dengan kategori **Baik**, namun capaian tersebut masih lebih tinggi bila dibanding dengan tahun sebelumnya (2020) yang hanya bisa mencapai 99,44%, disebabkan karena bisa terlaksananya beberapa kegiatan prioritas yang mempunyai point penting dalam mendukung tercapaiannya target peningkatan Indeks Kapasitas Daerah (IKD), seperti Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Namun sebagian besar kegiatan-kegiatan yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Tegal masih harus dikurangi volume capaiannya karena masih adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19, seperti Kegiatan Pelatihan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana, Pembinaan dan Pembentukan Desa Tangguh Bencana, Pengadaan Sarana dan Prasarana Mitigasi dan Komunikasi serta kegiatan-kegiatan penting lainnya yang nilai pointnya cukup menentukan besarnya Indeks Kapasitas Daerah (IKD).

Namun demikian masih ada beberapa kegiatan pada tahun 2021 yang bisa dilaksanakan dengan efisiensi anggaran seperti :

1. Kegiatan gladi kesiapsiagaan penanggulangan bencana
2. Sosialisasi penanganan bencana yang pelaksanaannya bersamaan



- dengan kegiatan-kegiatan sosialisasi
3. Gladi penanganan pandemi covid-19
 4. Jambore relawan penanggulangan bencana yang didalamnya juga dilaksanakan kegiatan pelatihan dan simulasi serta kegiatan reboisasi tanaman-tanaman produktif.

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam rangka pengurangan risiko bencana adalah pendanaan, sarana prasarana, kompetensi personil, budaya sadar bencana, akses informasi masyarakat dan koordinasi lintas sektoral dan wilayah. Upaya-upaya pemerintah dan masyarakat yang mengarah pada penanganan permasalahan tersebut diharapkan akan berpengaruh signifikan pada peningkatan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) yang secara langsung akan berpengaruh pada penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB).

Gambar 2.25
Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) dan
Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)





Gambar 2.26
Upaya-Upaya Pengembangan Kapasitas Personil, Masyarakat
dan Relawan Penanggulangan Bencana



Gambar 2.27

Upaya-Upaya Penanggulangan Bencana



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Tegal, 2021

Tujuan 7 : Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan

Dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatkan pelestarian dan pewarisan kebudayaan, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan 1 (satu) indikator utama. Adapun realisasi capaian tujuan tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :



Tabel 2.60
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan
Kebudayaan

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian 2021	Target Akhir RPJMD 2024
1.	Indeks Kebudayaan	Tahun	64,73	60,05	92,77	70,00

Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2021 sebesar 60, 05 atau 92,77% dengan kategori **Sangat Tinggi**. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan tersebut merupakan nilai IPK yang diperoleh Provinsi Jawa Tengah yang disusun setiap 3 tahun sekali, sehingga nilai yang dituangkan merupakan nilai indeks pembangunan kebudayaan tahun 2019, karena sebenarnya untuk tingkat kabupaten tidak menyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan, karena ini merupakan instrument baru yang diluncurkan Kemendikbud bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tanggal 10/10/2019, di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta.

Indeks ini diperlukan untuk mengukur pencapaian pembangunan kebudayaan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pada saat peluncuran tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid bahwa :

“Kemajuan dari sebuah bangsa itu sesungguhnya diukur dari kemajuan kebudayaannya.”

Beliau mengungkapkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) tersebut menjadi pertama di Indonesia, bahkan di dunia. Indeks ini secara spesifik mengukur pencapaian pembangunan kebudayaan di tingkat nasional dan daerah.

Meskipun realisasi indikator kinerja utama indeks kebudayaan belum tersedia data untuk level kabupaten, namun Pemerintah Kabupaten Tegal tetap berusaha secara maksimal dalam melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan dari kerusakan, kehancuran dan kemusnahan cagar budaya, hal ini didukung dengan adanya sumber daya manusia yang kompeten dalam kepengurusan cagar budaya.

Sebagai upaya pendataan cagar budaya maupun yang diduga cagar budaya yang berada di wilayah Kabupaten Tegal, Pemerintah



Kabupaten Tegal melakukan kegiatan inventarisasi benda cagar budaya di wilayah kabupaten Tegal. Berikut beberapa jumlah Cagar Budaya di Kabupaten Tegal :

Tabel 2.61
Benda-benda cagar budaya yang dilestarikan di kabupaten Tegal

NO.	NAMA BENDA CAGAR BUDAYA	LOKASI	KET.
1	Situs Makam Ki Gede Sebayu	Desa Danawarih, Balapulang	SK. Bupati Tegal No : 432.2 / 472 / 2008 Tanggal : 21 April 2008
2	Situs Balongan Cenggini	Desa Cenggini, Balapulang	
3	Situs Makam Amangkurat	Desa Pesarean, Adiwerna	
4	Situs Makam Pangeran Purbaya	Desa Kalisoka, Dukuhwaru	
5	Situs Makam Mbah Semedo	Desa Semedo, Kedungbanteng	
6	Fosil Semedo	Desa Semedo, Kedungbanteng	
7	Situs Candi Bulus	Desa Pedagangan, Dukuhwaru	
8	Situs Makam Mbah Atas Angin	Desa Pedagangan, Dukuhwaru	
9	Situs Lingga	Desa Pedagangan, Dukuhwaru	
10	Situs Makam Mbah Hanggawana	Desa Kalisoka, Dukuhwaru	
11	Situs Makam Suroponolawen	Desa Pagiyanten, Adiwerna	
12	Situs Makam Mbah Dagan	Desa Tembokluwung, Adiwerna	
13	Situs Makam Gendowor	Desa Tembokluwung, Adiwerna	
14	Situs Makam Datuk Kafi	Desa Pagongan, Dukuhturi	
15	Situs Makam Mbah Syeh Qadir	Desa Pagongan, Dukuhturi	
16	Pintu Air	Desa Pesayangan, Talang	
17	Masjid Tukul	Desa Cangkring, Talang	
18	Situs Candi Keberkahan	Desa Lebaksiu Kidul, Lebaksiu	
19	Situs Makam Mbah Tanjung	Desa Lebaksiu Kidul, Lebaksiu	
20	Situs Makam Syeh Maulana Maghribi	Desa Danaraja, Margasari	
21	Masjid Wali	Desa Danaraja, Margasari	
22	Situs Sumur Duren	Desa Danaraja, Margasari	
23	Situs Naskah Rambang	Desa Danaraja, Margasari	
24	Situs Piring Panjang	Desa Danaraja, Margasari	
25	Situs Candi Gong	Desa Sidamulya, Pagerbarang	
26	Situs Makam Sayid Abdulrachman Ibrahim Al Zamzami	Desa Pesarean, Adiwerna	
27	Masjid Wali	Desa Pesarean, Adiwerna	



NO.	NAMA BENDA CAGAR BUDAYA	LOKASI	KET.
28	Situs Makam Mbah Jinten	Desa Balamoa, Pangkah	
29	Situs Makam Pangeran Benowo	Desa Balamoa, Pangkah	
30	Situs Makam Mbah Jeneng	Desa Lembahsari, Jatinegara	
31	Situs Candi Peneker	Desa Dukuhtengah, Bojong	
32	Situs Candi Lingga	Desa Bandarsari, Bumijawa	
33	Situs Rumah Peninggalan Belanda	Desa Kemantran, Kramat	

Tabel 2.62
PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA KABUPATEN/KOTA
(PENYELAMATAN, ZONASI, PEMELIHARAAN DAN PEMUGARAN)

NO.	OBJEK	KETERANGAN
1	Stasiun Lama Kudaile	Kudaile
2	Gereja Katholik Santa Maria Imaculata	Pakembaran Slawi
3	SD Negeri Procot 01	Procot, Slawi
4	Rumah Dinas Camat Balapulang	Balapulang Wetan
5	SD Negeri Balapulang Kulon 03	Balapulang Kulon
6	Rumah Tinggal	Balapulang Kulon
7	Stasiun Balapulang	Balapulang Kulon
8	Rumah Kepala Stasiun Balapulang	Balapulang Kulon
9	Makam Mbah Jaksa	Wringinjenggot
10	Rumah Kolonial Belanda	Pangkah
11	Rumah Kolonial Belanda	Pangkah Rt. 05 Rw. 03
12	Makam KRT Wiragati	Sigarung Pener
13	Rumah Kolonial Belanda	Pangkah
14	Rumah Kolonial Belanda	Pangkah
15	Kantor Polsek Pangkah	Pangkah
16	Kantor Eks Kawedanan Pangkah	Pangkah
17	Saluran Irigasi Cacaban Duku Sabrang	Pangkah



Tabel 2.63
PEMETAAN SDM CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN

NO.	N A M A	KETERANGAN
1	Irfan Dwi Rohman, S.STP., SH., MM	Tim Ahli Cagar Budaya
2	Anggit Yudy Pratama, S.S	Tim Ahli Cagar Budaya
3	Uji Catur Nursito, M.Pd	Tim Ahli Cagar Budaya
4	Reyas Dwi Wihandoko, S.T	Tim Ahli Cagar Budaya
5	Benny Setiawan, S.Ant	Tim Ahli Cagar Budaya
6	Mulyo Badawi	Tim Pendaftaran Cagar Budaya
7	Pembayun Sulistyorini, S.S	Tim Pendaftaran Cagar Budaya
8	Slamet Haryanto	Tim Pendaftaran Cagar Budaya
9	Andri Kristanto	Tim Pendaftaran Cagar Budaya
10	Nurhadi	Tim Pendaftaran Cagar Budaya
11	Sudadi, SE	Tim Pendaftaran Cagar Budaya
12	Tofik	Penjaga Museum Sekolah

Tabel 2.64
PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA KABUPATEN
(PENELITIAN, REVITALISASI DAN ADAPTASI)

NO.	O B Y E K	ALAMAT
1	Museum Semedo	Ds. Semedo - Kedungbanteng



Tabel 2.65
 TRADISI MASYARAKAT KAB. TEGAL
 DI KABUPATEN TEGAL

NO.	JENIS TRADISI	LOKASI	KETERANGAN
1	Penjamasan Makam Amangkurat	Pesarean, Adiwerna	
2	Upacara Rambang	Danaraja, Margasari	
3	Upacara Rebo Pungkasan	Lebaksiu	
4	Upacara Temanten Tebu	Pangkah	
5	Upacara Daur Hidup	Masyarakat	Perkawinan, Kelahiran, Kematian
6	Upacara Ruwat Bumi	Guci, Cacaban	
7	Upacara Sedekah Laut	Pur'in, Suradadi	
8	Upacara Khaul	Masyarakat	
9	Tradisi Rolasan	Masyarakat	
10	Tradisi Moci	Masyarakat	
11	Upacara Minta Hujan (Nini Cowong)	Cacaban	

Penjamasan Makam Amangkurat I (Pesarean, Adiwerna)



Karena masih dalam suasana pandemi Covid-19 penjamasan langse digelar lebih sederhana ketimbang tahun-tahun sebelumnya dan tidak banyak melibatkan kerabat keraton Kasunanan Surakarta. Acara selain di hadiri Bupati Tegal Umi Azizah juga sejumlah tokoh agama dan

masyarakat. Setelah dicopot dan diganti dengan langse yang baru langse yang lama dimasukkan peti, selanjutnya dibawa ke Surakarta untuk dilarung di pantai selatan. Tak hanya mengganti langse para kerabat keraton juga menggelar tahlil dan zikir di dalam makam. "Kami juga mengadakan tahlilan dan dzikir yang diikuti ulama dan tokoh masyarakat di sini," ujar Pengageng Parentah Kasunanan Surakarta, KGPH Adipati Dipo Kusumo. Bupati Tegal Umi Azizah, menyebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tegal mendukung dilestarikannya tradisi penjamasan langse Amangkurat I."Kawasan makam Amangkurat I ini direncanakan akan



dijadikan tempat wisata religi dan sejarah. "Karena memiliki nilai historis dengan perjalanan riwayat Kerajaan Mataram,"

Upacara Rambang (Danaraja, Margasari)



Keberadaan kitab Rambang yang bertuliskan huruf tua Jawa Kuno peninggalan seorang tokoh bernama Syekh Maulana Maghribi, perlu dilestarikan dan dijaga. Bahkan kitab Rambang yang berusia ribuan tahun dan kegiatan perawatan tersebut bisa dijadikan sebagai wisata religi.

Menurut seorang tokoh masyarakat Desa Danaraja Kasmui seorang putra juru kunci sebelumnya, Kitab Rambang wilayah Danaraja memiliki nilai historis yang luar biasa, bahkan didalam nya banyak terdapat tata cara berperilaku dan menjalani berkehidupan, dan bukan sesuatu yang bersifat bersimpangan dengan ajaran agama. Kitab Rambang terdiri dari empat bagian naskah bertuliskan huruf tua Jawa Kuno yang ditempatkan dalam kotak kayu jati kuno dan antik, bahkan kertasnya konon didatangkan dari Turki, diperkirakan dibawa masuk ke Indonesia sekitar abad 17, Syeh Maulana Marghribi dan Syeh Jambu Karang yang makamnya berada di pebukitan daerah tersebut.

Hingga kini masyarakat Desa Danaraja masih melakukan tradisi Kitab Rambang setiap tahun diadakan Upacara Rambang usai melaksanakan sholat Idul Adha dengan mengarak naskah atau Kitab Rambang yang berumur ribuan tahun keliling dari kediaman sang juru kunci menuju Surau atau Saat ini menjadi masjid yang di dirikan oleh Syekh Maulana Maghribi saat itu. Selain Kitab Rambang warga desa juga membawa peninggalan sejarah lain seperti piring panjang dsb.

➤ **Upacara Rebo Pungkasan (Lebaksiu)**

Rabu diakhir tanggal, tradisi Pungkasan memiliki bentuk ritual, fungsi, makna dan nilai simbolik (nilai agama, nilai sosial, nilai moral, nilai moral, budaya bagi masyarakat pendukungnya. Ada rasa nilai). Bentuk ritual tradisi Pungkasan pada hari Rabu terdiri dari lima bentuk: tradisi Lececan, tradisi sholat Duha, tradisi Rajahan, tradisi Suramethan, dan tradisi ziarah ke Gunung Tanjung.



Fungsi sosial, agama dan budaya yang terkandung dalam Tradisi Pungkasan pada hari Rabu adalah sebagai upaya perbaikan sosial, sebagai suksesi norma sosial, sebagai integrasi sosial, sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagai upaya untuk mendapatkan keberkahan hidup melalui pendekatan kepada Tuhan yang Maha kuasa. Dan sebagai perlindungan budaya. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Pungkasan pada hari Rabu antara lain: Nilai religi: Mendidik doa dan syukur;

Dan masih banyak tradisi-tradisi yang lain yang belum dapat penulis sebutkan secara lengkap.

Beberapa Cagar Budaya yang berada di wilayah Kabupaten Tegal antara lain

➤ **Rumah Dinas Camat Balapulang.**

Bangunan rumah ini dahulu merupakan rumah kawedanan yang dipimpin oleh seorang wedono. Kawedanan merupakan wilayah administrasi pemerintahan yang berada di bawah kabupaten dan di atas kecamatan yang berlaku pada masa Hindia Belanda dan beberapa tahun setelah kemerdekaan Indonesia yang dipakai di beberapa provinsi.



Rumah dinas ini kadang masih dipergunakan untuk beristirahat oleh Camat tetapi sudah tidak dipergunakan sebagaimana rumah tinggal.

Secara keseluruhan, bentuk bangunan induk merupakan bangunan dengan ciri arsitektur campuran antara Belanda dan Jawa atau biasa disebut bangunan indis.

➤ **SD Negeri Balapulang Kulon 02**

Bangunan ini berada di jalan raya Balapulang, Desa Balapulang Kulon, Kecamatan Balapulang. Terdapat pada koordinat 7°3'8" LS dan 109°5'53" BT. Kondisi Obyek terawat dengan baik karena merupakan bangunan sekolah dasar, tetapi ada penambahan di beberapa ruangan sehingga menghilangkan bentuk ruangan aslinya.

Bangunan berbatasan di sebelah utara Jl. Desa, sebelah timur



rumah tinggal, sebelah selatan rumah tinggal, sebelah barat rumah tinggal. Riwayat kepemilikan bangunan ini awalnya merupakan kantor PG Balapulang kemudian didiami oleh pak madlap, selanjutnya ditempati oleh Pak Ibad. Setelah itu kemudian dihibahkan sebagai sekolah dasar.

Bangunan ini merupakan bangunan berarsitektur belanda yang dicirikan bangunan yang sangat tinggi. Bagian depan bangunan berupa tiang tinggi dengan pilar dua buah, pada bagian tengah terdapat pintu masuk tinggi. Eternit bangunan terbuat dari papan kayu jati yang sangat kuat. Lantai bangunan masih asli berupa ubin motif yang sangat bagus dan rapi pemasangannya.

➤ **Rumah Tinggal**

Banguan ini berada di jalan merpati, Desa Balapulang Kulon, Kecamatan Balapulang. Terdapat pada koordinat 7°3'8" LS dan 109°5'53" BT. Kondisi Obyek terawat sangat baik karena setiap tahunnya pemilik rumah menganggarkan untuk melakukan renovasi rumah. Untungnya pemilik rumah mengetahui bahwa rumah tinggalnya merupakan cagar budaya dan mengetahui bahwa tidak diperbolehkan merubah bentuk dan proses rehabilitasi bangunan sehingga bangunan masih tetap lestari bentuknya.



Bangunan berbatasan di sebelah utara Jl. Desa, sebelah timur SD Negeri Balapulang Kulon 02, sebelah selatan rumah tinggal, sebelah barat rumah tinggal. Riwayat kepemilikan bangunan ini awalnya merupakan kantor PG Balapulang yang tepat berada didepan Pabrik. Bangunan ini merupakan bangunan berarsitektur belanda, boleh dikatakan merupakan bangunan indis. Bangunan berhimpitan langsung dengan bangunan SD Negeri Balapulang Kulon 02, dahulu merupakan bangunan satu kesatuan. Eternit bangunan terbuat dari papan kayu jati yang sangat kuat dan terjaga dengan baik kondisinya. Lantai bangunan masih asli berupa ubin



motif bintang dan sulur-suluran. Pintu ruangan berukuran besar sedangkan jendela ada dua lapis, lapis yang luar berupa jendela kayu sedangkan yang dalam berupa tralis besi setengah bagian jendela. Atap bangunan sudah mengalami rehap. Bagian belakan rumah terdapat ruang-ruang seperti barak yang memanjang, dahulu diperuntukkan untuk dapur dan juga kamar mandi dan toilet. Sisa toilet jaman dahulu masih ada seperti kloset duduk dan bathtup.

➤ **Stasiun Balapulang**



<p>Stasiun Balapulang</p> <p>(BLP) merupakan stasiun kereta api kelas III/kecil nonaktif yang terletak di Balapulang Kulon, Balapulang, Kabupaten Tegal. Stasiun yang terletak pada ketinggian +90 meter ini termasuk dalam Daerah Operasi V Purwokerto. Stasiun ini merupakan titik terminus dari jalur KA Tegal–Balapulang yang dibuka oleh Javasche Spoorweg Maatschappij Belanda pada tahun 1885-1886.</p>

Bahan utama bangunan ini berupa batu bata isian semen. Panjang bangunan 7,6 meter dan lebar 5 meter. Pada bagian bangunan terdapat semacam tirai yang terbuat dari papan kayu yang menutupi atap bagian depan. Pintu kantor kecil dengan jendela kecil juga. Terdapat jendela tiket di bagian tengah bangunan dengan lobang kecil di bagian bawahnya.

Gambar 3.11
Stasiun Balapulang

Pada dinding bangunan terapat prasasti bertuliskan NWP 1590. Kepemilikan stasiun ini merupakan milik PT KAI. Pada sebelah utara stasiun terdapat bangunan yang dahulu merupakan tempat loko. Bangunan ini berpintu besar pada setiap sisi rel guna memasukkan loko ke dalam ruangan. Pintu bangunan terbuat dari besi bertralis. Bangunan sangat tinggi dan besar dengan panjang 16 meter dan lebar 10 meter.

➤ **Rumah Kepala Stasiun Balapulang**



Bangunan ini sekarang dipergunakan sebagai rumah tinggal. Penghuninya adalah anak dari Kepala Stasiun Balapulang yang terakhir saat masih beroperasi. Bangunan ini berada di jalan Stasiun Rt 02, Rw 02 Desa Balaulang Kulon. Posisi koordinatnya pada 7°3'20" LS dan 109°5'56" BT. Yang unik dari



bangunan ini yaitu berupa rumah panggung tetapi penyangga bawahnya berupa tiang umpak beton.

Terdapat pula lorong di bawah rumah berbentuk setengah lingkaran pas di bawah kamar tidur tetapi saat ini sudah ditutup dengan papan sehingga tidak bisa melihat seperti apa bentuk di dalamnya. Bahan utama bangunan berupa batu bata isian semen dengan eternit yang terbuat dari semacam besi tipis yang sangat kuat. Alas lantai rumah berupa papan kayu jati yang tertata sangat rapi dan berukuran besar.

➤ **Makam Mbah Jaksa**



Makam ini berada di Desa Wringinjenggot, Kecamatan Balapulang. Keberadaan makam berada di sebelah selatan makam umum. Kondisi makam terawat, pengelolaan makam oleh pemerintah desa. Pada makam mbah jaksan terdapat alas berupa papan kayu. Terdapat pula pohon asem besar yang berada di depan makam di dalam pagar makam.

Pagar makam terbuat dari batu bata yang disusun berundak. Makam sudah bercungkup menggunakan bahan galvalum. Makam Mbah Jaksa setiap jum'at kliwon ramai oleh para peziarah, dan pada tanggal 1 Suro dilakukan khoul. Di dekat makam terdapat dua mata air yang oleh masyarakat dinamai sumur kalapacung. Diberi nama tersebut karena di dekat mata air terdapat pohon kalapacung, dan konon getah pohonnya bisa dipergunakan untuk menyembuhkan penyakit.

c. Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 2.66

Capaian kinerja tahun 2019-2021

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2019			2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Mewujudkan Aparatur Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	-	45,25	-	50,10	63,69	127,13	64,19	64,21	100,03



	yang Profesional										
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,30	78,36	96,38	78,61	80,83	102,82	80,46	82,20	102,16
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	2,82	-	-	3,11	-	2,3	2,55	111
3	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Nilai SAKIP Kabupaten	-	60,10	-	63,61	61,36	96,45	65,61	63,28	96,44
4	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
5	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Indeks Wiliamson	-	-	-	0,258	NA	NA	0,254	NA	NA
6	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Pertumbuhan Ekonomi	-	5,56	-	5,48	-1,48	-26,64	3,2	3,72	116,25
7	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berku	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	68,24	-	68,03	68,39	100,53	68,73	68,79	100,08
8	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	70,16	69,25	98,7	69,30	72,58	104,73	69,70	72,12	103,47
		Indeks pembangunan gender (IPG)	65,72	86,74	131,98	86,85	86,74	99,87	86,94	87,53	100,67
9	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	6,87	6,86	98,98	6,75	6,98	103,41	6,77	6,99	103,25
		Harapan Lama Sekolah	12,7	12,68	99,84	12,37	12,67	102,43	12,40	12,89	103,95
10	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	69,63	71,40	102,54	71,19	71,60	100,58	71,24	71,72	100,67
11	Menurunkan Kesenjangan Kemiskinan	Indek Gini	-	-	-	0,307	NA	NA	0,303	0,368	78,87
12	Menurunkan Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	8,25	7,64	107,98	7,01	8,14	83,88	8,41	8,60	97,74
13	Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	-	8,21	-	7,45	9,82	68,19	10,42	9,97	104,31
14	Menurunnya Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	-	-	-	181,98	NA	NA	177,71	181,91	97,63
15	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Indeks Kebudayaan	-	-	-	62,34	NA	NA	64,73	60,05	92,77



d. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tabel 2.67

Capaian Kinerja dengan Target Akhir RPJMD

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Target Akhir 2024	% Capaian	Tingkat Kemajuan (%)
1	Mewujudkan Aparatur Birokrasi yang Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi	64,21	65,69	100,03	97,74
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,20	86,2	102,16	95,35
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,55	2,6	111	98,07
3	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Nilai SAKIP Kabupaten	63,28	73,61	96,44	85,96
4	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	100	100
5	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Indeks Wiliamson	NA	0,242	NA	NA
6	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Pertumbuhan Ekonomi	3,72	4,85-5,45	116,25	76,7
7	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berku	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,79	70,83	100,08	97,11
8	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	72,12	71,40	103,47	101
		Indeks pembangunan gender (IPG)	87,53	87,21	100,67	100,36
9	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	6,99	6,85	103,25	102,04
		Harapan Lama Sekolah	12,89	12,53	103,95	102,87
10	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,72	71,39	100,67	100,46
11	Menurunkan Kesenjangan Kemiskinan	Indek Gini	0,368	0,289	78,87	72,66
12	Menurunkan Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	8,60	5,50	97,74	43,63
13	Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	9,97	9,85-8,85	104,31	98,78
14	Menurunnya Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	181,91	172,12	97,63	94,31
15	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Indeks Kebudayaan	60,05	70,00	92,77	85,78



e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kerjanya mencapai sama atau lebih dari 100%. Terlihat dari 15 tujuan dan sasaran, yang menunjukkan sama atau lebih dari 100% yaitu sebanyak 8 (delapan) tujuan dan sasaran RPJMD. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait pencapaian target sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.68
Anggaran dan Realisasi Anggaran
Pemerintah Kabupaten Tegal Per Tujuan dan Per Sasaran
Tahun 2021

No.	Tujuan RPJMD	No.	Sasaran RPJMD	Rencana Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Mewujudkan Aparatur Birokrasi yang Profesional			523.523.185.500	551.676.391.699	105,37
		1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	15.773.208.000	14.177.840.486	89,88
		2	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	7.272.884.000	4.889.486.992	67,22
		3	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	516.250.301.500	532.609.064.221	103,16
2.	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah			26.405.806.325	22.918.850.622	86,79
3.	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			26.593.935.500	24.716.902.741	92,94
4.	Mewujudkan Sumber daya Manusia yang Berkualitas			667.105.361.767	618.642.876.622	92,73
		4	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	8.290.168.900	7.000.894.802	84,44
		5	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	177.263.691.500	179.854.007.550	101,46
		6	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	481.551.501.367	431.787.974.270	89,66
5	Menurunkan Kesenjangan			7.819.735.900	7.138.702.027	91,29



No.	Tujuan RPJMD	No.	Sasaran RPJMD	Rencana Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
	Kemiskinan					
		7	Menurunkan Angka Kemiskinan	5.760.667.900	5.470.561.247	94,96
		8	Menurunnya Pengangguran	2.059.068.000	1.668.140.780	81,29
6.	Menurunnya Resiko Bencana			5.330.271.700	4.631.515.073	86,89
7.	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan			103.989.962.600	92.370.451.646	88,82
JUMLAH				1.360.768.259.292	1.322.095.690.430	97,15

Dari tabel diatas dapat di ketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang di perjanjikan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2021. Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Tegal, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2021, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.69
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2021

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Jumlah Indikator	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran	Rencana Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
Mewujudkan Aparatur Birokrasi yang Profesional		1 Indikator	100,03	523.523.185.500	551.676.391.699	105,37
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2 Indikator	106,58	15.773.208.000	14.177.840.486	89,88
	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	1 Indikator	96,44	7.272.884.000	4.889.486.992	67,22
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Indikator	100	516.250.301.500	147.559.521.996	28,58
Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah		1 Indikator	-	26.405.806.325	22.918.850.622	86,79
Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		1 Indikator	116,25	26.593.935.500	24.716.902.741	92,94
Mewujudkan Sumber daya Manusia yang Berkualitas		1 Indikator	100,08	667.105.361.767	618.642.876.622	92,73
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	2 Indikator	102,07	8.290.168.900	7.000.894.802	84,44



Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Jumlah Indikator	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran	Rencana Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	2 Indikator	103,60	177.263.691.500	179.854.007.550	101,46
	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Indikator	100,67	481.551.501.367	431.787.974.270	89,66
Menurunkan Kesenjangan Kemiskinan		1 Indikator	78,87	7.819.735.900	7.138.702.027	91,29
	Menurunkan Angka Kemiskinan	1 Indikator	97,74	5.760.667.900	5.470.561.247	94,96
	Menurunnya Pengangguran	1 Indikator	104,31	2.059.068.000	1.668.140.780	81,29
Menurunnya Resiko Bencana		1 Indikator	97,63	5.330.271.700	4.631.515.073	86,89
Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan		1 Indikator	92,77	103.989.962.600	92.370.451.646	88,82
JUMLAH/ RATA-RATA			99,78	1.360.768.259.292	1.322.095.690.430	97,15

Terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai sama atau lebih dari 100%. Terlihat dari 15 tujuan dan sasaran, yang menunjukkan sama atau lebih dari 100% yaitu sebanyak 9 (sembilan) tujuan dan sasaran RPJMD. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 2.70
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2021

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Jumlah Indikator	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran	Persentase Realisasi Anggaran	Efisiensi
Mewujudkan Aparatur Birokrasi yang Profesional		1 Indikator	100,03	105,37	-



Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Jumlah Indikator	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran	Persentase Realisasi Anggaran	Efisiensi
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2 Indikator	106,58	89,88	16,7
	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	1 Indikator	96,44	67,22	29,22
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Indikator	100	28,58	71,42
Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah		1 Indikator	-	86,79	-
Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertaian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		1 Indikator	116,25	92,94	23,31
Mewujudkan Sumber daya Manusia yang Berkualitas		1 Indikator	100,08	92,73	7,35
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	2 Indikator	102,07	84,44	17,63
	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	2 Indikator	103,60	101,46	2,14
	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	1 Indikator	100,67	89,66	11,01
Menurunkan Kesenjangan Kemiskinan		1 Indikator	78,87	91,29	-
	Menurunkan Angka Kemiskinan	1 Indikator	97,74	94,96	2,48
	Menurunnya Pengangguran	1 Indikator	104,31	81,29	23,02
Menurunnya Resiko Bencana		1 Indikator	97,63	86,89	10,74
Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan		1 Indikator	92,77	88,82	3,91
JUMLAH/ RATA-RATA			99,78	97,15	2,63

f. Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Bentuk dari akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan atas penggunaan anggaran tertentu adalah dengan menyusun laporan kinerja penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel.



Mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024, yang didalamnya telah ditetapkan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai, Pemerintah Kabupaten Tegal secara berkelanjutan telah berupaya mencapai target kinerja sasaran yang ditetapkan dalam setiap tahunnya. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran tersebut merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugas dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, capaian kinerja tahun 2021 merupakan capaian kinerja tahun kedua dari pelaksanaan rencana pembangunan lima tahunan. Rata-rata tingkat capaian kinerja dari 15 tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah sebesar 99,78 %. Hasil pengukuran pada 18 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tegal yang telah ditetapkan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. 16 indikator tercapai dengan kategori Sangat Tinggi
- b. 1 indikator dengan kategori Tinggi
- c. 1 indikator tidak tersedia data untuk level kabupaten atau *Not Available (NA)*

Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan sebanyak 15 tujuan dan sasaran strategis dengan 18 indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 yang didalamnya tertuang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah pada bab 8 tabel 8.1 sesuai Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja tahun 2021. Adapun pencapaian tujuan sasaran per indikator dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 4.71
Persentase Capaian per Indikator

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021 %	Kategori
1	Mewujudkan Aparatur Birokrasi yang Profesional	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai; Tahunan	64,19	64,21	100,03	Sangat tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2	Persentase IndeK Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai; Tahunan	80,46	82,20	102,16	Sangat tinggi
		3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai; Tahunan	2,30	2,55	111	Sangat tinggi
3	Meningkatnya Kualitas Manajemen	4	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai; Tahunan	65,61	63,28	96,44	Sangat tinggi
4	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	5	Opini BPK	Opini; Tahunan	WTP	WTP	100	Sangat tinggi
5	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	6	Indeks Williamson	Persen; Kumulatif	0,254	NA	-	NA
6	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	7	Pertumbuhan Ekonomi	Persen; Tahunan	3,20	3,72	116,25	Sangat tinggi
7	Mewujudkan Sumber daya Manusia yang Berkualitas	8	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai; Tahunan	68,73	68,79	100,08	Sangat tinggi
8	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	9	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen; Tahunan	69,70	72,12	103,47	Sangat tinggi
		10	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen; Tahunan	86,94	87,53	100,67	Sangat tinggi
9	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	11	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun; Tahunan	6,77	6,99	103,25	Sangat tinggi
		12	Harapan Lama Sekolah	Tahun; Tahunan	12,40	12,89	103,95	Sangat tinggi
10	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	13	Angka Harapan Hidup	Tahun; Tahunan	71,24	71,72	100,67	Sangat tinggi
11	Menurunkan Kesenjangan Kemiskinan	14	Indeks Gini	Persen; Tahunan	0,303	0,368	78,87	Tinggi
12	Menurunkan Angka Kemiskinan	15	Persentase penduduk miskin	Persen; Tahunan	8,41	8,6	97,74	Sangat tinggi
13	Menurunnya Pengangguran	16	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen; Tahunan	10,42	9,97	104,31	Sangat tinggi
14	Menurunnya Resiko Bencana	17	Indeks Resiko Bencana	Angka; Tahunan	177,71	181,91	97,63	Sangat tinggi
15	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	18	Indeks Kebudayaan	Angka; Tahunan	64,73	60,05	92,77	Sangat tinggi



Dari 15 tujuan dan sasaran telah ditetapkan 18 indikator dengan capaian sebagai berikut :

1. 10 indikator telah melebihi/melampaui target.
2. 1 indikator telah sesuai target.
3. 6 indikator tidak mencapai target.
4. 1 indikator tidak tersedia data untuk level kabupaten atau *Not Available (NA)*

Persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tegal pada tahun 2021 menyentuh angka 99,78% yang berarti kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal dapat diartikan Sangat Tinggi. Dari sudut pandang berbeda, kondisi tersebut juga dapat diartikan bahwa terdapat ketidakakuratan dalam perencanaan dan kurang bisa memprediksi kondisi yang akan datang. Hal tersebut berakibat pada penentuan/penetapan target yang kurang relevan sehingga masih terdapat beberapa indikator yang tidak tersedia data.

Capaian capaian kinerja tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tegal pada tahun 2021 menyentuh angka 99,78% tak lepas dari capaian realisasi program maupun kegiatan yang dilaksanakan, dari tabel 2.72 dapat dilihat bahwa capaian realisasi anggaran yang mendukung capain kinerja sebesar 97,15%.

Tabel 2.72
Realisasi Capaian 2021

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Program	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
1	Mewujudkan Aparatur Birokrasi yang Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi	100,03		105,37	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	102,16	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 18 Kecamatan	55,49	Menunjang
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 18 Kecamatan	90,41	Menunjang
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	98,28	Menunjang
				Program Pengelolaan Informasi	86,41	Menunjang



				Administrasi Kependudukan		
				Program Pendaftaran Penduduk	58,25	Menunjang
				Program Pencatatan Sipil	71,38	Menunjang
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	111	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	94,02	Menunjang
				Program Aplikasi Informatika	94,48	Menunjang
3	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Nilai SAKIP Kabupaten	96,44	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah- Sub Kegiatan	56,56	Menunjang
				Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	95,84	Menunjang
				Program Perekonomian Dan Pembangunan	50,63	Menunjang
				Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah - Sub Kegiatan	84,62	Menunjang
4	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	100	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	103,29	Menunjang
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	96,20	Menunjang
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	91,07	Menunjang
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	73,16	Menunjang
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	72,73	Menunjang
5	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Indeks Wiliamson	NA	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LIAJ)	86,79	Menunjang



6	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Pertumbuhan Ekonomi	116,25	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	92,98	Menunjang
				Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	98,86	Menunjang
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	94,27	Menunjang
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	93,19	Menunjang
				Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	91,45	Menunjang
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	91,57	Menunjang
				Program Penyuluhan Pertanian	94,17	Menunjang
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	93,41	Menunjang
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	90,50	Menunjang
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	91,47	Menunjang
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA-Sub Keg Pengelolaan Destinasi	98,83	Menunjang
				Program Pemasaran Pariwisata	87,48	Menunjang
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	99,26	Menunjang



				-Sub Keg Penyediaan Sarana Distriub		
				Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	96,22	Menunjang
				Program Pengembangan Umkm	98,06	Menunjang
7	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berku	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	100,08		92,73	
8	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	103,47	Program Pengarusutamaa n Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	94,63	Menunjang
				Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	95,37	Menunjang
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	83,66	Menunjang
		Indeks pembangunan gender (IPG)	100,67			
9	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	103,25	Program Pengelolaan Pendidikan	102,15	Menunjang
		Harapan Lama Sekolah	103,95	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	98,16	Menunjang
10	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	100,67	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	86,90	Menunjang
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rs Suradadi	90,21	Menunjang
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rs Susilo	91,34	Menunjang
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	85,89	Menunjang
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan	89,68	Menunjang



				Makanan Minuman		
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	96,58	Menunjang
11	Menurunkan Kesenjangan Kemiskinan	Indek Gini	78,87		91,29	
12	Menurunkan Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	97,74	Program Pemberdayaan Sosial	99	Menunjang
				Program Rehabilitasi Sosial	94,28	Menunjang
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	94,90	Menunjang
				Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	95,09	Menunjang
13	Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	104,31	Program Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja	81,85	Menunjang
				Program Promosi Penanaman Modal	90,36	Menunjang
				Program Pelayanan Penanaman Modal	90,89	Menunjang
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	63,11	Menunjang
14	Menurunnya Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	97,63	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Da Non Kebakaran	95,49	Menunjang
				Program Penanggulangan Bencana	83,91	Menunjang
				Program Penanganan Bencana	97,73	Menunjang
15	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Indeks Kebudayaan	92,77	Program Pengembangan Kebudayaan	88,80	Menunjang
				Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	90,94	Menunjang



BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN
TUGAS PEMBANTUAN

a. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tegal tidak memperoleh tugas pembantuan namun menjadi lokasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diperoleh oleh Provinsi Jawa Tengah. Dasar hukum tugas pembantuan adalah sebagai berikut :

Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebelum tahun 2011.

b. Gambaran Umum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Dalam sistem dan prinsip negara kesatuan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, asas otonomi dan tugas pembantuan memiliki makna tersendiri. Dimana pembagian urusan yang kemudiandiatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang



menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang telah ditentukan menjadi urusan Pemerintah.

Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan, karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/ atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota. Penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga (K/L). Dana dekonsentrasi pada hakekatnya



merupakan bagian anggaran kementerian/ lembaga yang dialokasikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah propinsi, sesuai dengan beban dan jenis kewenangan yang dilimpahkan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan pelimpahan. Sementara dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/ lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota, dan/atau desa sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan penugasan. Sehingga berdasarkan pola pertanggungjawaban dan pelaporan penyelenggaraan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, maka yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten / Kota hanyalah pelaporan tugas pembantuan.

c. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama di Kabupaten Tegal tahun 2020 merupakan implementasi dari DIPA Tugas Pembantuan Kementerian/Lembaga dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak/juknis) masing-masing program/kegiatan yang dialokasikan untuk Provinsi Jawa Tengah. Realisasi kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan menjadi gambaran tentang tingkat capaian kinerja kegiatan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama. Pengukuran tingkat capaian kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran kegiatan dan anggaran menurut program/kegiatan Tugas Pembantuan pada Perangkat Daerah (PD). Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (goals and objectives). Kinerja kegiatan dan sasaran merupakan ukuran tingkat capaian indikator kinerja yang dicapai pada kegiatan dan sasaran. DIPA Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 yang kemudian salah satunya dialokasikan ke Kabupaten Tegal, telah menjabarkan indikator kinerja output dan input sebagai basis kuantitatif pengukuran kinerja program/kegiatan dan anggaran. Dengan mengacu kepada pedoman pengukuran dan evaluasi kinerja oleh LAN, dimana nilai capaian kinerja merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara kinerja nyata (realisasi/capaian) dengan kinerja yang direncanakan (target), secara umum



tergambar kegiatan-kegiatan yang direncanakan sudah mencapai target. Apabila dibandingkan antara capaian pada tolak ukur input yang menggunakan indikator mengenai besarnya dana, secara rata-rata akan tergambar bahwa nilai capaian input sebanding dengan nilai capaian pada tolak ukur output dan outcome-nya. Ditinjau secara simultan hasil penilaian terhadap kinerja kegiatan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama di Kabupaten Tegal tahun 2020 menunjukkan bahwa nilai capaian kinerja pelaksanaan kegiatannya berdasarkan tolak ukur dan target kinerja mencapai kisaran 70% –100%, sehingga dengan kondisi ini dapat diinterpretasikan, bahwa pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan dapat digolongkan sebagai kriteria berhasil. Meskipun demikian, secara parsial patut diakui bahwa masih terdapat beberapa kegiatan yang nilai kinerjanya belum mencapai 100 %. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa terdapat efisiensi input dalam pencapaian output. Sehingga tingkat efisiensi mencapai 70%-100%, yang artinya bahwa terdapat efisiensi input dalam pencapaian output sebagai dasar penentuan kerangka perencanaan anggaran. Secara lebih rinci mengenai capaian kinerja kegiatan yang disandingkan dengan target kinerjanya.

3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Kabupaten Tegal

Tugas pembantuan dapat juga diartikan sebagai tugas pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahan pusat atau pemerintah yang lebih tinggi, dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya.

Pemerintah pusat dalam hal ini berwenang dan berkewajiban memberikan perencanaan umum, petunjuk-petunjuk serta biaya. Sedangkan perencanaan lebih rinci, khusus mengenai pengawasan dari kegiatan tersebut dipercayakan kepada pejabat atau aparatur pemerintah pusat yang ada di daerah.

Pada Tahun 2021 Kabupaten Tegal memperoleh anggaran dari pemerintah pusat untuk kegiatan bantuan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (PAMSIMAS) III kepada desa di Kabupaten Tegal.

3.1.1. Target Kinerja

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat, atau dikenal dengan sebutan PAMSIMAS, merupakan *platform* pembangunan air minum dan sanitasi perdesaan yang



dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat. PAMSIMAS adalah program pemberdayaan yang melibatkan masyarakat secara aktif, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, hingga pengelolaan.

Program tersebut terbagi ke dalam tiga periode, yaitu Pamsimas I, II, dan III. Program ini telah berlangsung selama 14 tahun dan akan berakhir pada Jumat (31/12/2021). Program PAMSIMAS I (2008-2012) dan PAMSIMAS II (2013-2015), telah berhasil menambah akses air minum aman bagi 10,4 juta jiwa dan akses sanitasi layak bagi 10,4 juta jiwa di lebih dari 12.000 desa/kelurahan yang tersebar di 233 kabupaten/kota di 32 provinsi di Indonesia.

Selain melibatkan masyarakat, Pamsimas juga merupakan program kolaboratif yang melibatkan berbagai stakeholder, yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), dan pemerintah desa (pemdes).

Tujuan PAMSIMAS III adalah meningkatkan jumlah warga kurang terlayani di wilayah perdesaan dan peri-urban yang dapat mengakses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan.

3.1.2 Realisasi

Tabel 3.1

Matriks Capaian Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Kabupaten Tegal 2021

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI (DESA)	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	KEMENTERIAN PUPR	SK DIRJEN CIPTA KARYA PENETAPAN DESA PENERIMA PROGRAM PAMSIMAS III REGULER APBN	PROGRAM : PAMSIMAS III KEGIATAN - REGULER OUTPUT : SARANA AIR MINUM	Demangharjo	Dinas Perkintaru	245.000.000	245.000.000	100%	SAM terbangun	100%	Selesai
				Sukareja		245.000.000	245.000.000	100%		Selesai	
				Padaharja		245.000.000	245.000.000	100%		Selesai	
				Kupu		245.000.000	245.000.000	100%		Selesai	
				Grobog Kulon		245.000.000	245.000.000	100%		Selesai	
				Dukuh Waru		245.000.000	245.000.000	100%		Selesai	
				Langgen		245.000.000	245.000.000	100%		Selesai	
		SK DIRJEN CIPTA KARYA PENETAPAN DESA PENERIMA PROGRAM PAMSIMAS III HID APBN	PROGRAM : PAMSIMAS III KEGIATAN - HID OUTPUT : SARANA AIR MINUM	Lebakgowah	Dinas Perkintaru	245.000.000	245.000.000	100%	SAM terbangun	100%	Selesai
				Sarang Kidul		245.000.000	245.000.000	100%		Selesai	
				Sigedong		245.000.000	245.000.000	100%		Selesai	
				Begawat		245.000.000	245.000.000	100%		Selesai	
				Kesadikan		245.000.000	245.000.000	100%		Selesai	
				Sidomulyo		245.000.000	245.000.000	100%		Selesai	
				Kertaharja		245.000.000	245.000.000	100%		Selesai	
Pesarean	245.000.000	245.000.000	100%	Selesai							
Cibunar	245.000.000	245.000.000	100%	Selesai							



3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Kabupaten Tegal

Tahun Anggaran 2021 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal, tidak menerima Dana Tugas Pembantuan secara Mandiri yang langsung dari kementerian. Kegiatan yang bersumber anggaran Dana Tugas Pembantuan adalah Kegiatan TP Provinsi Jawa Tengah yang lokasi dan peruntukannya di Kabupaten Tegal. Kegiatan-kegiatan Dana Tugas Pembantuan yang berlokasi di Kabupaten Tegal bertujuan meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Tegal.

3.2.1. Target Kinerja

Adapun target kinerja dari tugas pembantuan yang bersumber dari Ditjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian yaitu :

A. Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian:

1. Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Irigasi Perpipaan)
 - a. Kelompok Tani Rukun Tani Desa Bumijawa Kecamatan Bumijawa
 - b. Kelompok Tani Ngesti Rahayu Desa Bumijawa Kecamatan Bumijawa
 - c. Kelompok Tani Aji Luhur Desa Gembongdadai Kecamatan Suradadi
 - d. Kelompok Tani Sagi Tani Desa Kendayakan Kecamatan Warurejo
 - e. Kelompok Tani Karyasari Desa Dukuhbenda Kecamatan Bumijawa
 - f. Gapoktan Bina Tani Desa Sidokaton Kecamatan Dukuhturi
2. O.M Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Jaringan Irigasi Tersier)
 - a. GPK. Subur Rejeki Desa Brekat Kecamatan Tarub
 - b. P3A Sidomakmur Desa Banjarturi Kecamatan Warurejo
 - c. Kelompok Tani Murah Desa Kremen Kecamatan Warurejo
 - d. GPK Tani Makmur Desa Mejasem Timur Kecamatan Kramat
 - e. P3A Ngudi Luhur Desa Kertayasa Kecamatan Kramat
 - f. P3A Sumpersugih Desa Luwijawa Kecamatan Jatinegara
 - g. KT Rukun Tani Desa Lebakwangi Kecamatan Jatinegara
 - h. P3A Jaya Utama desa Cerih Kecamatan Jatinegara
 - i. GPK. Rukun Sari Tani Desa Kertasari Kecamatan Suradadi
 - j. P3A Jatipurwo Desa Purwahamba Kecamatan Suradadi



- k. P3A Jatiluhur Desa Jatibogor Kecamatan Suradadi
 - l. P3A Tani Maju Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi
 - m. KT. Gunung Guntur Desa Cawitali Kecamatan Bumijawa
 - n. KT. Ngudi Rahayu Desa Traju Kecamatan Bumijawa
 - o. P3A Sumber Barokah Desa Pagerkasih Kecamatan Bumijawa
 - p. GPK Iestari Mulya Desa Blubuk Kecamatan Dukuhwaru
 - q. GPK Ngudi Sejahtera Desa Pagerbarang Kecamatan Pagerbarang
 - r. P3A Harapan Baru Desa Srengseng Kecamatan Pagerbarang
- B. Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian dengan kegiatan berupa Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan dalam bentuk Rekomendasi Perlindungan dan Pengendalian alih fungsi lahan pertanian mencakup :
- a. Sosialisasi dan Koordinasi kegiatan Perlindungan dan Pengendalian Alih fungsi lahan. Sosialisasi dan koordinasi dilaksanakan oleh Ditjen PSP sebagai dasar Pra Persiapan meliputi Sosialisasi awal, Pelatihan pengolahan data awal, Pelatihan Layout peta kerja, Pelatihan Join data Blanko ke Spacial, Pelatihan Aplikasi Avenza Map dan Pelatihan Pengisian Blanko data Dukung. Pembentukan Pokja, Persiapan Admintrasi dan Keuangan dan Sosialisasi Teknis dan jadwal kegiatan.
 - b. Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan dan Pengendalian Alih fungsi lahan
Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan melibatkan instansi terkait seperti Dinas Perkimtaru, Dinas PMPTSP, Kantor ATR/BPN, BPS, Bappeda, DPU dan Camat. Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah verifikasi Lahan Baku Sawah dan identifikasi awal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Output dari kegiatan ini terbitnya SK Bupati Tegal Nomor 050/1374 Tahun 2021 tentang Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan.
- C. Fasilitasi Publik Kepada Masyarakat berupa penyusunan e-RDCK untuk Pendataan dan Pelaksanaan verifikasi dan validasi penerima pupuk bersubsidi
- D. Fasilitasi Pembiayaan Pertanian berupa Asuransi Pertanian
- E. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya (Layanan manajemen dan perkantoran)



3.2.1 Realisasi Tugas Pembantuan

TABEL 3.2

Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan di Kabupaten Tegal

NO	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI (DESA)	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	BIDANG PERTANIAN	DIPA No. SP DIPA-018.08.4.039158/2021 Tanggal 23 Nopember 2020. (039158) DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Bumijawa	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal	3.156.878.000	2.956.328.200	93,65	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	100,00	Selesai
			Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian			2.164.000.000	2.009.170.000	92,85	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	100,00	Selesai
			Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			664.000.000	662.170.000	99,72	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	100,00	Selesai
			Irigasi Perpipaan			100.000.000	99.830.000	99,83	Irigasi Perpipaan	100,00	Selesai
			Persiapan			12.000.000	11.830.000	98,58	Persiapan	100,00	Selesai
			Kabupaten Tegal			12.000.000	11.830.000	98,58	Kabupaten Tegal	100,00	Selesai
			Pelaksanaan Kontruksi Irigasi Perpipaan			84.000.000	84.000.000	100,00	Pelaksanaan Kontruksi Irigasi Perpipaan	100,00	Selesai
			Kabupaten Tegal			84.000.000	84.000.000	100,00	Kabupaten Tegal	100,00	Selesai
			Monitoring dan Pelaporan			4.000.000	4.000.000	100,00	Monitoring dan Pelaporan	100,00	Selesai
			Kabupaten Tegal			4.000.000	4.000.000	100,00	Kabupaten Tegal	100,00	Selesai
Embung Pertanian		120.000.000	120.000.000	100,00	Embung Pertanian	100,00	Selesai				



		Pembangunan Embung Pertanian		120.000.000	120.000.000	100,00	Pembangunan Embung Pertanian	100,00	Selesai
		Kabupaten Tegal	Sumbaga	120.000.000	120.000.000	100,00	Kabupaten Tegal	100,00	Selesai
		Irigasi Perpompaaan Besar Wilayah Barat		254.000.000	252.810.000	99,53	Irigasi Perpompaaan Besar Wilayah Barat	100,00	Selesai
		Persiapan		30.800.000	29.910.000	97,11	Persiapan	100,00	Selesai
		Kabupaten Tegal		30.800.000	29.910.000	97,11	Kabupaten Tegal	100,00	Selesai
		Pelaksanaan Kontruksi Irigasi Perpompaaan		215.200.000	215.200.000	100,00	Pelaksanaan Kontruksi Irigasi Perpompaaan	100,00	Selesai
		Kabupaten Tegal		215.200.000	215.200.000	100,00	Kabupaten Tegal	100,00	Selesai
			Gembongdadi Kendayakan	107.600.000	107.600.000	100,00	0	100,00	Selesai
		Monitoring dan Pelaporan		107.600.000	107.600.000	100,00	0	100,00	Selesai
		Kabupaten Tegal		8.000.000	7.700.000	96,25	Monitoring dan Pelaporan	100,00	Selesai
		Irigasi Perpompaaan Menengah Wilayah Barat		8.000.000	7.700.000	96,25	Kabupaten Tegal	100,00	Selesai
		Persiapan		190.000.000	189.530.000	99,75	Irigasi Perpompaaan Menengah Wilayah Barat	100,00	Selesai
		Kabupaten Tegal		26.000.000	25.830.000	99,35	Persiapan	100,00	Selesai
		Pelaksanaan Kontruksi Irigasi Perpompaaan		26.000.000	25.830.000	99,35	Kabupaten Tegal	100,00	Selesai
		Kabupaten Tegal		156.000.000	156.000.000	100,00	Pelaksanaan Kontruksi Irigasi Perpompaaan	100,00	Selesai
			Dukuhbenda	156.000.000	156.000.000	100,00	Kabupaten Tegal	100,00	Selesai
			Sidakaton	78.000.000	78.000.000	100,00	0	100,00	Selesai
		Monitoring dan Pelaporan		78.000.000	78.000.000	100,00	0	100,00	Selesai
		Kabupaten Tegal		8.000.000	7.700.000	96,25	Monitoring dan Pelaporan	100,00	Selesai
				8.000.000	7.700.000	96,25	Kabupaten Tegal	100,00	Selesai



		OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		1.500.000.000	1.347.000.000	89,80	OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	100,00	Selesai
		Jaringan Irigasi Tersier		1.500.000.000	1.347.000.000	89,80	Jaringan Irigasi Tersier	100,00	Selesai
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier		1.500.000.000	1.347.000.000	89,80	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	100,00	Selesai
		Kabupaten Tegal		1.500.000.000	1.347.000.000	89,80	Kabupaten Tegal	100,00	Selesai
		Brekat		75.000.000	75.000.000	100,00		100,00	Selesai
		Banjarturi		75.000.000	75.000.000	100,00		100,00	Selesai
		Kreman		75.000.000	75.000.000	100,00		100,00	Selesai
		Mejasem Timur		75.000.000	75.000.000	100,00		100,00	Selesai
		Kertayasa		75.000.000	75.000.000	100,00		100,00	Selesai
		Luwijawa		75.000.000	75.000.000	100,00		100,00	Selesai
		Lebakwangi		75.000.000	75.000.000	100,00		100,00	Selesai
		Cerih		75.000.000	75.000.000	100,00		100,00	Selesai
		Kertasari		105.000.000	73500000	70,00		100,00	Selesai
		Purwahamba		105.000.000	73.500.000	70,00		100,00	Selesai
		Jatibogor		75.000.000	75.000.000	100,00		100,00	Selesai
		Sidaharja		75.000.000	75.000.000	100,00		100,00	Selesai
		Cawitali		75.000.000	75.000.000	100,00		100,00	Selesai
		Traju		75.000.000	75.000.000	100,00		100,00	Selesai
		Pagerkasih		75.000.000	75.000.000	100,00		100,00	Selesai
		Blubuk		75.000.000	75.000.000	100,00		100,00	Selesai
		Pagerbarang		75.000.000	75.000.000	100,00		100,00	Selesai
		Srengseng		75.000.000	75.000.000	100,00		100,00	Selesai



		Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian		598.000.000	560.130.700	93,67	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	100,00	Selesai
		Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan		598.000.000	560.130.700	93,67	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	100,00	Selesai
		Rekomendasi Perlindungan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian		598.000.000	560.130.700	93,67	Rekomendasi Perlindungan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian	100,00	Selesai
		Sosialisasi dan koordinasi kegiatan perlindungan dan pengendalian alih fungsi		198.000.000	189.640.000	95,78	Sosialisasi dan koordinasi kegiatan perlindungan dan pengendalian alih fungsi	100,00	Selesai
		Kabupaten Tegal		198.000.000	189.640.000	95,78	Kabupaten Tegal	100,00	Selesai
		Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan		352.000.000	322.590.700	91,65	Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan	100,00	Selesai
		Kabupaten Tegal		352.000.000	322.590.700	91,65	Kabupaten Tegal	100,00	Selesai
		Monitoring dan evaluasi		48.000.000	47.900.000	99,79	Monitoring dan evaluasi	100,00	Selesai
		Kabupaten Tegal		48.000.000	47.900.000	99,79	Kabupaten Tegal	100,00	Selesai
		Fasilitasi Pupuk dan Pestisida		378.830.000	371.079.500	97,95	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	100,00	Selesai
		Pelayanan Publik kepada masyarakat		242.100.000	239.054.500	98,74	Pelayanan Publik kepada masyarakat		Selesai
		e-RDKK untuk Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi		242.100.000	239.054.500	98,74	e-RDKK untuk Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi	100,00	Selesai



		Penyusunan e-RDKK untuk pendataan penerima pupuk bersubsidi		242.100.000	239.054.500	98,74	Penyusunan e-RDKK untuk pendataan penerima pupuk bersubsidi	100,00	Selesai
		Kabupaten Tegal		242.100.000	239.054.500	98,74	Kabupaten Tegal	100,00	Selesai
		Pelayanan Publik Lainnya		136.730.000	132.025.000	96,56	Pelayanan Publik Lainnya	100,00	Selesai
		Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi		136.730.000	132.025.000	96,56	Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi	100,00	Selesai
		Pelaksanaan verifikasi dan validasi penerima pupuk bersubsidi		136.730.000	132.025.000	96,56	Pelaksanaan verifikasi dan validasi penerima pupuk bersubsidi	100,00	Selesai
		Kabupaten Tegal		136.730.000	132.025.000	96,56	Kabupaten Tegal	100,00	Selesai
		Fasilitas Pembiayaan Pertanian		16.048.000	15.948.000	99,38	Fasilitas Pembiayaan Pertanian	100,00	Selesai
		Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		16.048.000	15.948.000	99,38	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	100,00	Selesai
		Asuransi Pertanian		16.048.000	15.948.000	99,38	Asuransi Pertanian	100,00	Selesai
		Persiapan pelaksanaan kegiatan asuransi pertanian		16.048.000	15.948.000	99,38	Persiapan pelaksanaan kegiatan asuransi pertanian	100,00	Selesai
		Kabupaten Tegal		16.048.000	15.948.000	99,38	Kabupaten Tegal	100,00	Selesai
		Program Dukungan Manajemen		90.500.000	85.895.000	94,91	Program Dukungan Manajemen	100,00	Selesai
		Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian		90.500.000	85.895.000	94,91	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	100,00	Selesai



			Layanan Perkantoran			90.500.000	85.895.000	94,91	Layanan Perkantoran	100,00	Selesai
			Layanan Dukungan Manajemen Satker			90.500.000	85.895.000	94,91	Layanan Dukungan Manajemen Satker	100,00	Selesai
			Layanan manajemen dan perkantoran			90.500.000	85.895.000	94,91	Layanan manajemen dan perkantoran	100,00	Selesai
			Kabupaten Tegal			90.500.000	85.895.000	94,91	Kabupaten Tegal	100,00	Selesai





3.3 Permasalahan dan Kendala

Dalam melaksanakan program/kegiatan tugas pembantuan tahun 2021 di Kabupaten Tegal, terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah pelaksana diantaranya:

- a) Belum optimalnya sistem pelaporan berbasis web atau on-line (e-Monev) sehingga sistem pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan masih bersifat manual.
- b) Masih adanya DIPA-DIPA yang turun dipertengahan dan di akhir tahun, sehingga berdampak terhadap lambatnya proses-proses penyelesaian pekerjaan secara administratif seperti penunjukan PPK, Pejabat Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran. Kondisi lambatnya proses administratif ini, akan berdampak terhadap lambatnya pelaksanaan operasional dilapangan.
- c) Adanya revisi DIPA dan POK yang dilaksanakan oleh PD pengelola Tugas Pembantuan, karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Hal ini berdampak pada tertundanya realisasi serapan anggaran seperti yang ditargetkan, sehingga terjadi penumpukan realisasi diakhir tahun.
- d) Realisasi tingkat partisipasi masyarakat (inkind dan incash) yang rendah yang disebabkan tuntutan program yang mewajibkan swadaya masyarakat sebesar 20% cukup memberatkan (PAMSIMAS).

3.4 Saran dan Tindak lanjut

Mengenai upaya tindak lanjut terhadap permasalahan tersebut diantaranya.

- a) Melakukan koordinasi dan konsultasi secara berjenjang ke Provinsi dan ke Pusat mengenai program-program yang DIPAnya terbit di pertengahan tahun untuk dapat diakses secara on line, sehingga realisasi anggaran dan realisasi kinerja dapat dimonitor melalui sistem e-Monev. Selain itu, penyempurnaan terhadap sistem aplikasi ini perlu terus dilaksanakan melalui penyederhanaan format yang ada, sehingga sistem pelaporan yang dilaksanakan dapat berjalan optimal.
- b) Perlunya penyesuaian diawal tahun antara rencana operasional yang telah disusun dengan kondisi iklim yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga keterlambatan pembagian bibit kepada masyarakat tidak terkendala oleh faktor-faktor non teknis.



- c) Koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga pemberi bantuan, agar DIPA dapat turun pada awal tahun, sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan guna menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Demikian pula dengan PD pengelola Tugas Pembantuan tersebut, untuk dapat mempersiapkan sedini mungkin kelengkapan administrasi guna berjalannya pelaksanaan kegiatan dilapangan.
- d) Mengecek kesesuaian POK dengan DIPA dan peraturan perbendaharaan, sehingga revisi dapat segera terealisasi sesuai kebutuhan, dengan tetap berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Hal ini sebagai langkah percepatan serapan anggaran sesuai dengan yang telah ditargetkan, guna menghindari terjadinya penumpukan realisasi di akhir tahun.



BAB IV

PENERAPAN DAN PECAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Urusan Pendidikan

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, jenis pelayanan dasar pendidikan yang dikelola oleh kabupaten/kota terdiri dari :

1. Pendidikan Anak Usia Dini
2. Pendidikan Dasar
3. Pendidikan Kesetaraan

Penerima Pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan yang dikelola kabupaten dengan ketentuan Pendidikan anak usia dini merupakan peserta didik yang berusia 5 tahun sampai dengan 6 tahun, penerima jenis layanan Pendidikan dasar merupakan peserta didik yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun dan penerima jenis layanan Pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 sampai dengan 18 tahun.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang- kurangnya memuat:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu warga negara, dengan ketentuan :

1. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini;
2. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar; dan
3. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.



4.1.2. Target Capaian SPM

TABEL 4.1
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR CAPAIAN	JUMLAH ORANG YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI	TARGET CAPAIAN (5) : (4) X 100%	RENCANA ANGGARAN		
						ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REFOCUSING	ANGGARAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pendidikan anak usia dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	57311	34772	60,67%	27.756.160.000	27.515.402.000	26.652.902.000
2	pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	252000	219503	87,10%	126.489.296.000	67.460.214.000	64.791.081.800



3	pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	306514	6065	1,98%	13.617.715.000	13.272.241.000	12.832.099.000
---	-----------------------	---	--------	------	-------	----------------	----------------	----------------



Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada awal perencanaan SPM Pendidikan, Kabupaten Tegal menargetkan 60,67% anak pada usia 5-6 tahun mendapatkan pelayanan PAUD, 87,10% anak usia 7-15 tahun mendapatkan pelayanan Pendidikan dasar dan 1,98 % anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasarnya mendapatkan pelayanan Pendidikan kesetaraan.

Melihat tabel di atas pada kolom anggaran terbagi menjadi 3 yaitu anggaran awal, anggaran refocusing dan anggaran perubahan. Hal ini dikarenakan sejak awal tahun 2020 sampai saat ini, di Indonesia sedang mewabah penyakit yang disebabkan oleh virus covid-19. Baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tidak terkecuali pemerintah Kabupaten Tegal, mengalokasikan sebagian anggarannya untuk penanganan pandemi ini. Oleh karena itu ada kolom berisi anggaran refocusing, dimana anggarannya terpangkas untuk penanganan pandemi. Namun menjelang trimester ketiga Pemerintah Kabupaten Tegal melakukan perubahan pada APBD 2021 untuk dapat memenuhi target kinerja.



4.1.3. Realisasi SPM

TABEL 4.2
Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA TARGET CAPAIAN SPM		REALISASI SPM			REALISASI CAPAIAN (6):(4)X100%
			JUMLAH ORANG YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	RENCANA ANGGARAN	JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	REALISASI ANGGARAN		
						APBD	APBD PROV/ APBN/ SUMBER LAIN YANG SAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pendidikan anak usia dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	57311	26.652.902.000	48980	24.195.177.184	10.333.712.460	85,46%
2	pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	252000	64.791.081.800	217900	59.360.248.872	166.706.450.000	86,47%



3	pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	306514	12.832.099.000	7623	9.927.220.494	2.698.898.500	2,49%
---	-----------------------	---	--------	----------------	------	---------------	---------------	-------



Berdasarkan tabel di atas presentase capaian keterlayanan PAUD sebesar 85,46%, Pendidikan dasar 86,47% dan Pendidikan kesetaraan 2,49%. Capaian Pendidikan kesetaraan yang rendah pada tahun ini disebabkan karena menurunnya jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah atas yang belajar pada Pendidikan kesetaraan di Kabupaten Tegal. Faktor-faktor yang mempengaruhinya akan dijelaskan lebih lanjut dalam subbab Permasalahan dan Solusi.

Pada pelayanan Pendidikan SPM tahun anggaran 2021 semua jenis pelayanan mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBN. Untuk Pendidikan PAUD sebesar Rp 10.333.712.460. Sedangkan untuk jenis pelayanan Pendidikan dasar sebesar Rp 166.706.450.000 dan Pendidikan kesetaraan sebesar Rp 2.698.898.500.

4.1.4. Alokasi Anggaran SPM

TABEL 4.3
Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal

NO	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
I.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	26.783.552.000
1.	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	580.000.000
2.	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas PAUD	488.274.700
3.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	993.873.600
4.	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	-
5.	Pengadaan Mebel PAUD	987.619.700
6.	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa PAUD	240.645.000
7.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	11.362.351.600



8.	Pengelolaan Dana BOP	12.130.787.400
II.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	43.204.482.150
1.	Penambahan Ruang Kelas Baru	3.126.500.000
2.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	445.498.300
3.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.543.051.500
4.	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	5.235.220.000
5.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	20.083.345.900
6.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.657.414.700
8.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	45.522.000
9.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.166.135.700
10.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	510.603.000
11.	Pengadaan mebel Sekolah	2.389.778.250
12.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	200.000.000
13.	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa	3.985.000.000
14.	Penyiapan Dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan pendidikan Dasar	186.735.800
15.	Pembinaan Minat, bakat Dan Kreativitas Siswa	200.796.000
16.	Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar	1.625.632.000
17.	Pembinaan Kelembagaan Dan manajemen Sekolah	273.249.000
18.	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	530.000.000
III.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	23.684.816.000
1.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	13.142.643.550
2.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	1.073.346.400
3.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	177.729.000
4.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	573.492.500



5.	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1.921.580.050
6.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	1.473.951.250
7.	Pengadaan mebel Sekolah	691.495.750
8.	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa	2.116.700.000
9.	Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	516.387.000
10.	Rehabilitasi sedang/berat ruang Tata Usaha	1.862.883.000
11.	Rehabilitasi sedang/berat ruang Kepala Sekolah	134.607.500
IV.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	11.553.634.950
1.	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	724.466.500
2.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	738.355.500
3.	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	-
4.	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	79.927.000
5.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.385.958.000
6.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	250.000.000
7.	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	375.610.000
8.	Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	469.042.950
9.	Pembinaan Kelembagaan Dan manajemen Sekolah nonformal/Kesetaraan	3.474.950.000
10.	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3.655.350.000
11	Pembangunan Laboratorium Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	399.975.000



4.1.5. Dukungan Personil

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal dalam rangka mendorong pencapaian SPM Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

TABEL 4.4
Kepegawaian

Jumlah Pegawai	8885	orang
PNS/CPNS	5038	orang
PPPK	213	orang
Honorar/THL	3634	orang

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

TABEL 4.5
Permasalahan dan Solusi Standar Pelayanan Minimal

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Orangtua masih enggan untuk menyekolahkan anaknya pada pendidikan PAUD karena kendala biaya Sarana Prasarana kurang/belum mencukupi standar minimal Jumlah lembaga PAUD masih kurang tetapi untuk izin pendirian TK persyaratannya melibatkan lintas sektor sehingga pengelola terkesan dipersulit pengurusannya	Memberikan bantuan operasional kepada lembaga PAUD serta pemenuhan sarana prasarana Memberikan bantuan sarana dan prasarana Mempermudah izin pendirian	Lintas sektoral meliputi Dinas Dikbud, Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu, Kepala Desa, Camat, dan Dinas Perkimtaru.
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,	Kondisi pandemi membuat banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya di pondok pesantren, terutama pondok pesantren di kabupaten/kota lain. Dengan	Perlu adanya pendataan anak usia 7-15 tahun di tingkat desa dan kelurahan	



		SMP/MTs)	alasan di pondok pesantren lebih sering pembelajaran tatap muka dibandingkan dengan pembelajaran daring		
			Jumlah Pendidik mencukupi akan tetapi bermasalah pada distribusi/pemerataan Kota dan pelosok desa	Pemberian bantuan sarana dan prasarana	
				Pemberian Bantuan Operasional Sekolah	
				Menampung mereka yang DO untuk mengikuti program Kejar Paket	
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Mutu pendidik masih rendah	Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Pendidik Kesetaraan sehingga mereka mampu untuk mendidik sesuai standar yang diharapkan	
			Anak yang Sudah putus sekolah tidak mau bersekolah kembali	Menggairahkan anak yang putus sekolah untuk kembali bersekolah dengan program Yuh Sekolah Maning	
			Sarana prasarana kurang/belum mencukupi standar minimal	Memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk Lembaga PNFI Pemberian BOP operasional PKBM/SKB/Kejar Paket	

4.2. Bidang Kesehatan

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan, jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan daerah kabupaten/kota terdiri dari 12 jenis pelayanan dasar yaitu :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;



10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

Berdasarkan Permenkes No 4 Tahun 2019, pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh oleh warga negara dilakukan di semua fasilitas pelayanan kesehatan baik fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang- kurangnya memuat:

1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
2. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan
3. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

1. ibu hamil untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. ibu bersalin untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. bayi baru lahir untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. balita untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan balita;
5. usia pendidikan dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. usia produktif untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. usia lanjut untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. penderita hipertensi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi;



9. penderita diabetes melitus untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. orang dengan gangguan jiwa berat untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. orang terduga tuberkulosis untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
12. orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).



4.2.2. Target Capaian SPM

TABEL 4.6
Target Capaian SPM

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR CAPAIAN	JUMLAH ORANG YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI	TARGET CAPAIAN (5) : (4) X 100%	RENCANA ANGGARAN		
						ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REFOCUSING	ANGGARAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan kesehatan terhadap orang penderita diabetes melitus	Pelayanan kesehatan terhadap orang penderita diabetes melitus	27.912	21.772	78%	69.754.500	69.754.500	118.921.400
2	Pelayanan kesehatan kepada ODGJ	Pelayanan kesehatan kepada ODGJ	3.944	2.366	60%	40.722.500	40.772.500	89.201.400
3	Pelayanan kesehatan terhadap penderita hipertensi	Pelayanan kesehatan terhadap penderita hipertensi	421.113	63.167	15%	7.000.000	6.440.000	120.828.900
4	Pelayanan orang usia 15 - 59	Pelayanan orang usia 15 – 59	1.062.545	212.509	20%	35.000.000	45.684.000	33.119.000
5	Pelayanan kesehatan terhadap orang dengan resiko HIV	Pelayanan kesehatan terhadap orang dengan resiko HIV	32.451	30.298	93,5%	73.868.000	78.021.000	182.693.000



6	Pelayanan kesehatan kepada orang terduga TBC	Pelayanan kesehatan kepada orang terduga TBC	16.932	11.008	65%	130.524.000	130.524.000	335.538.000
7	Pelayanan Kesehatan untuk anak usia pendidikan dasar	Pelayanan Kesehatan untuk anak usia pendidikan dasar	48.713	48.713	100%	38.948.000	38.948.000	330.798.000
8	Pelayanan kesehatan warga negara usia 60 tahun keatas	Pelayanan kesehatan warga negara usia 60 tahun keatas	155.273	155.273	100%	41.130.000	41.130.000	446.720.850
9	Pelayanan kesehatan balita	Pelayanan kesehatan balita	105.958	105.958	100%	43.756.000	43.756.000	1.482.690.900
10	Pelayanan untuk bayi baru lahir	Pelayanan untuk bayi baru lahir	27.457	27.457	100%	37.545.000	37.545.000	98.747.800
11	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Pelayanan kesehatan ibu hamil	29.352	29.352	100%	365.683.000	365.683.000	1.536.088.850
12	Ibu bersalin mendapatkan pelayanan	Ibu bersalin mendapatkan pelayanan	27.457	27.2457	100%	2.730.586.000	2.730.586.000	2.997.735.900



Berdasarkan tabel di atas. dapat disimpulkan bahwa dari 12 jenis pelayanan SPM Kesehatan, terdapat 4 jenis pelayanan yang mempunyai target capaian di bawah 70% yaitu pelayanan Kesehatan kepada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sebesar 60%, pelayanan Kesehatan terhadap penderita hipertensi sebesar 15%, pelayanan orang usia 15-59 tahun 20%, dan pelayanan Kesehatan kepada orang terduga TBC sebesar 65%. Sedangkan 8 pelayanan lainnya mempunyai target di atas 70%.

Dari segi anggaran, meskipun saat refocusing banyak anggaran yang dipangkas, namun pada anggaran perubahan, semua jenis pelayanan pada SPM bidang Pendidikan mendapatkan tambahan anggaran untuk memenuhi target kinerjanya.



4.2.3. Realisasi SPM Kesehatan

TABEL 4.7
Realisasi SPM Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA TARGET CAPAIAN SPM		REALISASI SPM			REALISASI CAPAIAN (6):(4)X100%
			JUMLAH ORANG YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	RENCANA ANGGARAN	JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	REALISASI ANGGARAN		
						APBD	APBD PROV/ APBN/ SUMBER LAIN YANG SAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan kesehatan terhadap orang penderita diabetes melitus	Pelayanan kesehatan terhadap orang penderita diabetes melitus	27.912	118.921.400	15.768	69.754.500	49.166.900	72,42%
2	Pelayanan kesehatan kepada ODGJ	Pelayanan kesehatan kepada ODGJ	3.944	89.201.400	1.476	78.021.000	54.237.500	62,37%
3	Pelayanan kesehatan terhadap penderita hipertensi	Pelayanan kesehatan terhadap penderita hipertensi	421.113	120.828.900	34.740	128.929.000	128.520.500	55%
4	Pelayanan orang usia 15 - 59	Pelayanan orang usia 15 – 59	1.062.545	33.119.000	139.342	30.722.500	18.990.500	65,57%



5	Pelayanan kesehatan terhadap orang dengan resiko HIV	Pelayanan kesehatan terhadap orang dengan resiko HIV	32.451	182.693.000	30.129	6.440.000	114.388.900	99,47%
6	Pelayanan kesehatan kepada orang terduga TBC	Pelayanan kesehatan kepada orang terduga TBC	16.932	335.538.000	7.670	31.130.000	415.590.000	69,68%
7	Pelayanan Kesehatan untuk anak usia pendidikan dasar	Pelayanan Kesehatan untuk anak usia pendidikan dasar	48.713	330.798.000	30.202	33.119.000	-	62,00%
8	Pelayanan kesehatan warga negara usia 60 tahun keatas	Pelayanan kesehatan warga negara usia 60 tahun keatas	155.273	446.720.850	78.784	28.948.000	303.075.200	50,74%
9	Pelayanan kesehatan balita	Pelayanan kesehatan balita	105.958	1.482.690.900	82.300	36.256.000	1.446.434.900	77,67%
10	Pelayanan untuk bayi baru lahir	Pelayanan untuk bayi baru lahir	27.457	98.747.800	24.721	30.045.00	68.702.800	90,04%
11	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Pelayanan kesehatan ibu hamil	29.352	1.536.088.850	25.337	334.558.000	1.201.500.850	86,46%
12	Ibu bersalin mendapatkan pelayanan	Ibu bersalin mendapatkan pelayanan	27.457	2.997.735.900	25.218	-	2.997.735.900	91,85%



Berdasarkan tabel realisasi SPM Kesehatan tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat tidak ada jenis pelayanan yang realisasi capaiannya di bawah 50%. Namun belum ada juga yang mencapai realisasi 100% seperti yang direncanakan pada target awal tahun.

4.2.4. Alokasi Anggaran

TABEL 4.8
Alokasi Anggaran

INDIKATOR PELAYANAN DASAR	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Pelayanan kesehatan terhadap orang penderita diabetes melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	118.921.400
Pelayanan kesehatan terhadap orang dengan resiko HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	182.693.000
Pelayanan kesehatan kepada orang terduga TBC	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	335.538.800
Pelayanan kesehatan kepada ODGJ	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	89.201.400



Pelayanan kesehatan terhadap penderita hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	120.828.900
Pelayanan kesehatan warga negara usia 60 tahun keatas	Pengelolaan Pelayanan Usia Lanjut	446.720.000
Pelayanan orang usia 15 - 59	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	33.119.000
Pelayanan Kesehatan untuk anak usia pendidikan dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Dasar	330.798.300
Pelayanan kesehatan balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.482.690.900
Pelayanan untuk bayi baru lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir	98.747.800
Ibu bersalin mendapatkan pelayanan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.997.735.900
Pelayanan kesehatan ibu hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesh Ibu Hamil	1.536.088.850

4.2.5. Dukungan Personil

Dalam upaya pemenuhan SPM Bidang Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal memiliki jumlah SDM yang tertera pada tabel berikut :



TABEL 4.9
Dukungan Personil

Jumlah Pegawai	1178	orang
PNS/CPNS	1124	orang
THL	54	orang

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

TABEL 4.10
Permasalahan dan Solusi

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI	KET
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan kesehatan terhadap orang penderita diabetes melitus	Pelayanan kesehatan terhadap orang penderita diabetes melitus	1. Pelaksanaan Posbindu PTM (Penyakit Tidak Menular) ditiadakan selama masa darurat covid 19	pelaksanaan Posbindu PTM setelah status daeurat dicabut, dengan penerapan protokol kesehatan. Dilaksanakan di daerah yang berstatus bukan zona merah	
			2. masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini Penyakit Tidak Menular (PTM)	Melakukan sosialisasi PTM, manfaat posbindu, dan germas melalui pertemuan langsung dengan masyarakat dan iklan layanan masyarakat di media massa	
2	Pelayanan kesehatan terhadap orang dengan resiko HIV	Pelayanan kesehatan terhadap orang dengan resiko HIV	stigma negatif terkait HIV AIDS	sosialisasi HIV utk mengurangi stigma dan diskriminasi di tingkat desa	
3	Pelayanan kesehatan kepada orang terduga TBC	Pelayanan kesehatan kepada orang terduga TBC	1. pelacakan kasus TB ditiadakan selama masa darurat covid 19	pelacakan kasus TB dengan menerapkan protokol kesehatan setelah masa darurat covid 19	
			2. Belum optimalnya peran serta masyarakat /organisasi masyarakat, dan linsek terkait dalam program pencegahan dan penanggulangan TB	1. penguatan jejaring layanan TB yang melibatkan semua faskes baik peemerintah maupun swasta, ormas, dan linkes terkait. Sdh terbentuk tim DPPM	



				(District Public Private Mix) penanggulangan TB	
				2. Sudah tersusunnya rencana aksi daerah (RAD) penanggulangan TBC tahun 2019 - 2023 yang melibatkan semua sektor terkait	
			3. masih kurangnya kesadaran masyarakat dan penderita TB dalam pencegahan dan penanggulangan TB	1. sosialisasi tentang TB melalui penyuluhan kelompok, di pondok pesantren, perusahaan, kegiatan masyarakat (pengajian)	
				2. screening/deteksi dini penyakit TB di desa dan tempat2 khusus (pontren, perusahaan/pabrik, lapas)	
				3. pembentukan kader khusus TB yang melibatkan ormas (fatayat, Aisyah, PKK)	
4	Pelayanan kesehatan kepada ODGJ	Pelayanan kesehatan kepada ODGJ	masih rendahnya dukungan dan pengetahuan keluarga terhadap pengobatan ODGJ	pertemuan dengan keluarga ODGJ tentang pentingnya dukungan keluarga terhadap pengobatan ODGJ, pembentukan paguyuban keluarga ODGJ, sosialisasi tentang kesehatan jiwa di masyarakat	
5	Pelayanan kesehatan terhadap penderita hipertensi	Pelayanan kesehatan terhadap penderita hipertensi	1. Pelaksanaan Posbindu PTM (Penyakit Tidak Menular) ditiadakan selama masa darurat covid 19	pelaksanaan Posbindu PTM setelah status daerurat dicabut, dengan penerapan protokol kesehatan. Dilaksanakan di daerah yang berstatus bukan zona merah	
			2. masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini Penyakit Tidak Menular (PTM)	Melakukan sosialisasi PTM, manfaat posbindu, dan germas melalui pertemuan langsung dengan masyarakat dan iklan layanan masyarakat di media massa	



6	Pelayanan kesehatan warga negara usia 60 tahun keatas	Pelayanan kesehatan warga negara usia 60 tahun keatas	adanya pandemi covid 19 menyebabkan pelayanan posyandu lansia terhenti pada saat masa darurat covid 19.	1. Pelayanan kesehatan lansia dengan mengoptimalkan pemberdayaan keluarga	
				2. Pelayanan kunjungan rumah bagi lansia yang mengalami kesulitan mobilitasi dengan menerapkan protokol kesehatan	
7	Pelayanan orang usia 15 – 59	Pelayanan orang usia 15 – 59	1. Pelaksanaan Posbindu PTM (Penyakit Tidak Menular) ditiadakan selama masa darurat covid 19	pelaksanaan Posbindu PTM setelah status darurat dicabut, dengan penerapan protokol kesehatan. Dilaksanakan di daerah yang berstatus bukan zona merah	
			2. masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini Penyakit Tidak Menular (PTM)	Melakukan sosialisasi PTM, manfaat posbindu, dan gemas melalui pertemuan langsung dengan masyarakat dan iklan layanan masyarakat di media massa	
8	Pelayanan Kesehatan untuk anak usia pendidikan dasar	Pelayanan Kesehatan untuk anak usia pendidikan dasar	pelayanan ini biasanya dilakukan pada awal tahun ajaran baru, yaitu pada sekitar bulan agustus sampai oktober. Tapi karena adanya pandemi covid 19, belum semua siswa diberi pelayanan kesehatan karena adanya pelarangan aktivitas luar ruangan pada zona merah. puskesmas masih dalam proses merekap laporan dari semua sekolah di wilayah kerjanya.	melaksanakan pelayanan kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan pada wilayah bukan zona merah	
9	Pelayanan kesehatan balita	Pelayanan kesehatan balita	1. adanya pandemi covid 19 menyebabkan pelayanan posyandu balita terhenti pada saat masa darurat covid 19, serta pembatasan pelayanan posyandu setelahnya.	1. pembatasan pelayanan posyandu dengan penerapan protokol kesehatan.	



				2. Pelayanan posyandu berada di luar ruangan menerapkan sistem shifting	
			2. adanya kebijakan pembatasan kontak langsung dengan balita saat pelayanan Kesehatan	Pemenuhan APD untuk pelayanan kesehatan balita	
10	Pelayanan untuk bayi baru lahir	Pelayanan untuk bayi baru lahir	1. adanya pandemi covid 19 menyebabkan pelayanan ibu bersalin dan bayi baru lahir terhambat. Terutama pada puskesmas yang ditutup sementara, atau karena petugas kesehatan yang terkonfirmasi positif covid 19 tidak bisa memberi pelayanan	pelayanan puskesmas PONED dan mampu persalinan tetap dibuka 24 jam	
			2. adanya kebijakan pembatasan kontak langsung dengan bayi baru lahir saat pelayanan kesehatan	Pemenuhan APD untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir	
			3. Masih ada bayi baru lahir yang ditangani dukun bayi	1. Pembinaan dukun bayi	
				2. sosialisasi pentingnya penanganan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan yang kompeten pada keluarga masyarakat	
11	Ibu bersalin mendapatkan pelayanan	Ibu bersalin mendapatkan pelayanan	1. adanya pandemi covid 19 menyebabkan pelayanan ibu bersalin terhambat. Terutama pada puskesmas yang ditutup sementara, atau karena petugas kesehatan yang terkonfirmasi positif covid 19 tidak bisa memberi pelayanan	pelayanan puskesmas PONED dan mampu persalinan tetap dibuka 24 jam	



			2. Keterbatasan ruang isolasi dan ruang bersalin untuk ibu bersalin terkonfirmasi Covid 19 di rumah sakit	1. Pemetaan rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan ibu bersalin terkonfirmasi Covid 19 dengan persalinan normal dan persalinan dengan tindakan	
				2. Penambahan ruang isolasi dan ruang bersalin untuk ibu bersalin terkonfirmasi Covid 19 di rumah sakit	
				3. Pemenuhan APD untuk pelayanan kesehatan ibu bersalin	
			3. Masih ada persalinan yang ditangani dukun bayi	1. Pembinaan dukun bayi melalui kelas ibu hamil dan kunjungan rumah agar tidak lagi menolong persalinan	
				2. sosialisasi pentingnya persalinan di faskes/tenaga kesehatan yang kompeten pada keluarga dan masyarakat	
12	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Pelayanan kesehatan ibu hamil	1. adanya pandemi covid 19 menyebabkan pelayanan posyandu terhenti pada saat masa darurat covid 19, serta pembatasan pelayanan posyandu setelahnya.	pembatasan pelayanan ibu hamil di posyandu dengan penerapan protokol kesehatan. Layanan konseling via daring dan media sosial	
			2. Ibu hamil yang tempat kerjanya berbeda dengan tempat tinggal tidak berkunjung ke Posyandu , sehingga tidak tercatat di kohort	1. Pengadaan Posyandu di tempat kerja	
				2. mewajibkan klinik untuk melapor pada Puskesmas tentang data pasien ibu hamil (bumil) yang diperiksa di klinik tersebut	



			3. adanya kebijakan pembatasan kontak langsung dengan ibu hamil saat pelayanan Kesehatan	Pemenuhan APD untuk pelayanan kesehatan ibu hamil	
--	--	--	--	---	--

4.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jenis Pelayanan Dasar pekerjaan umum pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar ditetapkan dalam standar teknis yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar pada bidang urusan Pekerjaan Umum adalah setiap warga negara.



4.3.2. Target Capaian SPM

TABEL 4.11
Target Capaian SPM

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR CAPAIAN	JUMLAH ORANG YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI	TARGET CAPAIAN (5) : (4) X 100%	RENCANA ANGGARAN		
						ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REFOCUSING	ANGGARAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	presentase jumlah masyarakat/rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1.640.437	1.559.563	95,07%	3.249.320.000	3.249.320.000	3.249.320.000
2	pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	1.640.437	1.075.306	65,55%	12.095.554.000	12.095.554.000	12.620.554.000



Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam memberikan pelayanan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic sudah cukup bagus dimana dari 1.640.437 jumlah penduduk Kabupaten Tegal, 1.559.563 orang sudah terlayani kebutuhan pengolahan air limbah domestic. Dan jika dihitung presentasinya sudah mencapai lebih dari 90 persen yaitu 95,07%.

Sementara untuk jenis pelayanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, Dinas Perkimtaru sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan ini, menargetkan 65,55% masyarakat mendapatkan pelayanan air minum sehari-hari. Atau dari 1.640.437 jumlah penduduk Kabupaten Tegal, ditargetkan 1.075.306 orang dapat terlayani.



4.3.3. Realisasi SPM

TABEL 4.12
Realisasi SPM

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA TARGET CAPAIAN SPM		REALISASI SPM			REALISASI CAPAIAN (6):(4)X100%
			JUMLAH ORANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	RENCANA ANGGARAN	JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	REALISASI ANGGARAN		
						APBD	APBD PROV/ APBN/ SUMBER LAIN YANG SAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	presentase jumlah masyarakat/rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1.640.437	3.249.320.000	1.536.105	65.098.680	3.163.082.500	93,64
2	pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	1.640.437	12.620.554.000	1.062.839	5.657.857.913	4.714.037.800	64,79



Berdasarkan tabel di atas jumlah orang yang terlayani pada jenis pelayanan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik mencapai 1.536.105 orang dari 1.640.437 jumlah penduduk Kabupaten Tegal atau jika diprosentasikan menjadi 93,64%. Tahun 2021 Kabupaten Tegal mendapatkan dana bantuan dari kementerian PUPR sebesar Rp 3.163.082.500 untuk penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Jenis pelayanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari mencapai realisasi 64,79 % dengan jumlah orang yang terlayani 1.062.839 dari 1.640.437 jumlah penduduk Kabupaten Tegal. Anggaran realisasi mencapai 5.657.857.913 yang bersumber dari APBD Kabupaten Tegal dan 4.714.037.800 yang bersumber dari APBN.

4.3.4. Alokasi Anggaran

TABEL 4.13
Alokasi Anggaran

NO	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
I.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.249.320.000
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	80.320.000
2.	Pembangunan/Penyediaan Sub sistem Pengelolaan Setempat	3.169.000.000
II.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	12.620.554.000
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	414.352.000
2.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	10.206.202.000
3.	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	2.000.000.000



4.3.5. Dukungan Personil

Jumlah personil yang mendukung pencapaian SPM urusan pekerjaan umum adalah sebagai berikut :

TABEL 4.14
Dukungan Personil

Jumlah Pegawai	62	orang
PNS/CPNS	32	orang
THL	30	orang

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

TABEL 4.15
Permasalahan dan Solusi

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI	KET
1	2	3	4	5	6
1	penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	presentase jumlah masyarakat/rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	perhitungan capaian belum bisa maksimal karena data dukung masih belum tervalidasi sempurna	perlu adanya verifikasi ulang terhadap data yang sudah ada terkait jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	
2	pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan	pendataan jumlah RT yang menggunakan air minum non perpipaan masih belum tervalidasi sempurna	perlu adanya verifikasi ulang terhadap data yang sudah ada terkait jumlah RT yang menggunakan air minum non perpipaan	

		bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Keterbatasan sumber mata air yang layak untuk layanan perkotaan dan pedesaan	Perlu mencari sumber mata air baru untuk menunjang pelayanan air minum	
--	--	---	--	--	--

4.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM bidang urusan Perumahan Rakyat terdiri atas :

1. Penyediaan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkenal relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap jenis Pelayanan Dasar ditetapkan dalam standar teknis dan sekurang-kurangnya memuat :

1. Standar jumlah dan kualitas barang/jasa;
2. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar pada bidang urusan Perumahan Rakyat adalah setiap warga negara, dengan ketentuan:

1. Korban bencana kabupaten yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
2. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.



4.4.2. Target Capaian SPM

TABEL 4.16
Target Capaian SPM

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR CAPAIAN	JUMLAH ORANG YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI	TARGET CAPAIAN (5) : (4) X 100%	RENCANA ANGGARAN		
						ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REFOCUSING	ANGGARAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten / kota	Presentase jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	-	-	-	0	0	0
2	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Presentase jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	-	-	-	0	0	0



Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal tidak memiliki anggaran untuk pelayanan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten. Sedangkan untuk pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten, Pemerintah Kabupaten Tegal menargetkan dari rencana 11 rumah yang akan di rehabilitasi, dapat diselesaikan semua dalam waktu satu tahun.



4.4.3. Realisasi SPM

TABEL 4.17
Realisasi SPM

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR CAPAIAN	JUMLAH ORANG YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI	TARGET CAPAIAN (5) : (4) X 100%	RENCANA ANGGARAN		
						ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REFOCUSING	ANGGARAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten / kota	Presentase jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	-	-	-	0	0	0
2	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Presentase jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	-	-	-	0	0	0



Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten tegal tidak memiliki anggaran untuk SPM bidang Perumahan Rakyat jenis pelayanan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten dan jenis pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten.

4.4.4. Alokasi Anggaran

TABEL 4.18
Alokasi Anggaran

NO	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran
	Program Tata Perumahan dan Permukiman	-

4.4.5. Dukungan Personil

Jumlah personil yang mendukung pencapaian SPM bidang urusan perumahan rakyat adalah sebagai berikut:

TABEL 4.19
Dukungan Personil

Jumlah Pegawai	10	orang
PNS/CPNS	7	orang
THL	3	orang



4.4.6. Permasalahan dan Solusi

TABEL 4.20
Permasalahan dan Solusi

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI	KET
1	2	3	4	5	6
1	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten / kota	Presentase jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	-Tidak ada data masyarakat yang rumahnya terkena relokasi program pemerintah -Belum tersedianya anggaran APBD untuk menangani penyediaan rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah	- Pengumpulan data terkait korban bencana akan lebih ditingkatkan dengan melibatkan OPD terkait lainnya - Anggaran yang bersumber dari APBD untuk menangani pelayanan ini akan diusulkan pada tahun berikutnya	
2	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Presentase jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	- Kurangnya data kerusakan rumah korban bencana - Belum tersedianya anggaran APBD untuk menangani rehab rumah bagi korban bencana	- Pengumpulan data terkait korban bencana akan lebih ditingkatkan dengan melibatkan OPD terkait lainnya - Anggaran yang bersumber dari APBD untuk menangani pelayanan ini akan diusulkan pada tahun berikutnya	

4.5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Permendagri 102 Tahun 2018 Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) kabupaten//kota terdiri atas :

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan informasi rawan bencana
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana



5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Mutu Pelayanan Dasar berdasarkan Permendagri 102 Tahun 2018 ditetapkan dalam standar teknis yang sekurang-kurangnya memuat:

1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa
2. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia
3. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu warga negara, dengan ketentuan :

1. Yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
3. Yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.



4.5.2. Target Capaian SPM

TABEL 4.21
Target Capaian SPM

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR CAPAIAN	JUMLAH ORANG YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI	TARGET CAPAIAN (5) : (4) X 100%	RENCANA ANGGARAN		
						ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REFOCUSING	ANGGARAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1.623.923	400	0,025%	917.076.000	806.850.000	956.850.000
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	314.233	54.602	17,38%	394.916.000	340.793.600	340.793.600
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	462.883	304.857	65,86%	1.790.339.000	4.211.329.730	3.372.949.530



4	Pelayanan informasi rawan bencana	Presentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	462.883	462.883	100%	321.164.000	314.765.570	314.765.570
5	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	1.623.923	24	0,0014%	116.651.000	66.651.000	66.651.000



Berdasarkan tabel di atas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal sebagai perangkat daerah yang melaksanakan jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, merencanakan dapat melayani 400 orang dari 1.623.923 orang yang membutuhkan pelayanan atau jika diprosentasekan menjadi 0,025%. Dimana dari anggaran awal sebesar Rp. 917.076.000 mengalami refocusing dan perubahan yang akhirnya untuk jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran mendapatkan anggaran sebesar Rp 956.850.000. sedangkan untuk jenis pelayanan Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, Satpol PP Kabupaten Tegal menargetkan 24 orang mendapatkan layanan ini dari 1.623.923 penduduk Kabupaten Tegal atau 0,0014%.

BPBD Kabupaten Tegal sebagai perangkat daerah penyelenggara 3 jenis pelayanan berikutnya yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan Pelayanan informasi rawan bencana. Pada pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, BPBD memasang target 17,38% dengan anggaran awal 394.916.000. Setelah mengalami refocusing menjadi 340.793.600 dan tidak mengalami perubahan anggaran. Sebanyak 304.857 orang dari 462.883 orang dapat terlayani dalam pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana atau jika diprosentasekan hanya 65,86%. Sedangkan untuk pelayanan informasi rawan bencana memasang target 100%.



4.5.3. Realisasi SPM

TABEL 4.22
Realisasi SPM

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA TARGET CAPAIAN SPM		REALISASI SPM			REALISASI CAPAIAN (6):(4)X100%
			JUMLAH ORANG YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	RENCANA ANGGARAN	JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	REALISASI ANGGARAN		
						APBD	APBD PROV/ APBN/ SUMBER LAIN YANG SAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1.623.923	956.850.000	328	913.764.875	-	0,002%
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	314.233	340.793.600	55.689	257.878.296	-	75.67%



3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	462.883	3.372.949.530	304.857	2.870.722.422	-	85,11%
4	Pelayanan informasi rawan bencana	Presentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	462.883	314.765.570	304.857	252.051.080	-	80,08%
5	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	1.623.923	66.651.000	47	65.117.000	-	0,0028%



Berdasarkan tabel realisasi SPM Trantibumlinmas, dapat dilihat bahwa Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran mendapat capaian 0,002%, Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana mendapat capaian 75,67%, Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 85,11%, Pelayanan informasi rawan bencana 80,28%, dan Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum 0,0028%.

4.5.4. Alokasi Anggaran

TABEL 4.23
Alokasi Anggaran

NO	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
I.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	
1.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	956.850.000
II.	Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	314.765.570
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	280.608.350
2.	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	34.157.220
III.	Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana	3.372.949.530
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	200.000.000
2.	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	83.359.580
3.	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	2.128.734.750
4.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	
5.	Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
6.	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
7.	Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	960.855.200



8.	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	
IV.	Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	340.793.600
1.	Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	
2.	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	76.683.600
3.	Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
4.	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	210.000.000
5.	Sub Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
6.	Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
7.	Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	54.110.000
8.	Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
V.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	
1.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	66.651.000

4.5.5. Dukungan Personil

Personil yang tersedia untuk jenis pelayanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan jenis pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum yaitu sebagai berikut:

TABEL 4.24
Dukungan Personil

Jumlah Pegawai	148	orang
PNS/CPNS	74	orang
HONORER	74	orang



Jumlah personil untuk Jenis Pelayanan Dasar informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebagai berikut :

TABEL 4.25
Dukungan Personil

Jumlah Pegawai	447	orang
PNS/CPNS	35	orang
THL	12	orang
RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA	180	Orang
RELAWAN KECAMATAN	220	Orang

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

TABEL 4.26
Permasalahan dan Solusi

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Kurangnya Sarana Prasarana Damkar yang meliputi : - Jumlah Pos Sektor Damkar, dengan WMK Kab. Tegal, idealnya harus ada 8 Pos Sektor, yang dipunyai sekarang hanya 4 Pos - Jumlah Armada, ideal nya per Pos minimal mempunyai 2 armada, shg dengan 4 Pos sekarang ini, idealnya mempunyai 8 Armada, sedang sekarang hanya mempunyai 4 unit armada	Penambahan Sarana dan Prasarana yang mendukung agar pelayanan lebih optimal	Karena keterbatasan anggaran, di 5 tahun kedepan blm ada perencanaan di penganggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana tersebut



2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kegiatan masih bisa berjalan, walaupun ada keterbatasan anggaran karena refocusing	Dianggarkan kembali di Tahun Anggaran 2021	
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kegiatan yang mengundang kerumuman tidak diperbolehkan, sehingga kegiatan sosialisai juga terdampak rrefocusing	Dianggarkan kembali di Tahun Anggaran 2021	
4	Pelayanan informasi rawan bencana	Presentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Anggaran penyusunan Dokumen KRB terdampak refocusing, sehingga tidak tersusun, dan Kegiatan yang mengundang kerumuman tidak diperbolehkan, sehingga kegiatan sosialisai juga terdampak rrefocusing	Dianggarkan kembali di Tahun Anggaran 2021	
5	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Di Perencanaan Penganggaran belum muncul untuk Pelayanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Dimunculkan di Perencanaan Penganggaran berikutnya	

4.6. Bidang Urusan Sosial

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang social di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, jenis pelayanan dasar pada SPM bidang social di daerah kabupaten/kota terdiri atas :

1. Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti social;
2. Rehabilitasi social dasar anak terlantar di luar panti social;



3. Rehabilitasi social dasar Lanjut Usia telantar di luar panti social;
4. Rehabilitasi social dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti social;
5. Perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang- kurangnya memuat:

1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
2. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan
3. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

1. penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
2. anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
3. lanjut usia telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
4. gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
5. korban bencana kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota



4.6.2. Target Capaian SPM

TABEL 4.27
Target Capaian SPM

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR CAPAIAN	JUMLAH ORANG YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI	TARGET CAPAIAN (5) : (4) X 100%	RENCANA ANGGARAN		
						ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REFOCUSING	ANGGARAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten /kota	100	100	100%	88.911.000	88.911.000	88.911.000
2	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	80	80	100%	494.047.000	494.047.000	494.047.000



3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	80	80%	2.367.560.000	2.367.560.000	2.151.460.000
4	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	72	30	41,6%	369.560.000	369.560.000	403.460.000
5	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti social	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	247	247	100%	917.842.000	734.842.000	824.842.000



Tabel target capaian SPM Bidang Sosial di atas menargetkan capaian 100% untuk semua jenis pelayanan spm bidang social kecuali jenis pelayanan Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial. Meskipun semua anggaran awal dikurangi karena ada refocusing dan perubahan anggaran, tidak mengubah target awal jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota, Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial, Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial, Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial, dan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial.



4.6.3. Realisasi SPM

TABEL 4.28
Realisasi SPM

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA TARGET CAPAIAN SPM		REALISASI SPM			REALISASI CAPAIAN (6):(4)X100%
			JUMLAH ORANG YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	RENCANA ANGGARAN	JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	REALISASI ANGGARAN		
						APBD	APBD PROV/ APBN/ SUMBER LAIN YANG SAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Persentase (%)korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten /kota	100	88.911.000	30	87.018.000	Bantuan Permakanan	30%
2	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti social	Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	80	494.047.000	18	462.908.558	Kebutuhan Permakanan (SOSH) dan Peralatan Mandi 1 Paket	22,5%



3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	2.151.460.000	736	2.057.990.923	APBN = Bantuan Sembako Kemensos RI dan Bantuan Perbaikan MCK APBN = Bantuan 6 Pampers ATENSI Kemensos RI	736%
4	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	72	403.460.000	304	399.490.923	APBD Prov = Pelatihan Keterampilan, APBN = 122.400.000, APBN = 18.000.000	422%
5	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	247	824.842.000	402	753.159.200	APBN ATENSI SWP = 61.000.000, APBN ATENSI Batik Ciprat = 500.000, APBN Alat Bantu = 5 buah kruk, 1 buah walker, 1 buah tangan palsu	146%



Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa untuk jenis pelayanan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota dan jenis pelayanan Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti social capaiannya kurang dari 50%. Sedangkan 3 jenis pelayanan lainnya realisasi capaiannya lebih dari 100%.

4.6.4 Alokasi Anggaran

TABEL 4.29
Alokasi Anggaran

NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
Program Penanganan Bencana Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	88.911.000
Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti	
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza	494.047.000
Program Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.	
Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan dan Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2.151.460.000
Program Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.	
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	403.460.000



Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti.	
Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu dan Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza	824.842.000

4.6.5. Dukungan Personil

Jumlah personil yang ada untuk mendukung pencapaian SPM Sosial adalah sebagai berikut :

TABEL 4.30
Dukungan Personil

JENIS PEGAWAI	JUMLAH
PNS	33
HONORER/THL	20
Pegawai Kemensos RI	3
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	18
Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM)	65
Pendamping Program Jaminan Hidup Lanjut Usia	67
Fasilitator Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	50
Sakti Peksos	2
Penyuluh Sosial	6
Pendamping Disabilitas	5
TOTAL PEGAWAI	269



4.6.6. Permasalahan dan Solusi

TABEL 4.31
Permasalahan dan Solusi

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten /kota	1.Terbatasnya Sarana dan Prasarana	a. Optimalisasi gudang logistik
			2.Terbatasnya SDM Perlindungan Sosial	b. Recruitment anggota Tagana baru dan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana
			3.Terbatasnya persediaan Kebutuhan Dasar	c. Peningkatan kemitraan dengan PSKS dan pendayagunaan CSR
			4.Terbatasnya Anggaran	d. Membuat usulan tambahan anggaran APBD
2	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	1. Banyaknya pengemis, pengamen yang masih memiliki keluarga dan menjadi tulang punggung keluarga sehingga saat terjaring razia, layanan rujukan ke balai/panti rehsos belum dapat	1. Pembinaan oleh Dinas Sosial dan dirujuk kembali kepada keluarga



			dilakukan	
			2. Terbatas nya kapasitas Balai Rehabilitasi Sosial milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Kemensos RI	2. Melakukan kerjasama yang lebih luas dengan berbagai Balai Rehabilitasi Sosial lainnya dan memaksimalkan penggunaan rumah singgah
			3. Gelandangan dan pengemis seringkali belum memiliki tanda identitas	3. Melakukan kerjasama dengan OPD terkait (Dinas Dukcapil) untuk pengadaan identitas
			4. Jika ada PGOT di jalan dan meresahkan masyarakat, sulit untuk berkoordinasi dengan OPD terkait (Satpol PP) untuk melakukan penertiban segera dikarenakan Satpol PP memiliki kegiatan lain	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	1. Terbatasnya kapasitas Ruang Perawatan Khusus (RPK) Balai Rehabilitasi Sosial/Panti bagi lansia terlantar yang tidak memiliki kemampuan untuk beraktivitas	1. Melakukan kerjasama yang lebih luas dengan berbagai Balai Rehabilitasi Sosial lainnya
			2. Belum terintegrasinya sistem BPJS kesehatan untuk menjamin kesehatan lanjut usia terlantar tanpa identitas/ tidak memiliki NIK	2. Melakukan kerjasama dengan OPD terkait (Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (Lazismu dan Baznas) untuk pengadaan identitas dan pembiayaan pengobatan



				bagi lansia terlantar
4	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	1. Sulitnya menentukan Calon Orang Tua Angkat (COTA) bagi anak terlantar	1. Assesment mendalam, home visit dan observasi oleh pekerja sosial
			2. Bayi/Balita terlantar yang masuk/berada di rumah sakit tetap dikenai biaya perawatan (tidak ditanggung oleh pemerintah)	2. Biaya perawatan dibayarkan oleh Calon Orang Tua Angkat (COTA)
5	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	1. Banyaknya jumlah penyandang disabilitas terlantar khususnya ODGJ yang tidak memiliki identitas dan tidak terekam dalam data kependudukan	1. Menyebarkan informasi penemuan ODGJ melalui sosial media, grup dan jejaring Dinas Sosial se Indonesia
			2. Adanya multi layanan di Balai Rehsos Kemensos RI namun belum didukung dengan sarana prasarana dan SDM	2. Pemindehan disabilitas tanpa identitas dari balai rehsos yang satu ke balai rehsos/panti lainnya.
			3. Terbatasnya jangka waktu layanan di panti/balai rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas yang tidak memiliki identitas	3. Melakukan kerjasama dengan OPD terkait (Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (Lazismu dan Baznas) untuk pengadaan identitas dan pembiayaan pengobatan psikotik
			4. Belum terintegrasinya sistem BPJS kesehatan untuk menjamin	4. Melakukan pengajuan dana Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk



			kesehatan psikotik/ODGJ terlantar tanpa identitas/ tidak memiliki NIK	biaya perawatan penyandang disabilitas terlantar
			5. Terbatas nya kapasitas Balai Rehabilitasi Sosial milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Kemensos RI	5. Melakukan kerjasama dengan berbagai Balai Rehabilitasi Sosial lainnya dan memaksimalkan penggunaan rumah singgah

4.7. Program dan Kegiatan

Urusan Pendidikan

TABEL 4.32
Program dan Kegiatan

NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	26.783.552.000	24.195.177.184	90,34%
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	580.000.000	561.409.000	
Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas PAUD	488.274.700	481.259.449	
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	993.873.600	900.148.525	
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	-	-	
Pengadaan Mebel PAUD	987.619.700	332.743.500	
Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa PAUD	240.645.000	227.145.650	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	11.362.351.600	11.358.738.600	
Pengelolaan Dana BOP	12.130.787.400	10.333.732.460	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	43.204.482.150	38.670.738.318	89,51%



Penambahan Ruang Kelas Baru	3.126.500.000	3.091.222.000	
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	445.498.300	441.491.730	
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.543.051.500	1.297.201.488	
Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	5.235.220.000	5.170.750.839	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	20.083.345.900	17.566.935.438	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.657.414.700	1.640.060.982	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	45.522.000	45.032.509	
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.166.135.700	1.044.371.016	
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	510.603.000	503.622.637	
Pengadaan mebel Sekolah	2.389.778.250	1.490.336.728	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	200.000.000	52.191.700	
Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa	3.985.000.000	3.713.025.000	
Penyiapan Dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan pendidikan Dasar	186.735.800	119.838.600	
Pembinaan Minat, bakat Dan Kreativitas Siswa	200.796.000	139.684.500	
Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar	1.625.632.000	1.580.151.501	
Pembinaan Kelembagaan Dan manajemen Sekolah	273.249.000	247.922.400	
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	530.000.000	526.899.250	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	23.684.816.000	20.689.510.554	87,35%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	13.142.643.550	11.035.502.157	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	1.073.346.400	966.827.049	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	177.729.000	175.938.329	



Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	573.492.500	529.938.743	
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1.921.580.050	1.789.712.448	
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	1.473.951.250	1.466.083.466	
Pengadaan mebel Sekolah	691.495.750	633.848.500	
Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa	2.116.700.000	1.914.432.750	
Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	516.387.000	465.097.109	
Rehabilitasi sedang/berat ruang Tata Usaha	1.862.883.000	1.579.140.588	
Rehabilitasi sedang/berat ruang Kepala Sekolah	134.607.500	132.989.415	
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	11.553.634.950	9.927.220.494	85,92%
Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	724.466.500	623.026.576	
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	738.355.500	692.658.842	
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	-	-	
Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	79.927.000	78.170.500	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.385.958.000	1.147.851.520	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	250.000.000	244.388.500	
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	375.610.000	309.313.258	
Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	469.042.950	337.211.200	
Pembinaan Kelembagaan Dan manajemen Sekolah nonformal/Kesetaraan	3.474.950.000	3.474.950.000	
Pengelolaan Dana BOP Sekolah	3.655.350.000	2.698.898.500	



Nonfomal/Kesetaraan			
Pembangunan Laboratorium Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	399.975.000	320.751.598	

Urusan Kesehatan

TABEL 4.33
Program dan Kegiatan

NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	118.921.400	101.202.000	85,10%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	182.693.000	115.761.970	63,36%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	335.538.800	162.443.700	48,41%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	89.201.400	41.906.700	46,98%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	120.828.900	79.894.000	66,12%
Pengelolaan Pelayanan Usia Lanjut	446.720.000	331.447.520	74,20%



Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	33.119.000	28.305.800	85,47%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Dasar	330.798.300	191.700.400	57,95%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.482.690.900	1.244.011.050	83,90%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir	98.747.800	78.162.100	79,15%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.997.735.900	1.964.092.300	65,52%
Pengelolaan Pelayanan Kesh Ibu Hamil	1.536.088.850	1.147.468.650	74,70%

Urusan Pekerjaan Umum

TABEL 4.34
Program dan Kegiatan

NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.249.320.000	3.228.181.180	99%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	80.320.000	65.098.680	81%
Pembangunan/Penyediaan Sub sistem Pengelolaan Setempat	3.169.000.000	3.163.082.500	100%
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	12.620.554.000	10.371.895.713	82%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	414.352.000	399.783.848	96%
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	10.206.202.000	8.634.037.800	85%



Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	2.000.000.000	1.338.074.065	67%
---	---------------	---------------	-----

Urusan Perumahan Rakyat

TABEL 4.35
Program dan Kegiatan

NO	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran
-		-	-

Urusan Trantibumlinmas

TABEL 4.36
Program dan Kegiatan

NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran			
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	956.850.000	913.764.875	95,5%
Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	314.765.570	252.051.080	80,08%
Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	280.608.350	221.269.500	78,85%
Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	34.157.220	30.781.580	90,12%
Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana	3.372.949.530	2.870.722.422	85,11%
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	200.000.000	188.260.230	94,13%



Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	83.359.580	79.242.400	95,06%
Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	2.128.734.750	1.665.626.427	78,24%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan			
Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	960.855.200	937.593.365	97,58%
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota			
Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	340.793.600	257.878.296	75,67%
Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas			
Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	76.683.600	53.383.750	69,62%
Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	210.000.000	156.757.546	74,65%
Sub Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			
Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	54.110.000	47.737.000	88,22%
Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum			
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	66.651.000	65.117.000	97,7%



Urusan Sosial

TABEL 4.37
Program dan Kegiatan

NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	SUMBER ANGGARAN
Program Penanganan Bencana Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				
Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	88.911.000	87.016.000	97,87	APBD
Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti				
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza	494.047.000	467.969.200	94,72	APBD
Program Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.				
Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan dan Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2.151.460.000	2.057.990.923	95,66	APBD
		APBN = Bantuan 6 Pampers ATENSI Kemensos RI		APBN
		APBN = Bantuan Sembako Kemensos RI dan Bantuan Perbaikan MCK		APBN



Program Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.				
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	403.460.000	399.490.923	133,82	APBD
		18.000.000		APBN
		122.400.000		APBN
		APBD PROV = Pelatihan Keterampilan		APBD PROV
Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti.				
Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu dan Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza	824.842.000	753.159.200	98,77	APBD
		61.000.000		APBN (ATENSI SWP)
		500.000		APBN
		APBN Alat Bantu = 5 buah kruk, 1 buah walker, 1 buah tangan palsu		APBN



BAB V P E N U T U P

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tegal sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan ketugasan pemerintahan.

Secara substantif penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tegal dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah yang merupakan tujuan penerapan otonomi daerah. Secara normatif, pelaksanaan kegiatan dalam kerangka pelaksanaan urusan konkuren, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan umum.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang akuntabel dan transparan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik, pemerintah daerah senantiasa membuka diri terhadap perkembangan maupun perubahan yang terjadi demi peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga terwujud sebuah pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Hasil-hasil yang sudah dapat kita rasakan selama ini, merupakan output dari pada proses pembangunan. Semua hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, merupakan hasil kerjasama dari semua pihak yang tentunya melibatkan peran aktif masyarakat, sehingga dari kerjasama tersebut merupakan kunci dan modal dasar kesuksesan bagi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan selanjutnya. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tegal mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas dukungan dari semua pihak selama ini. Selanjutnya, dalam kerangka mengoptimalkan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal tersebut, kami sangat mengharapkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh komponen dan perangkat penyelenggara pemerintahan serta warga masyarakat Kabupaten Tegal pada proses perumusan dan formulasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mengoptimalkan dan mendayagunakan seluruh potensi sumber daya yang ada dalam upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal yang sejahtera.

Dengan kerendahan hati kami senantiasa menerima kritik yang membangun, masukan yang konstruktif atas ketidak sempurnaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021 ini demi peningkatan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal selanjutnya.



NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	%	48980	85.05
				Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan		57590	
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	%	158324	92.729
				Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan		170738	
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	%	59576	72.712
				Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan		81934	
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	%	2599	96.545
				Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan		2692	
2	Kesehatan	5	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di kabupaten	%	1,527	0.092
				Jumlah Penduduk kabupaten		1,664,588	
		6	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan kabupaten yang terakreditasi minimal Tingkat Utama	%	3	33.333
				Jumlah RS kabupaten		9	
		7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	25,377	86.457
				Jumlah ibu hamil di kabupaten		29,352	

8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	%	25,218	91.845
		Jumlah ibu bersalin di kabupaten		27,457	
9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	%	24,721	90
		Jumlah bayi baru lahir di kabupaten		27,457	
10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	%	82,300	77.672
		Jumlah balita di kabupaten		105,958	
11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	%	30,202	62.000
		Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten		48,713	
12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	139,342	65.570
		Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten		212,509	
13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	78,784	50.739
		Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten		155,273	
14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	34,740	54.997
		Jumlah penderita hipertensi di kabupaten		63,167	
15	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	15,768	72.423
		Jumlah penderita DM di kabupaten		21,772	
16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	1,476	62.373
		Jumlah penderita ODGJ di kabupaten		2,366	

3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	7,670	69.677
				Jumlah penderita TBC di kabupaten		11,008	
		18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	30,129	99.47
				Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten		30,289	
		19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan kabupaten (ha)	%	16,571	78.23
				Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan kabupaten (ha)		21,182	
		20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten (ha)	%	21	2
				Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten (ha)		1,400	
		21	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan danelihara (ha) di tahun eksisting	%	2027	21.840
				Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten		9281	
22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten.	%	265,707	49.380		
		Jumlah total rumah tangga di seluruh kabupaten tersebut.		538,085			

		23	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	%	388,479	100		
				Jumlah rumah di Kabupaten		388,479			
		24	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya	%	1,618	100		
				Jumlah IMB yang berlaku		1,618			
		25	Rasio kemantapan jalan	Panjang jalan kewenangan kabupaten yang mantap	%	703.63	83.047		
				Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten		847.27			
		26	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	%	2	7.692		
				Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kabupaten		26			
		27	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	534	100.000		
				Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		534			
		4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	28	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2021	%	0	0
						Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2021		0	

		29	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	%	0	0		
				Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan		0			
		30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	13,658	23.48		
				Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha		58,158			
		31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni	%	36,586	9.42		
				Jumlah total unit rumah Kabupaten		388,479			
		32	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	%	980	0		
				Jumlah unit rumah kabupaten		388,479			
		5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	33	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang diselesaikan	%	11	100
						Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk		11	
				34	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	%	9	75.000
						Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi		12	
35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				Orang	20,000	379,828		
36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				Orang	400	400		
37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Orang	66,166	66,166				

		38	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah	%	73	82.022
				Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten		89	
		39	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran		Menit	15	15 enit
6	Sosial	40	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	754	34
				Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis		2,228	
		41	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	%	764	100
				Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten		764	
7	Tenaga Kerja	42	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	%	5	100
				Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten		5	
		43	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	%	48	0.111
				Jumlah tenaga kerja keseluruhan		43,255	

		44	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	%	25,403	58.728
				Jumlah tenaga kerja		43,255	
		45	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	381	14.894
				Jumlah Perusahaan		2,558	
		46	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan	%	13,221	66.105
				Jumlah pencaker yang terdaftar		20,000	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	47	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD	%	106,332,316,500	3.590
				Jumlah seluruh belanja langsung APBD		2,961,886,307,000	
		48	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten yang didampingi	%	44	0.009
				Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)		477068	
49	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	Per 100.000	50	6.12		
		Jumlah penduduk perempuan		816986			
9	Pangan	50	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan kabupaten	%	16663.5	11.196
				Jumlah kebutuhan pangan kabupaten		148839	
10	Pertanahan	51	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi	%	1,489,645	91
				Seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi		1,640,950	
		52	Persentase pengadaan tanah untuk pembangumam fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	3,068	87.808
				Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		3,494	
		53	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi	%	1,489,654	91
				Luas izin lokasi yang diterbitkan		1,640,950	

		54	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima Tanah Obyek Landreform dengan luasan yang diterima \geq 0,5 ha	%	0	0
				Jumlah penerima tanah obyek landreform		0	
		55	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah	%	0	0
				Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan		0	
		56	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	%	0	0
				Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan		0	
11	Lingkungan Hidup	57	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		-	60.67
				Indeks Kualitas Pencemaran Air (30%)		44.09	16.58
				Indeks Kualitas Pencemaran Udara (30%)		85.13	34.48
				Indeks Tutupan Hutan/Lahan (40%)		43.89	9.61
		58	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	Total Vol sampah yang dapat ditangani	%	155,992.00	80
				Total vol timbunan sampah Kabupaten		194,901.00	
59	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah kabupaten	%	9.00	64.286		
		Jumlah Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan		14.00			
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	60	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang pemilik KTP	%	1,201,054	100.000
				Jumlah penduduk 17 tahun ke atas		1,201,055	
		61	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	%	144,375	31.146
				Jumlah anak usia 0-17 tahun		463,545	
		62	Kepemilikan Akte Kelahiran	Jumlah penduduk usia 0 – 18 Tahun tahun yang memiliki akte kelahiran	%	455,089	95.3929
				Jumlah penduduk usia 0 – 18 tahun		477,068	

		63	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	2	4.17
				Jumlah PD		48	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	64	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	%	26	83.87
				Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)		31	
		65	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	%	3	150.000
				Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)		2	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	66	TFR (Angka Kelahiran Total)	$5\sum ASFR$		2.23	2.230
		67	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern	%	188121	67.774
				Jumlah Pasangan Usia Subur		277573	
		68	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	%	40883	14.73
				Jumlah Pasangan Usia Subur		277573	
15	Perhubungan	69	Rasio konektivitas kabupaten	Rasio konektivitas kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)		$(0,79 \times 70) + (0,5 \times 30)$ $= 55.3 + 15$ $= 70,3$	70.30
		70	Kinerja lalu lintas kabupaten	V/C ratio di jalan kabupaten		0,41	0.41
16	Komunikasi dan Informatika	71	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	10	20.833
				Jumlah PD		48	
		72	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	18	37.500
				Jumlah Layanan Publik		48	

		73	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten	%	897,000	67.129
				Jumlah penduduk		1,336,232	
17	Koperasi dan UKM	74	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	%	161	60.985
				Jumlah seluruh koperasi		264	
		75	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	97563	100.000
				Jumlah usaha mikro keseluruhan		97563	
18	Penanaman Modal	76	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	(Jumlah investasi tahun 2020 - jumlah investasi tahun 2019) di kabupaten	%	-7712673537384	-82.354
				Jumlah investasi tahun 2019 di kabupaten		9365315038415	
19	Kepemudaan dan Olahraga	77	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten	%	420	0.11
				Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten		393,626	
		78	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan orgaisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten	%	3,262	0.829
				Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten		393,626	
		79	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	Medali	2	2.0
20	Statistik	80	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	48	100
				Jumlah PD		48	
		81	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	48	100
				Jumlah PD		48	

21	Persandian	82	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi	%	294	45.58
				Jumlah area penilaian		645	
22	Kebudayaan	83	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	%	33	14.667
				Jumlah cagar budaya yang terdata		225	
23	Perpustakaan	84	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat			72.63
		85	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)			21.70
24	Kearsipan	86	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional pasal 40 dan pasal 59 UU No 43/2009 tentang Kearsipan	$T = (a + i + s + j)/4$			50.00
		87	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan barbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintah, pelayanan publik dan kesra	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$			0.50
25	Kelautan Perikanan	88	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kecamatan di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten (sumber data: one data KKP)	Ton	4,004.097	4,004
26	Pariwisata	89	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun 2020 – Jumlah wisatawan tahun 2019)	%	-137	-100.000
				Jumlah wisatawan tahun 2019		137	
		90	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	(Jumlah wisatawan tahun 2020 – Jumlah wisatawan tahun 2019)	%	483642 - 466.531	0
				Jumlah wisatawan tahun 2019		466,531	

		91	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual	%	12,664	3,702.924
				Jumlah kamar yang tersedia		342	
		92	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata (dalam satuan rupiah)	%	1768.67	1,768.67
				Jumlah total PDRB (dalam satuan rupiah)		25402.91	
		93	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Realisasi PAD dari Sektor Pariwisata Tahun 2020	%	5,403,868,988	5,831,029,840
				Realisasi PAD Tahun 2020		591,004,284,313	
27	Pertanian	94	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun (ton)	Ton/Ha	414,549	642.961
				Luas Panen (ha)		64,475	
		95	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus hewan menular tahun berjalan (2020) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (2019)	%	131	87.333
				Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun 2019		150	
28	Kehutanan						Tidak Perlu Diisi
29	ESDM	96	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin	%	0	surat keterangan
				Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi		0	
30	Perdagangan	97	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	%	77,794	80
				Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten		97,563	
		98	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi	%	25,567	89.95180
				RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani)		28,423	
		99	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan	%	5,779	61.218
				Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten		9,440	

31	Perindustrian	100	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten	Jumlah Industri Kecil dan Menengah tahun 2020 - Jumlah industri Kecil dan Menengah tahun 2019	%	272	0.932		
				Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2019		29,183			
		101	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten)	Jumlah Target Jenis Industri Prioritas kabupaten yang ditetapkan	%	10	40		
				Jumlah Realisasi Jenis Industri Prioritas kabupaten		25			
		102	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	%	19	100		
				Jumlah izin yang dikeluarkan		19			
		103	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	%	0	surat keterangan		
				Jumlah izin yang dikeluarkan		0			
		104	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	%	0	surat keterangan		
				Jumlah izin yang dikeluarkan		0			
		105	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	7 Informasi industri secara lengkap dan terkini		29	29.00		
		32	Transmigrasi						
		33	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)	1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan (realisasi)	%	414,584,865,324	16.804
						Jumlah APBD (realisasi)		2,467,200,647,000	
2	Rasio PAD			Jumlah PAD	%	469,765,165,000	18.493		
				Jumlah PDRB non migas		2,540,291,000,000			

		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	Level 3	Level 3
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	Level 3	Level 3
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures (realiasi)	%	385,461,170,000	15.623
				Jumlah belanja APBD (realisasi)		2,467,200,647,000	
		6	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	WTP/WDP/T W/TMP	WTP	WTP
34	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN)	7	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n	%	0	0
				Jumlah kontrak keseluruhan tahun n		106	
		8	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	3448	0
				Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif		0	
		9	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan	%	977,567,000,000	89.821
Total belanja langsung	1,088,349,117,846						
35	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)	10	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan Pendidikan Tinggi ke atas (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	1357	96.378
				Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		1408	
		11	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	%	449	16.519
Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	2718						

		12	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	%	189	42
				Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		449	
36	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)	13	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi	%	2,285,151,931,627	92.621
				Total belanja APBD dikurangi satu (Sebelum Perubahan)		2,467,200,647,000	
		14	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi	%	591,004,284,313	125.808
				Total PAD dalam APBD dikurangi satu (Sebelum Perubahan)		469,765,165,000	
		15	Assets management	Jumlah Asset Manajemen	Jumlah		
				Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)		Laporan BMD	ada
				Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)		Screenshoot simda BMD	ada
				Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)		BA rekonsiliasi aset	ada
				Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)		neraca	ada
		16	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai Realisasi SiLPA	%	291,117,611,051	13.16
Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya (realisasi)	2,211,813,962,000						
37	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK)	17	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	%	1,780,995,310,000	107.44
				Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda		1,657,701,735,684	
		18	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda	%	4	100
				Total jumlah dokumen yang telah dirinci		4	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja
		1	PENDIDIKAN PAUD				
1	Pendidikan	1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)		Unit	420	420
		2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	0	0
		3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	0	0
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)		Orang	2260	2,260
		5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)		Orang	2407	2,407
		6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini		Orang	1050	1,050
		7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah		Orang	628	628
		2	PENDIDIKAN DASAR				
		1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi		Unit	658	658
		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	158450	158,450
		3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	149133	149,133
		4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	158450	158,450
		5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	149133	149,133
		6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	6277	6,277
7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	3928	3,928		

8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar		Orang	8014	8,014
9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	5217	5,217
10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	1732	1,732
11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	1312	1,312
12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	1461	1,461
13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	747	747
14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		Orang	7581	7,581
15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		Orang	4172	4,172
16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	866	866
17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	191	191
18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Orang	1161	1,161
19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Orang	730	730
3	PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA				
1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi		Unit	54	54
2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	158450	158,450
3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	149133	149,133
4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	158450	158,450

5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	149133	149,133
6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	6277	6,277
7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	3928	3,928
8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar		Orang	8014	8,014
9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	5217	5,217
10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	1723	1,723
11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	1312	1,312
12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	1461	1,461
13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	747	747
14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		Orang	7581	7,581
15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		Orang	4172	4,172
16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	866	866
17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1,sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	191	191
18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Orang	1161	1,161
19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Orang	730	730
4	PENDIDIKAN KESETARAAN				
1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)		Orang	25	25
2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	6065	6,065

		3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	6065	6,065
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)		Orang	221	221
		5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)		Orang	236	236
		6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)		Orang	188	188
		7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	17	17
		8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1		Orang	17	17
2	Kesehatan	5	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan				
		1	Jumlah RS Rujukan kabupaten yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar		Unit	9	9
		6	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Yang Terakreditasi				
		1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya		Unit	9	9
		7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		paket	1	1
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal		Orang	1360	1360
		8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			1	1
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar		Orang	1360	1360
		9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			1	1
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar		Orang	1361	1361
		10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			1	1
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar			1404	1404
		11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			1	1
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar		Orang	1309	1309

		12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			1	1
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	1447	1447
		13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			1	1
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	1447	1447
		14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			1	1
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	1401	1401
		15	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			1	1
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	1447	1447
		16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			1	1
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	58	58
		17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			1	1
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	573	573
		18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			1	1
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	1405	1405
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten				
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten (ha)		Ha	2118225	2,118,225
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten (m)		M	0	0
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kab (ha)		Ha	1,400,000	1,400,000
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten (m)		M	0	0
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten		Ada/Tidak	Ada	Ada

6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten		Ada/Tidak	Ada	Ada
7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten		Jumlah	0	0
20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten				
1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten (ha)		Ha	2118225	2,118,225
2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten (m)		M	0	0
3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kab (ha)		Ha	1,400,000	1,400,000
4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten (m)		M	0	0
5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten		Ada/Tidak	Ada	Ada
6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten		Ada/Tidak	Ada	Ada
7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten		Jumlah	0	0
21	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi				
1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m)	%	0	#DIV/0!
		Panjang jaringan irigasi primer (m)		0	
2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi Sekunder dalam kondisi baik (m)	%	166.35	60.27%
		Panjang jaringan irigasi Sekunder (m)		276.02	
3	Persentase panjang jaringan irigasi Tersier dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi Tersier dalam kondisi baik (m)	%	0	#DIV/0!
		Panjang jaringan irigasi Tersier (m)		0	
22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten				
1	Pemenuhan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) kabupaten		Ada/Tidak	Ada	0
2	Tersusun dan ditetapkannya Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) kabupaten		Ada/Tidak	Tdk ada	0
3	Jumlah BUMD dan atau UPTD kabupaten penyelenggaraan SPAM		BUMD/UPTD	Ada	Ada
4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM		Izin	0	0

5	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.		Kerjasama	0	0
23	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik				
1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S		Rumah	362,913	362,913
2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T		Rumah	1,147	1,147
3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T		Rumah	362,913	362,913
4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja		Rumah	942	942
5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja		Rumah	942	942
6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik		Rumah	942	942
7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik		24,419	13.06%
		rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa/ha	%	186,937	
8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT		942	0.50%
		rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa/ha	%	186,937	
9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD T		942	0.47%
		rumah di wilayah pengembangan SPALD T	%	201,542	
10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat		362,913	194.14%
		jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S	%	186,937	
11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	jumlah sarana pengangkutan yang tersedia		2	66.67%
		jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kabupaten	%	3	
12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia		23,500	

		jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kabupaten	%	30,000	78.33%
13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD	%	1.147	0.00%
		jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kabupaten		201,542	
14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot	%	942	0.50%
		jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPADLD-S		186,937	
24	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten				
1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana yang laik fungsi yang berlaku)	%	170	49.85%
		Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)		341	
2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dalam tahun eksisting		Izin	1618	1,618
3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung		Ada/Tidak	Ada	Ada
4	Penetapan Keputusan Bupati tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung		Ada/Tidak	Tidak ada	Tidak ada
5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk dilindungi dan dilestarikan		Bangunan	33	33
6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk kepentingan strategis daerah kabupaten		Bangunan	0	0
7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kabupaten		Bangunan	2.677	3
8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten yang dipelihara/dirawat		Bangunan	2.677	3
25	Rasio kemantapan jalan				
1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kabupaten		KM	847.27	847
2	Panjang jalan yang dibangun		KM	0	0
3	Panjang jembatan yg dibangun		M	0	0
4	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)		KM	71.02	71.018
5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan		M	69	69
6	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi		KM	0	0
7	Panjang jembatan yang direhabilitasi		M	54.3	54.3
8	Panjang jalan yang dipelihara		KM	126.15	126.15

9	Panjang jembatan yang dipelihara		M	3262.2	3,262.20
26	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang pemilik sertifikat kompetensi				
1	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten		Orang	0	0
2	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten		Orang	2	2
3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten		Orang	2	2
4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan kabupaten yang aktif dengan data termutakhir		Ada/Tidak	Tidak	Tidak
5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD kabupaten		Ada/Tidak	Ada	Ada
6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN		Ada/Tidak	Ada	Ada
7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya		Ada/Tidak	Tidak	Tidak
8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala		Ada/Tidak	Ada	Ada
9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten		Ada/Tidak	Ada	Ada
10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.		Ada/Tidak	Tidak	Tidak
11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis		Ada/Tidak	Ada	Ada
12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/ analisis di wilayah kabupaten		Ada/Tidak	Ada	Ada
13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten		Ada/Tidak	Tidak	Tidak
14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		Ada/Tidak	Ada/45 CV	Ada/45 CV

		15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Ada/Tidak	Ada	Ada	
		16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		Ada/Tidak	Ada	Ada	
		17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Ada/Tidak	Ada	Ada	
		18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kabupaten		Badan Usaha	173	173	
		19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten		Badan Usaha	Tidak	Tidak	
		20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kabupaten		Badan Usaha	173	173	
		21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kabupaten		Badan Usaha	116	116	
		22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		izin	45	45	
		23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Pengawasan	Ada	Ada	
		24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		Kecelakaan Konstruksi	Tidak	Tidak	
		25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Pengawasan	Ada	Ada	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	28	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten					
		1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya		Unit	72,766	72,766	
		2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam		Unit	92	92	
		3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		Orang	292	292	
		4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi		Unit	92	92	
		5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		Unit	0	0	
		6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi		Unit	0	0	

7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana		Unit	0	0
8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi		Orang	292	292
9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan		Ha	Tidak Ada	Tidak Ada
29	Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten				
1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitas ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM		RT	Tidak Ada	0
2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitas penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM		RT	Tidak Ada	0
3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM		RT	Tidak Ada	0
4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		RT	Tidak Ada	0
5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		RT	Tidak Ada	0
6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah		Ha	Tidak Ada	0
30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani				
1	Jumlah luasan (ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha		Ha	13,658	13,658.00
2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH		Unit	0	0
3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh		Ha	38,672	38,672.00
31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)				
1	Jumlah rumah di kabupaten		Rumah	388.479	388
2	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH		Rumah	6.089	6
3	Jumlah rumah tidak layak huni		Rumah	36.586	37
4	Jumlah rumah yang tidak dihuni		Rumah	0	0
5	Rasio rumah dan KK	Jumlah KK	%	538.085	72.20%
		Jumlah total unit rumah		388.479	
6	Jumlah rumah pembangunan baru			1226	1,226
32	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)				
1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU		Perumahan	131	131
2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum		Rumah	276.198	276
3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan		Rumah	161.633	162

		4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)		Rumah	363.927	364
		5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH		Perumahan	131	131
		6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU		Rumah		-
		7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi		Pengembang	38	38
		8	Jumlah pengembang yang terregistrasi		Pengembang	38	38
		9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan		Pengembang	38	38
5	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	33	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan				
		1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kabupaten yang ditangani		Jumlah	11	11
		2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan		Orang	576	576
		3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan		Perda&Perkada	9	9
		4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS		Orang	2	2
		5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum		SOP	Ada	Ada
		6	Tersedianya sarana prasarana minimal		Unit	Ada	Ada
		35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				
		1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	%	0.75	75.00%
				Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan		1	
		2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%	399,828	68.42%
				Seluruh penduduk di kawasan rawan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana		584,336	
		36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				
		1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	%	0.75	75.00%
				Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan		1	
	2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	%	1	100.00%	
			Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan		1		
	3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan		1,250	0.21%	

		Jumlah aparaturnya dengan warga negara di kawasan rawan bencana	%	584,336	0.217%
4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	%	8,470	1.45%
		Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana		584,336	
5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops	%	399,828	68.42%
		Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana		584,336	
6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan	%	3,818	0.65%
		Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana		584,336	
37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				
1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB	%	1	100.00%
		Jumlah seluruh penetapan status KLB		1	
2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana	%	95	100.00%
		Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana		95	
3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	%	227	50.78%
		Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana		447	
4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi	%	66,166	21.06%
		Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana		314,233	
38	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				
1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten		Layanan	89	89
2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan		Pos	4	4
3	Tersedianya aparaturnya selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan		Orang	40	40

		4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa		Pos	0	0
		5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi		Sarpras	5 mobil,10 APAR	5 mobil,10 APAR
		6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran		Orang	1	1
		7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran		Orang	0	0
		8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran		Kegiatan	0	0
6	Sosial	40	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti				
		1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki		data	13	13
		2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar,lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM		Orang	754.	754.
		3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk		Tim	7	7
		4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau		Orang	2,228	2228
		5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki		unit	3	3
		6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi		Orang	1036	1036
		7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar		unit	1	1
		8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang		Orang	258	258
		9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu		Orang	87	87
		10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter		Alat	1	1
		11	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia		Paket	2	2
		12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan		Orang	118	118.00
		13	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah		Orang	-	-

14	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan		Orang	276	276
15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar dikeluarga, masyarakat, Dinas Sosial, rumah singgah/ shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial		Orang	234	234
16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat		bimbingan	210	210
17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan		Orang	69	69
18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar		Orang	41	41
19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga		Orang	48	48
20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga		Orang	48	48
21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk		Orang	79	79
41	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten				
1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan		Orang	764	764
2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang		Orang	0	0
3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki		Penampungan	0	0
4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan		Paket	0	0
5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial		Orang	45	45
6	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia		Orang	35	35
7	Tenaga Kerja				
42	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja				
1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten		Ada/Tidak	Ada (draft)	Ada (draft)
2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Realisasi indikator - target indikator	%	5	55.56%
		Realisasi indikator - target indikator		9	
3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten		Perusahaan	2,558	2,558
43	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi				

1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNi atau okupasi pada tahun 2021	%	13	100.00%
		keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun 2021		13	
2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun 2021	%	11	100.00%
		jumlah instruktur seluruhnya pada tahun 2021		11	
3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah instruktur pada tahun 2021	%	11	4.44%
		jumlah peserta pelatihan pada tahun 2021		248	
4	Persentase LPK yang terakreditasi	Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun 2021	%	41	100.00%
		jumlah seluruh LPK pada tahun 2021		41	
5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun 2021	%	41	100.00%
		jumlah LPK yang terdata pada tahun 2021		41	
6	Jumah penganggur yang dilatih		Orang	248	248
7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun 2021	%	248	100.00%
		Jumlah orang yang dilatih pada tahun 2021		248	
8	Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun 2021	%	248	100.00%
		jumlah lulusan pada tahun 2021		248	
9	Lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat Kompetensi pada tahun 2021	%	248	100.00%
		Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun 2021		248	
10	Jumlah calon pekerja migran Indonesia (CPMI)/ calon tenaga kerja indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	∑CPMI dilatih	%	0	#DIV/0!
		∑CPMI terdaftar		0	
11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia(CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)			0	0
44	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja				
1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun 2021	%	0	0.00%
		jumlah perusahaan pada tahun 2021		2558	

2	Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja).		-55.19	-55.19
45	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)				
1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun 2021	%	190	40.08%
		Jumlah perusahaan yg memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih		474	
2	Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun 2021	%	0	0.00%
		Jumlah perusahaan yg memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh		17	
3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan		SP/SB	28	28.00
4	Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah	%	38	9.95%
		Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (dalam PP atau PKB)		382	
5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	2558	100.00%
		Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor		2558	
6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Jumlah perusahaan yang berselisih	%	7	0.27%
		Jumlah perusahaan pada tahun 2020		2558	
7	Jumlah mogok kerja		Mogok	0	0.00
8	Jumlah penutupan perusahaan		Perusahaan	0	0.00
9	Jumlah perselisihan kepentingan		Perselisihan	Tidak Ada	Tidak Ada
10	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan		Perselisihan	Tidak Ada	Tidak Ada
11	Jumlah perselisihan PHK		Perselisihan	7	7.00
12	Jumlah pekerja/buruh ter-PHK		Orang	13	13.00
13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit		Perselisihan	7	7.00
14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten yang diberdayakan		LKS	Belum terbentuk	Belum terbentuk
15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah Perjanjian Bersama	%	7	100.00%
		Jumlah kasus perselisihan		7	
46	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten				

1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten		Lowongan Kerja	14,225	14,225
2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kabupaten		Orang	20,000	20,000
3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kabupaten		BKK	54	54
4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten		Orang	7	7
5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja		Orang	1	1
6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kabupaten		Lembaga	Tidak ada	Tidak ada
7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kabupaten		Perjanjian	21	21
8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)		orang	13,221	13,221
9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	ΣCPMI/CTKI yang mendapatkan sosialisasi			
		ΣCPMI/CTKI	%	Tidak Ada	Tidak Ada
10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata		Orang	172	172
11	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi kepulangan	Σfasilitasi PMI yang dipulangkan	%	Tidak Ada	Tidak Ada
		ΣPMI yang pulang		Tidak Ada	Tidak Ada
12	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan diklat kerja	ΣPMI/TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	%	Tidak Ada	Tidak Ada
		ΣPMI/TKI		Tidak Ada	Tidak Ada
13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	Σ PMI/TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan	%	Tidak Ada	Tidak Ada
		Σ PMI/TKI purna dan keluarganya		Tidak Ada	Tidak Ada
14	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	ΣLTSA yang terbentuk	%	Tidak Ada	Tidak Ada
		Jumlah daerah kantong PMI/TKI		Tidak Ada	Tidak Ada
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	47	Persentase ARG pada belanja langsung APBD		
	1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten yang telah dilatih PUG	Lembaga	45	45
	2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten	Prog/Keg	1	1
		48	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten		
	1	Jumlah media massa (cetak,elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Media Massa	4	4
	2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Lembaga	22	22

3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani	%	44	100%
		jumlah korban kekerasan anak di tingkat kabupaten		44	
4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan		Lembaga	22	22
5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Kabupaten (APBD kabupaten)		Lembaga	12	12
49	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)				
1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten yang mendapatkan pelatihan		Organisasi	19	19
2	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten yang sudah dilatih		Orang	19	19
3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan		Lembaga	1	1
4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten		Lembaga	1	1
5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi		Kebijakan/Program	1	1
6	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi		Lembaga	1	1
7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan	%	50	100%
		Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan		50	
9	Pangan				
50	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)				
1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak gudang cadangan pangan dan sarana pendukung lainnya	Ada/Tidak	Ada	Ada
2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/Tidak	Ada	Ada
3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/tidak regulasi harga minimum daerah	Ada/Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/tidak kegiatan pemberdayaan masyarakat	Ada/Tidak	Ada	Ada
5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/Tidak	Ada	Ada
6	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	Ada/Tidak	Ada	Ada

		7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan pangan	Ada/tidak penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan pangan	Ada/Tidak	Ada	Ada
		8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/tidak kegiatan pengawasan keamanan pangan segar	Ada/Tidak	Ada	Ada
10	Pertanahan	51	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan				
		1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)	%	16	100%
				Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun		16	
		2	SK Bupati tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Jumlah penerbitan SK Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absentee	%	0	#DIV/0!
				Jumlah Permohonan yang diusulkan Panitia Pertimbangan Landreform		0	
		3	SK Bupati tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilih tanah kelebihan maksimum/absentee	%	0	#DIV/0!
				Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek		0	
		4	Dokumen Izin membuka tanah	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + jumlah izin membuka tanah yang ditolak	%	0	#DIV/0!
				Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun		0	
		5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik	%	0	#DIV/0!
				Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun		0	
11	Lingkungan Hidup	57	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten				
		1	Hasil Perhitungan kota terhadap :				60.67
			a) Indeks Kualitas Air,(IKA)			44.09	16.58
			b) Indeks Kualitas Udara (IKU)			85.13	34.48
			c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)			43.89	9.61
		58	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten				
		1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten	Total Vol sampah yang dapat ditangani	%	155,992	80.04

			Total vol timbunan sampah Kabupaten	%	194,901	00.00	
		59	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten				
		1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	Izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	%	446	100.00%
				jumlah usulan permohonan yang teregistrasi		446	
		2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten	Jumlah PPLHD yang ada	%	0	0.00%
				Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten		446	
		3	Penetapan hak MHA (Masyarakat Hukum Adat) terkait dengan PPLH yang berada di Pemerintah Kabupaten	Jumlah MHA yg diakui dgn perda	%	0	#DIV/0!
				Jumlah usulan MHA		0	
		4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah MHA yg mendapatkan pelatihan	%	0	#DIV/0!
				Jumlah MHA yg ada		0	
		5	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yg diberikan diklat/rencana	%	58	100.00%
				target lembaga kemasyarakatan yg akan diberikan diklat		58	
		6	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten yang ditangani	Pengaduan masyarakat yang ditangani	%	10	100%
				Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi		10	
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	60	Perekaman KTP Elektronik				
		1	Penerbitan akta perkawinan	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan	%	378	100%
				Peristiwa perkawinan yang dilaporkan		378	
		2	Penerbitan akta perceraian	Jumlah akta Perceraian yang diterbitkan	%	93	100%
				Peristiwa Perceraian yang dilaporkan		93	
		3	Penerbitan akta kematian	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	%	16,060	68%
				Peristiwa kematian yang dilaporkan		23,538	
		4	Penyajian data kependudukan	Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam satu tahun	%	2	100%
				2 tahun		2	

13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	64	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal					
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		Desa	2	2	
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya		Desa	0	0	
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		Lembaga	26	26	
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		Desa	26	26	
		65	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri					
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		Desa	0	0	
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya		Desa	0	0	
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		Lembaga	3	3	
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		Desa	3	3	
		14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	66	TFR			
				1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan		Tidak ada	Tidak ada
2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun			Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia.	Nilai Tengah	10	9.98	
3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)					$(418/14564) \times 1000$	$(418/14564) \times 1000$	
4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)			Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)	%	290734	72%	
				Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)		406316		
5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK		Stakeholder	113	113			

67 Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)					
1	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP	%	68	100.00%
		Jumlah faskes		68	
2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Peserta KB Aktif	%	50367	18.15%
		Jumlah PUS		277573	
3	Pemerintah Kabupaten yang memiliki Kelompok Kerja KKBPk yang efektif			21	21
4	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern)	%	3,963	38.78%
		jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan		10,220	
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)					
1	Persentase kesertaan KB di kabupaten dengan kesertaan rendah	Jumlah kota yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu kabupaten	%	147	51.22%
		Jumlah desa/kelurahan dalam kabupaten		287	
2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	jumlah peserta KB pada Keluarga Penerima PBI	%	2,177	51.53%
		Jumlah Keluarga PBI		4,225	
15 Perhubungan					
68 Rasio konektivitas kabupaten					
1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia	%	3	100%
		Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan		3	
2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	Jumlah kendaraan yang diuji per tahun	%	7,371	68.22%
		Jumlah kendaraan wajib uji		10,805	
3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan	%	16	100%
		Jumlah lintas penyeberangan dalam kabupaten		16	
4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kabupaten	%	232	58.00%
		Target kebutuhan perlengkapan jalan kabupaten		400	
69 V/C Ratio di Jalan kota					

		1	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kabupaten	%	91	45.50%	
				Target kebutuhan perlengkapan jalan kabupaten		200		
16	Komunikasi dan Informatika	70	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo					
		1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	10	20.83%	
				Jumlah Perangkat Daerah		48		
		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan dinas kominfo	%	10	20.83%	
				Jumlah Perangkat Daerah		48		
		3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah		Ada/Tidak	Ada	Ada	
		71	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi					
		1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	Jumlah kegiatan (event),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015)	%	96	98.97%	
				Jumlah Kegiatan (event),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah		97		
		2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	%	36	75.00%	
				Jumlah Perangkat Daerah		48		
		3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	48	100%	
				Jumlah Perangkat Daerah		48		

4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	%	0	0.00%
		Jumlah layanan		96	
5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Jumlah layanan SPBE layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang memanfaatkan sertifikat elektronik	%	3	3%
		Jumlah layanan		96	
6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	%	58	40.00%
		Jumlah sistem elektronik		145	
7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	%	17	17.71%
		Jumlah layanan publik dan layanan administrasi		96	
8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	%	36	75.00%
		Jumlah perangkat daerah		48	
9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat	%	36	75.00%
		Jumlah perangkat daerah		48	
10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya	%	48	100%
		Jumlah perangkat daerah		48	
11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai	%	6	18.75%
		Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah		32	
12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	%	28	58.33%
		Jumlah perangkat daerah		48	
13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan dinas kominfo	%	4	100%
		Jumlah ASN Pengelola TIK		4	

		14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government		Ada/tidak	Ada	Ada
		72	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Kabupaten				
		1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten	Σ komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah Kabupaten yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah	%	75	88.24%
				Σ komunitas masyarakat atau Mitra Komunikasi Pemerintah Kabupaten		85	
		2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	%	495	61.80%
				Σ konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten		801	
		3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Diseminasi dan layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP	%	1306	99.85%
				Σ Diseminasi dan layanan informasi Publik		1308	
17	Koperasi dan UKM	73	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas				
		1	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan	%	74	52.86%
				Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam		140	
		2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	%	1	100%
				Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan		1	
		3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	%	124	46.97%
				Jumlah koperasi yang ada		264	
		4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	%	89	41.50%

	daerah kabupaten	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada	%	214	71.99%
5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	280	62.78%
		Jumlah koperasi yang ada		446	
6	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	%	1,021	64.46%
		Jumlah anggota koperasi yang ada		1,584	
7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan	%	4	3.23%
		Jumlah koperasi yang ada		124	
8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan				Tidak Perlu Diisi
9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasinya	%	140	53.03%
		Jumlah koperasi yang ada		264	
10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan	%	213	80.68%
		Jumlah koperasi yang ada		264	
11	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran	%	40	15.15%
		Jumlah koperasi yang ada		264	
12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha	%	124	46.97%
		Jumlah koperasi yang ada		264	
13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan	%	40	15.15%
		Jumlah koperasi yang ada		264	
74	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha				
1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru	%	200	44.44%
		Jumlah wirausaha yang ada		450	
2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS)	%	77,694	79.63%
		Jumlah usaha mikro yang ada		97,563	
3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Jumlah usaha mikro yang bermitra	%	40,211	41.22%
		Jumlah usaha mikro yang ada		97,563	
4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	%	66,851	100.01%

			Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standarisasi dan sertifikasi produk usaha	%	65,535	102.01%
		5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%	894	15.01%
			Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran		5,956	
		6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	1,814	1.86%
			Jumlah usaha mikro yang ada		97,535	
		7	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	%	465	0.48%
			Jumlah usaha mikro yang ada		97,535	
18	Penanaman Modal	75	Persentase peningkatan investasi di kabupaten			
		1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten	Ada/Tidak	Ada	Ada
		2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Ada/Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada
		3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Jumlah Laporan	Tidak Ada	Tidak Ada
		4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah Kegiatan	1	1.00
		5	Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah Kegiatan	1	1.00
		6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah Kegiatan	1	1.00
		7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jml Konsultasi	1507	1,507.00
		8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jml Perizinan & Non Perizinan	8909	8,909.00
		9	Laporan realisasi penanaman modal	Jml Realisasi (Rupiah)	1,652,641,501,031	1,652,641,501,031
		10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten	Jumlah Aparatur	55.60	55.60
		11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah Perusahaan	286	286.00
		12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten	Ada/Tidak	Ada	Ada
19	Pemuda dan Olahraga	76	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri			
		1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Orang	420	420.00
		2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Orang	84	84.00
		77	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan			

		1	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda		Orang	160	160.00
		2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan		Orang	50	50.00
		78	Peningkatan Prestasi Olahraga				
		1	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan		Orang	73	73.00
		2	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah		Event	2	2.00
20	Statistik	79	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah				
		1	Tersedianya buku profil daerah		Ada/tidak	Ada	Ada
		2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan		Jumlah Survey	48	48.00
		3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan		Jumlah Kompilasi	48	48.00
		4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS		Jumlah Survey	35%	0.35
		5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS		Jumlah Kompilasi	35	35.00
		6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral	%	1	0.020833333
				Jumlah kegiatan statistik sektoral		48	
		7	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	Jumlah metadata indikator statistik sektoral	%	0	0
				jumlah indikator statistik sektoral		48	
21	Persandian	81	Tingkat keamanan informasi pemerintah				
		1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yg harus diamankan	Jumlah kegiatan strategis teramankan	%	0	#DIV/0!
				Jumlah kegiatan strategis yang ada		0	
		2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapka prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yg ada pada Pemerintah Daerah	Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian	%	89	81.65%
				Jumlah SE yang ada		109	
		3	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	%	2	1.83%
				Jumlah SE yang ada		109	
		4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetankan	Jumlah titik teramankan	%	0	#DIV/0!
				Jumlah titik pada PHKS		0	
22	Kebudayaan	82	Terlestarikannya Cagar Budaya				

		1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Obyek	485	485.00
		2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Obyek	21	21.00
		3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Obyek	15	15.00
		4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Orang	14	14.00
		5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Cagar Budaya	33	33.00
		6	Perlindungan cagar budaya kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Cagar Budaya	17	17.00
		7	Layanan perizinan membawa cagar budaya kabupaten ke luar kabupaten dengan dukungan data	Cagar Budaya	-	-
		8	Pengembangan cagar budaya kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi),	Cagar Budaya	2	2
		9	Pemanfaatan cagar budaya kabupaten (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Cagar Budaya	17	17
		10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Koleksi	950	950
		11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Orang	1219	1,219.00
		12	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		-	-
		13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Tim	1	1
		14	Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten	Tim	1	1
		15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Tim	5	5
		16	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Orang	12	12
		17	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Orang	4	4
		18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Unit	10	10
		19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Kegiatan	1	1
23	Perpustakaan	83	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat			
		1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar)	%	269,488 16.19%

			Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)		1,664,588	
	2	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite	%	17,456	1.05%
			Jumlah penduduk di wilayahnya		1,664,588	
	3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya	%	121	0.01%
			Jumlah penduduk di wilayahnya		1,664,588	
	4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	11	1.56%
			Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya		706	
	5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat			5	5.00
	84	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat				
	1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya		Naskah Kuno	2	2.00
	2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa		Naskah Kuno	Tidak Ada	Tidak Ada
	3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)		Budaya Etnis	Tidak Ada	Tidak Ada
24	Kearsipan	85 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan				
	1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	222,669	100.00%
			Jumlah seluruh arsip aktif		222,669	
	2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	2,000	100.00%
			Jumlah seluruh arsip inaktif		2,000	
	3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	0	#DIV/0!
			Jumlah seluruh arsip Statis		0	
	4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	%	0	#DIV/0!
			Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan kabupaten		0	
	86	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat				
	1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK		Jumlah Arsip	0	0.00
	2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK		Jumlah Arsip	6	6.00

		3	Penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan sesuai NSPK di kabupaten		Jumlah Arsip		1	1.00
		4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten yang sesuai NSPK		Jumlah Arsip		0	0.00
		5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK		Jumlah Arsip		0	0.00
		6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten yang sesuai NSPK		Jumlah Arsip		0	0.00
URUSAN PILIHAN								
25	Kelautan Perikanan	87	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)					
		1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)				15	15.00
		2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Jumlah TPI yang operasional	%		2	100.00%
				Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah kabupaten			2	
		3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten yang diterbitkan		Izin	Tidak Ada		Tidak Ada
		4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)		Pembudidaya		150	150.00
		5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi		Benih		179,110,878	179,110,878
26	Pariwisata	88	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan					
		1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi				74	74.00
		2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata				175	175.00
		3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten		TDUP		6	6.00
		4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		orang		-	-
		5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri		Kegiatan		2	2.00
		6	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten		orang		-	0.00
		7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri		Industri		3	3.00
		8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi	%		13	2.99%
				Jumlah tenaga kerja pariwisata			435	
		9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan	%		430	100.00%

			Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan		430	100.00%	
		10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Lokasi	23	23.00	
27	Pertanian	93	Produktivitas pertanian per hektar per tahun				
		1	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Unit	23	23.00	
		2	Prasarana pertanian yang digunakan		56	56.00	
		3	Penerbitan izin usaha pertanian	Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	
		4	Persentase Prasarana pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan	%	56	100.00%
				Jumlah prasarana yang dibangun		56	
		5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kabupaten	Jumlah usulan yang difasilitasi	%	-	#DIV/0!
				Jumlah usulan usaha pertanian		-	
28	Kehutanan						
		1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan TAHURA	Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	
		2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga		Tidak Ada	Tidak Ada	
		3	Pemulihan ekosistem pada TAHURA		Tidak Ada	Tidak Ada	
		4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA		Tidak Ada	Tidak Ada	
29	ESDM	95	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten				
		1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten	ada/tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	
30	Perdagangan	96	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)				
		1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	Jumlah izin pusat perbelanjaan yg diterbitkan ≤5 hari kerja	%	0	#DIV/0!
				Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yg dokumennya sudah lengkap dan benar		0	
				Jumlah izin toko swalayan yg diterbitkan ≤5 hari kerja	%	0	#DIV/0!
				Jumlah permohonan izin toko swalayan yg dokumennya sudah lengkap dan benar		0	
		2	Persentase penerbitan TDG	Jumlah penerbitan TDG ≤5 hari kerja	%	14	107.69%
				Jumlah permohonan penerbitan TDG		13	
		3	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	Jumlah penerbitan TDG	%	14	11.11%
				Jumlah gudang yg ada di kabupaten		126	
		4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :		%	0	#DIV/0!
						0	

	a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	%	0	#DIV/0!
		Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri		0	
	b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	%	0	#DIV/0!
		Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri		0	
	c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	%	0	#DIV/0!
		Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri		0	
5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/kota	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kabupaten	%	0	#DIV/0!
		Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer		0	
6	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	Jumlah SKA yang terbit ≤1 hari kerja (1 x 24 jam)	%	0	#DIV/0!
		Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar		0	
7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = (a + b) \times 100\%$ K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5) b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)	%	16	100.00%
				16	

8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu		%	9.00%	9.00%
Persentase kinerja realisasi pupuk					
1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$X = a/(b \times c) \times 100\%$ X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan a = Jumlah pupuk yang disalurkan b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat kota sebesar (90% dari RDKK) c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)		0.00035	0.00035
98	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku				
1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	Jumlah total UTTP yg ditera dan tera ulang pada tahun berjalan	%	5,779	61.22%
		Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten		9,440	
2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku	%	490	5.90%
		Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan		8,300	
31	Perindustrian	99 Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten			
1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan	%	Tidak Ada	Tidak Ada
		Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk			
100	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK				
1	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA		%	75%	75%
101	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait				
1	Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan	%	19	100.00%
		Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk		19	
102	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait				
1	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan	%	Tidak Ada	Tidak Ada
		Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk			
104	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini				

		1	Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri di kota	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten di SIINas	%	99	0.33%
				Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten		30,085	
31	Transmigrasi	1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya		Kawasan	Tidak Ada	Tidak Ada
		2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya		Permukiman	Tidak Ada	Tidak Ada
		3	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibina		Permukiman	Tidak Ada	Tidak Ada